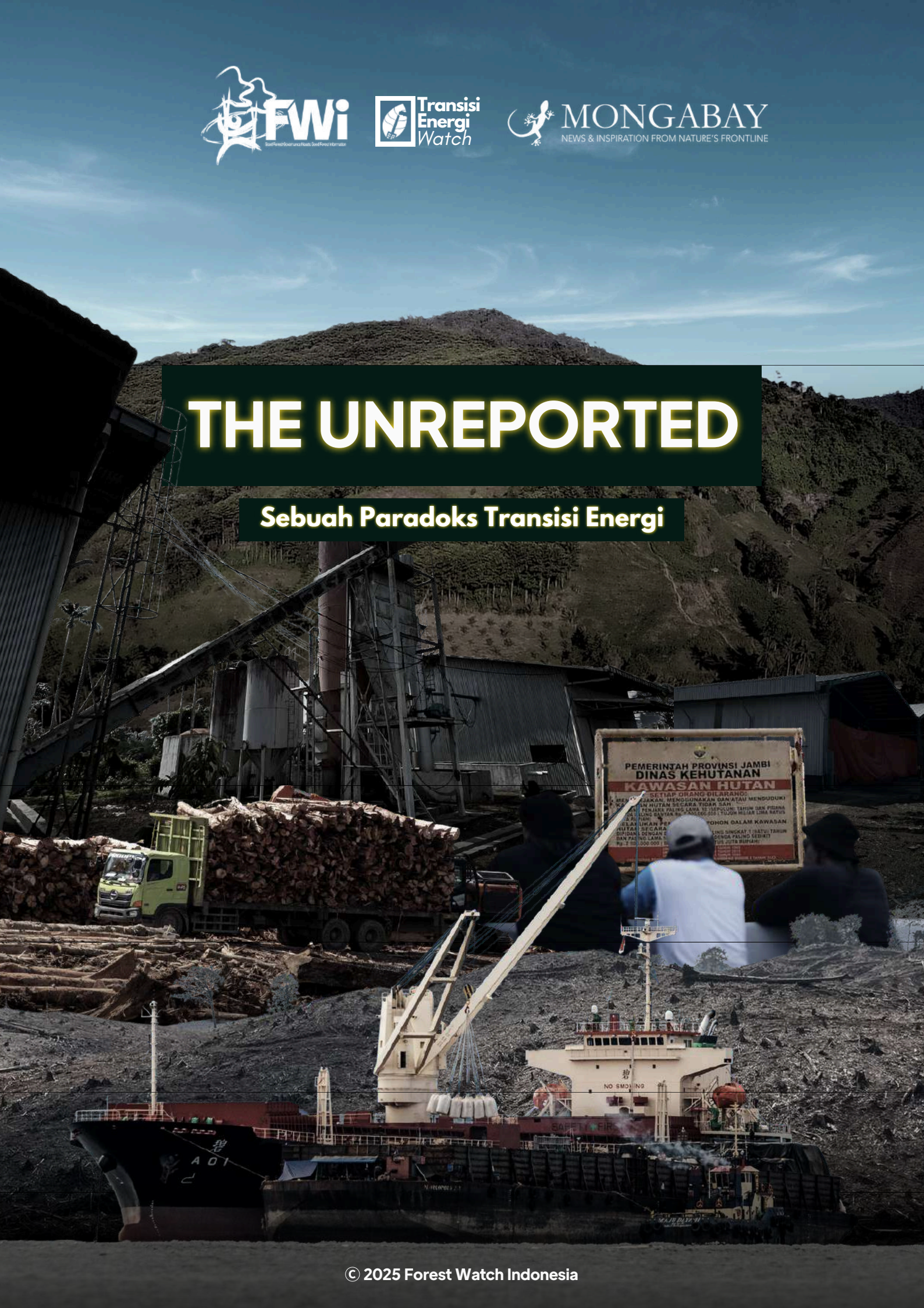


THE UNREPORTED

Sebuah Paradoks Transisi Energi



Laporan Investigasi Jurnalis Kerja Sama Forest Watch Indonesia dan Mongabay Indonesia dengan Jaringan Transisi Energi Watch



Ilustrasi Sampul dan Visualisasi Data

Ogy Dwi Aulia
Andi Juanda
Rosima Wati Dewi
Eryana Nurwenda Az Zahra
Muchamad Kahfi

Tata Letak

Respati Bayu Kusuma
Alvin Alviransyah
Muchamad Kahfi
Hasna Milenia Salsa Brina

Editor

Ir. Ridzki Rinanto Sigit, M.M.
Anggi Putra Prayoga

Penerbit

Forest Watch Indonesia
Jl. Sempur Kaler Nomor 62, Bogor 16129, Indonesia
Telp: +622518333308 | E-mail: fwibogor@fwi.or.id | Website: fwi.or.id

Tim Penulis

Suwandi
Akramul Muslim
Mhd Saifullah
Muhammad Jaya Barends
Alfan Raykhan Pane
Fitri Juliana
Arief Nugroho
Hidayat
Johan Djamanmona
Anna Desliani
Teguh Suprayitno
A. Riki Sufrian
Arlan
Arfandi Ibrahim
Sarjan M. Lahai
Sapril
Khairiyah Fitri
Nova Misdaryanti Mandasari
Edison Waas
Hernanda Salsabila Putri
Jafaruddin
M. Sobar Alfahri
Rara Khushshoh Azzahro
Mardili
Danur Lambang Pristiandaru
Cut Nauval Dafistri
Kurnia Sandi
Gresi Plasmanto
Rifani Halim



Menyoal Transisi Energi

Penggunaan biomassa kayu yang diklaim sebagai upaya pengurangan emisi menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan bauran energi terbarukan sebanyak 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Biomassa kayu akan dimanfaatkan pada 52 PLTU di Indonesia sebagai pengganti energi batu bara hingga porsi 10 persen (co firing) sesuai dengan pada dokumen RUPTL 2021-2030. Perusahaan Listrik Negara (PLN) berkomitmen akan memenuhi kebutuhan biomassa kayu tersebut, kira-kira 8 sampai 14 juta ton wood pellet per tahun melalui pembangunan hutan tanaman energi (HTE).

Transisi energi melalui pemanfaatan biomassa kayu ini memiliki konsekuensi signifikan terhadap sektor hutan dan lahan. FWI (2024) mencatat, praktek pembangunan HTE sejauh ini sudah mengakibatkan kehilangan hutan alam sebanyak 55 ribu hektare pada 13 konsesi perusahaan HTE yang sudah dinyatakan sebagai implementor. Deforestasi yang terjadi berupa hilangnya tutupan hutan alam yang direncanakan karena di dalam konsesi pembangunan HTE. Tanpa adanya upaya mitigasi perlindungan hutan, Hutan alam tersisa seluas 420 ribu hektare yang berada dalam 31 konsesi akan terdeforestasi secara terencana oleh proyek pembangunan HTE.

Lebih jauh lagi, jika praktek pembakaran di PLTU dan pemanfaatan biomassa diklaim sebagai upaya pengurangan emisi maka justru akan mendorong deforestasi yang lebih masif lagi. Hasil analisis FWI (2023) menyebutkan bahwa proyek pembangunan HTE diproyeksikan akan merusak hutan alam seluas 4,65 juta Ha yang berasal dari konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), HTI, dan PS melalui skema multi-usaha kehutanan.

FWI telah mengkompilasi fakta dan temuan bahwa transisi energi menjadi driver deforestasi baru. Implementasi pemenuhan biomassa kayu dari

pembangunan HTE sebagai upaya pengurangan emisi adalah sebuah asimetris informasi, yang menyebabkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Di Provinsi Jambi PT Hijau Artha Nusa (HAN) melakukan realisasi penanaman tanaman energi jenis sengon (*Albizia sp.*) seluas 64,5 Ha. Namun terbukti melakukan deforestasi hutan alam dengan cara land clearing seluas hampir 4 ribu Ha. Saat ini PT HAN sudah meninggalkan konsesinya di Kab. Merangin. Di Provinsi Aceh PT Aceh Nusa Indrapuri (ANI) diberikan konsesi oleh KLHK untuk membangun hutan tanaman energi di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie dengan luas 97.768 Ha. Padahal KLHK memasukan ANI kedalam daftar perusahaan yang dicabut.

Di Provinsi Kalbar, Kalsel, dan Kaltim pembangunan HTE akan dilakukan oleh 15 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Hutan Tanaman (PBPH-HT) dengan total luas 580 ribu Ha. Total ketiga provinsi memiliki target mitigasi deforestasi terencana dan tidak terencana terluas di Indonesia dengan luas 2,3 juta Ha sesuai dokumen FoLU Net Sink 2030. Salah satunya akibat ekspansi pembangunan hutan tanaman baru dengan agregat nasional total 6 juta Ha untuk capai net sink 2030.

Di Provinsi Gorontalo pembangunan hutan tanaman energi dilakukan oleh 2 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mendapatkan pemutihan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pemenuhan biomassa kayu dilakukan dengan melakukan deforestasi hutan alam dan memanfaatkan kayunya untuk dijadikan wood pellet. Diketahui deforestasi dari bisnis ini mencapai 1,1 ribu Ha dengan total produksi wood pellet 23,6 ribu ton untuk ekspor ke Korea dan Jepang.



Transisi Energi Watch: Journalist Fellowship Program

Di Provinsi Kaltara pembangunan HTE dilakukan oleh perusahaan berinisial MHL yang dibebankan di atas hutan alam dengan luas 19 ribu Ha. Proses penerbitan izin dilakukan tanpa adanya prinsip keterbukaan informasi.

Di tengah tantangan ini, transparansi tata kelola sumber daya alam menjadi kunci penting dalam upaya mitigasi pelepasan emisi dari deforestasi.

FWI menilai bahwa kinerja transparansi merupakan kunci dalam permasalahan ketimpangan informasi saat ini, yakni seperti hutan, deforestasi dan penguasaan lahan. Transparansi mendorong terjadinya penyebaran informasi, yang kemudian menciptakan prakondisi proses-proses partisipasi publik dalam mengawal setiap proyek top to bottom yang berdampak pada hilangnya hutan alam dan terancamnya kehidupan kelompok marginal.

Transisi Energi Watch: Journalist Fellowship Program mengangkat tema utama "Kamuflase Transisi Energi" dengan berfokus pada "Dampak pembangunan hutan tanaman energi dan dampak Co-firing, Biomassa kayu dan Full-firing". Ada berbagai pilihan sudut pandang yang dapat digunakan, yakni aktor, industri, supply chain, deforestasi, lingkungan & masyarakat adat, dan kerugian negara. Rangkaian kegiatan Transisi Energi Watch: Journalist Fellowship Program meliputi seminar, workshop, pelatihan, dan pendanaan untuk jurnalis untuk melakukan peliputan mendalam dan penulisan.








Diharapkan masyarakat dapat terlibat aktif dalam mengawal proyek transisi energi. Keterlibatan jurnalis dalam memproduksi informasi ini menjadi kunci untuk mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan

DAFTAR ISI PER-PROVINSI










 : Hutan Tanaman Energi
  : Co-Firing
  : Pembangkit Listrik
  : Industri Biomassa

PROVINSI ACEH

	Potret Karut Marut Lahan Hutan Tanaman Energi di Aceh Besar	2
	Saat Masyarakat Adat Berjuang Ambil Kembali Hutan Adat yang Masuk Konsesi Hutan Tanaman Industri	22
	Gagalnya Proyek HTE di Aceh	56
	Praktik Co-Firing PLTU Nagan Raya, Kesehatan Warga Jadi Ancaman	115
	Co-Firing Sumber Energi Bersih di Aceh? Antara Pasokan dan Isu Degradasi Lingkungan	125
	PLTBm Berbasis Limbah Sawit Potensi dan Tantangannya di Aceh Tamiang	154
	Target Energi Baru Terbarukan: Pesimis akan Tercapai 33 Persen di Tahun 2025 di Aceh	169

PROVINSI JAMBI

	Warga Desa Ranggo Terdampak, Kala Lahan Hutan Tanaman Energi Jadi Tambang Emas Ilegal di Sarolangun	33
	Praktik Tanaman Energi di Jambi: Ugal-Ugalan Dahulu, Gagal Kemudian	47
	Eksplorasi Hutan Berkedok Energi Terbaru di Jambi	60
	Korea Makin Terang dengan Energi Transisi, Hutan Jambi Makin Nelangsa	67
	Jejak Kotor di Lahan Konsesi Investasi Hijau	78
	Ketika Kesehatan Warga yang ada di Sekitar Pabrik PT RPSL Harus Jadi Perhatian	87
	Rantai Pasokan Kayu Wood Pellet di Jambi, Diduga Berasal dari Hasil Tebangan Ilegal	110








 Rencana Proyek PLTU Co-Firing Ancaman bagi Hutan Jambi	134
 Jadi Dalang Deforestasi, PT HAN di Jambi Rugikan Negara Puluhan Miliar	139
PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
 Dilema Pembangkit Listrik Biomassa di Kalbar	164
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	
 Co-Firing di PLTU Teluk Balikpapan, Transisi Energi atau Bencana Ekologi?	145
PROVINSI GORONTALO	
 Kebun Energi IGL, Proyek HTE yang Mendorong Deforestasi Hutan Gorontalo	8
 Kebun Energi dan Polemik Deforesasi di Gorontalo Utara	29
 Berdalil Transisi Energi Perusahaan HTE Hancurkan Alam Gorontalo	71
 Pelet Kayu Ilegal dari Gorontalo Ngalir ke Korea Selatan dan Jepang?	102
PROVINSI MALUKU	
 Suka-Suka di Kebun Energi Maluku Utara	15
 Hutan Tanaman Energi dan Ancaman Deforestasi di Kepulauan Maluku Utara	36
 Carut Marut Investasi Biomassa di Pulau Buru	95
 Pembangunan PLTBm di Ohoi Namar Harus Menyertakan Kajian Kerentanan Pulau Kecil	158
PROVINSI JAWA TENGAH	
 Tanaman Energi di Jateng: Strategi Transisi Energi atau Sekadar Bisnis Biasa?	41
PROVINSI JAWA BARAT	
 Mencermati Praktik Curang Oplosan Bahan Baku Co-Firing untuk PLTU Indramayu. Apa Dampaknya?	121

DAFTAR ISI PENULIS












 : Hutan Tanaman Energi
  : Co-Firing
  : Pembangkit Listrik
  : Industri Biomassa

PROVINSI ACEH

 Akramul Muslim - KBA One	2
 Mhd Saifullah - IDN Times	22
 Fitri Juliana - Digdata.id	56
 Mardili - BITHE.co	115
 Cut Nauval - Waspadaaceh.co	125
 Jafarudin - Aceh.tribunnews.com	154
 Alfian Raykhan Pane - Komparatif.id	169

PROVINSI JAMBI

 Kurnia Sandi - Jektvnews.com	33
 Gres Plasmanto - Liputan 6	47
 M. Sobar Alfahri - INDEPENDEN	60
 Suwandi - Kompas.com	67
 A Rifki Sufrian - Kilasjambi.com	78
 Rara Khushsoh Azzahro (RKA) - Jambian.id	87
 Hidayat - Jambian.id	110
 Teguh Suprayitno - Mongabay	134
 Teguh Suprayitno - Mongabay	139

PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
 Arief Nugroho - Pontianak post	164
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	
 Hernanda Salsabila Putri - Nomorsatukaltim	145
PROVINSI GORONTALO	
 Arlan - Barisan.id	8
 Sapril - Mimoza.tv	29
 Arfandi Ibrahim - Liputan6.com	71
 Sarjan Lahay - Mongabay	102
PROVINSI MALUKU	
 Muhammad Jaya Barends - Betahita.id	15
 Johan Djamanmona - Titastory.id	36
 Khairiyah Fitri - Tempo	95
 Edison Waas - Tirtastory.id	158
PROVINSI JAWA TENGAH	
 Danur Lambang P - Kompas.com	41
PROVINSI JAWA BARAT	
 Anna Desliani - Parboaboa	121

DAFTAR ISI

LAPORAN INVESTIGASI JURNALIS KERJA SAMA FOREST WATCH INDONESIA DENGAN JARINGAN TRANSISI ENERGI WATCH	i
TRANSISI ENERGI WATCH: JOURNALIST FELLOWSHIP PROGRAM	ii
DAFTAR ISI	viii
HUTAN TANAMAN ENERGI	1
Potret Karut Marut Lahan Hutan Tanaman Energi di Aceh Besar	2
Kebun Energi IGL, Proyek HTE yang Mendorong Deforestasi Hutan Gorontalo	8
Suka-Suka di Kebun Energi Maluku Utara	15
Saat Masyarakat Adat Berjuang Ambil Kembali Hutan Adat yang Masuk Konsesi Hutan Tanaman Industri	22
Kebun Energi dan Polemik Deforesasi di Gorontalo Utara	29
Warga Desa Ranggo Terdampak, Kala Lahan Hutan Tanaman Energi Jadi Tambang Emas Ilegal di Sarolangun	33
Hutan Tanaman Energi dan Ancaman Deforestasi di Kepulauan Maluku Utara	36
Tanaman Energi di Jateng: Strategi Transisi Energi atau Sekadar Bisnis Biasa?	41
Praktik Tanaman Energi di Jambi: Ugal-Ugalan Dahulu, Gagal Kemudian	47
Gagalnya Proyek HTE di Aceh	56
Eksplorasi Hutan Berkedek Energi Terbaru di Jambi	60
INDUSTRI BIOMASSA	66
Korea Makin Terang dengan Energi Transisi, Hutan Jambi Makin Nelangsa	67
Berdalil Transisi Energi Perusahaan HTE Hancurkan Alam Gorontalo	71
Jejak Kotor di Lahan Konsesi Investasi Hijau	78
Warga Perkotaan Hadapi Polusi dan Kerusakan Lingkungan Akibat Pabrik PLTBm	87
Ketika Kesehatan Warga yang ada di Sekitar Pabrik PT RPSL Harus Jadi Perhatian	92
Carut Marut Investasi Biomassa di Pulau Buru	95
Pelet Kayu Ilegal dari Gorontalo Ngalir ke Korea Selatan dan Jepang?	102
Rantai Pasokan Kayu Wood Pellet di Jambi, Diduga Berasal dari Hasil Tebangan Ilegal	110
CO-FIRING	114
Praktik Co-Firing PLTU Nagan Raya, Kesehatan Warga Jadi Ancaman	115
Mencermati Praktik Curang Oplosan Bahan Baku Co-Firing untuk PLTU Indramayu. Apa Dampaknya?	121
Co-Firing Sumber Energi Bersih di Aceh? Antara Pasokan dan Isu Degradasi Lingkungan	125

DAFTAR ISI

Rencana Proyek PLTU Co-Firing Ancaman bagi Hutan Jambi	134
Jadi Dalang Deforestasi, PT HAN di Jambi Rugikan Negara Puluhan Miliar	139
Co-Firing di PLTU Teluk Balikpapan, Transisi Energi atau Bencana Ekologi?	145
PEMBANGKIT LISTRIK	153
PLTBm Berbasis Limbah Sawit Potensi dan Tantangannya di Aceh Tamiang	154
Pembangunan PLTBm di Ohoi Namar Harus Menyertakan Kajian Kerentanan Pulau Kecil	158
Dilema Pembangkit Listrik Biomassa di Kalbar	164
Target Energi Baru Terbarikan: Pesimis akan Tercapai 33 Persen di Tahun 2025 di Aceh	169



1



Hutan Tanaman Energi

Potret Karut Marut Lahan Hutan Tanaman Energi di Aceh Besar

Akramul Muslim – KBA ONE
Hutan Tanaman Energi



Kebun Kurma Barbate milik Haji Syukri di dalam kawasan Hutan Tanaman Energi (HTE) PT ANI

KBA. ONE, Aceh Besar - Mobil berwarna biru tua mulai tampak dari lekuk bukit menuju ke lokasi kebun kurma yang kami datangi. Lambaian tangan terlihat dari luar kaca mobil sembari membunyikan satu sentuhan suara klakson. Saat turun, dia langsung menyapa dan menyalami. "Apa kabar," katanya kepada kami.

Lelaki 61 tahun itu adalah Mahdi Muhammad. Dia inisiator pengembangan kebun kurma di Barbate, Aceh Besar. Kebun ini mulai ditanami pohon kurma sejak awal 2015, luas lahannya berkisar 18 hektar.

Perkebunan ini terletak di Lembah Barbate di Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Mahdi menjadi pelopor perkebunan kurma di sana.

Nama Barbate sebutnya terambil dari nama kota yang ada di negara Spanyol yaitu Kota Barbate. Dan inisiasinya menanam kurma itu atas inspirasinya dari ayat Al Qur'an. Lebih dari 21 kali disebutkan dalam Al-Qur'an tentang kurma.



Mahdi Muhammad
61 Tahun

Barbate wilayah yang tandus, banyak tanaman yang ditanam masyarakat dipastikan gagal berhasil, tidak memungkinkan untuk dilakukan bercocok tanam, karena wilayah Barbate tanahnya berunsur asam sehingga apapun ditanam tentu tidak bagus, malahan daerah sini curah hujannya sangat minim," ungkap Mantan Kepala Bank Indonesia (BI) di Pekanbaru dan Banda Aceh ini (Sabtu 24 Agustus 2024).

Mahdi sudah menanam 3000 pohon kurma di kebunnya, di sela pohon kurma ada beberapa pohon cabai dan tomat. Kini tanah tandus yang tidak cocok ditanami pohon berbuah itu, sebutnya sudah menjadi tanah yang subur. Dia mengatakan jika penggunaan pupuk alami dicampuri pada unsur tanah, terutama unsur asam sulfat sangatlah membantu guna menyuburkan tanah.

Kurma yang ditanami di Barbate sebutnya didatangkan dari Inggris, kurma yang dipilihnya adalah jenis betina, "Kalau yang jantan tidak berbuah, tetapi diselingi yang jantan agar pohon kurmanya berbunga untuk menjadi buah kurma," jelasnya.

Pada tahun 2015 silam, jelasnya hanya dia sendiri yang menanam pohon kurma di kawasan Barbate, setelah itu kawan-kawannya ikut bergabung untuk berdirikan satu komunitas pengelola kebun kurma bernama Komunitas Petani Kebun Kurma Barbate.

Pelan tapi pasti makin banyak orang yang berkunjung, Mahdi dan rekan-rekannya pun mendeklarasikan Barbate sebagai tempat wisata kebun kurma.



Lokasi Lahan Konsesi Terlantar

Mahdi tak mengelak jika lokasinya ini adalah bagian dari konsesi PT Aceh Nusa Indrapuri (PT ANI) yang bergerak dalam usaha perkebunan tanaman industri. Namun saat itu, jelasnya dia membeli tanah ini berasal dari penggarap sebelumnya. "Saya membeli tanah ini dari masyarakat setempat, dan harga satu meternya adalah 40 rupiah," terangnya.

Sebelumnya ada perkebunan kurma, Barbate adalah kawasan tanaman eukaliptus dan akasia yang tidak terurus, sebagian lainnya tanah gersang.

"Selama ini PT ANI menelantarkan kawasan konsesinya di Barbate, kemudian masyarakat menggarap, PT ANI pernah meminta kepada saya untuk bermitra dalam hal perkebunan dan wisata, namun saya menolaknya," ujar Mahdi.

Persoalannya, menurut Mahdi, apabila keduanya saling bekerja sama membangun kebun ini tentu dirinya setuju, cuma kedatangan PT ANI ketika kebun kurma ini sudah jadi. Penjelasan serupa diperoleh dari Ramadani, Pengelola Perkebunan Kurma Barbate milik Haji Syukri seluas 15 hektar.

"Kalau keseluruhan perkebunan kurma dimiliki oleh Koperasi Kebun Kurma Barbate, dimana luasan kebun yang digarap hingga mencapai 600 hektar," ungkap Ramadani saat ditemui di perkebunan Barbate (Kamis 8 Agustus 2024).

Ramadani mengungkapkan, saat ini koperasi baru mampu menanam kurma di wilayah Barbate sekitar 150 hektar, belum sepenuhnya ditanami bibit kurma.



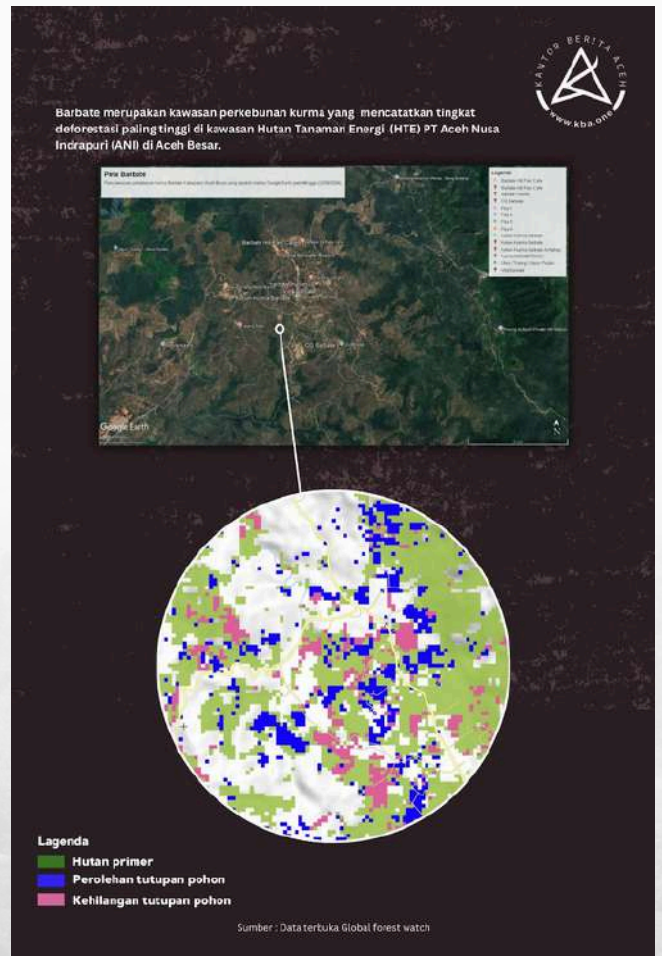
Kawasan Barbate di dalam wilayah konsesi PT ANI

Dalam proses pembelian lahan hutan sebelum dijadikan perkebunan kurma, Ramadani sebut Haji Syukri membeli tanah hutan ini melalui aparat desa langsung. Imum Mukim Krueng Raya, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Yusman menuturkan, wilayah Barbate adalah tanah tandus. Dulunya masyarakat menjadikan wilayah tersebut tempat menggembala lembu dan kambing, biasanya masyarakat sekitar menyebutnya "Padang Meurabe". "Sebagian wilayah Barbate yang masuk dalam kawasan HTI bukan wilayah kelola masyarakat Kecamatan Krueng Raya," sebut Yusman (Kamis, 8 Agustus 2024). "Persoalannya secara administratif imam mukim tidak pernah terlibat dalam hal tapal batas antara wilayah mukim dengan PT ANI," lanjutnya.

Dia menerangkan ada beberapa desa yang langsung berdekatan dengan kawasan konsesi yaitu Desa Ruyung, Paya Kameng, Beurandeh, Meunasah Kulam, Meunasah Keude, Meunasah Mon, dan Lamreh. Hingga sekarang pun, tapal batas mukim dengan konsesi PT. ANI belum ada penjelasan. "Hingga kini tidak pernah ada lagi aktivitas dalam wilayah kami," jelas Yusman. Dia mengingat komunikasi hanya terjadi pada tahun 2004 lalu.

Saat dijumpai, Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga menjelaskan, PT Aceh Nusa Indrapuri (ANI) sebagai salah satu implementator Hutan Tanaman Energi (HTE) di Aceh telah bermasalah. "Seharusnya hutan alam dalam konteks transisi energi ini dijaga. Akan tetapi kredibilitas perusahaan tidak mampu untuk pengawasan dan menjaga hutan secara manajemen dan tata kelola hutan dengan baik, sehingga perusahaan tidak mampu dalam menjalankan tugasnya," ungkap Anggi (Kamis, 1 Agustus 2024).

Izin Operasi Sejak Orde Baru: Dari HTI ke HTE



Gambar: KBA ONE

PT. Aceh Nusa Indrapuri sendiri didirikan di Jakarta pada 2 April 1993, dengan Akte Nomor 3 Notaris Abdul Latief, SH, dengan komposisi saham 60 % milik PT. Takengon Pulp dan Paper utama dan 40% milik PT INHUTANI IV.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan No. 762/kpts-II/92 tertanggal 5 Agustus 1992 yang bersifat sementara, Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) telah diberikan kepada PT. Takengon Pulp dan Paper Utama seluas 166.500 hektar. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 1571/MENHUT-IV/1993 tertanggal 10 September 1993, IUPHHK-HTI tersebut dialihkan kepada PT Indonusa Indrapuri, sekarang PT Aceh Nusa Indrapuri, dengan luas areal 118.515 hektare. Dalam perkembangannya, areal perusahaan tersebut mengalami pengurangan menjadi 111.000 hektare.

Pengurangan terjadi setelah diterbitkannya surat keputusan Menteri Kehutanan No. 95/kpts-II/97, tanggal 17 Februari 1997, tentang pemberian HPHTI (IUPHHK-HTI) atas areal hutan seluas ± 111.000 hektar di Aceh kepada PT Aceh Nusa Indrapuri. Kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan No.131/MenLHK- II/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No.95/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997, dimana luas areal IUPHHK-HTI PT. Aceh Nusa Indrapuri ± 111.000 Ha berubah menjadi ± 106.197 Ha di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

Pada Keputusan No.SK.261/Menlhk/Setjen/HPL.O/4/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan No.95/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997, 1997, dimana luas areal IUPHHK-HTI PT. Aceh

Nusa Indrapuri ± 106.197 Ha berubah menjadi ± 97.905 Ha di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

Adanya perubahan ketiga dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan No. 1483/MENLHK/SETJEN/HPL.O/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan No.95/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997, telah dilakukan perubahan nomenklatur Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman.

Pada perubahan terakhir ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan No. SK.1344/MENLHK/SETJEN/PHL.1/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pemulihan Kegiatan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) D/H Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Acehnusa Indrapuri di Provinsi Aceh.

Menurut data FWI, PT Aceh Nusa Indrapuri (ANI) diberikan konsesi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membangun Hutan Tanaman Industri (HTI) yang kini direncanakan menjadi Hutan Tanaman Energi (HTE) di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie dengan luas 97.806 hektar. Sejak keberadaan perusahaan, Deforestasi sejak tahun 2015-2021 telah mencapai 35.235,74 hektar, dan cakupan wilayah bukan hutan 41.858, 58 hektar.



Supervisor Management Planning PT ANI, Muammar Syafwan menjelaskan, Dari tahun 1992 sampai tahun 2000 menjelaskan jika perusahaan fokus padapenanaman Hutan Tanaman Industri (HTI). Pada saat pemilik perusahaan berganti, arah perusahaan berganti."Saat ini kami sedang memproses mengubah rencana kerja, yang awalnya bisnis pada kayu, kini mulai mengarah ke perdagangan karbon, ini sudah tersusun rencana kerjanya, sedang dalam tahapan revisi oleh pihak manajemen PT. ANI," jelas Syafwani ketika ditemui di kantor PT ANI (Sabtu, 24 Agustus 2024).

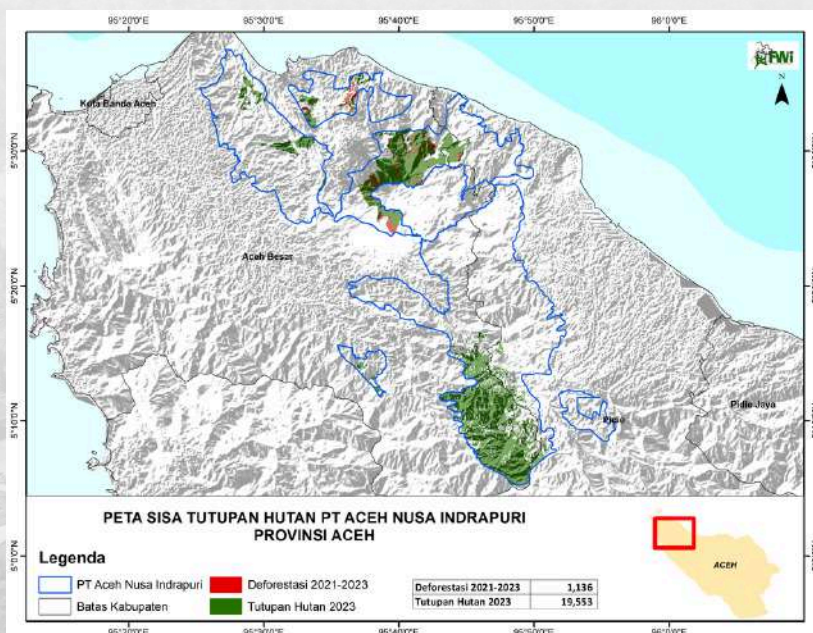


Gambar: KBA ONE

Bukan hanya perdagangan karbon, perusahaan juga merencanakan kerja kemitraan dalam ekowisata dengan masyarakat dan kemitraan dengan perusahaan lainnya. "Konflik dengan masyarakat begitu banyak, di daerah Barbate sangat masif konflik dengan masyarakat, jadi mau tidak mau kita harus berdampingan dengan masyarakat dengan bermitra dalam hal ekowisata dan kebun kurma pada daerah tersebut. Wilayah tersebut sangat jelas milik konsesi PT Aceh Nusa Indrapuri," jelas Syafwan. Permasalahannya, selama ini tidak ada komunikasi antara pihak kebun kurma dan ekowisata yang berada di Barbate dengan PT ANI.

"Pihak perusahaan pernah melayangkan surat teguran kepada pemilik kebun kurma di Barbate dan menawarkan kemitraan kerjasama. Itu sudah pernah dibahas pada tahun 2022 lalu. Malah mereka ingin agar kawasan tersebut dikeluarkan dari konsesi," kata Syafwan.

Syafwan mengakui pengawasan yang dilakukan sangat kurang. Perusahaan jelasnya pernah berhenti bekerja saat konflik di Aceh. Pegawai perusahaan pun sudah sangat minim jumlahnya. Dia pun menyebut tidak saja dengan para pemilik kebun kurma, di Blang Bintang, ada beberapa instansi pemerintah yang tumpah tindih dengan lahan konsesi, sebut Syafwan. Pihak perusahaan katanya, terus berkoordinasi dengan Balai pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Hutan (DLHK) Aceh, untuk menyurati instansi-instansi yang berada di dalam kawasan konsesi PT ANI.



Peta Tutupan Hutan PT Aceh Nusa Indrapuri Provinsi Aceh



Gambar: KBA ONE

“Negara perlu melakukan evaluasi terhadap lahan konsesi. Negara juga berhak membatalkan izin kepada PT ANI,” tutur Nasir.

Sub Koordinator Bidang Usaha dan Perhutanan Sosial Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Faisal mengungkapkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengevaluasi terhadap izin-izin perhutanan, salah satunya PT ANI. Dia menyebut PT ANI diberikan waktu enam bulan untuk merealisasikan kerja, tim DLHK selanjutnya akan meninjau mereka telah merealisasikan kinerjanya.

Perihal adanya aktivitas di luar kegiatan utama, maka PT ANI harus melaksanakan kewajiban perusahaan mengamankan wilayah mereka, serta turut membangun kemitraan multi usaha dengan mitra mereka.

Oknum–Oknum Penjual Tanah

Deputi Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nasir menuturkan, seharusnya pihak PT ANI memiliki inisiatif kerja sama dengan pihak ketiga, dalam skema kemitraan. Termasuk dengan para pemilik usaha ekowisata dan kebun kurma di Barbate. Dia pun menyinggung perihal pemanfaatan lahan dan indikasi penjualan lahan masif di Barbate, dari 40 hektar hingga ratusan hektar. Informasi yang dia temukan, oknum perangkat desa bermain dalam skema penjualan lahan dalam area konsesi.

“Saya pernah diskusi dengan pemilik lahan dalam kawasan Barbate tersebut, selama ini pelaku pemilik lahan disana tidak memiliki sertifikat izin guna lahan secara resmi. Mereka hanya mengandalkan bukti jual-beli saja melalui oknum perangkat desa dengan bentuk kwitansi saja,” Dia pun menyebut perlunya pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh kepada PT ANI.

Kebun Energi IGL, Proyek HTE yang Mendorong Deforestasi Hutan Gorontalo

Arlan – Barisan.id
Hutan Tanaman Energi



Ketika perusahaan hutan tanaman energi disebut, ingatan Miksel Rambli melayang ke masa 11 tahun silam. Masih segar di ingatannya, saat hasil panen jagung milik adiknya yang rusak akibat tidak memiliki tempat jemuran jagung karena perusahaan melarang mengambil kayu di sekitar wilayah konsesi perusahaan untuk dijadikan sebagai tempat jemuran darurat.

Dengan mata berkaca-kaca Miksel Rambli menceritakan, lahan kebun adiknya sekitar 2 hektar sudah lama dikelola, sebelum perusahaan PT Inti Global Laksana (IGL) masuk di Gorontalo pada tahun 2009. Setiap tahun adiknya membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Sebelum perusahaan datang, keluarga Miksel Rambli telah lama mengelola tanah tersebut, bahkan mereka sudah mulai membersihkan lahan itu untuk ditanami jagung. Namun sebelum melakukan penanaman jagung perusahaan datang menyerobot lahan untuk pembukaan jalan perusahaan. Dengan perasaan sedih keluarga miksel tetap membiarkan pembukaan jalan perusahaan tersebut.

"Lahan sudah dibersihkan adik saya sebelum perusahaan masuk. Saat perusahaan membuka jalan, lahan adik saya terkena pembuatan jalan. Meskipun begitu adik saya tetap menanam jagung di sisa-sisa lahan yang terkena jalan itu," ujarnya.

Beberapa bulan kemudian, saat panen tiba adiknya ingin mengambil kayu di perusahaan untuk pembuatan jemuran darurat jagung, sebagai orang yang bekerja menjaga alat-alat perusahaan kemudian Miksel Rambli berinisiatif minta izin ke perusahaan untuk mengambil kayu sebagai bahan baku pembuatan jemuran darurat tersebut.

Sayangnya niat baik Miksel ditolak perusahaan, hingga jagung hasil panen adiknya rusak karena tidak mendapatkan tempat jemuran. "Ini kan cuma penjemuran sementara, tidak sampai sebulan, supaya jagung ini tidak rusak. Habis di pakai juga akan dibongkar karena hanya terbuat dari kayu. Tapi tetap tidak dikasih izin," kata Miksel.

Merasa frustrasi, adiknya yang bernama Refli Rambli kemudian menuju ke pos penjagaan dan protes kepada petugas. Aksi ini kemudian berujung pada terbakarnya salah satu pos milik perusahaan.



"Pada saat momentum sosialisasi ada permintaan dari masyarakat soal sertifikat, maka kami perusahaan dalam hal ini membantu pengurusan sertifikat," kata Burhanuddin.

Kapasitas perusahaan hanya bisa membantu pengurusan sertifikat bersama pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Pengurusan ini sudah dilaksanakan dan sementara berproses.

Kejadian seperti ini tidak hanya dialami oleh Reflin Rambli, ada ratusan masyarakat yang menjadi korban janji-janji perusahaan. Salah satu tokoh masyarakat di desa Londoun menyatakan sejak perusahaan masuk pada tahun 2009 sudah banyak konflik yang terjadi ditengah masyarakat.

Mulai dari pelarangan pengambilan kayu bakar yang akan digunakan pada acara hari hari besar keagamaan seperti hari raya paskah, natal dan tahun baru. Begitu juga dengan pengambilan rotan di wilayah konsesi mendapat larangan dari perusahaan.

"Untuk mengambil kayu bakar buat acara paskah saja perusahaan larang, begitu juga untuk pengambilan rotan. Padahal ada beberapa masyarakat disini yang menggantungkan hidupnya pada pencarian rotan," ujarnya.

Selain terjadinya konflik sosial, masyarakat juga dijanjikan oleh perusahaan untuk difasilitasi pembuatan sertifikat tanah, diberi kayu satu kubik per keluarga, bibit jagung, dan janjikan plasma seluas 2 hektar perkepa keluarga. Namun sampai saat ini tidak ada yang terealisasi dari janji-janji tersebut.

Menanggapi hal itu, Direktur PT IGL Burhanuddin menegaskan tidak pernah menjanjikan pembuatan sertifikat tanah karena perusahaan tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat tanah.



Deforestasi Terencana

Transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan akan menimbulkan masalah baru bagi lingkungan. Pemanfaatan hutan alam untuk pemenuhan biomassa dari kayu akan terus mendorong terjadinya deforestasi baru dan terencana yang mengintai berbagai hutan alam di berbagai daerah Indonesia termasuk Gorontalo.

Berdasarkan analisis Nusantara Atlas sejak Januari 2023 sampai dengan agustus 2024, setidaknya sudah 36 hektar hutan alam yang hilang atau terdeforestasi di wilayah konsesi PT IGL. Angka ini disinyalir akan bertambah besar melihat wilayah konsesi perusahaan IGL luasannya sekitar 11.860,10 hektar.



Manager Community Development Officer (CDO) PT IGL, Zunaidi membenarkan ada pembukaan lahan di areal perusahaan IGL tapi ini untuk pembukaan jalan perusahaan. Wilayah kerja perusahaan IGL ini sayangnya berdiri di atas hutan alam sehingga pembangun kebun energi atau hutan tanaman energi tidak akan lepas dari upaya land clearing dan deforestasi.

Manager kampanye, advokasi dan media Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga mengatakan, Implementasi pembangunan hutan tanaman energi dan kebunenergi oleh perusahaan yang sejauh ini selalu dengan pembukaan hutan dengan cara land clearing. Bukang rehabilitasi di lahan kritis seperti yang digembar-gemborkan, oleh karena itu deforestasi hutan alam tidak bisa terelakan dalam pemenuhan biomassa kayu.

Dalam temuannya, FWI menyebutkan, perusahaan IGL memanfaatkan kayu hutan dengan cara land clearing atau meng-deforestasi di dalam konsesinya untuk dijadikan bahan baku wood pellet di perusahaan PT Biomassa Jaya Abadi (BJA). Perusahaan ini menurut FWI, berkomitmen untuk meng-deforestasi hutan alam agar dapat memenuhi kebutuhan produksi. Pemenuhan bahan baku biomassa kayu ini selalu diiringi pelepasan emisi yang justru menjauhkan dari target pengurangan emisi dari sektor hutan, penggunaan lahan dan energi.

"Biomassa wood pellet diklaim sebagai sumber energi terbarukan karena dianggap netral karbon. Padahal sesungguhnya tidak karena berasal dari deforestasi hutan alam", tulis FWI dalam laporannya.

Dengan demikian apa yang dilakukan IGL ini tidak sesuai dengan tujuan transisi energi yang sebenarnya. Bahkan tidak akan mencapai target pengurangan emisi dari sektor hutan dan penggunaan lahan, dan juga akan meningkatkan laju deforestasi kawasan hutan Gorontalo.

Deforestasi PT IGL yang terencana ini akan menambah cerita buruk hilangnya hutan indonesia khususnya di wilayah Gorontalo. Pasalnya menurut data Global Forest Watch, Gorontalo kehilangan 140 ribu hektar tutupan pohon sejak tahun 2001 hingga 2023. Angka ini setara dengan penurunan 14% tutupan pohon sejak tahun 2000, dan setara dengan 96.5 Mt emisi CO₂e.

Pada laporan terbaru tim ilmuwan Global Carbon Project yang tertera dalam jurnal Earth System Science menyebutkan, emisi karbon dioksida (CO₂) global di tahun 2023 terus mengalami kenaikan, bahkan menduduki tingkat tertinggi dalam sejarah. Indonesia Pun menempati posisi kedua sebagai negara penghasil emisi terbesar di dunia.

Anggi mengatakan, pemanfaatan biomassa wood pellet sebagai sumber energi hanya akan menghasilkan utang emisi karena berasal dari kerusakan hutan alam. Dimana, hutan alam adalah salah satu ekosistem yang paling banyak menyimpan karbon dibanding hutan tanaman. Dalam 1 hektar hutan alam dapat menyimpan karbon sebanyak 245 ton karbon. Sedangkan hutan tanaman dapat menyimpan karbon hanya 107,86 ton karbon perhektar.

Selain memperparah krisis iklim, rusaknya hutan akibat proyek perkebunan energi atau hutan tanaman energi juga dapat menyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyedia jasa lingkungan serta berpotensi menimbulkan bencana ekologi baru.

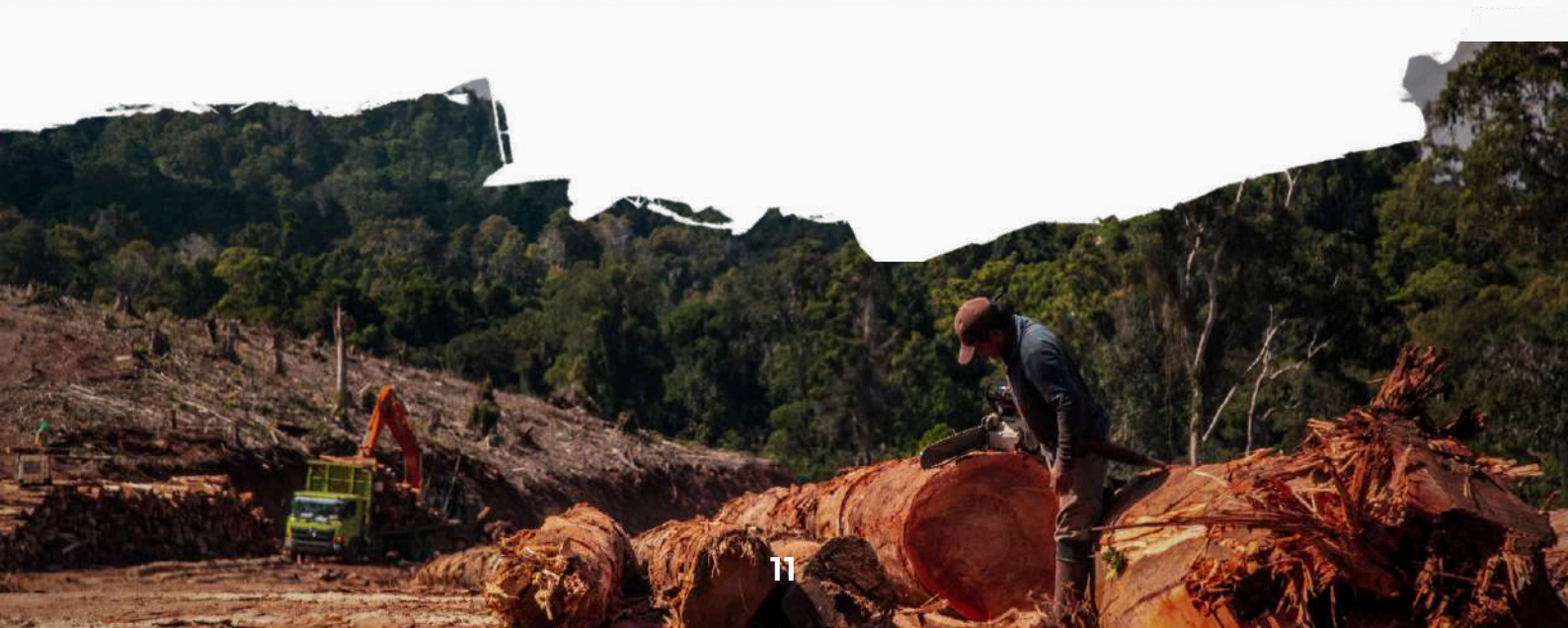
Peneliti dari Institute for Human and Ecological Studies (Inhides) Dr. Terry Repi, M.Si. dalam materi yang disampaikan pada dialog 'Save Gorontalo Dari Cengkraman Proyek Energi' menjelaskan, bioenergi dapat menjadi ancaman serius bagi biodiversitas yang ada di Gorontalo. Aktivitas bioenergi dapat mempercepat hilangnya habitat atau tempat hidup yang alami bagi hewan, terutama bagi spesies spesialis dan spesies dengan jelajah yang luas. Hal ini beresiko menyebabkan kepunahan.

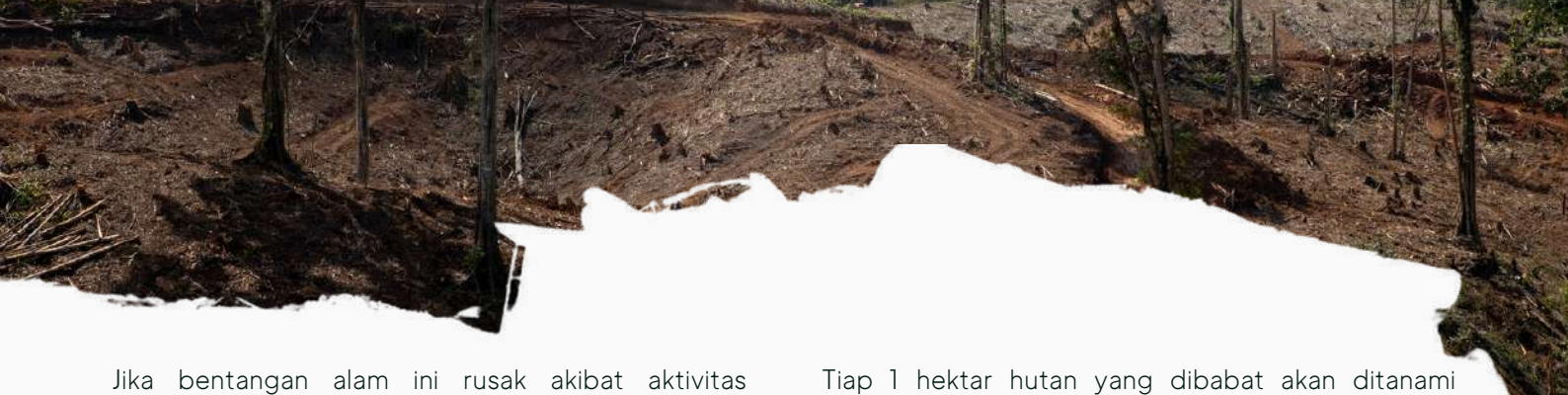
“

Misalnya tarsius membutuhkan tegakan pohon yang besar atau rumpun-rumpun bambu yang dijadikan sarang. Ketika sarang itu hilang dia pun ikut hilang. Kemudian spesies dengan wilayah jelajah yang luas seperti rangkong yang kemudian membuatsarang di pohon-pohon besar Ketika digantikan dengan fastgro-fastgro ya tentu saja tidak bisa bersarang, dan hilang.

Dr. Terry Repi, M.Si.

la pun menyebutkan, wilayah barat Gorontalo adalah koridor satwa yang menghubungkan habitat di wilayah tengah, barat sampai timur Sulawesi. Jika koridor ini hilang akibat ancaman, misalnya monokultur sawit dan hutan tanaman energi, itu kemudian bisa memfragmentasi koridor tersebut. Kawasan bentang alam Popayato-Paguat merupakan kawasan non konservasi yang menjadi habitat dan koridor penting bagi spesies kunci. Spesies kunci yang memanfaatkan koridor bentangan alam ini diantaranya ada julang Sulawesi, babirusa dan anoa.





Jika bentangan alam ini rusak akibat aktivitas perusahaan bioenergi maka dapat berpotensi mempercepat hilangnya habitat bagi spesies yang dalam kawasan bentang alam tersebut, bahkan bisa berakibat pada kepunahan spesies-spesies kunci ini. Sementara itu, Direktur PT IGL, Burhanudin, membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepada perusahaannya. Ia menegaskan, sebagai pelaku usaha, IGL telah mematuhi aturan yang ada, dengan seluruh perizinan yang lengkap.

"Kami adalah investor jangka panjang yang berkomitmen pada keberlanjutan. Tidak mungkin kami mengabaikan aturan yang ada, terutama mengingat ini adalah bisnis internasional. Kepatuhan terhadap regulasi adalah prioritas utama kami," kata Burhanudin.

Ia pun menjelaskan, areal perusahaan adalah hutan alam atau tanaman alam. Untuk melakukan pembangunan kebun energi dalam hal ini hutan tanaman energi makadiperlukan tindakan dan perlakuan land clearing. Hasil dari land clearing ini kemudian dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk produk wood pellet.

Setelah proses land clearing, perusahaan langsung bergerak melakukan penanaman tanaman energi Gliricidia (Gamal).

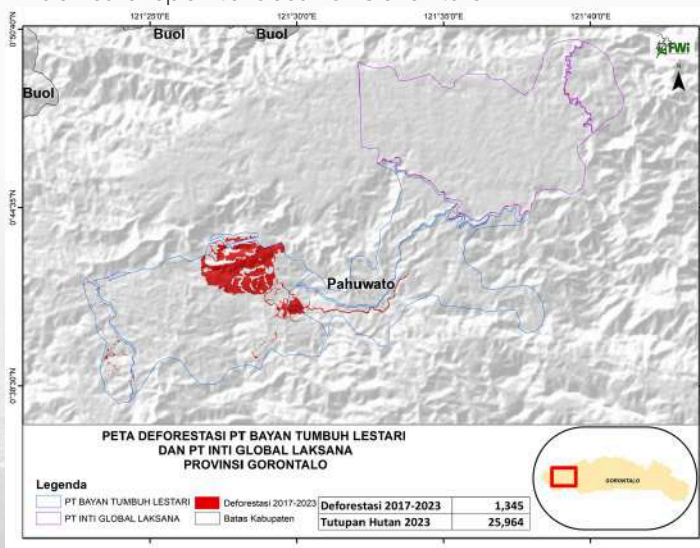
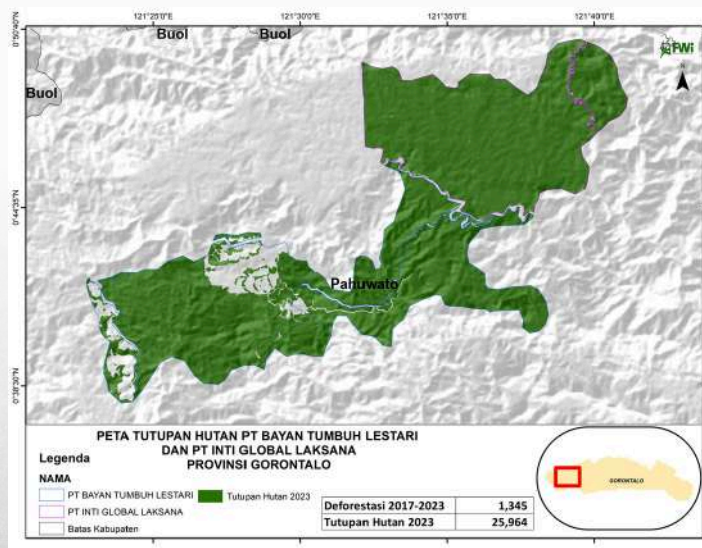
Tiap 1 hektar hutan yang dibabat akan ditanami dengan tanaman Gamal sebanyak 5 ribu pohon, jadi bisa dikatakan perusahaan tidak melakukan deforestasi.

"Setelah lahan dibuka, kita langsung melakukan penanaman gliricidia. inilah nanti yang menjadi masa depan kita. karena ini sebagai bahan baku utama kita," kata Burhanuddin.

Burhanuddin juga mengungkapkan, tanaman Gamal yang telah ditanam akan di panen 1 kali setiap 4 tahun. Cara panennya pun menggunakan tehnik Trubusan atauterubusan. Tehnik terubusan adalah cara panen yang dikerjakan pada pohon gamal untuk menghasilkan pohon baru melalui pemeliharaan tunas yang muncul padatunggak.

"Sekali tanam itu empat tahun baru panen, begitu di panen kita sisakan pohon 50 centi meter, agar bisa tumbuh lagi dan bisa di panen lagi. Jadi sekali tanam itu bisa 5 kali panen," ujarnya.

Setelah 5 kali panen, perusahaan kembali melakukan penanaman baru tanpa mencabut akar pohon sebelumnya. Hal ini dilakukan agar kesuburan tanah tetapterjaga. Menurut Burhanuddin, langkah mereka dalam perkebunan energi ini seharusnya di apresiasi pemerintah karena telah menjadi penghasil devisa ekspor terbesar di Gorontalo.



Peta Tutupan Hutan dan deforestasi PT Bayan Tumbuh Lestari dan PT Inti Global Laksana Provinsi Gorontalo

Dari Sawit Menjadi Bioenergi

PT IGL adalah perusahaan perkebunan sawit yang ada di pohuwato kemudian bertransformasi menjadi perusahaan hutan tanaman energi yang akan memproduksi kayu menjadi wood pellet. Berdasarkan riset Walhi, PT IGL menjalankan operasinya berlandaskan izin lokasi yang diberikan oleh bupati pohuwato melalui surat keputusan Nomor 170/ 01/VI/2010 untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit seluas 12.000 hektar. Area izin PT IGL iniberada di kecamatan Lemito dan Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato, yang lokasinya berada pada hutan produksi konversi (HPK).

Pada tahun 2011, kemudian PT IGL mendapatkan izin penanaman sawit dari KLHK melalui SK 566/MENHUT-II/2011. Izin pinjam pakai kawasan hutan milik PT IGL inipada 6 januari 2022 dicabut oleh Presiden Jokowi karena perusahaan dinilai tidak aktif, tidak membuat rencana kerja dan ditelantarkan. Namun, diam-diam PT IGL telah mengajukan izin perhutanan sosial di wilayah konsesi yang sama kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK punmenyetujui izin perhutanan sosial tersebut melalui SK.3102/MENLHK PSKL/PKTHA/PSL.1/5/2020 pada tanggal 13 mei dengan status Hutan Hak seluas 11.860 hektar.

Menurut Walhi, Kebijakan dari KLHK itulah yang membuat proses pencabutan izin yang dilakukan Presiden tidak merubah apapun sehingga perusahaan tetap beraktivitasseperti biasa, melakukan penanaman pohon Gamal dan Kaliandra.

"SK pencabutan izin pelepasan Kawasan hutan yang dibebankan pada konsesi-konsesi sawit di Pohuwato tidak berlaku di lapangan dan hanya bersifat pemberitahuan," tulis Walhi dalam laporannya.

Artinya, dengan disetujuinya skema hutan hak oleh KLHK pada 13 Mei 2020, komoditas perusahaan pun ikut berubah yang awalnya perkebunan sawit menjadi tanaman gamal dan kaliandra. Perubahan komoditas ini berdasarkan surat rekomendasi perubahanjenis tanaman pada izin perkebunan pada tanggal 4 february 2020 dengan No: 207/PI.400/E/2020.



Dengan begitu, PT IGL menjadi salah satu perusahaan di Kabupaten Pohuwato yang akan menyediakan bahan baku untuk di produksi menjadi wood pellet. Wood pellet merupakan bagian dari upaya transisi energi di Indonesia, yang memanfaatkan biomassa sebagai sumber energi alternatif. Inisiatif ini masuk dalam kebijakan forest and land use (FOLU) Net Sink 2030, yang merupakan salah satu langkah penting Indonesia dalam memenuhi komitmen global untuk mengatasi krisis iklim. Melalui kebijakan FOLU Net Sink 2030 itu, Pemerintah Indonesia menetapkan target agar sektor kehutanan tidak lagi menjadi sumber emisi gas rumah kaca. Pada akhir dekade ini diharapkan hutan Indonesia dapat menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak krisis iklim.

Kebijakan ini disetujui juga PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan emisi karbon. Dalam rencana penyediaan tenaga listriknya untuk tahun 2021-2030, PLN mengandalkan pemanfaatan biomassa sebagai salah satu strategi utama dalam mengurangi emisi karbon. Berdasarkan sosialisasi dari KLHK Bidang Pengelolaan Lestari pada tahun 2020, disebutkan bahwa dalam rangka implementasi FOLU Net Sink 2030, Provinsi Gorontalo mendapatkan alokasi lahan sebesar 74.147,78 hektar terkait modalitas perizinan berusaha pemanfaatan hutan.

Siapakah di balik PT IGL



Di Kabupaten Pohuwato ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan khususnya di sektor hutan tanaman energi yang akan menjadi biomassa wood pellet. Perusahaan ini adalah PT Inti Global Laksana (IGL) yang memiliki konsesi seluas 11.860 hektar. Sebelumnya, PT IGL adalah milik PT Provident Agro Tbk (Perseroan) dan PT Mutiara Agam (MAG). Namun pada 4 Juli 2019 PT Buana Pratama Cipta (BPC) mengakuisisi saham IGL. Artinya BPC menjadi pemilik saham mayoritas IGL saat ini.

Dari data profil perusahaan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM yang diunduh 30 Juli 2024 menyebutkan sebagian besar dikuasai oleh BPC dengan kepemilikan 1.053.199 lembar saham atau senilai Rp105.319.900.000

Untuk Komisaris PT IGL diduduki oleh Syamsul B. Ilyas yang merupakan seorang pengacara dari Jakarta. Syamsul B. Ilyas ini juga merupakan salah satu pejabat Komisaris pada perusahaan tambang di Pohuwato yaitu PT PETS. Kemudian Presiden direktur ditempati oleh Heru Purnomo. Selain menjabat sebagai direktur, Heru Purnomo juga memiliki 1 lembar saham pada PT IGL senilai 100 ribu rupiah. Sementara sebagai pemilik saham terbesar IGL, PT Buana Pratama Cipta (BPC) berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM yang di unduh pada 30 Juli 2024 menyebutkan saham BPC dimiliki oleh Heru Purnomo 1 persen atau 1 lembar saham senilai 1 juta rupiah. Sisanya milik PT Reka Varia Tara dengan kepemilikan saham 99 persen atau 99 lembar senilai 99 juta rupiah.

Berdasarkan laporan Mighty Earth yang dirilis pada bulan Mei 2024, saham PT Reka Varia Tara 87,5% dimiliki oleh Andy Kelana dan 12,5% oleh Helena Adnan. Kedua namanya tidak asing lagi dalam dunia hukum, mengingat keduanya adalah mitra di Firma Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), yang memiliki portofolio klien di sektor pertambangan seperti termasuk PT Merdeka Copper and Gold Tbk, PT Saratoga Investama, dan Provident Capital.

Suka-Suka di Kebun Energi Maluku Utara

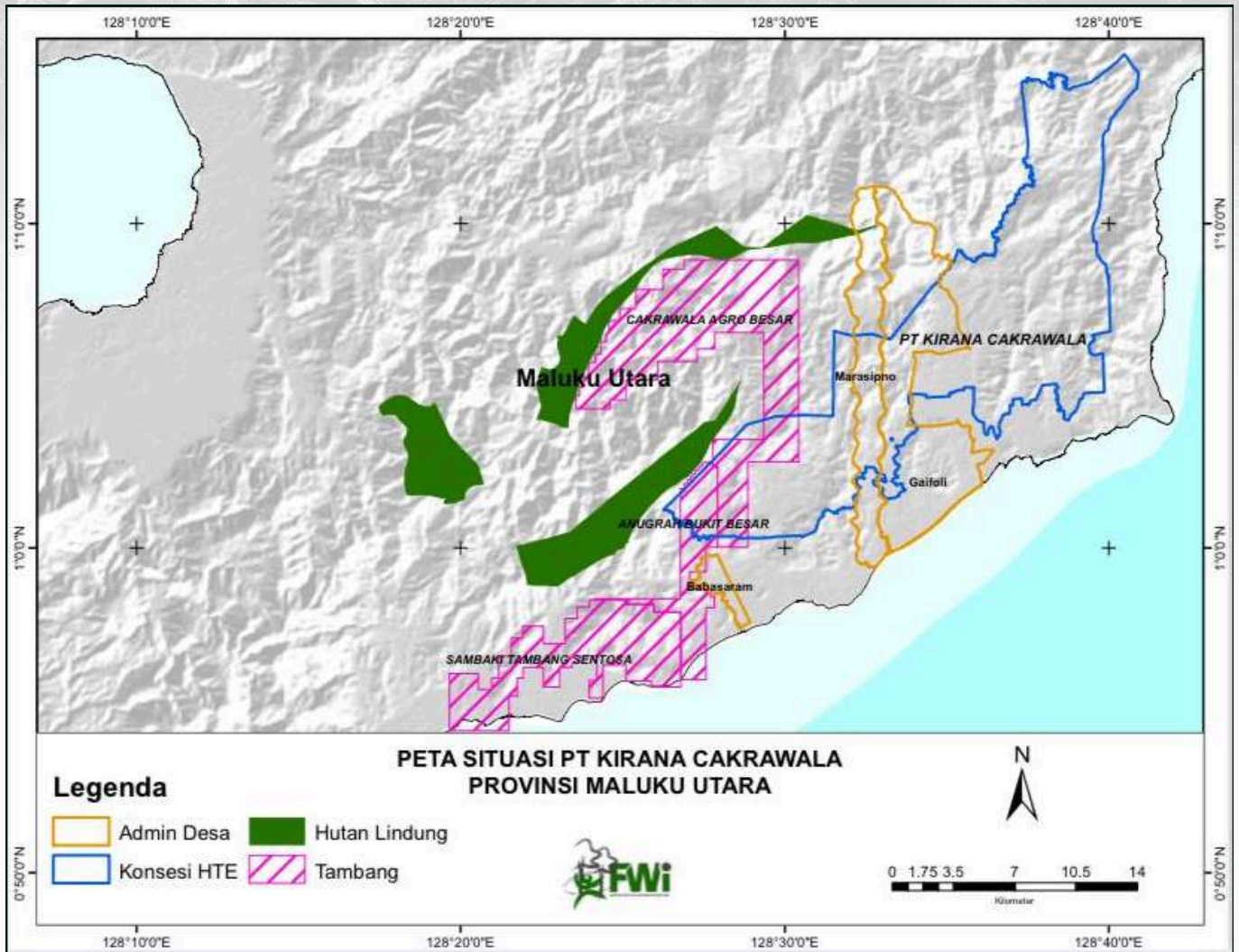
Muhammad Jaya Barends – Betahita.id
Hutan Tanaman Energi



Hamparan tegakan jati putih tumbuh tak beraturan sekitar 7 meter dari belakang rumah Letet Tomodi di Dusun Mamawas, Desa Maratana Jaya, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Di bawah pohon-pohon itu sudah sesak semak belukar. Namun Letet seakan tak peduli. Ia memilih mengurus kebunnya. Kebun lelaki berusia 64 tahun itu berlokasi di hutan Tanah Merah, berjarak 8 kilometer dari dusun. Semenjak dua tahun terakhir, ia kembali ke dusun hanya hari Sabtu untuk persiapan Ibadah Minggu. Gerejaanya kebetulan berada tepat di sisi kiri rumahnya. Meski memiliki rumah ibadah, perkampungan itu tak lumrah umumnya. Di sana terdapat lima rumah saja dan terkepung pohon *Gmelina arborea* Roxb—nama latin jati putih.

"Pohon gmelina milik perusahaan, bukan milik kitong (kita)," ungkap Letet kepada Betahita Jumat, 9 Agustus 2024.

Perusahaan tersebut—PT Kirana Cakrawala—pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 184/Kpts-II/1997. Luas konsesinya 2.3457 hektare. Produksi terakhirnya 2011. Sudah vakum 10 tahun, PT Kirana kembali mendapat izin penyeteraan melalui SK Nomor 936/MENLHK/SETJEN/HPL.O/10/2021. Izin ini diperoleh setelah lahir Permen KLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Berdasarkan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan (RKUPH) periode 2021–2023, model usaha PT Kirana teranyar adalah multiusaha kehutanan, berupa kebun energi atau Hutan Tanaman Energi (HTE). Luas konsesinya masih seperti SK pertama, membentang di sebagian hutan alam Kecamatan Maba Tengah. Dusun Mamawas, perkampungan masyarakat adat Ohongana Manyawa atau Orang Tobelo Dalam masuk konsesi tersebut.



Letet, tetua dari klan suku itu, bercerita bahwa sebelum perusahaan beroperasi, para datuk mereka lebih awal menempati belantara hutan. Namun saat hendak membangun perkampungan di dalam hutan itu ditolak perusahaan. Kala itu 2007, Letet bersama kerabatnya, Kepala Desa Ilii datang ke kantor PT Kirana Cakrawala di Desa Maratana Jaya.

Di hadapan penanggung jawab perusahaan, ia menyampaikan maksud membangun lima hunian di kilometer 14—kini Dusun Mamawas.

“Tapi pihak perusahaan tar (tidak) memberikan izin,” ujarnya. Letet tak patah arang, namun tiga kali ia mendatangi kantor itu, tiga kali pula ditolak. “Padahal ini tanah adat kita, tetapi mengapa ditolak.”

Letet kemudian bertemu seorang polisi lalu meminta bantuan. Pria ini membuat warkat dan dengan diantar anak lelakinya, ia mendatangi lagi Kantor PT Kirana Cakrawala.

Tak berselang lama, pihak perusahaan menyetujui pembangunan hunian. “Syaratnya, boleh membangun hunian asal jangan tebang gmelina,” ungkapnya.

Letet bercerita, tanah adat mereka sebenarnya membentang dari Dusun Mamawas, Tanah Merah hingga ogah-ogah. Di sana ada kawasan hutan, kuburan, babasaram (bekas tempat tinggal), dan kebun. Klaim Letet itu dibenarkan Orah Tomodi yang lahir di kilometer 16 di sempadan sungai Mamawas—Babasaram. Kata dia, hutan itu ditanami nanas, singkong, keladi, bambu, dan duku. Tanaman-tanaman itu merupakan pohon sarat makna bagi warga di sana. Merujuk penelitian M Nasir Tamalene, bersama rekannya Mimien Henie Irawati Al Muhdhar, Endang Suarsini, dan Fatkhur Rochman [2014], duku dan seleguri adalah pohon kelahiran.

“Untuk kematian, bambu dan nangka,” tulis mereka dalam penelitian itu.

"Untuk kematian, bambu dan nangka," tulis mereka dalam penelitian itu.

Oraha kecil waktu itu hidup nomaden dalam hutan, sebelum akhirnya turun bersama klannya ke Desa Miaf pada 1980. Sejak itu pula ia memilih beragama Kristen bersama Letet dan anggota suku. Oraha mengungkapkan, ada rumah semi permanen miliknya yang dibangun pemerintah di kilometer 8, Desa Maratana Jaya. Meski begitu, ia mengaku tak nyaman ditempati.

"Lebih senang tinggal di hutan (Mamawas)," jelasnya

Meski berkali-kali berpindah perkampungan, Mamawas selalu disematkan menjadi nama perkampungan dan lokasinya selalu berdekatan dengan sungai (Toto-doku). Mamawas adalah nama datuk mereka. Manager Kampanye, Advokasi, Media Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Yoga mengkritik izin pembaruan PT Kirana Cakrawala. Ia menilai, prinsipal izinnya cacat karena mengabaikan modal sosial di Maluku Utara. Pasalnya dalam konsesi itu terdapat eksistensi masyarakat adat yang hidup, tinggal dan bergantung terhadap alam. Selain itu, ada kebun kelapa, coklat, cengkih dan pala milik masyarakat. Selain Letet dan Oraha, ada juga Alfons Tutuarima dan Maskatim—dua dari sekian masyarakat berstatus petani—bergantung hidup dari kebun dalam konsesi demi memenuhi kebutuhan ekonomi yang kini was-was. Misalnya Maskatim, warga transmigrasi asal Jawa Barat ini terpaksa berkebun dalam konsesi karena tidak ada lahan kosong lagi. Alasannya ada benarnya. Permukimannya yang sudah beralih status menjadi Desa Maratana Jaya itu lahan usahanya masih dalam konsesi perusahaan.

"Tidak ada tanah lagi tersisa, makanya saya berkebun di sini," ujarnya.

Bagi Anggi, kondisi faktual itu bertentangan dengan Standar Norma dan Pengaturan (NSP) tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam (TSDA). NSP ini disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 14/PS/00.04/XI/2021 tanggal 2 November 2021.

"Seharusnya pembaruan izin tidak diberikan kepada PT Kirana Cakrawala," kata Anggi.

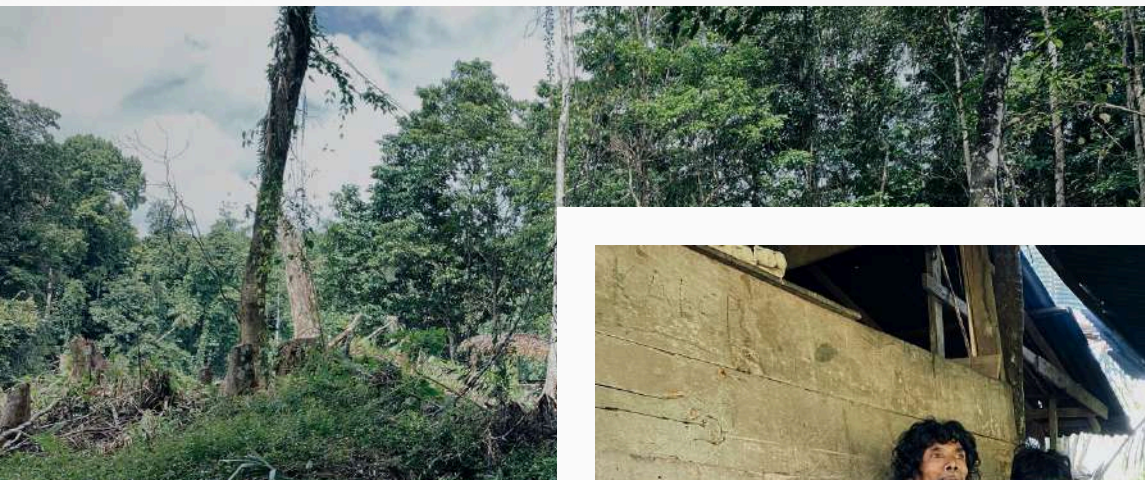
Anggi menyarankan sebelum izin pembaruan dikeluarkan harusnya di audit, dimonitoring, dan dievaluasi kembali. Ia khawatirkan, transisi energi memenuhi target bauran energi dapat mencederai prinsip hak asasi manusia dan merusak hutan alam. Muhammad Nur Abdullah Aziz tak menampik semenjak penyetaraan izin, pihaknya belum turun ke lokasi melakukan pemantauan. Kepala Seksi Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung BPHL Wilayah XIV Ambon itu mengaku hanya menganalisis melalui information system (DIS) laporan PT Kirana Cakrawala.



Kita belum turun ke lapangan melakukan evaluasi dan monitoring secara langsung [PT Kirana Cakrawala]. Tapi 2023, kita sudah bedah kinerja," ungkapnya kepada Betahita, Selasa, 8 Oktober 2024.

Dia berujar, khusus untuk kebun masyarakat dalam konsesi seharusnya perusahaan melakukan kemitraan kehutanan dan juga pemetaan konflik. "Kalau misalnya, tidak melaksanakan kewajiban salahnya perusahaan."

Tapi menurutnya, perusahaan telah melakukan tata batas hingga luas efektifnya cuma 13.000 hektare. Kemungkinan, katanya, tata batas itu untuk menghindari menggarap kebun masyarakat, apalagi perusahaan lama tak beroperasi sehingga jadi terbuka bagi masyarakat.



Ancaman Senyap Deforestasi dan Bencana

Awal Agustus 2024, Betahita menyusuri konsesi PT Kirana Cakrawala melalui Desa Maratana Jaya. Sepanjang perjalanan, tak tampak hamparan pohon 'raksasa' hingga menuju batas izin di kilometer 23. Tutupan hutan renggang. Cuma ada hamparan pepohonan yang ketinggian sekitar 15-24 meter dengan diameter sekitar 15-34 sentimeter. Bahkan areal konsesi juga tergerus erosi Sungai Onat yang makin meluas di sepanjang kilometer 14-22.

Haji Suaib Haji Hasan Tiyabo bercerita akhir Juli 2024, para-para asaran kopra di sana pernah terbawa banjir. Mantan Kepala Desa Maratana Jaya ini menuturkan sempadan sungai juga ikut terkikis 2 meter akibat meluapnya Sungai Onat.

"Kopra milik warga di kilometer 8 [Desa Maratana] yang berdekatan dengan sempadan sungai terbawa banjir," katanya.

Kondisi serupa dirasakan sebagian warga Desa Tatanggapu. Letak desa berada tak jauh dari Hulu sungai. Dua desa ini potret dari hutan yang terbentang di konsesi HTE. Ada juga Desa Babasaram, Beringin Lamo, Beksili, Wayamli, Yawanli, Gaifoli dan Marsipno. Di Desa Gaifoli bertetangga dengan Desa Marsipno, Juli 2024, enam rumah terbawa banjir akibat meluapnya Sungai Gaifoli. Berbeda di Sungai Walolo di Desa Beringin Lamo. Banjir kerap meluap ke permukiman dan sapi terbawa banjir.

Di tengah ancaman bencana, warga Desa Marsipno, Suleman Pakor mengatakan pada 2017 pihak PT Kirana Cakrawala bersama PT Sampoerna Kayoe melakukan sosialisasi ke desa-desa dan mengabarkan bahwa mereka akan beroperasi lagi. Desa yang didatangi, di antaranya Desa Miaf, Marsipno, dan Wayamli.

Ia mengaku kaget setelah perusahaan menyatakan kembali beroperasi. Tentu saja, Suleman khawatir ancaman bencana yang mengintai jika perusahaan beroperasi. Merujuk data FWI mengenai tabulasiutupan hutan Maluku Utara 2021, semula di Maluku Utara ada hutan seluas 2.361.723,33 hektare. Sejak 2017 hingga 2021, kawasan hutan alam menyusut sekitar 237.515, 42 hektare. Suleman bilang, staf PT Kirana Cakrawala telah menyisir bekas konsesi yang pohonnya belum sempat tergarap untuk ditebang. Baginya penebangan ini menyebabkan pengundulan hutan dan ancaman bencana.

"(Mereka) Akan menebang pohon sengon (*Paraserianthes falcataria* L. Nielsen) dan gmelina yang ditanam dan menggarap hutan alam tersisa," jelasnya.

Terkait afiliasi PT Kirana Cakrawala, Betahita menuliskan laporan Trend Asia berjudul Penanggung Cuan Transisi Energi. Riset ini menyebut PT Kirana Cakrawala anak usaha tak langsung PT Barito Pacific Tbk dan pemilik manfaat dari PT Sumber Agung Maluku yang dimiliki PT Barito Wanabinar Indonesia bagian dari Barito Pacific Group. Namun, dalam laporan keuangan kuartal pertama 2022, PT Kirana Cakrawala tidak terdaftar lagi sebagai perusahaan anak tidak langsung. Penelusuran Betahita, PT Sumber Agung Maluku merupakan joint venture antara Barito Pacific Group dan PT Sampoerna Kayoe. Perusahaan patungan itu menaungi PT Kirana Cakrawala; PT Kalpika Wanatama di Pulau Taliabu dan Pulau Mangole; PT Manggole Timber Producer –pabrik plywood dan wood pallet–beroperasi di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Nantinya, bahan baku dipasok dari tiga konsesi korporasi tersebut.

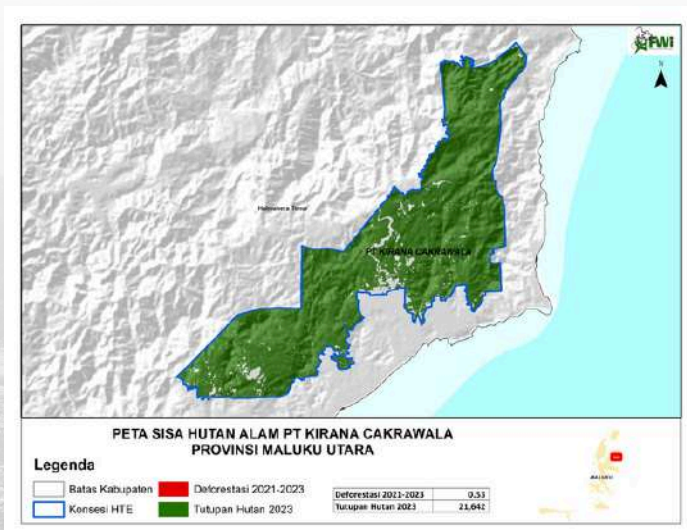
Konsesi HTI-HTI Barito Pacific Grup dulu vakum. Tapi setelah bekerjasama dengan PT Sampoerna Kayoe beroperasi kembali di Taliabu dan Mangole pada 2023," jelas Muhammad Nur Abdullah Aziz.

"Kalau PT Kirana Cakrawala belum realisasi penanaman maupun produksi."

Target penanaman dan produksinya 234 hektare. Di akhir RKUPH 2023 target ini tidak terealisasi. Oleh KLHK, PT Kirana Cakrawala masuk daftar izin konsesi evaluasi sebagaimana SK Menteri LHK Nomor: SK.01/2022. Lalu, perusahaan ini diberikan kesempatan lagi menyusun RKUPH 2023-2032. Jenis pohon yang akan ditanam, sengon, gmelina, jabon (*Neolamarckia cadamba*), dua belanga dan binuang (*Octomeles sumatrana* Miq). Penanggung jawab PT Kirana Cakrawala–PT Sumber Agung Maluku–Sayudiyanta tak bersedia memberikan keterangan ihwal hal di atas. Ia mengatakan perlu konsultasi dengan manajemen untuk menjawab pertanyaan Betahita.

"Ada beberapa item [pertanyaan] yang saya gak bisa jawab," katanya kepada Betahita Jumat, 11 Oktober 2024.

Sementara itu, BPHL Wilayah XIV Ambon mengancam akan memberi sanksi tegas ke PT Kirana Cakrawala. Muhammad Nur Abdullah Aziz bilang, bila kemudian kewajiban perusahaan tak segera direalisasi tiga tahun berturut-turut sebagaimana ditegaskan dalam Permen KLHK Nomor 8 Tahun 2021, "Bisa sanksi tertulis, pembekuan izin hingga pencabutan izin."



Hutan alam tersisa dalam konsesi PT Kirana Cakrawala

Sasar Hutan Adat yang Gundul Berulang



Ingatan Suleman lekat dengan pembicaraan dalam sosialisasi pada 2017 tersebut. Soalnya, lahan yang akan digarap itu bernama “lahan-lahan kehidupan”, sungguhpun hutan kawasan Gosora dan Kajawu sebagian dalam konsesi.

“Kalau Kajawu hutan waris, ada Perkebunan. Selain itu juga ada bukti peradaban kita, seperti kelapa raja Y jauh sebelum PT Kirana Cakrawala beroperasi,” ungkap Suleman Pakor.

Marga Pakor yang dipakai Suleman merupakan salah satu nama moyang O’hongana Manyawa. Orang tuanya, turun dari belantara hutan—menetap di pesisir dan beragama Islam 1984. Pantas saja Suleman mengklaim memiliki tanah waris-klan O’Hongana Manyawa—marga Pakor, Gilalo dan Dubalen.

Bahkan di beberapa titik, terdapat tanah lapang penuh semak belukar dan tunggul pohon sisa perusahaan beroperasi sebelumnya. Di sisi lain, terdapat sungai Gaifolo dan Sungai Kajawu yang sempadannya rusak tergerus erosi. Meski begitu, Welmince Gilalo masih tahu tempatnya termasuk batas-batasnya. Kerabat Suleman ini mengatakan, Kajawu dan sungainya bekas perkampungan O’Hongana Manyawa, sebelum ia turun dan menetap bersama anggota suku di Marsipno, dulu dusun II—anak dusun—Desa Wayamli 1961. Wanita 56 tahun itu juga mengatakan, tete dan bapaknya dulu tanam pohon kelapa, duku, sagu, nanas dan kelapa di sana.

“Dulunya kelapa buat makan saja, tidak untuk di jual,” katanya. Setiap kali berpindah perkampungan, ujanya, selalu berdekatan Toto-doku.



Napak Tilas Datuk Mamawas dan Maratana

Memang sungai bagian tidak terpisahkan dari perkampungan O’Honga Manyawa. Sungai tak sekedar menjadi tempat mandi. Lebih dari itu, tempat mencari ikan dan sumber kehidupan.

Setelah itu, 1963 mereka hijrah menuju tepian pantai bergabung dengan penduduk Desa Wayamli. Maka terbentuklah Dusun Haramoni. Kemudian kembali lagi ke Marsipno 1969, tepat 17 April 2006 menjadi desa definitif. Jauh sebelum PT Kirana Cakrawala beroperasi di kawasan hutan, sebelumnya ada dua perusahaan raksasa kayu beropersai. Dua perusahaan menebang pohon pada 1961.

Suleman tak menampik aktivitas dua perusahaan itu mengusik keberadaan mereka dalam hutan. Belum lagi, kehadiran PT Kirana Cakrawala yang mengakibatkan kenyamanan semakin terganggu. Mimin Dwi Hartono, Analisis Kebijakan Madya Komnas HAM RI menyebut sebelum KLHK menerbitkan izin penyetaraan, harus dipastikan tidak ada lagi tumpang tindih konsesi antara perusahaan dan hak kelola masyarakat adat.



"Perusahaan juga harus memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi masyarakat adat," katanya.

Selain norma hak asasi manusia, ada juga prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang harus dipatuhi perusahaan. Pihak PT Kirana Cakrawala, menolak wawancara langsung bersama Betahita. Melalui staf PT Sumber Agung Maluku yang menaungi perusaha tersebut, Fitri meminta Betahita mengajukan pertanyaan tertulis.

"Untuk pertanyaan yang ingin ditanyakan boleh kirim ke saya. Maksudnya, agar sekalian kami jawab," jelasnya.

Saat dikonfirmasi kembali, ia menyuruh menghubungi pengacara perusahaan bernama Wandu Kuswandi Buamona. Meski begitu, surat yang dikirim tak berbalas. Sementara itu, Muhammad Nur Abdullah Aziz, Kepala Seksi Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung BPHL Wilayah XIV Ambon mengatakan, untuk masyarakat adat ada undang-undang dan aturan sendiri dan masuk ke perhutanan sosial. Tapi yang ia alami, di Maluku-Maluku Utara secara de facto kawasan hutan milik negara, namun secara de jure ada masyarakat adat.

"Kami kan bergerak ikuti aturan, hutan adat akan diakui apabila sudah ada pengakuan dari pemerintah daerah," jelasnya.

Buku Perampasan Ruang Hidup Cerita Orang Halmahera [2014] menyebut O'Hongana Manyawa diprediksi sudah berabad-abad mendiami pedalaman hutan Pulau Halmahera. Sebagian besar terpusat di Halmahera Utara. Kemudian menyebar ke tengah dan selatan. Kabupaten Halmahera Timur adalah daerah otonomi baru hasil pemekaran Halmahera Timur. Di bagian Kecamatan Maba Tengah ada gunung Isa Lou-Isa Lei.

Gunung ini tampak dari Desa Marsipno. Gunung ini pula disebut tempat awal O'Hongana Manyawa bermukim di kawasan hutan ini. Baim Bulawa, tokoh pemuda Desa Wayamli menuturkan di kaki gunung dahulu kala ada dua datuk saudara kandung. Datuk Maratana bermukim di Isa Lei adalah kakak, sementara Datuk Mamawas di Isa Lou adalah ade. Tempat tinggal keduanya terpisah aliran sungai.

"Saat itu, datuk Kapita Maratana lebih awal turun ke pesisir. Datuk Mamawas masih memilih bertahan," jelasnya.

Saat turun ke pesisir, datuk Maratana punya empat keturunan dan berpindah-pindah ke empat Lokasi, salah satunya Obu. Ia kemudian memilih menetap di Desa Wayamli dan Obu—tempat keramat. Sedangkan keturunan Mamawas tersebar di antaranya di Desa Miaf. Desa Bebsili, Desa Marsipno, Desa Gaifoli. Dua nama datuk kini disematkan untuk nama desa dan dusun. Meski memiliki sejarah kepemilikan lahan, tetapi hak adat terkesan diabaikan. Padahal ada ancaman lain dari aktivitas PT Kirana Cakrawala.



Ancaman itu adalah menyusutnya habitat burung akibat terjadinya deforestasi di hutan alam. Soalnya, sebagian konsesi perusahaan beririsan dengan Taman Nasional Akejawe blok Lolobata. Di sini terdapat sejumlah spesies burung endemik Maluku Utara. Bahwa ancaman itu nyata bisa dilihat dari wilayah lain dengan konsesi serupa. Di wilayah lain, merujuk catatan FWI pada 2023, sudah terjadi deforestasi. Sebanyak 31 konsesi kebun energi yang ditargetkan memenuhi biomassa kayu untuk kebutuhan co-firing di 52 PLTU diketahui telah merusak hutan alam Indonesia sebanyak 55 ribu hektare. Deforestasi itu diproyeksi meningkat di angka 4,65 juta hektare bila co-firing dan biomassa kayu tetap dijadikan strategi bauran energi dan upaya pengurangan emisi. Sebab, bionergi dikhawatirkan bisnis yang mendorong deforestasi.

Saat Masyarakat Adat Berjuang Ambil Kembali Hutan Adat yang Masuk Konsesi Hutan Tanaman Industri

Mhd Saifullah - IDN Times
Hutan Tanaman Energi

Banda Aceh, IDN Times - Muhamad Nasir (64) berdiri di jembatan perlintasan Tol Sigli Banda Aceh (Sibanceh) Gerbang Padang Tiji-Seulimeum tepatnya di Gampong Cot Paloh yang masih tahap pengerjaan pembangunan. Tangannya menunjuk hutan adat yang dikuasai PT Aceh Nusa Indrapuri (ANI) dengan status hutan tanaman industri (HTI).

“Jadi secara adat dahulu, daerah ini awalnya kawasan hutan adat. Diambil menjadi HTI,” jelas pria itu kepada IDN Times (11/8/2024).

Nasir adalah tokoh adat di Mukim Paloh. Di Aceh, mukim merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat. Meski berada di bawah kecamatan, lembaga pemerintahan gabungan dari beberapa gampong ini strukturnya ada sejak masa Kerajaan Aceh Darussalam. Pimpinan lembaga ini disebut imeum mukim. Nasir salah satunya. Ia dibantu beberapa perangkat adat, seperti pawang gle atau panglima uteun (hutan), petua seuneubok (perkebunan), keujruen blang (sawah), dan struktur lain sesuai kebutuhan. Gampong Cot Paloh di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, masuk dalam wilayah Mukim Paloh.

Belantara yang kini dibelah untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional Tol Sumatera itu, bagian hutan adat milik masyarakat. Hutan adat bagi Nasir bukan sekadar belantara berisi ribuan batang pohon maupun vegetasi yang menjadi habitat satwa. Tempat itu menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Mukim Paloh yang hampir rata-rata berprofesi sebagai petani. Keberadaan hutan yang sudah dimiliki masyarakat hukum adat sejak Indonesia belum merdeka, baginya sangatlah penting. Selama ini, pengelolaan hutan adat dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat sebelum belakangan menjadi lahan konsesi. Aturan khusus adat diberlakukan kepada warga yang ingin mengelola hutan. Salah satunya, jenis tanaman yang ditanam.

Nasir sebut warga hanya bisa menanam tanaman keras berbuah seperti kakao, langsung, durian, rambutan, kemiri, dan yang tidak merugikan lingkungan. Sedangkan perkebunan sawit, dilarang. Selain itu, masyarakat juga diizinkan untuk mengangon ternak di kawasan hutan adat dengan syarat tidak mengganggu tanaman kebun milik warga lain. Pengambilan kayu diperbolehkan untuk kepentingan pembangunan rumah namun bukan untuk perambahan berlebih.

"Hutan adat itu dikelola bersama oleh masyarakat adat yang berasaskan sosial ekonomi dengan turun temurun dan berkesinambungan,"

Hal serupa pun diungkap Ridwan (49), Imuem Mukim Kunyet. Sebutnya, hutan adat seumpama bank yang bisa dimanfaatkan untuk menyimpan cadangan air. Jika hutan adat rusak, maka mata pencaharian warga dari persawahan dan perkebunan akan terganggu.

"Kalau ditanami sawit, maka airnya bisa kering dan sawah di sini kering semua," kata Ridwan (10/8/2024).

Dia pun menyebut berdasarkan aturan adat, warga dilarang untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Tujuannya agar rumput tidak mati dan bisa digunakan sebagai pakan ternak. Zulfikar Arma, Sekretaris Pelaksana Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, mengatakan kontribusi masyarakat adat terhadap pengelolaan sumberdaya alam membuat hutan adat menjadi sangat penting.

"Jadi kita melihatnya bahwa hutan adat itu bagian penting bagi masyarakat hukum adat. Itu tempat wilayah mereka, tempat mereka untuk ada nilai-nilai ekonomi mereka sendiri," kata Zulfikar (13/8/2024).

JKMA mengartikan hutan adat sebagai identitas masyarakat adat terhadap penguasaan wilayah. Hutan itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari ruang hidup masyarakat hukum adat.

Teuku Muttaqin Mansur, peneliti dan dosen Hukum Adat dari Universitas Syiah Kuala (USK), pun menyebut bahwa masyarakat adat diakui keberadaannya di Aceh sejak era kerajaan dahulu, yaitu di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Secara khusus, dia menyebut mukim, sebagai lembaga masyarakat hukum adat yang ada di tingkat tapak. Hal itu ia rujuk berdasarkan struktur dan Qanun Syarak Kerajaan Aceh atau undang-undang (UU) atau konstitusi kerajaan zaman dulu. Di aturan itu dijelaskan bahwa mukim berada di atas gampong. Adapun imuem mukim dipilih oleh perwakilan gampong.

"Jadi sudah ada dari bagian struktur pemerintahan, jadi bukan barang baru," kata Muttaqin, (20/8/2024).





Tanpa Diskusi, Tiba-Tiba Hutan Adat Masuk Area Konsesi

Nasir coba mengingat saat pertama kalinya PT ANI masuk dan beroperasi di hutan mereka tahun 1997, mereka berdalih kawasan itu masuk dalam wilayah konsesi perusahaan. Seingat mantan Keuchik Jurong Anoe Paloh itu, pihak perusahaan tidak pernah bermusyawarah maupun diskusi dengan masyarakat.

“Mungkin karena saat itu masa Orde Baru. Jadi kita tidak diberi tahu untuk program yang dilaksanakan,” sebutnya.

Aktivitas eksploitasi hutan, katanya terhenti saat konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia (RI) memuncak sejak awal tahun 2000. Sebab tidak ada yang berani masuk hutan kala itu. Jeda menahun, menyebabkan area yang sudah dibuka kembali ditumbuhi belukar. Kawasan yang ditinggal perusahaan itu, belakangan dimanfaatkan warga untuk berkebun. Tindakan ini bukan tanpa alasan. Warga masih berpikir bahwa belantara itu milik masyarakat adat. Alhasil, kawasan konsesi yang ditinggalkan mulai banyak digarap warga. Pinang, mindi, bayu, cokelat, angka, dan beberapa tanaman lain, mulai ditanam. Saat itu, warga sempat meminta kepada pemerintah untuk membuka jalan untuk mempermudah mengangkut hasil kebun. Namun permintaan mereka tidak bisa dikabulkan. Tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Pidie kala itu menemukan bahwa lokasi pembangunan jalan yang diajukan masuk dalam kawasan konsesi hutan tanaman industri milik PT ANI. Itu sesuai petunjuk satelit menggunakan Global Positioning System (GPS).

“Itu baru kita ketahui pada 2006 ketika saya mau mengusulkan jalan ke atas,” kata Nasir.

Kisah mirip juga terjadi di Mukim Kunyet jelas Khalidin (56), mantan imuem mukim periode 2018–2023. Ketika itu, ia bersama pemuda Mukim Kunyet mendapat bantuan bibit untuk menanam di areal seluas 100 hektar. Program ini sebagai langkah reboisasi usai hasil kayu hutan digunakan untuk bantuan pasca tsunami 2004. Enam bulan usai penanaman, dia baru mengetahui bahwa lokasi tempat mereka menanam masuk kawasan HTI. Ini diketahui usai pengusulan pembangunan jalan mereka ditolak pemerintah.

“Di situlah terungkap bahwa kawasan yang kita tanam ini merupakan kawasan HTI. Kawasan orang, sedangkan bantuan pemda tidak boleh masuk ke situ,” jelas pria yang pernah bekerja untuk tenaga reforestasi hutan di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias pada 2008 lalu.



Pemberian Konsesi yang Mengesampingkan Eksistensi Masyarakat Adat

Manajer Kampanye, Advokasi, dan Media Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga, mengatakan banyak permasalahan yang berpotensi konflik ditemukan di lapangan mengenai wilayah konsesi. Sistem perizinan yang ada, kata dia, tidak melihat modal sosial di lapangan. Perizinan kerap mengesampingkan eksistensi masyarakat dan masyarakat hukum adat di kawasan yang diberi izin untuk perusahaan. “Wilayah atau hutan bukanlah ruang kosong yang tidak ada penghuni maupun pemanfaatan di lapangan,” kata Anggi (1/8/2024). Dia menilai proses perizinan yang diberikan selama ini terkesan keliru dan perlu dievaluasi. “Negara tidak bisa memberikan ruang seandainya kepada perusahaan tanpa melihat modal sosial yang ada di dalam kawasan,” imbuhnya.

Hal ini terkait dengan aturan lahan yang ada di Indonesia. Pemberian izin konsesi untuk perusahaan, selama ini tidak melibatkan masyarakat adat. Warga yang tinggal di wilayah itu, dianggap tidak memiliki dokumen legalitas yang lalu menimbulkan munculnya sengketa. "Ini yang tidak dijalankan prosesnya sehingga terjadi saling klaim wilayah," kata Ahmad Shalihin, Direktur Eksekutif WALHI Aceh (20/8/2024). PT Aceh Nusa Indrapuri atau ANI sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan hutan tanaman. Perusahaan ini memperoleh izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 95/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997. Sub Koordinator Bina Usaha dan Perhutanan Sosial DLHK Aceh, Faisal, mengatakan luas kawasan konsesi yang diizinkan untuk dikelola PT ANI saat itu adalah 111.000 hektar, yang tersebar di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie. "Izin tersebut berlaku mulai 5 Agustus 1992 dan berakhir pada 5 Agustus 2035," kata Faisal (22/8/2024).

Luas areal yang dikelola PT ANI mengalami perubahan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 131/MenLHK-II/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang keputusan sebelumnya. Konsesi perusahaan tinggal 106.197 hektare. Pada tahun 2019, luas areal PT ANI berkurang untuk kepentingan pembangunan Tol Sibanceh yang masuk kawasan konsesi. Luas areal perusahaan telah berkurang dari 106.197 hektar menjadi 97.905 hektar. Ini termasuk konsesi yang ada di Mukim Paloh, Kecamatan Padang Tiji. "Proyek Strategis Nasional tersebut melintasi wilayah konsesi milik PT ANI," kata Faisal.

Pengurangan itu berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.261/Menlhk/Setjen /HPL.O/4/2019 tanggal 1 April 2019 tentang perubahan keputusan sebelumnya. Menteri LHK kembali menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konsesi. Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Nomor 1483/MENLHK/SETJEN /HPL.O/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Disebutkan bahwa telah dilakukan perubahan nomenklatur Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman.



Izin Sempat Dievaluasi

PT ANI masuk dalam perusahaan yang dievaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Januari 2022. Perusahaan diduga tidak melakukan aktivitas penanaman dan pengawasan di kawasan konsesi. Bahkan perusahaan pengelola konsesi HTI tersebut terancam kehilangan izin. Hal itu sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan hutan.

Evaluasi tersebut dibenarkan oleh DLHK Provinsi Aceh. Dikatakan penyebab PT ANI dievaluasi karena tidak merealisasikan operasional sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT). PT ANI berjanji akan merealisasikan operasional sesuai dengan RKT yang direncanakan dalam waktu enam bulan. Mulai dari penanaman, persemaian, pengamanan, dan seluruh aspek yang direncanakan sesuai ketentuan. Nama PT ANI belakangan dipulihkan KLHK usai dinilai memenuhi komitmen realisasi sesuai RKT. Pemulihan sesuai Keputusan Nomor SK.1344/MENLHK/SETJEN/PHL.1/12/2022 tanggal 30 Desember 2022. "PT Aceh Nusa Indrapuri betul dievaluasi oleh kementerian, sesuai berjalannya waktu mereka mendapatkan SK Pemulihan dari kementerian," ujar Faisal.

Terkait komitmen reforestasi, Supervisor Management Planning PT Aceh Nusa Indrapuri, Muammar Syafwan, menyebut pihaknya telah melakukan realisasi penanaman di Gampong Panca, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu (24/8/2024). Namun, temuan fakta yang dilakukan oleh WALHI Aceh menyebutkan hal berbeda. WALHI menuding jika perusahaan belum melakukan kewajiban sebagaimana komitmen reforestasi 500 hektar kawasan konsesi. "Berdasarkan hasil pemantauan kita dan informasi dari beberapa masyarakat di sana bahwa proses penanaman belum mereka lakukan," kata Shalihin. Selain itu sebutnya, kegiatan reforestasi di Gampong Lamtamot dan Gampong Panca, Kecamatan Lembah Seulawah tidak berjalan mulus. Penanaman yang rencananya bakal dilakukan di lahan 200 hektar kawasan konsesi, nyatanya hanya terealisasi 100 hektar. "Bahkan dari 100 hektar yang ditanam tersebut jika kita melihat ke lokasi, pohon tersebut tidak semuanya tumbuh," jelasnya.

Secara hukum, kata Shalihin, perusahaan sudah melanggar karena tidak memenuhi kewajiban usai dievaluasi. Kondisi ini bisa menjadi indikasi dan alasan bagi pemerintah untuk segera mencabut izin PT ANI. Meski WALHI Aceh menilai izin PT ANI layak dicabut, namun KLHK tampaknya tidak ingin perusahaan itu langsung angkat kaki. Kementerian malah memperpanjang perizinan pengelolaan hutan untuk perusahaan. Ini sesuai Keputusan Menteri KLHK Nomor SK.1166/Menlhk/Setjen/PHL.2/11/2023 tanggal 3 November 2023. Pemerintah memberikan perpanjangan perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman kepada PT Aceh Nusa Indrapuri seluas lebih kurang 97.507 hektar.



Hutan tanaman industri yang masuk serta menguasai wilayah adat membuat masyarakat Mukim Paloh dan Mukim Kunyet sadar bahwa harta mereka yang berharga telah dirampas. Mereka mulai berjuang untuk hutan berkesinambungan milik masyarakat adat. Mukim Paloh mulai memperjuangkan hak atas hutan adat pada 2015. Seluruh keuchik di bawah administrasi Mukim Paloh diajak bermusyawarah. "Kita sampaikan masalah keadaan hutan, lalu buat usulan kepada pihak terkait," kata Nasir. Dia bilang enam dari 12 gampong di Mukim Paloh. Gaung bahwa warga memiliki hak dan kewajiban menjaga hutan adat turut terjadi di Mukim Kunyet. Adapun 8 dari 14 gampong di Mukim Kunyet sampai sekarang berbatasan langsung dengan kawasan konsesi. Pengusulan wilayah belantara yang pernah ada menjadi hutan adat pun mulai dilakukan pada 2016. Pengusulan itu mengacu dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 terkait dengan pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Putusan tersebut membuat hutan adat tidak lagi menjadi bagian dari hutan negara. Aturan itu juga memperkuat Program Perhutanan Sosial yang sempat mandek dan kembali berjalan pada 2014. Ada lima skema dalam program ini, yakni Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), Pola kemitraan. "Setelah ada putusan MK, kita mulai gencar memberi pengetahuan kepada masyarakat adat terkait tahapan-tahapan untuk mendapat pengakuan wilayah hutan adat mereka sejak 2014," jelas Zulfikar.

Berdasarkan data JKMA, Mukim Paloh memiliki luas wilayah adat mencapai 7.189 hektar. Luas hutan adat yang diusulkan 2.921 hektar dan semua berada dalam kawasan konsesi HTI. Sementara Mukim Kunyet memiliki luas wilayah adat 7.271 hektar. Luas hutan adat yang diusulkan kepada pemerintah pusat yakni 4.106 hektar.

Semua wilayah hutan adat tersebut masuk dalam konsesi HTI. Selain Mukim Paloh dan Kunyet, Pemerintah Aceh juga mengusulkan hutan adat 16 mukim lain pada 2018. Usulan ini telah disampaikan ke KLHK. Sebagai lampiran, warga juga telah memberikan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Penetapan Batas Wilayah Mukim disertai pengantar usulan dari Pemerintah Aceh. Meski demikian, saat itu masih ada kegamangan nomenklatur hukum perihal mukim, yang tidak dipahami KLHK. Muttaqin Mansur menduga penyebab KLHK tidak mengetahui dan mengakui mukim dikarenakan lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Di aturan tersebut disebutkan tidak ada lembaga lain setelah antara pemerintah kecamatan dan desa. "Fungsi mukim terdegradasi setelah adanya UU Nomor 5 Tahun 1979," katanya.

Tidak hanya keberadaan, UU tersebut juga melemahkan penguasaan lembaga masyarakat adat tersebut secara de facto. Seperti penguasaan lahan termasuk hutan yang ada di wilayah mukim. Menjaga keberadaan lembaga mukim tersebut Pemerintah Aceh pernah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Adat dalam Provinsi.

Kewenangan mukim sebagai lembaga pemerintahan masyarakat adat diperkuat dengan adanya UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan ditambah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. "Kita berhasil membuktikan bahwa mukim sebagai subjek masyarakat hukum adat dan beserta objek yakni tanah wilayah. Kajian itu kemudian diantar ke KLHK hingga akhirnya diakui setelah tujuh tahun berjuang," kata Muttaqin.

Delapan masyarakat hukum adat di Aceh termasuk Mukim Paloh dan Mukim Kunyet menerima SK Penetapan Status Hutan Adat. SK langsung dilakukan Presiden Joko Widodo saat puncak Gelaran Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (Festival LIKE) di Jakarta (18/9/2023). Berdasarkan SK tersebut, luas hutan adat Mukim Paloh yang ditetapkan pemerintah pusat yakni 2.934 hektar. Sementara luas hutan adat Mukim Kunyet sesuai penetapan yakni 1.280 hektar. Semua kawasan berada di wilayah konsesi HTI PT ANI.



Meski telah peroleh SK Penetapan Status Hutan Adat, persoalan berikutnya muncul. Tapal batas di lapangan belumlah jelas. "Jadi yang sekarang ini, hutan desa berbatasan langsung dengan HTI, tapi kita tidak tahu tapal batasnya," kata Ridwan. Tapal batas yang belum ada membuat ia tidak berani memberi warga izin mengelola hutan adat. Situasi yang mirip juga terjadi di Mukim Paloh. Luas hutan adat 2.934 hektar yang dimiliki belum dilepas oleh PT ANI selaku pengelola kawasan konsesi. "Kita belum tahu sampai saat ini, mana milik mereka dan mana milik kami, hutan adat. Kami yang tahu mulai dari atas kampung itu milik kita, sedangkan ke hutan sana belum tahu sampai di mana," ungkap Nasir.

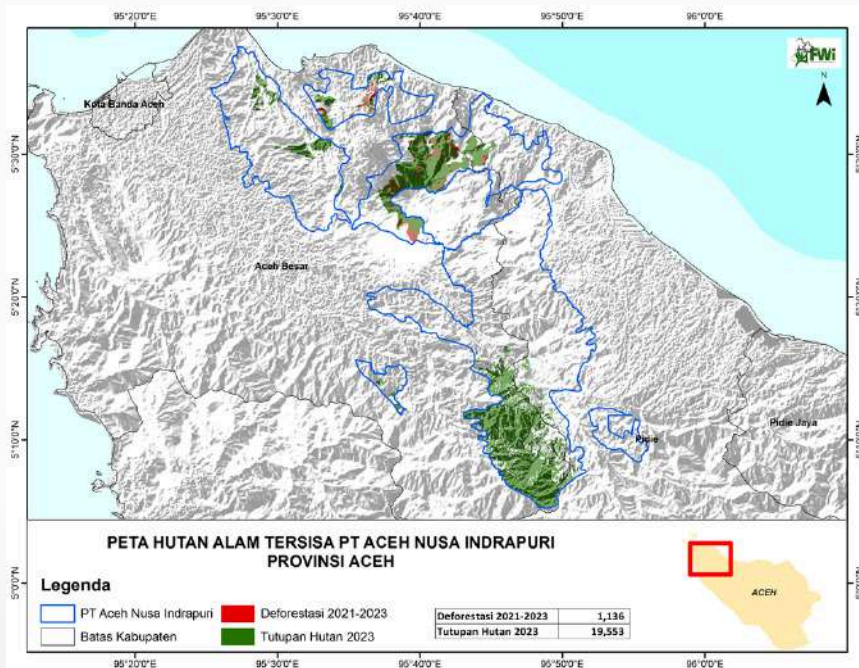
Pembahasan mengenai tapal batas antara hutan adat dan HTI terakhir dilakukan di Sigli, Kabupaten Pidie, pada awal Agustus 2024. Di pertemuan itu, Nasir, Ridwan, JKMA, beserta pihak yang selama ini mendampingi pengusulan hutan adat bersepakat untuk dilakukan inisiasi pemetaan tata batas terlebih dahulu. Sebab mereka tidak mau hutan yang sudah menjadi milik masyarakat adat dicaplok oleh perusahaan. Baik Nasir maupun Ridwan, sama-sama berharap pemerintah segera menetapkan tapal batas antara hutan adat dan HTI yang dikelola PT ANI. Mereka khawatir bila kondisi ini terus berlanjut berpotensi terjadi konflik. Perihal inisiasi ini, Muttaqin menyarankan agar mukim membuat tapal batas sementara.

Penandaan bisa dilakukan dengan memberi jarak dari perkiraan titik akhir perbatasan sambil menunggu tapal batas resmi dari KLHK. "Batas terakhir tidak usah diambil dulu, bisa menyisakan satu kilometer. Itu tidak masalah sebetulnya, kecuali sengaja dipermasalahkan," jelasnya. Sementara itu, Supervisor Management Planning PT ANI mengaku pihaknya terbuka, dan menunggu undangan dari masyarakat adat untuk membahas mengenai tapal.

"Sebenarnya kita menunggu masyarakat adat, kapan mereka mengundang kita, kita siap datang," kata Syafwan. Dia mengatakan sejak PT ANI beroperasi belum pernah terjadi konflik dengan masyarakat, terutama yang ada di hutan adat. Selain itu, aktivitas penebangan juga tidak pernah dilakukan lagi oleh perusahaan. Dia pun menyebut, bila masyarakat ingin berkolaborasi melindungi hutan, pihaknya bersiap untuk menjalin kerja sama. "Kalau memang masih sejalan pengelolannya, kenapa kita tidak join pengelolannya seperti apa. Bekerja sama untuk menjaga hutan," lanjut Syafwan.

Jaringan pendamping masyarakat adat seperti JKMA pun menyarankan agar pihak PT ANI dapat berbicara perihal peluang kemitraan dengan masyarakat adat. "Itu yang ditunggu sebenarnya. Duduk bareng untuk berdiskusi dengan masyarakat adat dan JKMA untuk berbicara kemitraan di lokasi hutan adat. Itu yang belum ada terjadi," kata Zulfikar.

Di sisi lain, DLHK Aceh menyarankan kedua pihak selaku pemilik izin harus segera melakukan penandaan tapal batas sehingga kepastian pengelolaan hutan lebih jelas. Melalui tapal batas itu pula dapat memastikan perusahaan tidak menanam di luar areal sesuai SK yang diberikan. "Saya berharap dua pihak yang bersinggungan tersebut bisa duduk untuk melakukan bagaimana pengelolaan-pengelolaan tapal batas harus disepakati bersama," tutup Faisal.



Hutan Alam Tersisa di dalam konsesi PT Aceh Nusa Indrapuri Provinsi Aceh

Kebun Energi dan Polemik Deforestasi di Gorontalo Utara

Sapril - Mimoza.tv
Hutan Tanaman Energi



Marten Laita tak kuasa menyembunyikan kesedihannya, saat menceritakan kembali kisah memilukan di tahun 2012 silam. Dia dan lima warga warga lainnya, dikriminalisasi pihak perusahaan pengelola hutan tanaman industri (HTI) PT Gema Nusantara Jaya (PT GNJ), pasalnya Marten dan warga lainnya dilaporkan karena melakukan perusakan tanaman milik perusahaan yang diklaim masuk dalam kawasan izin konsesi HTI. Dari sejumlah nama itu, empat orang dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, setelah menjalani rangkaian proses persidangan, mereka di vonis bebas. Sebelum vonis bebas, mereka sempat mendekam di tahanan kejaksaan selama kurang lebih tiga bulan dan berlanjut di dalam blok hunian Lapas Kelas II A Gorontalo. Setelah bebas pun, Marten tidak diizinkan melakukan aktivitas kembali di lahan tersebut. "Sekarang saya hanya memanfaatkan sisa lahan yang ada untuk berkebun, tapi tidak bisa dibuatkan sertifikat atas nama saya. Pemerintah desa tidak mau dengan alasan lahan itu masih masuk dalam kawasan konsesi HTI," tuturnya.

Lahan milik Marten yang diklaim perusahaan kurang lebih 8 hektare, yang berada di desa Bubode, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara.

'Kami menanam lahan itu dengan cabai rawit dan sejumlah tanaman jenis lainnya, oleh perusahaan lahan itu digarap dan ditanami dengan tanaman jenis jabon dan sengon tanpa sepengetahuan kami,' ungkapnya.

Marten menyesalkan, kejadian itu dilakukan saat dia tidak berada di lokasi. Sebelumnya, Marten sempat ditawarkan untuk bekerja di perusahaan, namun dirinya dengan tegas menolak. Dia lebih memilih untuk mempertahankannya. Sebab lahan itu dinilainya sebagai sumber penghidupan diri dan juga untuk keluarganya.

Marten Laita





Selain marten, Niko Abdullah adalah salah satu warga Bubode yang lahannya diambil oleh perusahaan. Niko menyebut warga menolak, karena pihak perusahaan tidak pernah sebelumnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Secara mendadak, mereka lalu mengambil lahan hak mereka. "Di 2010 sempat ada penolakan masyarakat karena mereka tidak tahu-menahu. Tanpa adanya informasi dan sosialisasi, perusahaan masuk ambil lahan warga," ujarnya.

Niko bilang dia sempat berkonsultasi dengan pemerintahan desa, para wakil rakyat hingga tingkat provinsi. Puluhan kali dia melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Gorontalo Utara dan DPRD Gorontalo Utara. Tetapi usahanya tidak berbuah. "Demo di depan Kantor Bupati dan DPRD Gorontalo Utara tercatat sudah 23 kali, Kantor Gubernur maupun DPRD Provinsi Gorontalo ada 4 kali. Saya mengadukan terkait dengan permasalahan yang ada di Desa Bubode ini."

Di sisi lain, perusahaan minta aktivitas warga di lahan dihentikan, hingga muncul kesepakatan. Namun, alih-alih menunggu, perusahaan justru terus melakukan aktivitas penanaman sehingga memicu terjadinya konflik yang berujung pada pencabutan tanaman perusahaan oleh warga. Padahal, sebelum masuknya perusahaan HTI, Desa Bubode merupakan lumbung pangan yang menghasilkan banyak hasil pertanian, mulai beras, jagung, cabai, dan beragam jenis pangan yang menjadi penopang sektor pertanian di Kabupaten Gorontalo Utara.

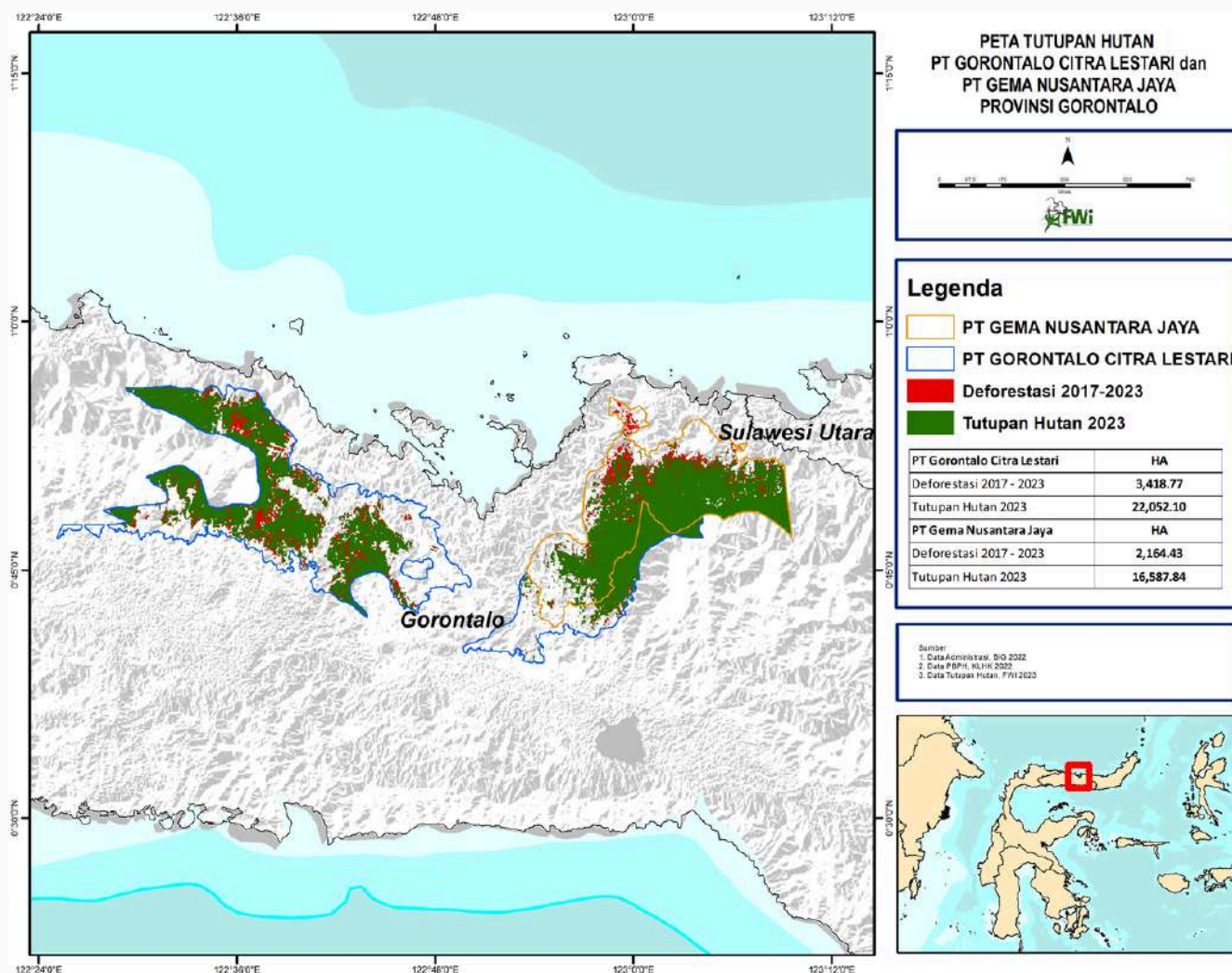
Saat ini, produktivitas menurun drastis. Hanya sekitar separuh lahan sawah yang masih berfungsi. Pengerukan tanah dan penumpukan sedimentasi oleh perusahaan, termasuk di saluran irigasi dan bendungan, telah menyebabkan aliran persawahan tidak lagi optimal. "Dampaknya amat kami rasakan. Dari sawah dua hektare bisa menghasilkan seratus karung, namun sejak adanya aktivitas perusahaan terjadi penurunan. Di sisi lain biaya yang dikeluarkan cukup besar. Bisa sekitar Rp10 juta," keluh Niko.



**Dari HTI ke HTE,
Siapakah yang Diuntungkan?**

Di Gorontalo, selain PT GNJ ada juga PT Gorontalo Cipta Lestari (PT GCL) yang mana keduanya adalah dua unit pengelolaan hutan tanaman industri yang tergabung dalam Katingan Timber Group. Kedua perusahaan ini merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Hasil Hutan-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) sejak 2011, yang kemudian berubah melalui Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan Nomor 1109/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 untuk PT GNJ dengan luas 27.976,78 hektare, dan melalui PBPH Nomor 1110/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2021 dengan luas 46.170 hektare untuk PT GCL.

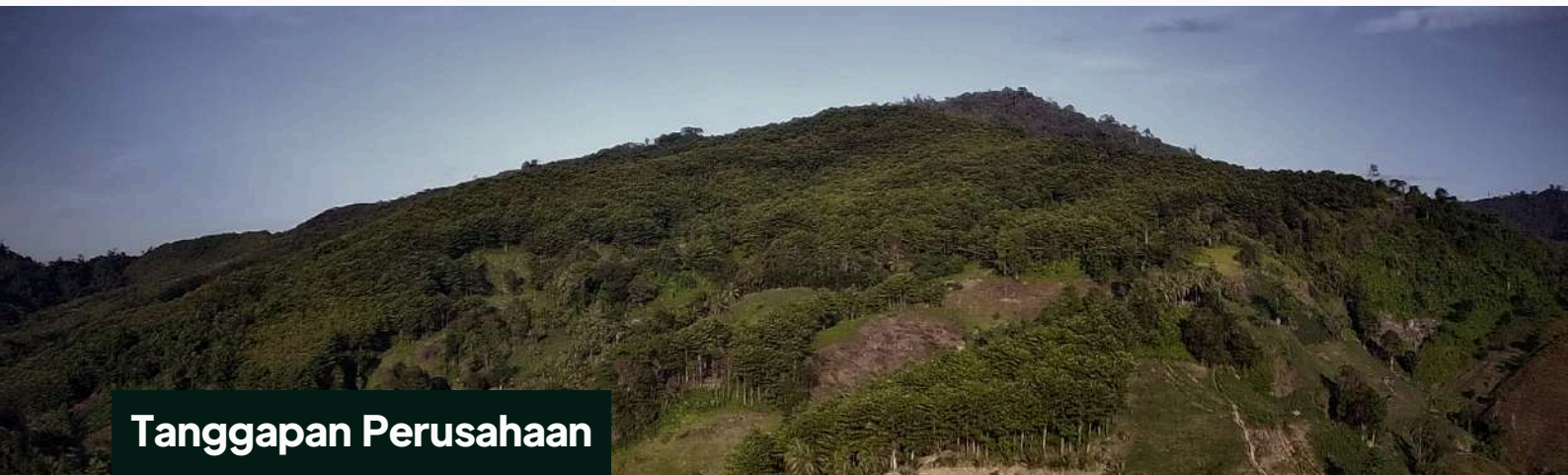
Manager Kampanye, Advokasi Forest Watch Indonesia (FWI) Anggi Putra Prayoga mengatakan saat ini kedua perusahaan inilah berubah menjadi perusahaan di bidang Hutan Tanaman Energi, untuk mendukung proyek transisi energi Indonesia dan memproduksi bahan baku wood pellet. Bahan bakar berbasis biomassa ini akan digunakan untuk mencampurkan batu bara, di sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap Biomassa (PLTBm) atau yang disebut sebagai co-firing biomassa. Hasil wood pellet itu lalu masuk untuk diolah di industri kayu primer yang bernama PT Gorontalo Panel Lestari. Tetapi dibalik gemerlap rencana itu, FWI mencatat bahwa Provinsi Gorontalo mengalami deforestasi (2017-2021) sebesar 33.492 hektare. Sementara itu masih ada 696.631 hektare hutan alam tersisa di Gorontalo. Untuk wilayah GNJ sendiri dari tahun 2017 hingga 2023 dari tutupan hutan sebesar 22,052.10 hektare telah terjadi laju deforestasi 3,418.77 hektare, sedangkan untuk GCL dari tutupan hutan sebesar 16,587.84 hektare telah terjadi deforestasi 2,164.43 hektar.



Peta FWI mengenai tutupan lahan GNJ dan GCL tahun 2017 – 2023

Mengacu pada hasil riset Trend Asia yang berjudul "Penanggung Cuan Transisi Energi" menyebut dibalik mulusnya kehadiran perusahaan ini, diduga penerima manfaat dari GNJ adalah Jacqueline Sitorus dan Andy Indigo. Keduanya memiliki hubungan keluarga dengan Wilmar Group karena Jacqueline Sitorus merupakan anak dari Martua Sitorus, sedangkan Andy Indigo merupakan keponakan Ganda Sitorus.

Diketahui, Martua Sitorus merupakan pendiri Wilmar International, dan Andy Indigo juga duduk sebagai Direktur di PT Wahana Indigo yang memiliki 50 persen saham dari PT Gama Energi Negeri yang berkongsi dengan PT Pembangkit Jawa Bali Investasi untuk mengelola PLTU Sumatera Utara-2.



Tanggapan Perusahaan

Dani Gumilar, Manager Operasional GNJ mengatakan, sebagai pengelola kawasan hutan, pihaknya bertanggung jawab atas area seluas 24.000 hektare yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri. Dari luas tersebut baru sekitar 6.000 hektare yang telah ditanami.

"Kami membagi kawasan ini menjadi beberapa zona, termasuk kawasan konservasi dan area multi-usaha kehutanan, dan perdagangan karbon yang baru akan diwacanakan. Sebagian besar areal tersebut, tidak ditebang sama sekali untuk menjaga keseimbangan karbon,"ujarnya.

GNJ sendiri sebutnya telah memperoleh sertifikat Forest Stewardship Council (FSC), yang berkomitmen untuk tidak membuka area baru, terutama hutan alam. Dimana fokus perusahaan pada pengembangan hutan tanaman industri seperti pertukangan dan wood pellet untuk energi.

"Saat ini kami memanfaatkan berbagai hasil tanaman, yaitu jabon dan sengon, dan diolah menjadi industri pertukangan juga industri wood pellet," tuturnya. " Kami tidak mengizinkan pembukaan lahan baru di kawasan hutan dan hanya melakukan penebangan sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah disetujui."

Terkait dengan klaim masyarakat terhadap lahan, pihaknya berupaya melakukan pola kemitraan. "Contoh konkret kerjasama kami dengan masyarakat adalah bantuan penanaman jagung dan tanaman musiman lainnya, serta membayar pekerjaan pemeliharaan."

Dia juga mengklaim bahwa sebagian karyawan yang bekerja di GNJ adalah warga desa Bubode. Perusahaan juga berkontribusi membangun akses jalan yang sebelumnya sulit dilalui kendaraan. "Kini sudah bisa diakses mobil, dalam mempermudah masyarakat mengangkut hasil pertanian mereka," sebutnya.



Warga Desa Ranggo Terdampak, Kala Hutan Tanaman Energi Jadi Tambang Emas Ilegal di Sarolangun

Kurnia Sandi – Jektvnews.com
Hutan Tanaman Energi



JAMBI - Aktivitas penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan PT Hijau Artha Nusa (HAN) marak berlangsung, tepatnya di koordinat -2.492817 LS dan 102.52788 BT di sekitar Desa Ranggo. Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Aktivitas ini buah dari tidak terurusnya wilayah konsesi PT HAN, sebuah perusahaan Hutan Tanaman Energi (HTE), yang telah vakum dalam beberapa tahun terakhir.

Dampak aktivitas penambangan emas ilegal ini menyebabkan sejumlah kawasan hutan hilang, dan berdampak kepada pencemaran lingkungan dan hilangnya sebagian mata pencaharian dari masyarakat sekitarnya.

"Sumur banyak yang kering, [air] sumur keruh berminyak," ungkap Mashuri, Ketua Karang Taruna Desa Ranggo (20/8/2024). Akibatnya, sekarang untuk kebutuhan air masyarakat harus membeli atau mencari air bersih di luar area penambangan emas ilegal ini. "Ada orang keliling, [jual] air satu galonnya 10 ribu," sambungnya.

Warga pun mulai merasakan gejala gatal-gatal di kulit akibat air yang sudah tercemar itu.

Fendi, seorang warga lain, menyebut bahwa aktivitas pertambangan ilegal (PETI) bermula sejak sekitar tahun 2000-an oleh warga pendatang. Sementara, warga setempat baru tahu jika ada potensi emas di wilayahnya.

"Sudah ada sekitar 15 tahunan orang main dongfeng (mesin tambang emas ilegal) ini," tuturnya. Sekarang kondisi pertambangan ilegal makin masif dengan masuknya banyak alat berat yang digunakan.

Menjamurnya Tambang-Tambang Emas Ilegal

Berdasarkan data Komunitas Konservasi Lingkungan (KKI) Warsi, tercatat pada 2022 di Provinsi Jambi ada sekitar 45.059 hektar lahan yang terdapat aktivitas penambangan emas ilegal. Jumlahnya tambah tahun semakin meningkat. Pada 2023 ada 46.249 hektar lahan yang dijadikan area PETI.



Sementara itu di Kabupaten Sarolangun, berdasarkan data KKI Warsi ada sekitar 15.578 hektar aktivitas PETI pada tahun 2022. Lahan-lahan itu pun rusak parah akibat aktivitas penambangan emas ilegal tersebut. Berdasarkan peta google earth di Sarolangun, dapat terlihat secara langsung kawasan yang masif penambangan emas ilegal, salah satunya terkonsentrasi di sekitar Desa Ranggo. Saat dikonfirmasi, Muchlisin Madras, Manajer Administrasi dan Marketing PT HAN membenarkan jika banyak lahan di areal konsesinya yang dirambah. Ini sebutnya, makin meningkat sejak perusahaan HTE itu tidak lagi beroperasi di lapangan sejak tahun 2021.

"Kalau secara aturan, tidak satu orang pun boleh mengambil kayu, apalagi mengklaim wilayah itu yang sudah diserahkan sebagai wilayah konsesi PT HAN," sebutnya.

Aktivitas tambang emas ilegal diakuinya, dalam tiga tahun terakhir bertambah parah. Demikian juga hutan di kawasan Blok II di sekitar Nalo sampai perbatasan Tabir Barat dan Tabir Ulu, sudah banyak yang diokupasi. "Ada yang ditanami sawit, karet, area PETI. Dulu saat perusahaan masih beroperasi kami terus melakukan imbauan agar tidak ada PETI di kawasan itu. Bahkan kami pernah melaporkan ke pihak berwajib agar menindak kegiatan di sana. Untuk sumber daya internal, kami belum punya kemampuan untuk menindak itu," lanjutnya.



Praktik pendudukan lahan hutan, dan menjadikannya area kebun dan tambang, tentu mengakibatkan deforestasi. Dalam kajian Forest Watch Indonesia (FWI) wilayah konsesi perseroan yang terdiri dari hutan hujan dataran rendah ini, telah mengalami deforestasi seluas 4.834,52 hektar pada 2017-2021 dan 2022-2023 seluas 225 hektar. Penambangan emas ilegal selain mengubah bentang alam (sungai) dan menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat disekitar wilayah konsesi, keberadaannya juga berakibat buruk pada kesehatan masyarakat yang menggunakan sungai, sebagai sumber air.

Tak hanya membuat masyarakat semakin turun kesejahteraannya, eksploitasi alam dalam kegiatan penambangan emas juga menyebabkan bencana ekologis yang sangat hebat. Ketika hujan permukiman warga rawan banjir, sedang saat memasuki musim kemarau lahan-lahan warga dilanda kekeringan. Analisis FWI pun menemukan bahwa deforestasi di kawasan PT HAN sangat masif. Luas deforestasi itu tak sebanding dengan realisasi penanaman tanaman jenis sengon yang digadang-gadang perseroan untuk memenuhi kebutuhan biomassa.

Anggi Putra Prayoga Manager Komunikasi, Kerjasama, dan Kebijakan FWI menyebut ada kegagalan pihak perusahaan hingga areanya dirambah oleh warga.

"Perusahaan awalnya mengekstraksi kayu yang ada di dalam konsesi sebagai bentuk penguasaan hutan dan lahan. Lalu perusahaan berencana membangun hutan tanaman energi, yang sebetulnya jauh dari fakta kemampuan perusahaan," jelasnya.

"Setelah itu perusahaan justru meninggalkan tanggung jawab yang tidak diselesaikannya."



Mendorong Pencabutan Izin

Mencermati kondisi yang terjadi, organisasi lingkungan WALHI Jambi mendorong agar pemerintah segera ambil tindakan.

"Kami mengusulkan pencabutan izin dan hak pengelola dikembalikan ke masyarakat. Wilayah itu bisa dijadikan kawasan kelola, seperti hutan desa. Bisa dikelola antara tanaman hutan dan jenis pemanfaatan, seperti kopi dan kayu manis," jelas Eko Mulia, Manajer Advokasi WALHI Jambi.

Dia pun menyinggung perihal aktivitas tambang emas ilegal, dimana pelakunya juga banyak yang melibatkan warga setempat.

"Menjadi sebuah tantangan bagaimana masyarakat bisa memperoleh sumber pendapatan lain [di luar emas], ini yang perlu dianalisis," ucapnya.

"Sejauh ini posisi WALHI melihat untuk mencegah deforestasi hutan dan alih fungsi lahan, maka perlu ditanami dengan komoditi bermanfaat buat masyarakat, bukan komoditi hutan seperti jenis tanaman energi," sebutnya.

Dia pun menyebut WALHI sedang memperkuat dalil, untuk mengajukan usulan pencabutan izin PT HAN ke KLHK.

"WALHI Jambi sepakat mendorong pencabutan izin PT HAN. Adapun area yang dimanfaatkan oleh masyarakat itu diberikan sebagai wilayah kelola rakyat," katanya.

Fendi memandang baik jika warga diperkenankan untuk mengelola lahan. Dia sebut berkebun bisa jadi alternatif pendapatan warga, bukan hanya bergantung dari hasil mencari emas yang penuh ketidakpastian dan berisiko untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Bisa dari komoditi seperti kopi, yang ditanam di area hutan," ucapnya (20/08/2024). Dia menyebut, warga terpaksa mencari emas lantaran lahan sudah tidak lagi cukup tersedia di Desa Ranggo. Sedang untuk memenuhi kebutuhan kayu rakyat, dia bilang warga Desa Ranggo bisa mulai membudidayakan tanaman kayu hutan seperti pulai dan tembesu, untuk kebutuhan bahan baku rumah tangga dan bangunan.

Benny Budiansyah, Kasi Pemantauan dan Evaluasi Badan Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Unit IV Jambi membenarkan jika izin konsesi PT HAN telah dimulai sejak 2013 yang lalu. Namun sejak pandemi COVID-19 melanda, kegiatan perusahaan itu berhenti hingga saat ini. Dia bilang pihak BPHL IV Jambi akan menyurati KLHK terkait ketidakoperasian dari perusahaan.

"Kita berikan peringatan dulu, misalkan tidak terpenuhi dalam jeda waktu dalam 30 hari, muncul peringatan kedua, peringatan ketiga, lalu dipanggil, masih sanggup atau tidak, lalu dilepas perizinannya," tutur Benny.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika nantinya dari kementerian memutuskan untuk mencabut izin operasi perusahaan, maka statusnya akan dikembalikan ke negara, dan masyarakat sekitar bisa mengajukan skema pengelolaan perhutanan sosial.

Hutan Tanaman Energi dan Ancaman Deforestasi di Kepulauan Maluku

Johan Djamanmona – Titastory.id
Hutan Tanaman Energi



Titastory.id - Ternate-Berawal dari sebuah dialog nasional, pada Kamis (28/1/2021), secara terbuka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya memberi dukungan terhadap kebijakan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan mendorong pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk bioenergi atau yang dikenal sebagai "Hutan Tanaman Energi (HTE),"

Pada saat yang sama, Menteri LHK mengatakan telah terdapat potensi-potensi terkait HTI untuk bioenergi, diantaranya terdapat 14 unit usaha dengan luas alokasi untuk tanaman energi seluas 156,032 hektar. Terdapat juga 18 unit usaha di 10 provinsi yang berkomitmen mengembangkan bioenergy.

Tujuan pengembangan HTE adalah untuk memenuhi target penurunan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29 persen, hingga 41 persen. Namun kebijakan terkait dengan HTI yang menyediakan bahan baku untuk produksi biomassa di Maluku Utara, -yang merupakan provinsi dengan banyak pulau-pulau kecil, pun dinilai akan mendorong peningkatan deforestasi di provinsi kelautan ini.

PLTU COFIRING & PERUSAHAAN PEMBANGUN HTE (2021-2023)

PROVINSI MALUKU

Perusahaan
PT KIRANA CAKRAWALA
MALUKU UTARA

Luas HTE
22,680.40 Ha

Luas Deforestasi
5.62 Ha

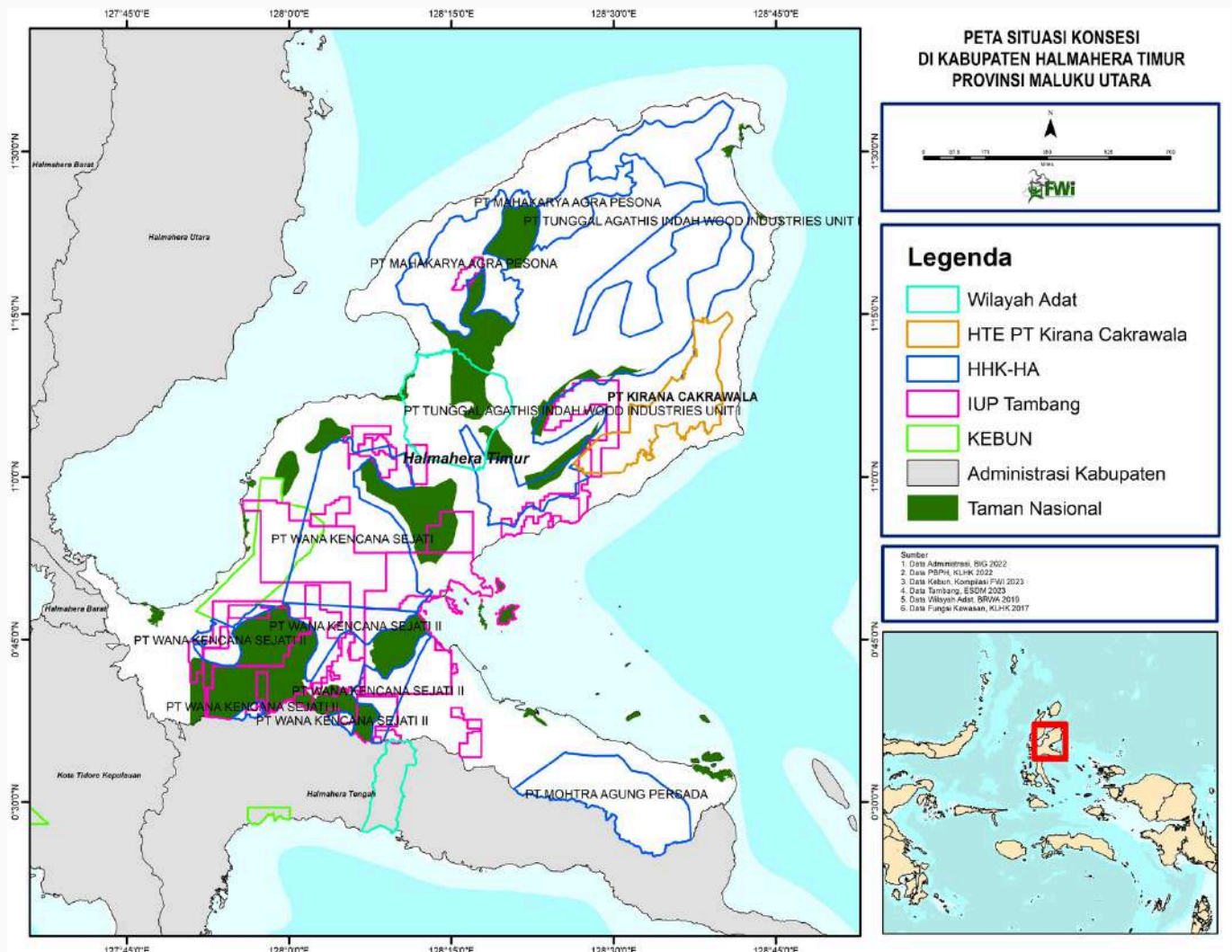
PLTU Co-Firing
PLTU Tidore

Tanaman
-

NO SK Izin : SK.183/Monhut-II/2013



Dalam kunjungan kerja Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ke Kepulauan Tidore, Maluku Utara pada 2019. F.X. Sutijastoto, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM kala itu berencana akan melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di pulau Halmahera. Kapasitas yang ada sebesar 40 Megawatt (MW) pembangkit diesel menggunakan sistem sewa, yang biaya pembangkitan sangat mahal, yaitu mencapai lebih dari 4.000/kwh.



Dia mengatakan kapasitas pembangkit yang ada, dinilai berisiko karena tidak memiliki cadangan ketika ada kerusakan. Sehingga adanya ketersediaan potensi bioenergi, PLTBm yang direncanakan bakal disiapkan di Desa Oba, Kota Tidore Kepulauan, akan mampu untuk menjadi back-up tambahan. Namun, hingga saat ini PLTBm Sofifi belum melakukan aktivitas.

"Sebelumnya konsep HTI dikenal sebagai aktivitas penebangan kayu dari hutan alam yang dilakukan oleh perusahaan untuk kebutuhan bahan baku industri, seperti tripleks dan material untuk bahan furniture dan lainnya," jelas Sutijastoto saat itu.

Di jalan masuk menuju salah satu daerah Transmigrasi, Desa Maratanajaya, Kecamatan Maba Tengah, Halmahera Timur, Maluku Utara, terdapat kantor PT Kirana Cakrawala. Siang itu (6/08/024), Obert Siregar, koordinator lapangan perusahaan, dibudidaya

bersama seorang pekerja sedang sedang memindah tanaman cabutan ke dalam polybag untuk dibudidaya pada lokasi persemaian yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor PT Kirana Cakrawala.

"Untuk saat ini kita masih beres-beres karena sebelumnya kan sempat pasif. Kalau kita disini fokusnya untuk menghasilkan bahan baku. Untuk proses penanaman sampai terbang, HTI sendiri membutuhkan waktu sekitar 8 sampai 10 tahun untuk usia produktif," katanya.

Perusahaan itu sendiri sudah beroperasi sejak tahun 1990-an lewat izin Menteri Kehutanan bernomor 184/Kpts-II/1997. Perusahaan yang melakukan produksi kayu dari hutan alam ini sempat pasif pada 2013. Aktivitas PT Kirana Cakrawala ini lalu berlanjut kembali setelah adanya SK Nomor: 936/MENLHK/SETJEN/HPL.O/10/2021.

"Saat ini ada ada sekitar 16 orang pekerja yang beraktivitas di lapangan, saya sendiri masuk dalam bagian pemadam kebakaran, dua bagian lainnya itu, bagian perencanaan dan persemaian," jelas Nikodemus Banggai, seorang pekerja persemaian yang direkrut dari warga desa setempat. Dia bilang rencana proses produksi akan dimulai pada 2025.

Nikodemus sebut ada beberapa jenis kayu yang ada di persemaian, seperti sengon (*Paraserianthes falcataria*), jabon (*Neolamarckia cadamba*), dan binuang (*Octomeles sumatrana*) sebagai tanaman prioritas. Untuk eksploitasi dari hutan alam, dia sebut ada beberapa jenis kayu yang menjadi target produksi seperti merbau (*Intsia bijuga*), matoa (*Pometia pinnata*), kenari (*Canarium sp.*), bintangur (*Calophyllum sp.*), meranti (*Shorea sp.*), nyatoh (*Palaquium rostratum*), dan kayu hutan lainnya.

"Kalau wood pellet sudah jalan, akan diekspor ke Jepang. PT Kirana Cakrawala yang produksi, dan nanti Sumber Graha Maluku yang menjual. Setiap pengiriman, sekitar 10 ribu ton," jelas Arif Budiantoro (54) salah seorang manajer perusahaan menyebut.



Deforestasi dan Pentingnya Memahami Ekologi Pulau Kecil

Data riset Forest Watch Indonesia, menyebut luas tutupan hutan Maluku Utara adalah 2,361,723.33 hektar dan terus mengalami penyusutan setiap tahunnya. Menurut FWI "pada tahun 2017-2021 sekitar 237,515.42 hektar kawasan hutan mengalami deforestasi". Hal ini juga disebabkan karena sejak 1990-an aktivitas HTI telah banyak beroperasi di wilayah Maluku Utara.

Mencermati tingginya deforestasi yang terjadi, Faisal Ratuela selaku Direktur Walhi Maluku Utara menyebut kebijakan HTE berpotensi akan semakin mendegradasi lingkungan hutan yang ada, khususnya di pulau-pulau kecil. Dia mencontohkan, wilayah-wilayah yang dulunya adalah kawasan hutan alam yang kemudian dijadikan pusat-pusat produksi HTI sekarang menjadi langganan banjir. Seperti yang terjadi di Desa Mafa, Gane Timur, Halmahera Selatan.

"Itu salah satu wilayah bekas HTI, dalam satu tahun ada dua kali banjir karena tidak ada kekuatan daya tampung pada daerah resapan air," sebut Faisal.

Meski ditujukan untuk memenuhi nilai keekonomian penyediaan tenaga listrik, penggunaan kayu untuk biomassa, alih-alih bakal mengurangi emisi gas rumah kaca, malah akan semakin mendorong laju deforestasi yang ada.

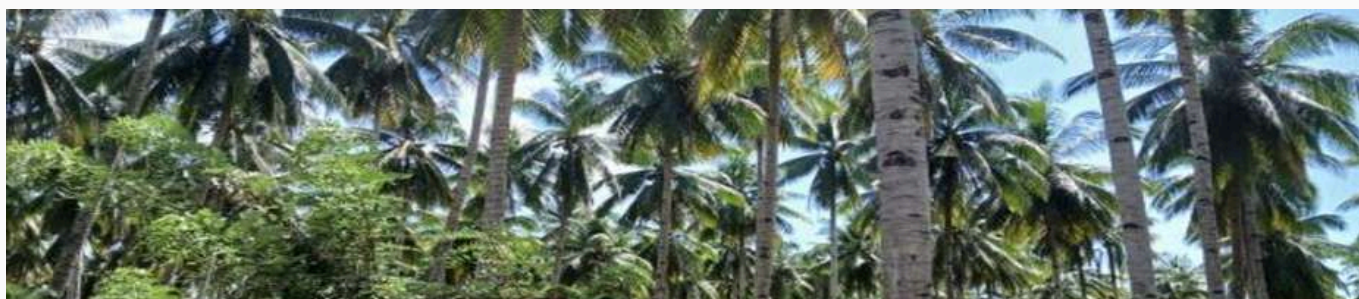
Dari publikasi Forest Watch Indonesia mengungkap solusi transisi energi yang berbasis ekonomi kerakyatan pun tak terjawab. Pada akhirnya industri biomassa kayu bakal didominasi oleh oligarki lama. Contohnya PT Kirana Cakrawala, yang merupakan anak perusahaan Sumber Graha Maluku yang berada di bawah lingkup group Sampoerna Kayu. Menanggapi rencana pengendalian perubahan iklim yang berkaitan dengan transisi energi, Guru Besar bidang Perencanaan dan Sumberdaya Hutan di Universitas Pattimura menyebut , rencana pengembangan industri tanaman energi di wilayah kepulauan harus benar-benar direncanakan matang.

"Bicara tentang Halmahera maka harus diketahui bahwa wilayah itu adalah bagian-bagian kecil yang terbentuk dalam satu luasan yang besar," jelas Agus lewat sambungan telepon (26/08/2024).

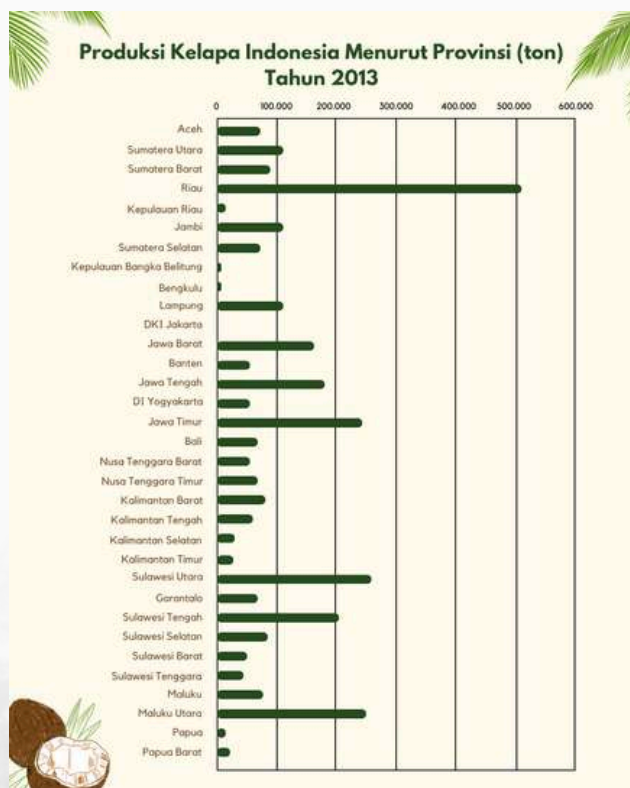
Kepulauan Maluku, jelasnya, memiliki karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sempit dan pendek. Wilayah itu dibatasi oleh punggung bukit yang ketika dicurahi air hujan akan mengalir ke sungai-sungai utama. "DAS seperti di Halmahera secara keseluruhan dalam bentuk geografis seperti itu, memiliki DAS yang sempit dan pendek. Jadi DAS seperti adalah ciri khas daerah pulau-pulau kecil. Selama ini tidak diperhatikan dalam rencana-rencana pembangunan, sekarang mulai dirasakan dampaknya," sambungnya.

Agus menyebut, perubahan hutan alam menjadi HTI monokultur berarti kawasan itu akan dikonversi terlebih dahulu, baru akan dilakukan penanaman kembali. Akibatnya akan terjadi kehilangan keragaman hayati, perubahan pada siklus air pada DAS yang sempit, serta akan terjadi lepasan emisi. "Kalau kita punya wilayah hutan yang punya biodiversitas atau sumber daya hayati yang tinggi kemudian dikonversi menjadi hutan tanaman yang monokultur, punya resiko yang sangat besar dan itu sudah terjadi dimana-mana," terangnya.

"Harusnya ada studi kelayakan yang berfokus untuk menghitung konsekuensi yang bakal terjadi akibat dari pengembangan hutan tanaman itu. Sudah harus dibatasi aktivitas yang melakukan konversi hutan." Agus menyarankan, alih-alih mengeksploitasi hutan alam, maka bauran energi terbarukan di Maluku bisa diperoleh dari pemanfaatan energi terbarukan yang lain, seperti energi matahari, angin, gelombang laut, maupun mikro hidro. "Ini terutama dalam upaya-upaya pengendalian perubahan iklim," pungkasnya.



Kelapa, Potensi Bahan Baku Bioenergi di Maluku Utara



Sumber: Titastory.id

Siang itu di bawah rindangnya pepohonan kelapa yang berjejeran dengan rapi di ujung Desa Minamin, kecamatan Ekor, Halmahera Timur. Artones Ambeua (52), seorang petani kelapa, bersama beberapa anaknya tengah mengumpulkan kelapa kering di kebun kelapa miliknya. Dalam sekali panen, dia bisa mengumpulkan kelapa sebanyak sepuluh ribu buah kelapa kering.

"Kalau torang (kita) disini memang jadikan kelapa sebagai hasil utama, sekali kumpul (panen) bisa sampai puluhan ribu buah. Tergantung berapa luas dusun (kebun) kelapa," ujarnya (5/08/2024).

Artones menyebutkan untuk satu buah kelapa biasanya dijual kepada pengepul di desa Ekorino dengan harga Rp 1.300 per buah. "Ya sudah lumayan karena bisa sampai tiga belas, bahkan bisa empat belas juta. Bisaenuhi kebutuhan anak yang sementara kuliah," katanya sambil tersenyum.

Dalam penelitiannya tentang energi baru terbarukan, Muhammad Syukri Nur menyebut pemikiran tentang forest to bioenergy maupun plantation to bioenergy, harus memperhatikan sisi kearifan, dengan melihat situasi dan kondisi wilayah setempat.

"Perlu ada kearifan; yaitu mampu melihat situasi dan kondisi wilayah setempat. Yang mana, bisa memberikan manfaat lebih banyak terhadap daerah tersebut," ujar Syukri.

M. Syukri menjelaskan, kalau di Maluku Utara tidak sesuai ketika digunakan konsep forest to bioenergy, akan lebih cocok digunakan coconut to bioenergy, dia percaya karena sumber dayanya melimpah.

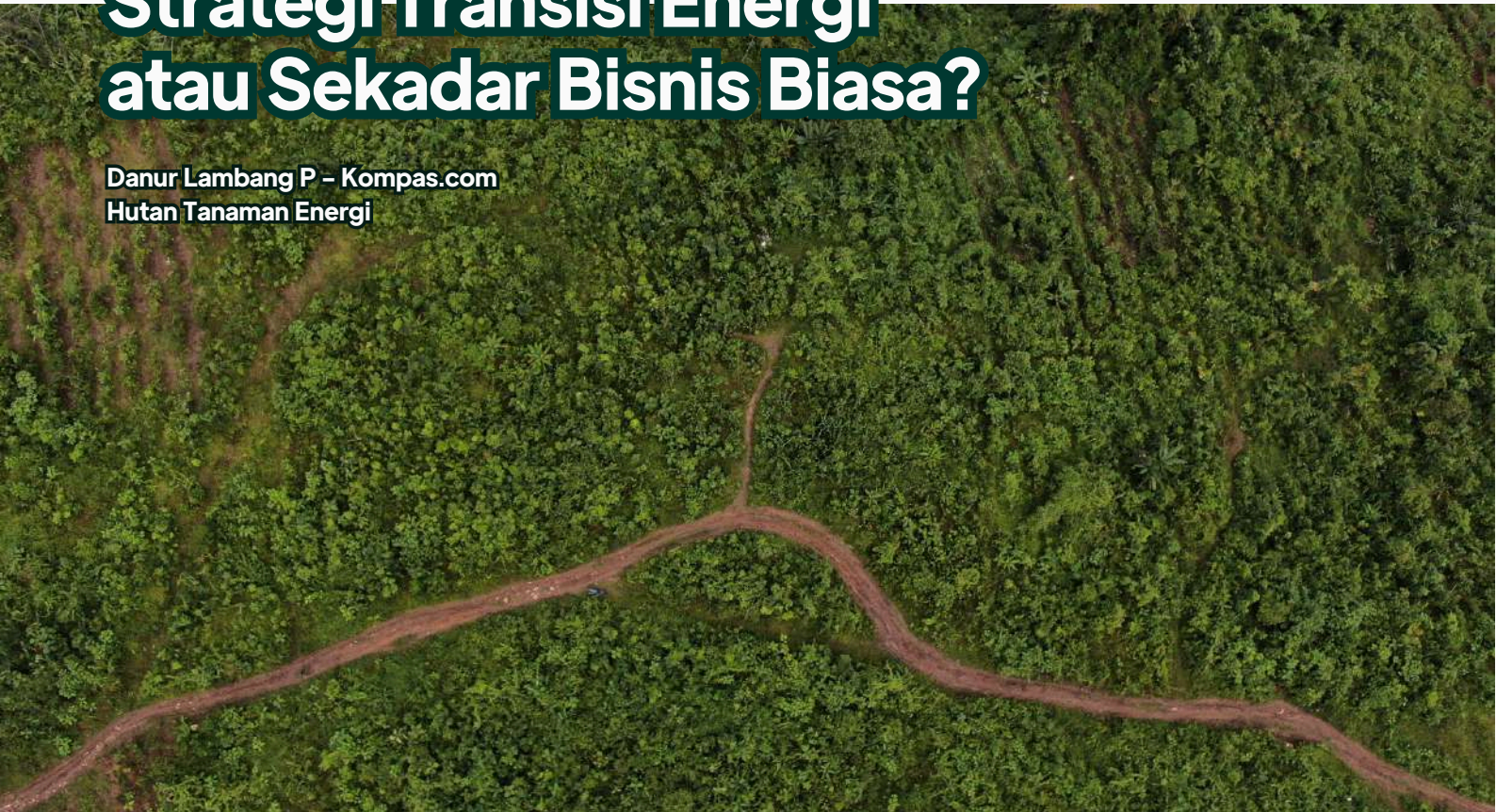
"Dengan begitu akan memberikan nilai ekonomi langsung kepada masyarakat paling bawah dengan jangkauan yang lebih besar. Sementara kalau forest to bioenergy, lebih mengarah kepada pengusaha yang memiliki modal besar."

Kelapa sendiri di Maluku Utara berlimpah. Ada sekitar 200 ribuan hektar luas lahan kelapa. Industri kelapa sendiri mampu menghasilkan bahan pangan, bahan pakan untuk ternak, material serat fiber. Sementara biochar dari tempurung kelapa dapat dijadikan sebagai black pellet maupun arang aktif yang harganya lumayan bagus.

"Kelapa menjadi solusi paling ideal untuk industri green energy di wilayah itu (Maluku Utara). Sehingga mampu menghidupkan industri-industri lain, di sisi lain tidak perlu mengandalkan bahan bakar diesel yang mahal," tutupnya.

Tanaman Energi di Jateng: Strategi Transisi Energi atau Sekadar Bisnis Biasa?

Danur Lambang P - Kompas.com
Hutan Tanaman Energi



KOMPAS.com – Sore yang hangat menyinari ratusan tanaman gamal (*Gliricidia sepium*) di petak hutan yang dikelola Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Purwodadi di Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jumat (2/8/2024).

Tanaman tersebut berjajar rapi dengan jarak 1 x 2 meter satu sama lain di petak 6B yang dipangku oleh Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Karangasem, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Karangasem tersebut.

Selain gamal, KPH Purwodadi juga menanam kaliandra. Pada 2020, mereka mulai menanam dua tanaman tersebut di lahan seluas 897 hektare. Lokasi penanaman tidak dilakukan di satu tempat, melainkan disebar di sejumlah RPH naungan KPH Purwodadi.

Tanaman tersebut sedianya akan menjadi campuran bahan bakar alias co-firing di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Jawa Tengah. Dengan tinggi rata-rata sekitar tujuh sampai delapan meter, dan diameter batang 10 sentimeter, tegakan gamal tersebut sebetulnya sudah siap dipanen dan dijadikan biomassa.

Namun, sejak ditanam pada 2020 hingga sekarang, belum ada satu pun batang pohon gamal atau kaliandra yang dipanen. Untoro Tri Kurniawan, Administratur KPH Purwodadi mengatakan, sebagai pelaksana program penanaman tanaman energi di level tapak, pihaknya hanya menunggu aba-aba dari hierarki yang lebih tinggi.

"[Sampai sekarang] belum ada perintah untuk diarahkan ke mana. Karena kan sifatnya kalau tanaman energi harus segera dikirim ke pabrik [untuk diolah]," jelas Untoro saat ditemui Kompas.com di kantornya.

Dia menuturkan, gamal adalah tanaman yang cepat kering. Begitu dipangkas, tanaman tersebut harus segera diolah dan dikirim ke pabrik untuk diolah, entah itu menjadi wood chip, wood pellet, briket, atau produk lainnya. "Tidak lebih dari dua sampai tiga hari [untuk diolah sejak dipanen]," tuturnya.

Meski masih belum dipanen, Untoro menyatakan KPH Purwodadi tetap mengalokasikan lahan dan menanam gamal dan kaliandra sesuai Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) yang ditetapkan untuk kawasan tersebut.

Dari data yang diperoleh Kompas.com, KPH Purwodadi mengalokasikan total 2.330 hektare lahan hingga 2023 untuk ditanami gamal dan kaliandra. Rencana produksinya ditarget 4.660 ton dari tanaman yang ditanam pada 2020 dan 2021. Gamal dan kaliandra di KPH Purwodadi adalah satu dari berbagai proyek tanaman energi untuk memenuhi program co-firing di berbagai PLTU di Indonesia.

Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menargetkan co-firing biomassa dengan porsi antara 10-20 persen pada 2025 di 52 PLTU. Untuk mencapai target tersebut, biomassa yang diperlukan bisa mencapai 8 sampai 14 juta ton per tahun. Sepanjang 2023, serapan biomassa untuk co-firing di 43 PLTU mencapai 1 juta ton untuk campuran batu bara dengan rasio antara 1-3 persen.

Perjanjian Kerja Sama

Pada 1 Maret 2022, PT PLN (Persero) meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Perhutani untuk menyediakan pasokan biomassa dalam program co-firing PLTU. Dalam kerja sama tersebut, Perhutani diminta menyediakan kebutuhan biomassa dari tanaman energi untuk dua PLTU yakni PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Rembang.

Kasi Komunikasi Perusahaan dan Pelaporan Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Tri Utdiono mengatakan, luas lahan yang dialokasikan untuk menanam tanaman energi berupa gamal dan kaliandra adalah mencapai 18.605,2 hektare yang tersebar di tujuh KPH tersebut.



Dalam situs web Perhutani, Divisi Regional Jawa Tengah mengelola hutan seluas 635.858 hektare. Dengan demikian, alokasi lahan untuk tanaman energi sekitar 2,3 persen dari hutan yang dikelola. Tri menuturkan, sampai saat ini tanaman energi untuk dipasok ke PLTU Rembang masih belum terealisasi hingga kini.

Dia menyampaikan, gamal dan kaliandra yang sudah terlanjur ditanam oleh Perhutani masih belum dapat diserap untuk co-firing PLTU karena belum ada pabrik yang mengolahnya menjadi wood pellet. Rencananya, Perhutani bakal mengolah gamal dan kaliandra yang mereka tanam menjadi wood pellet di dua pabrik yang saat ini sedang dibangun. Satu berlokasi di Semarang, lainnya berlokasi di Rembang.

"Saat ini kami sedang membangun pabriknya dulu. Baru proses kemarin *ground breaking*," ucap Tri. Menurutnya, biomassa dari tanaman energi memiliki prospek bisnis yang bagus di masa depan. Selain bisa diserap untuk co-firing PLTU, Tri meyakini pasar ekspor masih terbuka lebar. "Tidak harus di PLN juga. Bisa ekspor biomassa ke luar negeri, seperti untuk pemanas ruangan," paparnya.

Kompas.com mencoba meminta wawancara dan mengirim permintaan konfirmasi mengenai realisasi serapan biomassa dari Perhutani ke PLN melalui Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN Gregorius Adi. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan



Pilih Limbah

Direktur Biomassa PLN Energi Primer Indonesia (EPI) Antonius Aris Sudjarmiko mengatakan, pihaknya selama ini hanya menyerap limbah sebagai campuran pembakaran PLTU batu bara. Dia menegaskan, tidak sebarang pun biomassa yang dipakai untuk co-firing yang terealisasi diambil dari hutan tanaman industri (HTI).

Aris juga menuturkan, untuk mencukupi target co-firing PLTU yang telah ditetapkan, PT PLN EPI selaku anak perusahaan PT PLN meyakini dapat tercukupi dengan potensi limbah biomassa yang ada. Dia menuturkan, bahan baku biomassa untuk co-firing PLTU didapatkan dari berbagai sumber yaitu limbah pertanian, limbah tanaman pakan ternak, limbah serbuk dari berbagai produk perikanan, limbah HTI, atau limbah replanting atau penanaman kembali tanaman contohnya karet.

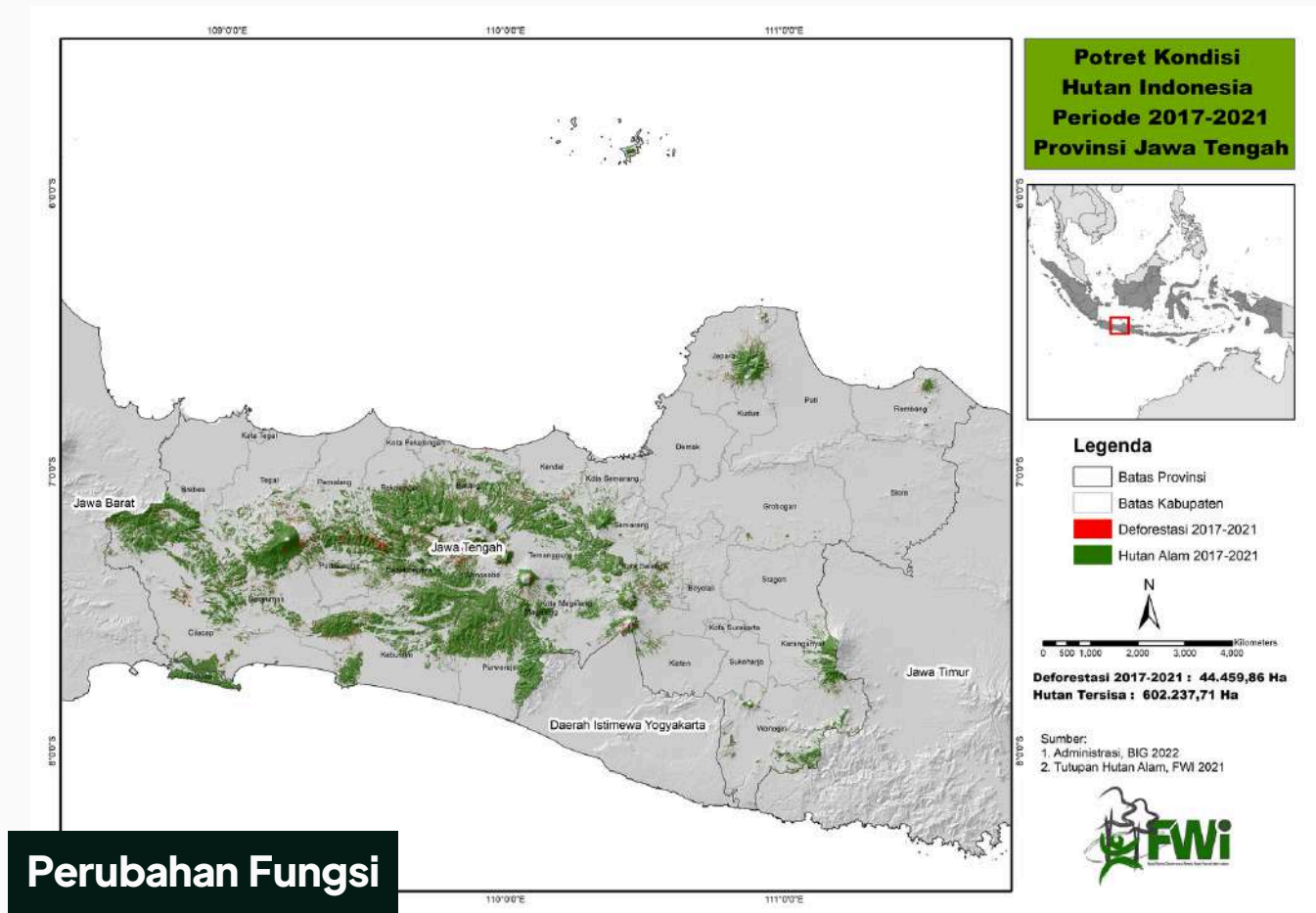
"Jadi kalau selama ini di HTI, seperti pulp and paper, itu kan banyak ranting yang ditinggal begitu saja. Nah limbah-limbah itu bisa dipakai [untuk co-firing PLTU]," ujar Aris saat dihubungi Kompas.com.

PLTN EPI, lanjut Aris, tidak mengolah kayu dari HTI untuk dijadikan bahan co-firing karena akan bertolak belakang dengan semangat menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) di PLTU.

"Kalau HTI itu artinya mulainya dari mengubah dari suatu kontur, suatu lahan menjadi hutan yang dikhususkan untuk tanaman energi. Artinya secara emisi itu sudah terganggu. Sistem biodiversitas dan lain-lain. Karena tujuannya co-firing biomassa itu kan untuk menurunkan emisi," papar Aris.

Dengan memanfaatkan limbah untuk bahan baku co-firing PLTU, Aris berujar langkah tersebut sekaligus mencegah pelepasan emisi metana ke atmosfer.

"Jadi yang selama ini ditimbun seperti sekam padi, kemudian serbuk gergaji yang selama ini dibuang-buang, serbuk aren, limbah jagung yang ditimbun, itu menghasilkan metana," ucap Aris.



Perubahan Fungsi

Direktur Eksekutif Sajogyo Institute Maksu Syam menyampaikan, penanaman tanaman energi yang dilakukan oleh Perhutani mengukuhkan "hutan politik" alias monopoli kawasan hutan di Jawa oleh pemerintah.

Melalui monopoli tersebut, pemerintah dapat melakukan kontrol atas tiga hal di hutan yakni kontrol teritori, kontrol spesies, dan kontrol warga. *"Kalau dipakai untuk kebun energi, berarti tanamannya menjadi monokultur dan sudah tidak bisa lagi disebut sebagai hutan,"* ujar Maksu kepada Kompas.com melalui sambungan telepon.

Di sisi lain, alih fungsi hutan untuk ditanami komoditas keperluan energi dapat mengubah pergeseran sosial di masyarakat sekitar.

Bila dulu masyarakat bergantung kepada hutan di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan ternak, alih fungsi hutan akan membuat masyarakat sekitar mau tak mau menjadi pekerja yang diupah atau buruh.

Manager Kampanye, Advokasi, dan Media Forest Watch Indonesia, Anggi Putra Prayoga menyebutkan, Jawa sebagai wilayah yang padat penduduk sangat rentan bisa terjadi perubahan fungsi hutan.

Menurut data FWI, luas tutupan hutan tersisa di Jawa Tengah hanya sekitar 602.237,71 hektare atau sekitar 18 persen dari total wilayah provinsi tersebut yang mencapai 3,25 juta hektare. Perubahan fungsi dan tutupan hutan lebih lanjut berpotensi besar memicu bencana hidrologis yang dapat memengaruhi masyarakat di sekitarnya.

"Jawa sebagai lanskap yang sudah seharusnya butuh treatment untuk mengembalikan fungsi hutan. Bukan untuk menambah perubahan-perubahan pola tanam atau fungsi dari hutan itu sendiri," ujar Anggi saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Untuk mengembalikan fungsi hutan di Jawa, seharusnya dilakukan rehabilitasi permanen. Hal tersebut perlu dilakukan agar fungsi hutan di Jawa bisa kembali pulih, contohnya untuk konservasi air dan tanah.

Kamuflase Transisi Energi

Di satu sisi, Anggi menyampaikan, proyek penanaman tanaman energi seperti gamal dan kaliandra di Jawa merupakan proyek mangkrak. Tidak adanya asesmen yang jelas dari awal mengenai suplai dan permintaan membuat tanaman energi yang sudah terlanjur ditanam menjadi mubazir. Pemilihan Jawa untuk penanaman tanaman energi disebut Anggi tak lepas dari hasil kebijakan yang bersifat top down.

"Jadi memang ada upaya mainstreaming dari sisi kebijakan, termasuk juga implementasi di lapangan bahwa tanaman biomassa ini harus digalakkan juga oleh BUMN (badan usaha milik negara), tutur Anggi.

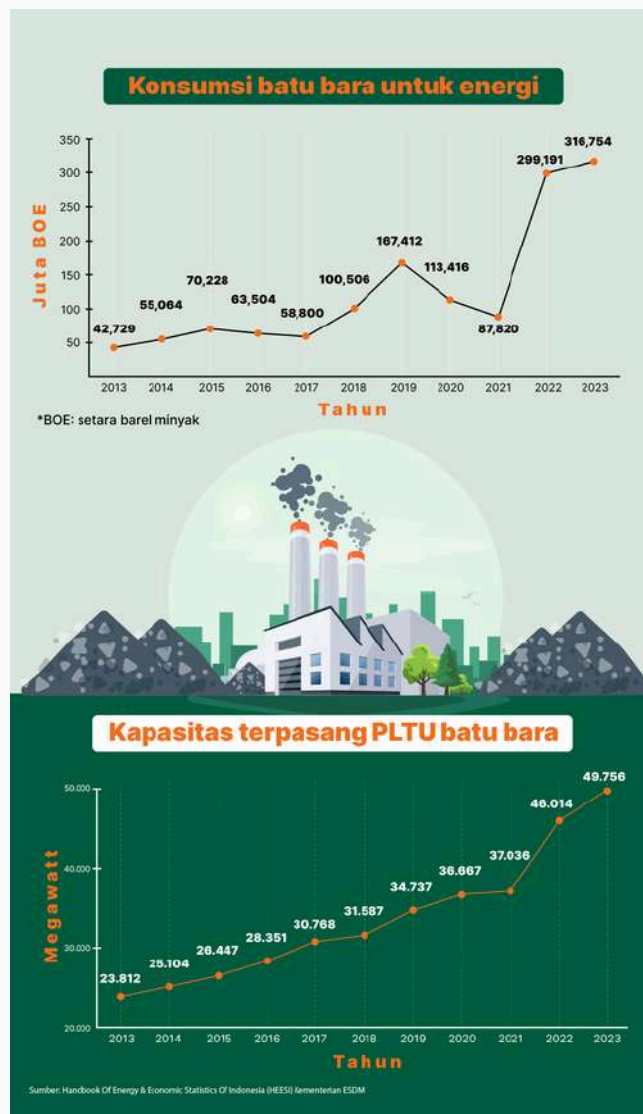
Di sisi lain, meski proyek penanaman tanaman energi di Jawa jalan terus dan tidak terserap, Anggi menyampaikan co-firing di PLTU hanya menjadi kamuflase transisi energi. Sebab, seberapa pun banyaknya campuran biomassa dalam co-firing, PLTU akan tetap menghasilkan emisi dan mengkonsumsi batu bara. Dia menambahkan, co-firing hanya akan melanggengkan penggunaan batu bara untuk kebutuhan PLTU.

Menurut data Handbook Of Energy & Economic Statistics Of Indonesia (HEESI) yang dirilis Kementerian ESDM, jumlah PLTU batu bara selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2013 kapasitas terpasang PLTU batu bara tercatat 23.812 megawatt (MW). Pada 2020, kapasitas terpasang PLTU batu bara naik dua kali lipat menjadi 49.756 MW. Konsumsi batu bara untuk kebutuhan energi juga meningkat selama 10 tahun terakhir. Dari 42 juta setara barel minyak pada 2013 melonjak tujuh kali lipat pada 2023 menjadi 316 juta setara barel minyak. Bila dikonversikan, konsumsi batu bara untuk energi sepanjang tahun lalu sekitar 66 juta ton untuk energi.

Konsumsi batu bara untuk energi tersebut sangat jomplang dibandingkan realisasi penyerapan co-firing biomassa PLTU yang sebesar 1 juta ton pada tahun lalu. Anggi menyampaikan, pada akhirnya co-firing PLTU tidak akan menjawab sekaligus menjadi solusi transisi energi berkeadilan. Kacamata bisnis menjadi satu-satunya faktor dalam kebijakan tanaman energi tersebut, bukan berlandaskan pada keberlanjutan lingkungan.

"Mereka nggak peduli kalau pada akhirnya hutan rusak begitu ya. Tidak menjawab juga misalkan apakah co-firing juga menurunkan emisi di Indonesia karena pengurangan konsumsi batu bara? Kan enggak juga" ujar Anggi.



Gambar: Kompas.com



Banjir Insentif

Manajer Program Biomassa Trend Asia Amalya Oktaviani menilai, program tanaman energi untuk co-firing biomassa, termasuk oleh Perhutani, tak lepas dari berbagai insentif yang akan ditawarkan oleh pemerintah.

Tanaman energi bisa memberikan berbagai keuntungan karena adanya kebijakan yang bakal memberikan insentif baik dari segi pengembangan tanaman energi maupun dari segi penjualannya.

"Kalau insentif terkait kebun energi, itu akan ada RUU EBT (Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan) itu akan memberikan insentif terkait kebun energi," kata Amalya.

Sedangkan insentif penjualan dipayungi oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2023

di mana pembelian biomassa dilaksanakan berdasarkan harga patokan tertinggi atau harga kesepakatan.

Amalya berujar, kebijakan biomassa untuk co-firing tersebut justru malah memberikan insentif atau kepastian bisnis kebun energi yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

Padahal, ujar Amalya, alih fungsi lahan menjadi kebun energi mempunyai berbagai dampak seperti perubahan fungsi lahan, persaingan pangan dan energi, hingga potensi konflik dengan warga.

"Jadi mereka hitungannya hanya ekonomi saja. Belum sampai ke tahapan bahwa itu (co-firing dengan biomassa) menghasilkan emisi, di pembakaran," pungkasnya.

Praktik Tanaman Energi di Jambi: Ugal-Ugalan Dahulu, Gagal Kemudian

Gresi Plasmanto – Liputan 6
Hutan Tanaman Energi



Pembukaan hutan alam dengan dalih untuk hutan tanaman energi (HTE) biomassa dinilai akan menambah serenteng masalah baru, salah satunya deforestasi, pengusuran hak masyarakat, hingga bencana alam. Lantas apakah transisi energi yang mengorbankan hutan alam bisa dikatakan sebagai energi bersih?

Petak tanaman sengon (*Paraserianthes falcataria*) dengan usia tanam sekitar empat tahun itu berjejal di sisi selatan bangunan mes permanen yang sudah porak poranda. Ada dua petak tanam sengon di wilayah itu. Petak tanam kedua berada di atas bukit seberang bangunan mes.

Dua petak tanam sengon itu berada di wilayah administrasi Desa Nalo Gedang, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Jambi. Di wilayah lain, bukit-bukit gundul berdiri. Sebagian lagi, bekas bukaan hutan alam itu dibiarkan dan kini menyisakan semak belukar.

“Kalau kita lihat di lokasi ini luas tanaman sengon tidak sebanding dengan luas hutan yang telah dibabat PT HAN,” kata Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan Forest Watch Indonesia (FWI) Anggi Putra Prayoga di lokasi konsesi Hijau Artha Nusa pertengahan Mei 2024.

PT HAN yang dimaksud Anggi adalah Hijau Artha Nusa—pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan nomor SK.183/Menhut-II/2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, perseroan mendapat izin konsesi seluas 32.620 hektar, separuh luas Jakarta.

Sedari awal kerja perusahaan tidak sesuai dengan perencanaan yang matang. Rencana awal perusahaan adalah mengembangkan perkebunan HTI skala luas untuk menghasilkan serpihan kayu atau wood pallet untuk diekspor.



HAN telah memperoleh izin membangun Hutan Tanaman Energi (HTE) di wilayah hulu Jambi. Lokasinya sendiri tumpang tindih dengan ruang hidup dan ulayat Orang Rimba dan masyarakat lokal yang lebih dulu mendiami kawasan konsesi perusahaan. Dalam dokumen akta perusahaan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang diakses 5 Agustus 2024, PT Hijau Artha Nusa ini dipimpin warga negara Korea Selatan, Han Man Seong. Dia di perusahaan ini memiliki 30.475 lembar saham atau senilai Rp3,45 miliar.

Pemilik saham lain adalah Mohamad Sukri, yang menjabat sebagai Komisaris. Sukri memiliki 5.025 lembar saham, seharga Rp502,5 juta. Sementara pemegang saham mayoritas PT HAN adalah Woorim Energy Co., Ltd. yang berkedudukan di Bangi-dong, Songpa, Seoul, Korea Selatan. Perusahaan yang bergerak di bisnis pembangkit listrik tenaga surya dan energi terbarukan itu menguasai 142.000 lembar saham setara Rp14,2 miliar.

Hijau Artha Nusa telah menebang hutan alam cukup luas yang katanya untuk mengembangkan perkebunan tanaman energi berupa sengon. Komoditi hutan energi jenis sengon tersebut rencananya akan digunakan untuk biomassa dalam bentuk wood pellet--pengganti bahan bakar fosil batu bara.

Dalam dokumen rencana penanaman tahun 2015-2024 yang dirilis Direktorat Usaha Hutan Produksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PT HAN dengan kelas perusahaan kayu serat itu berencana menanam komoditi sengon seluas 18.087 hektar dengan rincian alokasi untuk tanaman energi seluas 10.001 hektare. Alih-alih merealisasikan kebun energinya, perusahaan asal negeri K-pop itu malah serampangan memabat hutan dan kemudian meninggalkannya begitu saja.

Hasil analisis Forest Watch Indonesia (FWI)— lembaga nirlaba yang fokus pada isu pemantauan kehutanan itu, perusahaan telah mendeforestasikan hutan alam seluas 4.834,52 hektar pada rentang 2017-2021 dan 2022-2023 seluas 225 hektar.

"Analisis kami berbasis peta dan melihat langsung di lapangan, realisasi tanaman sengonnya hanya 64,5 hektar saja, sementara hutan yang sudah ditebang sudah mencapai ribuan hektare," kata Anggi.

Dalam praktiknya kata Anggi, PT HAN memulai pembangunan HTE dengan kerusakan hutan dan menggusur masyarakat. Disisi lain perusahaan tidak punya komitmen kuat untuk membangun HTE.

"PT HAN ini hanya mengincar kayu-kayu alam yang bagus-bagus saja di sana. Yang terjadi kemudian perusahaan malah mengekstraksi hutan, perusahaan dapat kayu dan terus dijual," ujar Anggi.

Sementara itu, berdasarkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) jumlah produksi kayu bulat PT HAN selama 2021-2023 sebanyak 7.014 meter kubik. Sementara data Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) menunjukkan mulai 2021 sampai 2023, perusahaan telah mengangkut kayu bulat 14.851 meter kubik.

Kayu-kayu alam itu tidak diolah menjadi wood pellet maupun veneer. Melainkan kayu-kayu alam itu dijual ke sawmill, lokasinya tidak jauh dari area kerja perusahaan yang berada di Merangin dan Bungo. Hasil penelusuran Lembaga Tiga Beradik (LTB)— lembaga nirlaba yang fokus pada isu konservasi dan pemberdayaan di Merangin disebutkan, produksi kayu alam PT HAN langsung dijual dalam bentuk kayu gelondongan.

Ada tiga lokasi penjualan kayu alam, meliputi: Tempat Penimbunan Kayu (TPK) di kilometer 9 Merangin, TPK Mentang Bungo, dan PT Lestari Utama Karya Pamenang, Bangko Merangin.

Bekas Manajer Umum PT HAN, Muchlisin Madras sebelumnya mengklaim, pembukaan hutan tanaman energi itu bertujuan untuk menghasilkan kayu pertukangan dan kayu sengon sebagai bahan baku biomassa—energi baru terbarukan dalam bentuk wood chip dan wood pellet.

Di samping menguasai izin konsesi HTI, perusahaan, juga telah mendapatkan perizinan pendirian kilang penggergajian (sawmill), pabrik triplek (plywood), dan pabrik pengolahan serbuk kayu (wood pellet). Meski telah mengantongi ketiga perizinan pengolahan kayu itu, nyatanya perusahaan sekarang baru mampu mendirikan sawmill dan menjual kayu gelondongan yang ditebang dari alam. Kini pun lokasi sawmill di Desa Pulau Aro, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Jambi, hanya tinggal rongsokan.



Berlindung di Balik Dalih Tanaman Energi

Anggi mengatakan, PT HAN yang tercatat perusahaan dengan penanaman modal asing itu hanya berlindung dibalik investasi hijau untuk tanaman energi. Menurut Anggi kebijakan transisi energi dalam kebijakan hutan tanaman energi tidak ada sama sekali untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, sementara yang terjadi kerusakan hutan dan lingkungan.

“Tanaman energi komoditi sengon yang katanya untuk transisi energi ini hanya kedok saja. Yang terjadi hanya deforestasi dan kerusakan lingkungan. Setelah kayu habis, perusahaan hilang begitu saja,” kata Anggi.

Setelah pemerintah membuat Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, terjadi perubahan atas izin perusahaan. PT HAN pun kini telah mengantongi izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPHH). Sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 230/Menlhk/Setjen//HPL.3/5/2021 tanggal 18 Mei 2021.

Lewat izin sapu jagat perizinan dan kebijakan multiusaha kehutanan ini, perusahaan akan memproduksi veneer, kayu gergajian, dan wood

pellet dengan kapasitas mencapai 6.000 M3 yang berlokasi di Desa Pulau Aro Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Hasil Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) yang dilakukan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV Jambi menyimpulkan perusahaan asal Korea Selatan itu telah berhenti beroperasi sejak April 2023. Setelah kayu alam habis, perusahaan mandek operasi.

PT HAN juga belum menyusun dokumen RKUPH periode tahun 2024- 2034 dan RKTPH periode tahun 2024. Sementara itu, pada periode RKTPH tahun 2021-2023, tidak ada rencana dan realisasi kegiatan pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan. Tidak ada laporan kegiatan bulanan, progres tata batas, kemitraan, sertifikasi, keuangan, penanaman, produksi, dan tenaga kerja.

Kepala BPHL IV Jambi Wahyu Nurhidayat mengatakan, timnya telah memantau aktivitas PT HAN. Wahyu menyebut, aktivitas perusahaan, termasuk rencana penanaman sengon tidak dijalankan perusahaan. Pihaknya juga telah mengevaluasi perusahaan. Hasil evaluasinya itu sudah diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK

Menurut Wahyu tidak masuk akal, perusahaan mengembangkan tanaman sengon untuk kebutuhan memasok energi. Menurut dia, sengon memiliki kalori yang rendah sehingga tidak masuk akal, sebab masih ada jenis tanaman yang memiliki kalori yang tinggi.

"PT HAN relatif tidak jalan. Perusahaan tidak jelas, dan juga manajemen visi-misi kedepannya kita belum tangkap," kata Wahyu.



Aktor Di Balik Konsesi Tanaman Energi

Pemberian izin kepada perusahaan asal Korea Selatan ini menjadi kisah tentang eksploitasi hutan di Kabupaten Merangin, Jambi. Jauh sebelumnya pada tahun 2012, ada 18 desa, yang wilayah administrasinya bakal masuk area konsesi perusahaan, meminta pemerintah untuk menghentikan perizinan yang diajukan PT Hijau Artha Nusa.

Selain bisa memperpanjang konflik lahan, warga khawatir pemberian izin terhadap perusahaan bisa memunculkan bencana ekologis. Ini lantaran konsesi PT HAN berdekatan dengan Sungai Mangkilam yang lebat dengan vegetasi kayu hutan. Warga takut eksploitasi kawasan akan merusak ekosistem dan memicu bencana ekologis ke depannya.

Kala itu Desa Nalo Gedang, termasuk 17 desa lainnya di Merangin dan Sarolangun, menolak kehadiran perusahaan. Aksi kampanye dan penolakan digaungkan oleh koalisi Poros Masyarakat Kehutanan Merangin (PMKM).

Menurut koalisi masyarakat sipil saat itu, rencana pengembangan industri biomassa pallet kayu tersebut memasukan kawasan penyangga (buffer

zone) Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagai lahan cadangan bahan baku, yang selama itu merupakan lahan produktif yang dikelola masyarakat desa.

Rentang setahun di sela-sela penolakan itu, pemerintah tak bergeming. Syahdan, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 183/Menhut-II/2013 yang diteken Zulkifli Hasan pada 25 Maret 2013, PT HAN mendapatkan izin konsesi seluas 32.620 hektar di Kabupaten Merangin dan Sarolangun. Izin perusahaan berlaku sampai dengan tahun 2073.

Dari total luas konsesi itu terbagi menjadi 3 blok. Blok I terletak di Kecamatan Tabir, Tabir Ulu, dan Tabir Barat dengan luas lahan 11.494 hektar. Sedangkan blok II seluas 10.239 hektar berada di Nalo Tantan, dan Renah Pemberap. Setidaknya ada 15 desa yang masuk dalam konsesi perusahaan di wilayah Kabupaten Merangin, salah satunya Desa Nalo Gedang.

Sementara blok III seluas 10.947 hektar berada di wilayah Desa Ranggo, Panca Karya dan Demang, Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun.

Di tengah penolakan warga desa, jajaran top perusahaan turun gunung menggelar sosialisasi kepada warga dan tokoh masyarakat di sejumlah desa yang beririsan dengan wilayah konsesi perusahaan.

Komisaris PT HAN Mohamad Sukri dan Direktur Utama Mr. Han Man Seong datang membawa segudang janji manis, salah satunya perbaikan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Selain itu, untuk meminimalisir gejolak penolakan dan memuluskan kerja perusahaan itu, mereka merekrut kalangan tokoh pemuda dan aktivis untuk menduduki jabatan manajer.

Bahkan Bupati Merangin kala itu, Al Haris, pada Juni 2015 turut menghadiri ekspose rencana pembangunan HTE milik PT HAN. Ketika itu, beberapa orang tim Al Haris menempati posisi penting di manajemen perusahaan.



Meski begitu, diawal sebagian warga ada dan kepala desa menyambut gembira kedatangan PT HAN. Perusahaan ini meredakan kekhawatiran warga soal dampak buruk proyek kebun energinya dengan membagikan uang tunai dalam bentuk fee kayu.

Masih jelas dalam benak ingatan Zuhadi, Mantan Kepala Desa Nalo Gedang. Kala itu, Manajer Produksi PT HAN Richo Widoyo menjanjikan kepada warga pemilik pancong alas dan pemerintah desa bakal dapat bagian dari setiap kubik kayu yang ditebang dari kawasan hutan senilai Rp50.000 untuk setiap meter kubik kayu yang keluar.

Menurut Zuhadi dan sejumlah warga di Nalo Gedang, Richo Widoyo merupakan orang kepercayaan Mr Han Man Seong. Kompensasi kayu itu juga diberikan kepada masyarakat adat Orang Rimba yang lebih dulu mendiami kawasan itu. Pendekatan perusahaan dengan pola kompensasi kayu itu, bertujuan untuk membujuk masyarakat desa dan masyarakat adat supaya mau bekerjasama dengan perusahaan.

"Dulu dibuatkan skema fee kayu, rinciannya per kubik itu untuk masyarakat yang punya lahan dapat Rp25.000, dan desa Rp50.000," kata Zuhadi.

"Kayu-kayu alam di desa kami ditebang dan dijual, kalau untuk energi belum pernah dengar," sambung Zuhadi.

Selain itu, perusahaan juga menjanjikan bagian 10 persen dari hasil bersih panen tanaman sengon kepada masyarakat dengan terikat pola kemitraan. Namun banyak warga yang kecewa, sebab sampai sekarang, sengon yang ditanam perusahaan belum pernah dipanen dan perusahaan telah berhenti beroperasi.

Tak hanya janji manis kemitraan, warga yang mempunyai pancong alas juga akan diberikan pekerjaan di perusahaan. Namun alih-alih pekerjaan, warga justru diberi ketidakpastian dan kini janji hanya tinggal janji.

"Saya sempat kerja di perusahaan hanya sebulan, namun dikeluarkan tanpa alasan jelas," kata Kusmadi, yang lahannya ditanami sengon oleh perusahaan. "Sekarang ini, tanaman sengon yang sedikit itu kapan dipanen, di situ ada hak saya dan warga lainnya," sambung Kusmadi.

Di awal-awal itu Kusmadi menganggap perusahaan itu bagus. Dia berharap kehadiran perusahaan bisa mengubah ekonominya, karena perusahaan melibatkan masyarakat desa dalam pekerjaan, dan juga masyarakat diajak bermitra. Namun, alih-alih menguntungkan, kini yang terjadi masyarakat merugi oleh kehadiran PT Hijau Artha Nusa. Kini Kusmadi mengaku tak punya pilihan lain. Dia masih ingin kembali menggarap lahan yang dulunya sempat diserahkan kepada perusahaan.

Sementara itu, Richo Widoyo membantah jika ia disebut sebagai tangan kanannya Mr Han Man Seong--petinggi perusahaan yang melakukan pendekatan dengan tokoh dan masyarakat desa, termasuk memberikan kompensasi hasil kayu dan imbal hasil tanaman sengon.

"Itu kan anggapan masyarakat," kata Richo dihubungi lewat sambungan telepon.

Mantan Manajer Lapangan PT Hijau Artha Nusa Syaiful Mursal mengakui bahwa kini perusahaan sudah tidak beroperasi. Ia tidak mengetahui pasti penyebab perusahaan ini mandek beroperasi.

Meski begitu, diawal sebagian warga ada dan kepala desa menyambut gembira kedatangan PT HAN. Perusahaan ini meredakan kekhawatiran warga soal dampak buruk proyek kebun energinya dengan membagikan uang tunai dalam bentuk fee kayu.

Masih jelas dalam benak ingatan Zuhadi, Mantan Kepala Desa Nalo Gedang. Kala itu, Manajer Produksi PT HAN Richo Widoyo menjanjikan kepada warga pemilik pancong alas dan pemerintah desa bakal dapat bagian dari setiap kubik kayu yang ditebang dari kawasan hutan senilai Rp50.000 untuk setiap meter kubik kayu yang keluar.

Menurut Zuhadi dan sejumlah warga di Nalo Gedang, Richo Widoyo merupakan orang kepercayaan Mr Han Man Seong. Kompensasi kayu itu juga diberikan kepada masyarakat adat Orang Rimba yang lebih dulu mendiami kawasan itu. Pendekatan perusahaan dengan pola kompensasi kayu itu, bertujuan untuk membujuk masyarakat desa dan masyarakat adat supaya mau bekerjasama dengan perusahaan.

"Dulu dibuatkan skema fee kayu, rinciannya per kubik itu untuk masyarakat yang punya lahan dapat Rp25.000, dan desa Rp50.000," kata Zuhadi. "Kayu-kayu alam di desa kami ditebang dan dijual, kalau untuk energi belum pernah dengar," sambung Zuhadi.

Selain itu, perusahaan juga menjanjikan bagian 10 persen dari hasil bersih panen tanaman sengon kepada masyarakat dengan terikat pola kemitraan. Namun banyak warga yang kecewa, sebab sampai sekarang, sengon yang ditanam perusahaan belum pernah dipanen dan perusahaan telah berhenti beroperasi.



Masih jelas dalam benak ingatan Nawi, mantan pekerja PT HAN. Nawi yang ketika itu bekerja sebagai tukang ukur diameter kayu menyaksikan kayu-kayu alam digaruk buldozer. Beragam jenis kayu kualitas bagus mulai dari: keruing, benuang, meranti habis digaruk.

Kayu-kayu alam yang ditebang itu mencakup rentang diameter 70-160 centimeter. Setelah kayu ditebang menggunakan sinsaw, kemudian kayu ditarik keluar dan diangkut ke tempat penumpukan kayu (TPK) sebelum dijual.

"Tebang habis tak tersisa pokoknya," kata Nawi.

Nawi yang merupakan warga Nalo Gedang itu bekerja hingga larut malam. Di suatu malam sekitar pukul 22.00 WIB yang gerimis itu, Nawi menyaksikan seekor harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) melintas di hadapannya. Jantungnya berdegup, hanya berjarak tiga meter dari dia berdiri, datuk belang itu melintas di depannya.

"Sewaktu hutan masih ada memang jalurnya harimau," kata Nawi.

Hutan yang dibabat di wilayah konsesi PT HAN itu merupakan wilayah penting dan menjadi habitat satwa yang dilindungi.



Syahdan, tak berselang lama pada April 2022, seekor harimau masuk ke Desa Nalo Gedang. Raja rimba itu telah memangsa belasan ternak warga desa itu.

Banyaknya aktivitas manusia dan alih fungsi hutan ditengarai menjadi penyebab harimau mendekati pemukiman warga.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) pun langsung turun menangani konflik antara manusia dan satwa itu. Akhirnya tim penanganan konflik berhasil menangkap harimau itu dengan perangkap. Tempat harimau ditemukan itu hanya berjarak 20 kilometer dari batas paling luar TNKS atau hanya terpisah dengan kawasan HTE di Desa Nalo Gedang.

Selain meningkatkan interaksi manusia dan satwa dilindungi, eksploitasi hutan yang dilakukan PT HAN mendatangkan bencana banjir. Pada November 2020, otoritas penanggulangan bencana Kabupaten Merangin melaporkan, ratusan rumah di 4 kecamatan: Tabir, Tabir Ilir, Tabir Timur, dan Margo Tabir terendam banjir.

Banjir yang diakibatkan meluapnya sungai Batang Tapir mengindikasikan disebabkan oleh eksploitasi hutan yang dilakukan perusahaan. Mengingat konsesi PT HAN di blok I dan II berada di antaranya sungai Batang Tabir.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi Abdullah mengatakan, alih fungsi hutan untuk kepentingan tanaman energi mendatangkan masalah serius. Eksploitasi hutan, selain dapat memunculkan konflik lahan, dan konflik satwa juga mendatangkan bencana ekologis. Banjir diperparah oleh kondisi di bagian hulu, yang mana hutan yang menjadi daerah tangkapan air telah dibabat habis.

“Banjir datang lebih cepat, karena daerah tangkapan air sudah hancur,” kata Abdullah.

Selain merusak habitat satwa dan mendatangkan bencana, proyek tanaman energi ini telah merongrong tanah ulayat Orang Rimba-- masyarakat adat yang hidup seminomaden di Kabupaten Merangin yang menggantungkan hidup dengan berburu dan meramu. Penggundulan hutan telah menyulitkan mereka berburu.

Keluarga-keluarga Orang Rimba yang dulunya tinggal di konsesi PT HAN, kini terpaksa harus keluar hutan untuk mencari sumber penghidupan. Lantas, apakah tanaman energi yang mengorbankan hutan alam, masyarakat adat, dan warga desa, bisa menjadi solusi untuk transisi energi?

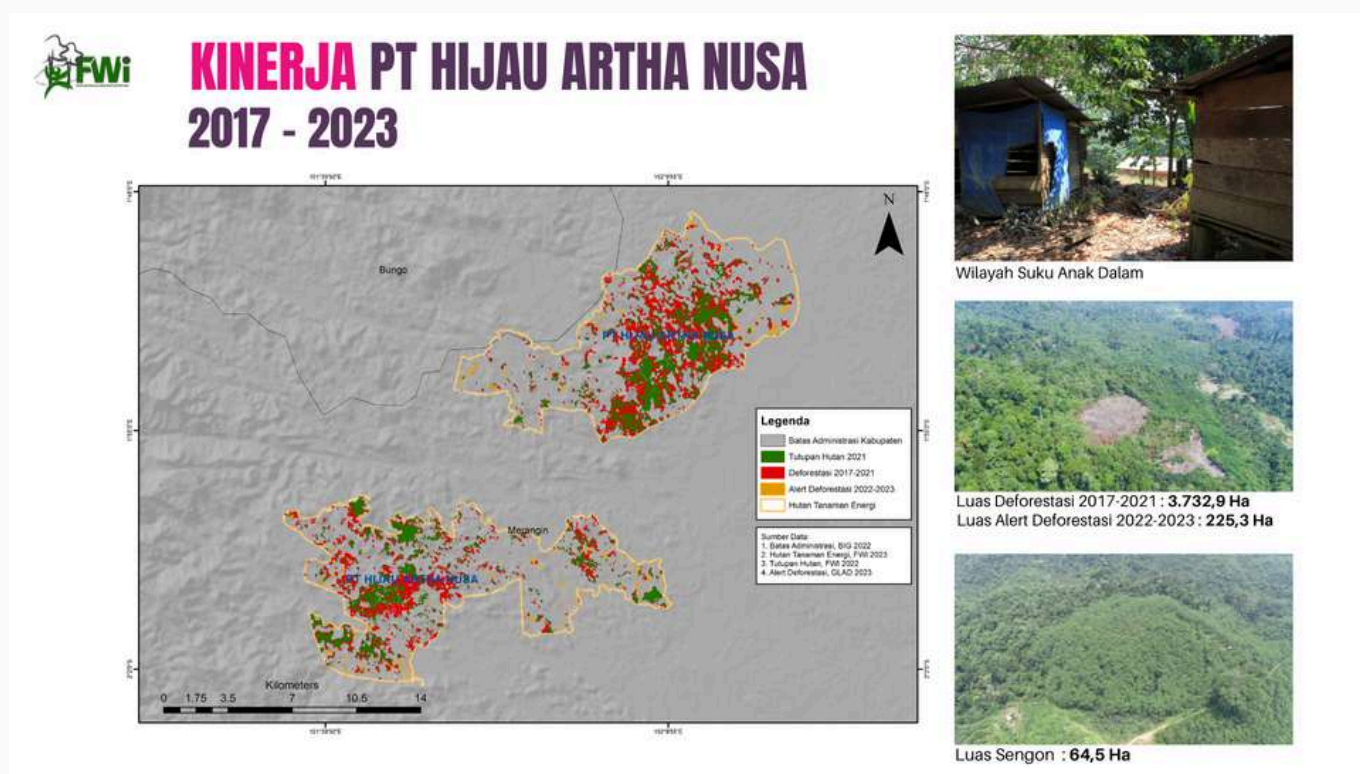
Solusi Semu dan Hutang Energi



Pemerintah Indonesia masih berambisi untuk mencapai target bauran energi terbarukan hingga 23 persen pada tahun 2025 dan 31 persen pada tahun 2050. Target tersebut didesain dapat dicapai dari sektor hutan dan penggunaan lahan dan energi sebanyak 97 persen dari total komitmen nasional. Untuk menggenjot capaian bauran energi nasional tersebut, biomassa pun ditempatkan sebagai prioritas kedua setelah energi surya. Biomassa diklaim sebagai sumber energi terbarukan karena dianggap netral karbon. Saat ini, pemerintah mendorong produksi biomassa dari Hutan Tanaman Energi (HTE) untuk menjadi sumber energi terbarukan pengganti energi fosil.

Sesuai peta jalan transisi energi yang dikeluarkan Kementerian ESDM, saat ini terdapat 52 lokasi PLTU dengan total kapasitas 18.664 megawatt akan jadi target co-firing hingga tahun 2025. Adapun potensi bahan baku biomassa untuk co-firing PLTU ini dari tanaman energi, limbah pertanian atau perkebunan, limbah industri kayu, dan sampah rumah tangga.

Program biomassa untuk co-firing PLTU akan meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) sebanyak 1,8 persen dengan proyeksi kebutuhan biomassa sekitar 10,2 juta ton per tahun pada 2025. Kebutuhan biomassa itu salah satunya dipasok dari pengembangan HTE.



Namun upaya transisi energi menyisakan persoalan penggundulan hutan. Forest Watch Indonesia (FWI) dalam sebuah kajiannya menyebutkan, biomassa terutama yang berasal dari kernel sawit dan kayu akan mendorong terjadinya deforestasi melalui pembukaan hutan dan lahan baru di berbagai daerah di Indonesia.

Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI Anggi Putra Prayoga mengatakan, kebijakan HTE ini keliru. Menurut Anggi, biomassa wood pellet tak bisa diklaim sebagai sumber energi terbarukan, karena berasal dari deforestasi hutan alam.

“Pembangunan HTE untuk menghasilkan biomassa kayu (bioenergi) yang berasal dari deforestasi tidak bisa diklaim sebagai energi bersih,” kata Anggi.

Anggi bilang proyek biomassa menjadi driver baru deforestasi di Indonesia. Pemerintah telah menargetkan pembangunan HTE melalui

perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 1,29 juta hektare untuk memenuhi kebutuhan biomassa.

Dalam kajiannya, FWI mencatat, praktik pembangunan HTE sejauh ini sudah mengakibatkan kehilangan hutan alam sebanyak 55 ribu hektare dan seluas 420 ribu hektar hutan alam tersisa terancam dirusak untuk kepentingan pembangunan HTE.

Anggi memaparkan, dari 31 perusahaan HTI yang membangun HTE, tidak semuanya memiliki kejelasan status perizinan. Dalam implementasinya ada 13 perusahaan yang belum bisa dipastikan apakah perusahaan tersebut akan menyuplai kebutuhan biomassa untuk dalam negeri dalam rangka pemenuhan target pembangunan hutan tanaman agar target net sink 2030 tercapai.

Proyek pembangunan HTE untuk biomassa co-firing PLTU diproyeksikan akan merusak hutan alam



4,65 juta hektar dengan diberlakukannya kebijakan multiusaha tanaman energi. HTE biomassa untuk co-firing PLTU tidak bisa dikatakan sebagai penyediaan energi bersih dan terbarukan, karena praktiknya mengorbankan hutan alam.

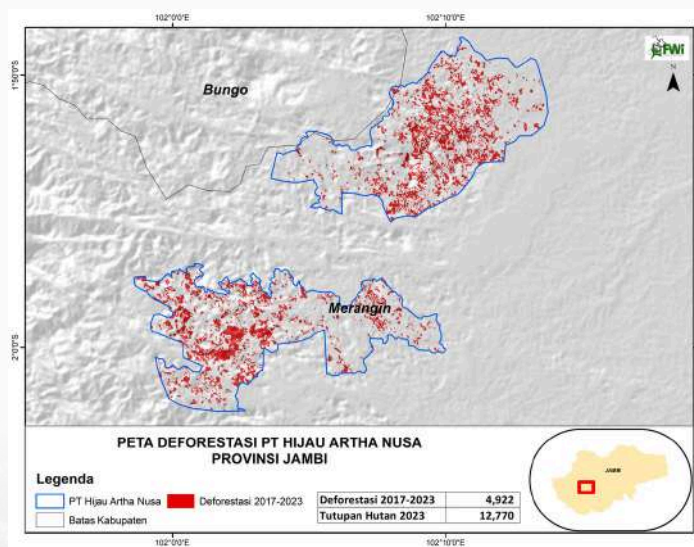
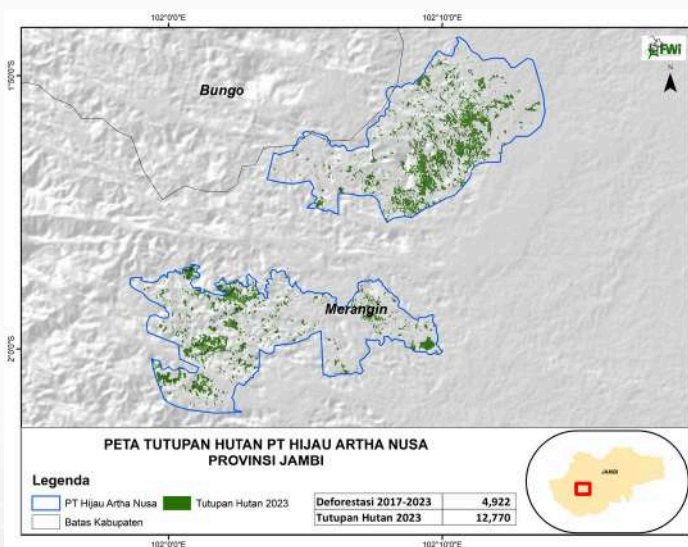
“Biomassa itu hanya solusi palsu, tidak untuk transisi energi. Hanya kepentingan bisnis as usual saja,” ujar Anggi.

Sejatinya pemanfaatan biomassa dengan cara dibakar yang dipenuhi dari pembangunan HTE hanya akan menghasilkan hutang emisi. Pasalnya, biomassa yang diproduksi berasal dari kerusakan hutan alam. Dimana hutan alam adalah salah satu ekosistem yang paling banyak menyimpan karbon dibanding hutan tanaman.

Satu hektar hutan alam tropis dapat menyimpan karbon sebanyak 254 ton karbon-C. Sedangkan hutan tanaman dapat menyimpan karbon hanya 107,86 ton karbon per hektar.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi mengakui jika pembangunan hutan tanaman energi (HTE) dapat menyebabkan pelepasan emisi karbon yang berdampak pada meningkatnya efek gas rumah kaca.

“Semua proses pasti ada pembukaan lahan. Jadi yang dilihat bukan sesaatnya, tapi manfaat lebih lanjutnya, tahap demi tahap,” katanya, usai menghadiri acara peresmian tower GRK di Jambi, Kamis 18 Juli 2024.



Peta Tutupan Hutan dan deforestasi PT Hijau Artha Nusa Provinsi Jambi

Gagalnya Proyek HTE di Aceh

Fitri Juliana – Digdata.id
Hutan Tanaman Energi



Pagi itu, suara senso (gergaji mesin) mengaung-ngaung di lembah gunung Seulawah – yang beririsan dengan lahan milik PT Aceh Nusa Indrapuri (PT ANI). Serbuk dan bekas potongan kayu berserakan sepanjang jalan menuju lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dijadikan Hutan Tanaman Energi (HTE).

Suara gergaji mesin meraung tidak jauh dari jalan utama menuju konsesi PT Aceh Nusa Indrapuri (PT ANI) sekitar 10.00 pagi (03/08/2024). Di lokasi perusahaan hutan tanaman industri (HTI) itu serbuk dan bekas dan potongan kayu berserakan. Tak jauh, seorang lelaki paruh baya sedang membereskan mesin belah kayu miliknya.

“Meah pak, kameuganggu dron, nyoe lampoh dron nyeh? peu kaye nyan pak?” (“Maaf pak, sudah mengganggu anda, ini kebun bapak? Itu jenis kayu apa?”). Demikian tanya dari seorang rombongan kami.

Dengan sedikit salah tingkah, dia lalu menjawab bahwa lahan itu bukan miliknya. Kayu yang

dibelahnya pun adalah jenis pohon perlak, yang kayunya punya harga ekonomis. Lelaki itu pun bergegas keluar dari lokasi itu.

Tak jauh dari situ, sejarak sekitar sepuluh meter, masih tampak asap kepulan pembakaran ilalang dan bekas tebangan pohon. Di lokasi PT ANI yang berlokasi di Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, praktik-praktik pembukaan lahan dengan penebangan dan land clearing adalah hal yang sering dijumpai. Membentang dari Aceh Besar hingga Pidie, aktivitas ilegal ini menjadi penyebab tingginya laju deforestasi di kawasan itu.

Akibat dari hilangnya hutan, Gunung Seulawah pun menjadi area yang tandus. Di sekitar wilayah ini, bencana hidrologis terjadi. Warga gampong (kampung) yang berada di kaki Seulawah seperti gampong Panca, Lamkubu dan Panca Kubu pun semakin kesulitan mendapatkan air bersih dalam beberapa tahun terakhir ini.

Sebaliknya pada musim hujan, tiga desa ini terendam banjir hingga beberapa hari. Puluhan hektar lahan sawah dan lahan pertanian warga menjadi rusak parah.



“Awal tahun 2024 di sini banjir sampai 1,5 meter hingga sehari-hari. Beberapa bulan ini masyarakat juga merasakan dampak kekeringan, sumur-sumur kering. Bahkan parahnya lagi, air sungai debitnya sudah sangat sedikit sehingga tidak bisa digunakan untuk mengairi sawah dan kebun warga,” tutur Muhammad Hasyim, mantan mukim Gunong Biram (03/08/2024).

Menurut Hasyim, perambahan hutan di mukimnya, telah terjadi sejak tahun 1997, saat dimana PT ANI mulai masuk di wilayah ini. Saat lahan konsesi tidak diurus, area ini menjadi open access, ibarat daerah tak bertuan. Berbagai kegiatan ilegal, seperti pembalakan liar, tambang galian C, dan pembukaan lahan perkebunan sawit pun marak terjadi. Lokasinya bahkan tak jauh dari Tahura Pocut Meurah Intan.

Bukan hanya sawit, di konsesi ini juga ada perkebunan kurma, villa hingga cafe-cafe yang berdiri dalam beberapa tahun terakhir. Hutan pinus yang sebelumnya ada, telah berganti menjadi tanaman pisang, kemiri, cabai, dan jagung. Lokasinya ini berada di koordinat 5°28'1.13"N 95°46'21.57"E, koordinat 5°27'40.94"N95°45'18.85"E dan 5°27'12.69"N95°45'20.35"E.



Kawasan Konsesi Kehutanan yang Dirambah

Muammar Syafwan Supervisor Management Planning PT ANI yang ditemui Digdata.id di Kantornya Sabtu sore (24/8) tak menampik hasil temuan media ini.

Dia membenarkan jika banyak lahan mereka yang diserobot dan berubah fungsi menjadi perkebunan kurma, perkebunan sawit bahkan juga ada yang membangun objek wisata di dalamnya berupa villa, cafe dan arena bermain. Seperti yang terjadi di Blang Bintang Aceh Besar.

“Itu kawasan hutan, semestinya secara aturan tidak boleh ada pembangunan. Tidak benar kalau dikatakan PT ANI dibidang menyerobot tanah milik warga. Yang ada lahan kami yang di serobot dan itu sudah terjadi lama, waktu perusahaan sedang vakum,” jelasnya.

Namun apakah semata-mata berarti tidak ada kontribusi kesalahan dari pihak perusahaan?

Perusahaan HTI PT ANI, telah mengelola kawasan hutan produksi milik negara sejak tahun 1997. Perubahan lanskap politik dan ekonomi akibat pergantian rezim pemerintahan, dan isu keamanan Aceh di waktu itu membuat perusahaan tidak mampu memberi manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar hutan.

Bahkan pasca konflik Aceh di tahun 2004 sampai berganti kepemilikan di tahun 2016, keberadaan lahan ini tidak terurus dan tidak ada kegiatan sama sekali.

Hal itu dikatakan oleh Ahmad Solihin, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh, saat dihubungi.

"PT ANI sepertinya tidak sanggup mengelola lahan konsesi tersebut secara menyeluruh, karena selama ini banyak lahan mereka yang dikuasai oknum-oknum tertentu baik perorangan maupun kelompok. Bukan cuma satu atau dua hektar saja, tapi sampai puluhan hektar," jelasnya.

Solihin pun mempertanyakan, tentang kinerja perusahaan terkait dengan penanaman dan pengolahan di area konsesi.

Pada tahun 2022, PT ANI, sebutnya pernah melakukan penanaman bibit akasia yang dilakukan oleh pihak vendor seluas 250 hektar di Desa Lamtamot dan Panca, Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar. Namun realisasi di lapangan hanya 100 hektar.

Sisanya 150 hektar tidak terealisasi akibat wanprestasi pembayaran dari perusahaan, yang menyebabkan pihak rekanan memutuskan kontrak kerjasama penanaman dengan perusahaan HTI itu.

"Dari temuan WALHI di lokasi realisasi penanaman di Desa Panca, bibit tanamannya banyak mati, dan parahnya lagi bibit yang ditanam tersebut terbungkus kantong bertuliskan BP DAS. Itu jelas menyalahi aturan," lanjut Ahmad Solihin lagi.

"Demikian pun, sejak 2022 hingga awal 2024 tidak ada giat penanaman di lahan PT ANI. Hanya warga yang menggarap lahan milik mereka dengan menanam tanaman muda, kemiri dan pinang, bahkan sebagian lahannya ditanami sawit juga kurma."



Sebelumnya akan Dicabut, Malah Jadi Perusahaan HTE

Penelusuran digdata.id perusahaan HTI PT ANI kepemilikannya diambil alih oleh pengusaha Robin Sitaba sejak tahun 2017 setelah beberapa kali berganti. Di awal perusahaan ini dimiliki oleh Ibrahim Risjad, pengusaha asli Aceh.

Sejak itu tidak ada lagi giat penanaman di dalam area lahan konsesi seluas 97.806 hektar yang membentang dari Kabupaten Aceh Besar hingga Kabupaten Pidie. Walhasil, pada tahun 2022 perusahaan mendapat pemberitahuan hasil evaluasi ketiga dari KLHK lewat SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang pencabutan izin konsesi kawasan hutan.

Namun anehnya, alih-alih mendapat sanksi administratif, perusahaan malah mendapat izin sebagai konsesi pemasok Hutan Tanaman Energi (HTE). Statusnya yang sebelumnya 'dalam pencabutan' kini berubah menjadi pada 'pembinaan'.

Dari informasi yang diperoleh Digdata.id, PT ANI saat ini pun sudah kembali beroperasi setelah sebelumnya sempat vakum. Pemulihan status pencabutan izin oleh KLHK dikarenakan pihak perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya dengan melakukan penanaman seluas 500 hektar sesuai ketentuan yang diberikan KLHK.

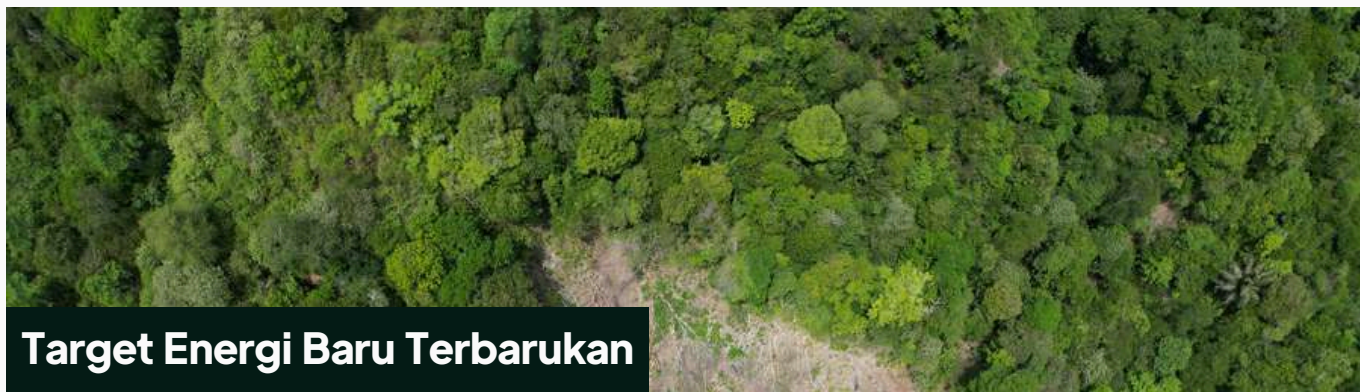
Di tahun 2024, perusahaan sudah menyelesaikan pengurusan dokumen Rencana Kerja Utama (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) di Badan Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah 1 Aceh. Kewajiban tanam di tahun ini pun arahnya ke tanaman energi.

"Status pencabutannya sudah dibatalkan oleh KLHK dan RKU-nya juga sudah disahkan KLHK sekitar Juni lalu. Tapi BPHL tidak memegang fisiknya, karena belum diserahkan ke kami. RKU itu diajukan secara aplikasi ke KLHK begitu juga dengan RKT-nya," jelasnya.

Dengan keluarnya izin penggunaan lahan multi usaha, pihak pengelola pun bisa memanfaatkan lahan konsesinya tidak hanya untuk tanaman energi tapi dimungkinkan untuk membuka perkebunan dan ekowisata. "Yang tidak boleh adalah untuk perkebunan sawit, kurma bahkan untuk kawasan tambang, karena ini lahan hutan,"

Amar Syafwan, menyebut lahan 500 hektar telah direalisasi tanam jenis akasia di Desa Panca, Mukim Gunong Biram, Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar. Dia menyebut dalam proses perbaikan RKU, kini dengan izin multi usaha, perusahaan dapat berubah ke penjualan karbon yang memungkinkan tidak ada lagi penebangan hingga 30 tahun.

"Kami telah mengubah rencana kerja usaha (RKU) dari HTI ke Kayu Energi dengan izinnya multi usaha. Kami hanya wood pellet, harga belinya sangat rendah, dan permintaan sangat kecil di Indonesia. Di Aceh misalnya, hanya untuk kebutuhan PLTU, itu juga hanya 10 persen menggantikan batu bara," imbuhnya.



Target Energi Baru Terbarukan

Sesuai peta jalan transisi energi yang dikeluarkan Kementerian ESDM, saat ini terdapat 52 lokasi PLTU di seluruh Indonesia dengan total kapasitas 18.664 megawatt akan jadi target co-firing hingga tahun 2025. Adapun potensi bahan baku biomassa untuk co-firing PLTU ini dari tanaman energi, limbah pertanian atau perkebunan, limbah industri kayu, dan sampah rumah tangga.

Program biomassa untuk co-firing PLTU akan meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) sebanyak 1,8 persen dengan proyeksi kebutuhan biomassa sekitar 10,2 juta ton per tahun pada 2025. Kebutuhan biomassa itu salah satunya dipasok dari pengembangan HTE.

Adapun di Aceh, konsesi HTE dirancang guna memenuhi target energi terbarukan sebanyak 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2030.

Penggunaan biomassa di Aceh sudah dimulai sejak 2020 di PLTU 1&2 Nagan Raya.

Namun hingga 2024 penggunaannya masih sangat sedikit, hanya sekitar 0,2 persen dan angka ini masih sangat jauh dari target yang di beri KLHK. Terkait perkembangan itu, pemerhati menyebut dengan pesimis hal ini. Salah satunya Anggi Putra Prayoga, Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan Forest Watch Indonesia (FWI).

"HTE biomassa untuk co-firing PLTU tidak bisa dikatakan sebagai penyediaan energi bersih dan terbarukan, karena praktiknya mengorbankan hutan alam, Energi bersih itu hanya bualan saja," sebutnya.

Anggi mengatakan pemberian mandatori Hutan Tanaman Energi (HTE) guna memenuhi kebutuhan biomassa pada perusahaan –perusahaan yang bermasalah adalah kesalahan besar, karena tidak semua perusahaan HTI yang mengembangkan HTE akan mampu menyuplai kebutuhan biomassa.

Eksplorasi Hutan Berkedok Energi Terbarukan di Jambi

M. Sobar Alfahri – INDEPENDEN
Hutan Tanaman Energi



INDEPENDEN—Alat berat berwarna oranye menghantam satu per satu pohon di area konsesi PT Hijau Artha Nusa (HAN), yang secara administrasi berada di wilayah Desa Nalo Gedang, Kecamatan Nalo Tantan, Merangin, Jambi, Selasa (6/8).

Dataran yang sebelumnya hijau nan rindang, kini terbuka. Sedangkan di titik yang lain, pepohonan sudah pada tumbang. Bibit kelapa sawit yang siap ditanam berbaris di titik pembukaan lahan tersebut. Ada pula pondok beratap terpal biru yang tidak diketahui siapa pemiliknya.

"Banyak sawit yang ditanam di sini. Sangat prihatin kawasan hutan dialihkan ke perkebunan sawit," kata Deri Sopian (33), warga Merangin.

Deri saat itu menelusuri area PT HAN dengan mengendarai sepeda motor. Tidak hanya melihat terjadinya deforestasi dan alih fungsi lahan, potongan kayu gelondongan ditemukan Deri tidak jauh atau beberapa meter dari pos satpam PT HAN.

Deri bahkan sempat berpapasan dengan truk yang sedang mengangkut beberapa kayu gelondongan di area tersebut.

PT HAN sendiri mengantongi izin konsesi Hutan Tanaman Energi (HTE) seluas 32.620 sesuai dengan SK.183/Menhut-II/2013. Area konsesinya terdiri dari tiga blok yang berada di Kabupaten Sarolangun dan Merangin. Sebagai bagian dari investasi Penanaman Modal Asing, perusahaan ini dibangun dengan dana operasional dan pembangunan usaha berasal dari Korea Selatan.

Perusahaan ini sejak awal dirancang untuk memenuhi kebutuhan biomassa kayu dalam bentuk wood pellet ke Korea Selatan, bukan untuk Indonesia.



Papan larangan merusak hutan berdasarkan UU yang dipasang di sekitar kawasan konsesi PT HAN, Merangin, Jambi. (M Sobar Alfahri)

Hasil perhitungan Forest Watch Indonesian (FWI), PT HAN hanya melakukan penanaman sengon di lahan seluas 64,5 hektare. Sementara rencana penanaman energi PT HAN hingga tahun 2024, hanya seluas 18.087 hektare. Perusahaan itu bergerak dengan label investasi dan label hijau, tetapi sama sekali tidak menjunjung konsep ESG (environment, social, and good governance) dan hanya melakukan greenwashing.



Apa itu greenwashing?

Menurut Investopedia, greenwashing adalah proses penyampaian informasi yang palsu dan menyesatkan tentang label ramah lingkungan sebuah produk atau perusahaan. Greenwashing adalah klaim yang tidak berdasar untuk menipu konsumen atau pihak lain agar percaya bahwa produk suatu perusahaan ramah lingkungan.

Deforestasi yang terjadi di area PT HAN mencapai 4.834,52 hektare pada 2017-2021 dan 225 hektare pada 2022-2023, lebih luas dibandingkan dengan luas penanaman sengon yang dilakukan perusahaan itu yakni hanya berkisar 100 hektare.

Mereka hanya menebang kayu alam dengan dalih mengembangkan energi baru terbarukan. Izin konsesi PT HAN berlaku hingga 2073, tetapi perusahaan ini berhenti beroperasi.

Bangunan mes dan pos satpam PT HAN terbengkalai, bahkan ada yang tinggal kerangka. Sesuai dengan laporan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) terkait Hasil Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH), PT HAN secara resmi menyatakan sudah tidak aktif sejak April 2023.

Perusahaan ini telah meninggalkan dampak buruk pada lingkungan. Kerugian negara tentu tak terelakkan. Lahan konsesi HTE ini dibiarkan sehingga kerusakan lebih lanjut. Tidak heran, sepanjang penyusuran hutan, Deri bukan melihat hutan penghasil bahan baku energi. Ia hanya menemukan jejak deforestasi, pembalakan liar, dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Bahkan, ia menemukan satu lokasi penambangan emas ilegal yang sudah ditumbuhi semak-semak.



Truk mengangkut beberapa kayu gelondongan diduga ilegal di area konsesi PT HAN, Merangin, Jambi. Sedangkan perusahaan itu tidak beroperasi lagi sejak 2021. (Sobar Alfahri)

Pembalakan kayu yang ditemukan Deri, mengingatkan pada penangkapan yang dilakukan Polres Merangin dua tahun lalu. Saat itu, delapan warga Desa Nalo Baru ditangkap lantaran terlibat kasus illegal logging di area konsesi PT HAN. Delapan pelaku pembalakan liar itu divonis satu tahun penjara.

Menurut Deri, aktivitas ini meningkat sejak perusahaan tidak beroperasi. Lebih lanjut, Deri menduga banjir yang terjadi di dekat Sungai Tantan dan Sungai Ulak merupakan dampak kerusakan ekologis yang terjadi di area PT HAN.

"Sungai itu berdampak, terjadi kenaikan debit air yang akhirnya bermuara ke Sungai Tantan. Ketika banjir, yang paling parah itu di Sungai Ulak," kata Deri.

Ia pun menyesalkan tindakan pemerintah yang memberikan karpet merah untuk perusahaan melakukan deforestasi berkedok HTE. Pembukaan lahan yang terjadi di area konsesi itu mengakibatkan pelepasan emisi karbon.

"Transisi energi yang kalau dilihat sekarang, itu bullhsit. Pemerintah katanya melakukan perubahan energi yang lebih baik, tetapi pembukaan lahan tidak seimbang dengan program tersebut. Pembukaan lahan yang masif juga menyebabkan bencana bukan peralihan energi yang lebih baik," ujarnya.

Kepala Desa Nalo Gedang Said menyampaikan sejak perusahaan membatasi hutan, banjir tahunan yang terjadi di permukiman semakin parah. Genangan air itu menutup jalan sehingga aktivitas masyarakat terganggu.

"Tingkat kebanjiran tinggi. Setiap tahun pasti ada kalau hujan tinggi, tetapi tidak separah sebelumnya. Kebun sawit masyarakat yang di pinggir sungai juga terganggu," ujarnya.

Ia mengatakan pihaknya tidak akan menerima PT HAN beroperasi lagi di Desa Nalo Gedang karena perusahaan tersebut terbukti merugikan desa.

"Tidak menguntungkan juga. Tetapi kalau memang serius tidak apa. Tetapi kini terbukti tidak serius," katanya.



Tambang Emas Ilegal Mencemari Sungai

Sementara itu, beberapa titik di area konsesi PT HAN yang berada di Desa Ranggo, Kecamatan Limun, Sarolangun, Jambi, beralih menjadi pertambangan emas tanpa izin alias PETI. Sejak adanya pertambangan emas ilegal, tidak hanya di area konsesi PT HAN, sungai sebagai sumber air bagi masyarakat mengalami pencemaran. Masyarakat Desa Ranggo pun sempat mengalami gatal-gatal karena menggunakan air sungai itu.

Mereka kini terpaksa memenuhi kebutuhan air dengan memanfaatkan mata air di area bukit, berjarak sekitar dua kilometer dari permukiman Desa Ranggo. Tidak hanya itu, sebagian masyarakat pun beralih menjadi pelanggan air galon. Bahkan, ada yang membeli air dengan harga Rp 20.000 per drum.

"Mana yang punya modal, pakai mobil angkutnya. Ketika sampai rumah, isi lagi pakai tedmon. Begitulah sekarang. Ada juga yang jual air galon keliling, satu galon seharga Rp 10.000. Sumur bor pun tidak jernih lagi, tetap disaring," kata Mashuri, salah satu warga Desa Ranggo, Minggu (20/8).

Berdasarkan data dari FWI, terjadi alih fungsi hutan primer dan sekunder wilayah konsesi PT HAN pada tahun 2013 hingga 2022.

Dari 32.189,17 hektare wilayah konsesi perusahaan itu, 182,41 hektare telah menjadi perkebunan, pertanian lahan kering seluas 12,36 hektare, pertanian lahan kering campur seluas 15.277,10 hektare, lahan terbuka seluas 300,8 hektare, semak belukar sekitar 544 hektare, dan pertambangan berkisar 374,24 hektare. Sedangkan menurut Dirjen Perkebunan, luas perkebunan kelapa sawit di area konsesi PT HAN mencapai 390,56 hektare pada tahun 2019.

Tutupan hutan primer yang tersisa di PT HAN pada 2022 berkisar 10.408,18 hektare, sedangkan hutan sekunder seluas 2.441,85 hektare. Imbas deforestasi serta alih fungsi lahan 2013-2022, terjadi pelepasan emisi karbon sebesar 1.007.677,72 ton CO₂-e. Kerugian ekologis ini belum termasuk deforestasi dan alih fungsi lahan yang berlangsung pada periode 2023-2024.



Potensi Kerugian Negara

Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI Anggi Putra Prayoga mengatakan pelepasan emisi karbon karena deforestasi dan alih fungsi area di PT HAN memperparah laju perubahan iklim. Aktivitas pelepasan emisi karbon pun menyebabkan kerugian negara karena ada pajak karbon yang tidak dibayarkan.

"Hutan tanaman energi ini menjawab kebutuhan apa? Justru menimbulkan kerugian negara. Hutannya gundul. Bicara emisi, justru kita menjadi mempunyai utang emisi. Masyarakat dirugikan dan bencana lebih dekat," katanya, Sabtu (31/8).

FWI menduga PT HAN mengeksploitasi hutan berkedok transisi energi. Perusahaan terbukti tidak mampu beroperasi dan menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh KLHK. Lahan konsesi dibiarkan begitu saja sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang tidak dikenal dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan pertambangan emas.

"Transisi energi melalui hutan tanaman energi itu dijadikan perusahaan sebagai bentuk kamuflase saja. Sedangkan PT HAN sudah meninggalkan konsesinya sehingga itu dimanfaatkan oleh oknum dengan memanfaatkan ruang-ruang PT HAN," kata Anggi.

Anggi pun mengatakan perusahaan harus bertanggung jawab atas pemulihan lahan konsesinya, meski pihak lain yang melakukan perusakan. "Apa pun yang terjadi, PT HAN harus bertanggung jawab. Yang tentunya perusakan ini mengakibatkan banyak kerugian. Sesuai laporan BPHL Jambi, mereka tidak membayar dan menjalankan rencana kerja mereka," ujarnya.

Berdasarkan SK Menteri LHK No.661 Tahun 2023 yang mengatur besaran Provisi Sumber Daya dan Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), pembukaan lahan ilegal di area konsesi PT HAN menimbulkan kerugian yang ditaksir mencapai Rp 30 miliar lebih. Hingga sekarang, deforestasi dan pembukaan perkebunan di sana terus berlanjut.

Manajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi Eko Mulia Utomo mengatakan pemerintah harus menimbang kerugian negara dan kerusakan ekologis yang ditimbulkan perusahaan HTE itu. Pembukaan perkebunan sawit di kawasan hutan yang tidak mengikuti prosedur pelepasan kawasan hutan yang tepat, mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan untuk kas negara dan daerah.

"Karena di dalam hutan, negara tidak bisa memungut pajaknya. Sementara instansi sektor kawasan hutan, juga tidak bisa memungut pajak sawitnya. Sehingga secara tidak langsung, ini ada potensi pendapatan negara yang hilang. Nah ini yang harus ditertibkan. Kalau ini dilakukan oleh pemilik modal, ini yang seharusnya pemerintah menindak tegas," katanya.

Eko mengatakan keuntungan pembukaan hutan tanaman energi tidak akan sebanding dengan kerusakan ekologis dan kerugian negara yang ditimbulkan. Namun, negara mengabaikan dampak tersebut.

"Apakah mereka juga menghitung ancaman kerusakan hutan itu ketika ada pembukaan lahan di PT HAN? Termasuk bencana ekologis dan penyakit. Seharusnya kan ini dilihat dan dipertimbangkan. Lebih besar kerusakan ekologis dibandingkan kerugian pendapatan negara. Harus fair juga negara bicara soal pendapatan dari perusahaan dan sebagainya," katanya.

Sementara itu, Manajer Administrasi dan Marketing PT HAN Muchlisin Madras mengatakan PT HAN sudah tidak beraktivitas sejak tahun 2021 walau izin konsesi belum dicabut. Salah satu penyebabnya, investasi dari perusahaan di Korea Selatan berhenti. Para pegawai PT HAN terpaksa diberhentikan.

Muchlisin sendiri tidak bisa memastikan apakah PT HAN bakal beroperasi lagi atau tidak bila mengingat target co-firing di Indonesia yang membutuhkan bahan baku biomassa. Ia mengakui terdapat area hutan yang sudah ditebang PT HAN tetapi belum ditanami sengon. Namun, ia tidak bisa menjawab bagaimana tanggung jawab perusahaan.

"Kalau mengenai hal seperti itu saya tidak bisa menjawab. Saya sebenarnya berharap perusahaan aktif terus dan lokasi yang sudah dilakukan land clearing (LC), itu bisa ditanam cepat. Kemudian bisa kita tanam lagi sengonnya. Kalau dahulu kan kita buka, kita tanam sengon lagi sehingga deforestasi tidak terjadi. Tapi belakangan kita sudah melakukan LC berapa hektare cuma tanam tidak jalan," katanya.

Terkait alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan ilegal di area konsesi PT HAN, Muchlisin mengatakan praktik ilegal itu sudah ada sebelum perusahaan beroperasi. Ia tidak mengetahui pasti siapa para pelakunya.

"Saat perusahaan beroperasi kita terus melakukan imbauan agar tidak ada PETI di kawasan itu. Bahkan kita pernah melaporkan ke pihak berwajib agar menindak kegiatan di sana. Cuma memang untuk sumber daya internal, kita belum mempunyai kemampuan untuk menindak itu," ujarnya.

Ia mengatakan area konsesi PT HAN berada di kawasan hutan produksi (HP). Ketika perusahaan masuk, sebagian wilayah sudah dikelola oleh masyarakat setempat. Karena itu, perusahaan bermusyawarah hingga membuat kesepakatan dengan pemerintah desa dan warga setempat yang mengklaim lahan. Kesepakatan yang dimaksud ialah PT HAN wajib memberikan fee senilai Rp 50.000 per meter kubik kayu yang dibawa dari Desa Nalo Gedang. Sepengetahuan Muchlisin, PT HAN sudah membayar lebih dari Rp 100 juta ke pemerintah desa.

"Saya tidak memastikan yang punya utang itu perusahaan atau pihak desa (kepada penjual lahan). 100 juta itu perkaliannya begini, per meter kubik itu perusahaan mengeluarkan fee kayu terhadap pengklaim lahan itu sebanyak Rp 50.000, yakni Rp 25.000 untuk desa dan Rp 25.000 untuk masyarakat atau oknum yang mengklaim lahan," katanya.

Namun, Pemerintah Desa Nalo Gedang menyampaikan PT HAN diduga belum melunasi kompensasi tersebut sehingga perusahaan ini meninggalkan utang. Padahal, dana kompensasi ini digunakan untuk pembelian tanah seluas sekitar satu hektare yang akan dibangun fasilitas desa.

"Ketika masa pemerintahan desa sebelumnya, informasinya kan desa dapat kompensasi dari PT HAN, Rp 130 juta yang kemudian untuk dibelikan tanah di sini. Dijanjikan oleh PT dibayar selama 3 bulan. Sampai sekarang belum dibayar sebesar Rp 30 juta. Mungkin tidak ada lagi kompensasi untuk pelunasan itu, kurang lebih satu hektare. Itu pembelian tahun 2019," kata Said.

Said mengungkapkan pihak penjual lahan sudah berkali-kali meminta pelunasan seharga Rp 30 juta, tetapi pemerintah desa kesulitan memenuhinya. Pihak penjual lahan bahkan sempat meminta pelunasan Rp 80 juta karena tenggat waktu yang diberikan terlewat jauh.

"Terkendala PAD. Sempat dituntut dengan meminta Rp 80 juta. Kemudian kami musyawarah sehingga dia kini meminta Rp 35 juta," katanya.



Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi tim BPHL IV Jambi pada Maret 2024, PBPH PT HAN belum menyusun dokumen RKUPH periode tahun 2024- 2034 dan RKTTPH periode tahun 2024. Pada periode RKTTPH Tahun 2021 sampai 2023, tidak ada rencana dan realisasi kegiatan pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan. Tidak ada laporan kegiatan bulanan, progres tata batas, kemitraan,sertifikasi, keuangan, penanaman, produksi dan tenaga kerja.



Konsesi PT HAN Harus Segera Dicabut

Anggi khawatir bila dibiarkan begitu saja, deforestasi di area PT HAN semakin luas. Menurutnya, izin konsesi perusahaan itu harus segera dicabut.

Perusahaan ini pun belum melaksanakan kemitraan dengan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Sejak bulan April 2023 PT Hijau Artha Nusa sudah tidak aktif melakukan aktivitas pemanfaatan hutan, sehingga tenaga kerja, alat-alat operasional dan sarana prasarana yang menunjang kegiatan pemanfaatan hutan sudah tidak ada pada area kerja PBPH PT Hijau Artha Nusa.

Perusahaan ini terindikasi telah meninggalkan area kerja. Dalam laporan evaluasi itu, PT HAN direkomendasikan mendapatkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, dan dapat dilakukan audit kerjanya yang berdasarkan ketentuan dalam PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada Pasal 362 ayat 1 huruf a sd l.

Kasi Pemantauan dan Evaluasi BPHL IV Jambi Benny Budiansyah mengatakan hasil evaluasi itu sudah diberikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK.

Biasanya, setelah perusahaan dievaluasi dan terbukti tidak menjalankan tanggung jawab, akan diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Bila peringatan tidak digubris, barulah izin konsesi dicabut.

"Sementara kami menunggu dari pusat. Karena kita tidak bisa semena-mena langsung melepaskan izin bila perusahaan tidak aktif. Mereka kan sudah berinvestasi, makanya kita berikan peringatan terlebih dahulu," katanya.

Benny menyampaikan pihak PT HAN sulit ditemui atau diajak komunikasi. Tidak ada perwakilan resmi perusahaan yang memberikan laporan dan menanggapi undangan terkait evaluasi kinerja.

"Agak susah. Tidak perwakilan resmi dari perusahaan. Waktu awal tahun diundang dalam kegiatan untuk evaluasi kinerja itu, juga tidak ada. Harapannya sih waktu itu ketemu untuk mengetahui apa permasalahannya dan apa yang bisa disupport," ujarnya.

"FWI dan Walhi Jambi sepakat mendorong pencabutan izin PT HAN. Terus, area yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat itu diberikan sebagai wilayah kelola rakyat," katanya.

Sementara itu, Eko mewanti-wanti izin konsesi ini dialihkan kepada perusahaan yang turut memperluas kerusakan ekologis. Namun, bila izin konsesi PT HAN sudah dicabut, masyarakat dapat diberikan akses untuk mengelola dengan skema Hutan Desa. Dalam skema tersebut, terdapat zona lindung dan zona pemanfaatan sebagai area yang bisa ditanami komoditi yang ramah lingkungan.

"Kalau bicara hutan desa, wilayah pemanfaatan itu kan bisa mereka kelola untuk tanaman hutan dan sebagainya. Kalau zona pemanfaatan, bisa ditanami kopi, kayu manis dan sebagainya, tetap ada tutupan. Dengan catatan dikelola dengan kearifan lokal," katanya.





2



Industri Biomassa



Korea Makin Terang dengan Energi Transisi, Hutan Jambi Makin Nelangsa

Suwandi - Kompas.com
Industri Biomassa

JAMBI, KOMPAS.com – Di tengah gemerlap Korea Selatan, negara ginseng itu masih tergantung pada pasokan wood pellet dari Indonesia. Hal itu didasarkan fakta, bahwa negara itu sekarang sedang coba mengalihkan pasokan energi berbahan bakar batubara, menjadi energi biomassa dalam komitmen transisi energinya.

Untuk mencukupi kebutuhan energinya tersebut, Korea Selatan pun mengimpor pelet kayu dari Jambi, Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi mencatat data ekspor pelet kayu mencapai 14.513 ton pada 2022, meski tahun berikutnya melorot menjadi 12.042 ton. Lalu data triwulan tahun 2024, tercatat 1.955 ton. Dari total ekspor itu, nilainya mencapai 3,09 juta dolar.

Salah satu pemasoknya adalah PT Rimba Palma Sejahtera Lestari (RPSL), sebuah perusahaan yang dimiliki investor asal Hong Kong. Weal Union Limited. Produsen wood pellet ini berlokasi di Kota Jambi.

Lestari Defri, Humas PT RPSL, menyebut ekspor perusahaannya bisa lebih lima kali dalam sebulan, yang dikirim dari Pelabuhan Talang Duku dengan kapasitas 30 kontainer untuk satu pembeli.

“Ada beberapa buyer yang beli wood pellet dari kami,” kata Defri. Dia sebut bahwa pengeksport pelet kayu terbesar ke Korea.

Dia mengklaim bahwa wood pellet produksinya punya kualitas setara dengan batubara, namun lebih ramah lingkungan.

Sebelumnya, PT RPSL adalah pemasok listrik ke PT PLN (Persero) yang dihasilkan dari pembangkit listrik biomassa (PLTBm). Ini dilakukan hingga tahun 2019.

Kontrak dengan PLN sebutnya terpaksa putus, disebabkan tarif setrum melorot lebih 50 persen dari yang ada di kontrak tahun 2014.

"Kami sudah putus kontrak pasokan listrik ke PLN pada 2019. Kami nyerah dengan harga rendah dari PLN. Sempat vakum 2 tahun, di tahun 2022 kami fokus produksi pelet kayu," kata Defri.

Meskipun sudah tidak memasok listrik ke PLN, produksi listrik dari pembangkit biomassa masih dipertahankan untuk kebutuhan sendiri memproduksi wood pellet. Dari total kebutuhan kayu sebanyak 104.400 ton sesuai izin di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Defri ungkap RPSL hanya bisa mengumpulkan 60 persen.

"[Meski demikian] kami banyak kendala juga, terkadang bahan baku yang tergantung cuaca dan mesin yang kadang rusak. Jadi tidak bisa konsisten produksi 288 ton setiap harinya," sambungnya.



Direktur Perkumpulan Hijau Jambi, Feri Irawan menyebut bahwa dari analisis dokumen yang ia peroleh, PT RPSL mengolah minimal 104 ribu ton bahan baku kayu dan biomassa lainnya. Sementara itu, perusahaan tersebut tidak memiliki konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI).

Dari data 2017, biomassa dan pelet kayu jenisnya beragam, seperti dari cangkang sawit 281,9 ton, fiber sawit 59.967,5 ton, kayu karet 32,206,2 ton, kayu kualitas rendah (seberan) 371 ton dan serbuk kayu sebesar 2.090,6 ton.

Hasil penelusuran Perkumpulan Hijau, untuk bahan baku sawit sumbernya berasal dari 16 perkebunan sawit di Jambi, Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Sementara untuk karet berasal dari empat desa yaitu Air Hitam, Kebon Sembilan, Talang Belido dan Petaling. Kebanyakan karet yang ditebang berasal dari lahan yang akan dikonversi menjadi kebun sawit.

"Sudah sulit cari tebangan kebun karet di Jambi," kata Feri.

Sedangkan untuk bahan baku kayu, perusahaan membeli limbah yang berasal dari pabrik olahan kayu (sawmill). Di sinilah masalahnya, karena meski PT RPSL membeli kayu limbah dari sawmill, asal-usul kayu ini diduga tidak jelas.

"Kayu mereka diduga berasal dari pembalakan liar Taman Nasional Berbak Sembilang (TNBS) dan hutan penyangga di sekitarnya," jelas Feri. "Memang limbah, tapi [asal] kayunya ilegal dari perambah,"

Setiap harinya ada puluhan truk mengantar kayu racuk atau kayu kualitas rendah dan karet ke RPSL.

"Kami mengantar kayu racuk (kayu kualitas rendah) ke RPSL untuk dijual," kata TN, seorang sopir truk asal Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi, Jambi.

Dalam truk dengan bobot muatan delapan ton, sambung TN selain karet, ada banyak jenis-jenis kayu hutan seperti meranti, tembesu dan yang lainnya. Untuk kayu asal kebun, lelaki yang sudah belasan tahun menjadi sopir angkutan kayu, menuturkan rata-rata kayu dibawa dari kebun-kebun karet milik petani. Dia tidak menjelaskan lebih jauh dari mana kayu-kayu asal jenis hutan itu ia dapatkan.

Indikasi ketidakjelasan asal-usul kayu, diperoleh dari MH, seorang pekerja sawmill di Jambi. Dia menyebut kayu ilegal deras mengalir masuk ke sawmill saat tengah malam.

"Kayu tanpa surat, masuknya tengah malam. Ya harus dikawal petugas biar aman untuk masuk sini," sebutnya (28/8/2024). Dia tidak mendeskripsikan siapa oknum petugas yang ia maksud.

Itu yang membuat sawmill tempat MH bekerja, seakan tak kekurangan bahan baku. Pasokan kayu itu katanya berasal dari hasil tebangan di kawasan hutan seperti di Sarolangun dan Muaro Jambi, perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan.

Bagi mereka, kebutuhan dari PT RPSL tentunya jadi solusi untuk industri sawmill. Limbah-limbah kayu sebaran yang menumpuk dan tidak ekonomis di habis di borong perusahaan.

"Mereka sekali ambil satu truk lah sekitar 6-7 ton," jelasnya.

Meskipun menjual sebaran ke RPSL, MH menyebut sawmill tak berhubungan langsung dengan pihak pembeli, melainkan ada peran pihak ketiga.

Hal ini pun dibenarkan oleh Defri.

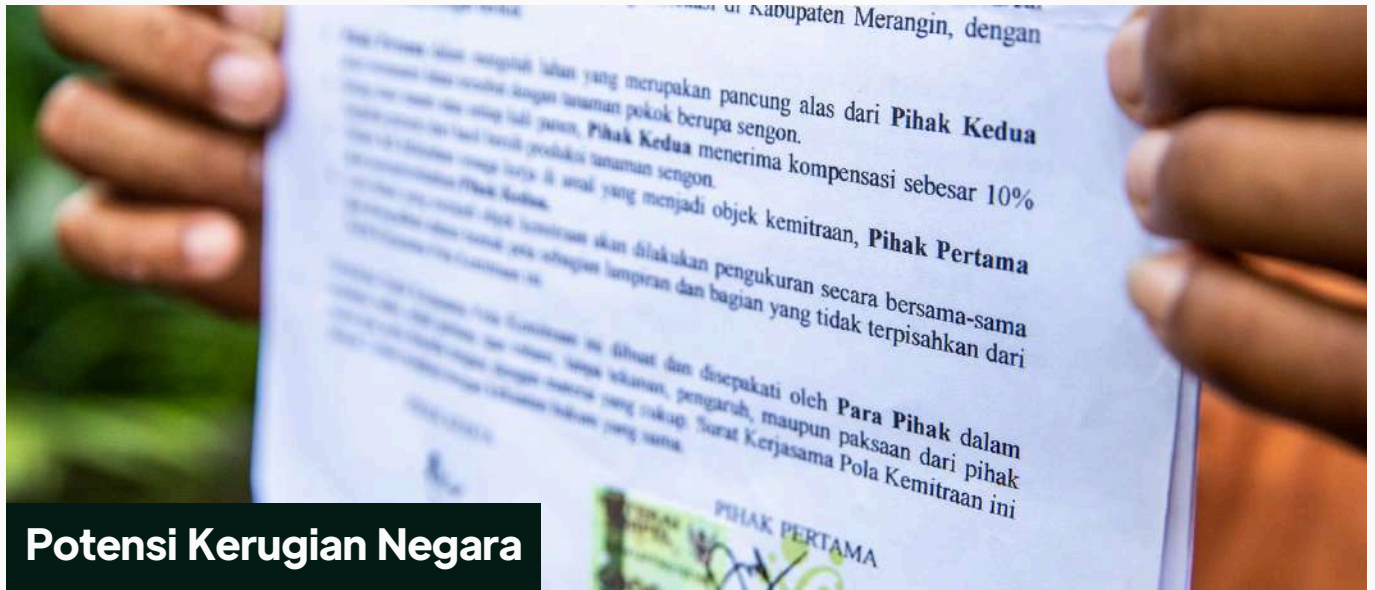
"Ya, kami ambil bahan baku dari sawmill yang 90 persen dari wilayah Muarojambi dan Kota Jambi. Semua pakai pihak ketiga yang telah punya izin," ungkapnya.

Kebutuhan bahan baku untuk produksi pelet kayu mayoritas memang dari sawmill, lalu sisanya membeli kayu racuk dan karet dari masyarakat.

Kendati demikian, Defri tidak bisa memastikan legalitas kayu dari sawmill. Ia hanya bilang, jika RPSL mematuhi regulasi dan telah mengantongi izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dan sertifikat sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK).

"Asal kayu kita ada tim auditor kehutanan. Semua dokumen-dokumen itu pasti di cek, jadi tidak mungkin ada kayu ilegal masuk ke kita," katanya.

Defri bilang sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi bersih, perusahaannya harus memiliki komitmen zero deforestation yang memastikan sumber pemasok kayu mereka legal dan dapat dibuktikan dari dokumen resmi yang disahkan pemerintah saat menjual kayu ke RPSL.



Feri menyebut dengan praktik yang terjadi seperti itu, negara mendapat kerugian dari hasil tebangan liar. Belum ditambah dengan dampak ekologis yang dihasilkannya. Secara khusus, dia menyoroti jenis-jenis kayu hutan seperti rengas, bungur, meranti yang merupakan kayu-kayu yang berasal dari hutan, bukan dari kebun.

Jika di estimasi kebutuhan kayu RPSL sedikitnya 50 persen dari total bahan baku 104.400 ton atau apabila dikonversi menjadi 141,205 per meter kubik. Dengan pembayaran pajak terendah yakni Rp75.000/kubik, setiap tahun negara kehilangan Rp10,59 miliar.

Kerugian lain adalah emisi karbon. Dengan kebutuhan kayu minimal 50.000 ton, maka deforestasinya sekitar 4.000 hektar setiap tahun. Menurut Forest Watch Indonesia (FWI) penebangan 1 hektar hutan akan melepas 146,14 ton emisi karbon.

"Dengan angka itu, maka pelepasan karbon karena kayu kebutuhan RPSL mencapai 584,560 ton. Itu baru dari deforestasi, belum kita menghitung emisi dari pembakaran di pembangkit listrik dan pabrik pelet kayu," kata Feri.

Penebangan ilegal dan konversi hutan adalah faktor di balik deforestasi yang ada di Provinsi Jambi. Data KKI Warsi menyebut, jika pada 1973, tutupan hutan Jambi 3,4 juta hektar. Setengah abad kemudian, deforestasi membuat hutan musnah dan hanya tersisa 922.891 hektar. Hutan alam terakhir pun hanya tersisa di empat taman nasional dan kawasan penyangga.

Sementara emisi di Sumatera terus meningkat. Dokumen RUPTL menyebut proyeksi peningkatan dari 37,1 juta ton pada 2018 menjadi 77,9 juta ton pada 2027. Sebaliknya emisi dari sektor energi akan turun dari 0,877 ton CO₂/MWh pada 2018 menjadi 0,809 ton CO₂/MWh pada 2027, jika transisi energi berjalan mulus.

Dorongan pemanfaatan biomassa dari hutan maupun limbahnya untuk energi, dikhawatirkan bakal memperburuk krisis iklim. Emisi dari pembangkit biomassa, diperkirakan sama besarnya dengan PLTU. Deforestasi pun menjadi pemicu krisis iklim, yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan.

Selama Juli-Agustus 2024 saja, telah terjadi kebakaran seluas 6.798 hektar. Lebih separuh lahan yang terbakar berada di konsesi perusahaan sawit dan hutan tanaman industri. Angka ini diprediksi akan meningkat seiring musim kemarau, yang memicu krisis air di lahan gambut.



Produksi Pelet Kayu Jadi Pemicu "Pencucian Kayu"

Anggi Putra Prayoga, Juru Kampanye Forest Watch Indonesia (FWI), menuturkan perusahaan yang memproduksi pelet kayu dan tidak memilikilahan sendiri, berpotensi serampangan mencari kayu dari sumber-sumber ilegal.

Untuk bertahan bahkan menambah volume produksi, meski tidak secara langsung PT RPSL akan terlibat dalam aktivitas ilegal 'pencucian kayu'.

"Caranya dengan memanfaatkan sawmill untuk melegalkan kayu dari aktivitas pembalakan liar. Ini modus baru deforestasi di Jambi," katanya.

Anggi juga mencermati modus baru deforestasi di Jambi dengan serius. Ia menilai Korea mendapatkan citra energi bersih dari pelet kayu, sementara hutan-hutan di Jambi terus dibabat.

"Ini namanya kolonialisme iklim," kata Anggi.

Anggi juga menyoroti perihal ekspor PT RPSL ke Korea Selatan yang tidak tercatat di KLHK.

"Menurut data KLHK, hanya ada tiga provinsi yang melakukan ekspor kayu pelet ke Korsel yakni Provinsi Gorontalo, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini berpotensi menyebabkan kerugian negara dari sektor kehutanan, karena tidak tercatat di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK)."

Untuk itu, Anggi mendorong agar pihak pemerintah dapat melakukan audit, monitoring dan pengawasan, serta evaluasi secara ketat.



Berdalil Transisi Energi, Perusahaan HTE Hancurkan Alam Gorontalo

Arfandi Ibrahim – Liputan6.com
Industri Biomassa

Sore itu gerimis menyelimuti Desa Londoun, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Miksel Rambi menatap langit-langit rumah. Dia coba mengenang kembali konflik lahan yang pernah terjadi di tanah Bumi Panua.

Refli Rambi, adiknya, pernah membakar pos jaga milik sebuah perusahaan sawit. Itu bukan ekspresi seorang kriminal tanpa sebab. Namun sebuah bentuk protes, saat warga merasa haknya digusur perusahaan.

"Tanah ini sudah digunakan sebelum perusahaan masuk. Nah, saat perusahaan menggusur buat jalan, lahan adik saya kena, jadi dia hanya menanam dilokasi yang tidak terkena jalan," kata Miksel.

Beberapa bulan kemudian, saat panen tiba adiknya meminta izin ke pihak perusahaan untuk membuat penjemuran jagung hasil panen untuk digunakan sementara waktu. Sayangnya, permintaan izin tersebut tidak diindahkan, hingga jagung rusak terkena jamur.

"Ini kan cuma penjemuran sementara, tidak sampai sebulan, supaya jagung ini tidak rusak. Habis dipakai juga akan dibongkar karena hanya terbuat dari kayu. Tapi tetaptidak dikasih izin," tuturnya.

Merasa frustrasi dengan hasil panen yang merugi, adiknya menjuke pos penjagaan dan protes kepada petugas. Aksi ini kemudian berujung pada pembakaran salah satu pos penjagaan milik perusahaan.

Di saat bersamaan, Miksel bilang, saat itu perusahaan coba mendekati tokoh-tokoh lokal yang berpengaruh. Pendekatan ini bertujuan untuk membujuk masyarakat agar mau menjual tanah kepada pihak perusahaan, untuk dibuatkan jalan menuju ke hutan Popayato.

Padahal, kata dia, saat itu hutan masih menjadi sumber kehidupan bagi warga sekitar untuk menyambunghidup. "Masyarakat di sini masih banyak yang mengandalkan hasil hutan ataupun kebun."

Dia bilang, hutan tersebut bakal lenyap dalam beberapa tahun kedepan, saat pemerintah memberi izin perusahaan kayu untuk mengelola hutan dengan luasan wilayah konsesi yang terbilang cukup luas.

Perusahaan yang dimaksud Miksel adalah PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL), perusahaan yang telah masuk ke Provinsi Gorontalo sekitar 15 tahun silam.

Miksel bercerita, sejak kehadiran PT BTL berulang kali telah menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat lokal. Itu bermula saat pihak perusahaan berniat membeli tanah milik warga untuk dibuatkan jalan.

Oleh perusahaan, tanah mereka ditawarkan dengan harga yang begitu rendah, yakni Rp 600 per meter. Kendati dibayar murah, warga rela menjual karena pihak perusahaan berjanji akan membuatkan sertifikat.

Khusus di Desa Londoun, -yang menjadi akses menuju lokasi perusahaan, lebih kurang ada 100 warga yang menjual tanah ke pihak PT BTL.

"Warga mau sebab pihak perusahaan berjanji akan memfasilitasi pembuatan sertifikat untuk setiap tanah yang dibayar," katanya.

Namun nyatanya, janji hanya sekedar janji, hingga kini, banyak sertifikat warga yang belum juga terbit.

Dari ratusan sertifikat yang dijanjikan, hanya ada sekitar 30 sertifikat yang dibuat.

"Kami dijanjikan untuk difasilitasi pembuatan sertifikat, tapi sampai sekarang banyak yang belum terbit. Pajak masih kami yang bayar, padahal tanahnya sudah dibeli perusahaan," ujarnya.

Persoalan persoalan konflik agraria pihak PT BTL dengan warga desa, sebenarnya tidak berhenti di situ. Pihak perusahaan juga diketahui pernah menggusur jalan desa sepanjang hampir 600 meter.

Penggusuran jalan itu dilakukan guna pelebaran jalan menuju perusahaan dengan lebar kurang lebih 30 meter.

Sosialisasi awal dengan masyarakat, pelebaran jalan itu hanya untuk digunakan sementara. Tapi sampai saat ini masih juga digunakan dan tidak ada kejelasan sama sekali.

"Kami sudah menanyakan hal ini ke pihak perusahaan, jawabannya mereka mengaku tidak tahu," tuturnya.

Belakangan diketahui, perusahaan hanya

mendapatkan persetujuan dari salah satu aparat desa untuk penggunaan jalan tersebut, sebagai gantinya aparat desa tersebut diijinkan membuka usaha kantin di dalam wilayah perusahaan.

Selain disinyalir telah merubah ratusan meter jalan desa menjadi jalan perusahaan, PT BTL juga diduga membangun jalan perusahaan di kawasan perhutanan sosial. Padahal, kawasan yang menjadi perhutanan sosial itu memiliki dokumen resmi dari kementerian KLHK tahun 2019.

Pengajuan izin perhutanan sosial itu berangkat dari konflik yang berlarut-larut terjadi antara pihak perusahaan dan masyarakat. Hingga akhirnya masyarakat mengajukan permohonan izin Perhutanan sosial ke kementerian KLHK.

Upaya ini kemudian mendapatkan persetujuan, hasilnya, pada tahun 2019, sekitar 158 hektar wilayah yang berdekatan dengan perusahaan diizinkan KLHK untuk digunakan oleh masyarakat.

Janji perusahaan tidak hanya pembuatan sertifikat, ada tiga janji lainnya yang tidak pernah ditunaikan setelah hampir 15 tahun perusahaan ini berada di Kabupaten Pohuwato.

"Perusahaan pernah menjanjikan kebun plasma sawit 2 hektar per orang, kemudian kayu ramuan rumah satu kubik untuk satu keluarga, juga bantuan bibit jagung."

Janji yang diterima masyarakat desa tinggal janji belaka. Perusahaan sawit telah berubah menjadi perusahaan hutan tanaman energi (HTE).



Miksel kembali menatap jauh ke luar, mengingat kembali saat perusahaan memintanya untuk membantu dalam mengidentifikasi jenis kayu yang ada di hutan tersebut.

Ia bercerita, sejak awal beroperasi, pihak perusahaan sudah melakukan pengambilan sampel terhadap pohon yang ada di hutan tersebut. Ia tahu betul, sebab dirinya dilibatkan oleh perusahaan dalam pengambilan sampel kayu di hutan itu.



Sekitar tahun 2014, ia bersama kakaknya diminta perusahaan untuk mengidentifikasi jenis kayu yang ada di hutan itu. Totalnya, ada sekitar 15 jenis kayu yang berhasil teridentifikasi.

Dalam proses pengambilan sampel tersebut, banyak ditemukan jenis kayu seperti meranti, beberapa jenis kayu palapi dan ada pula kayu jenis nantu.

"Jadi lebih dari satu tahun setelah pengambilan sampel kayu itu, sekitar tahun 2016 itu baru uji coba layak atau tidak pelet ini. Setelah beberapa kali dikirim sampel ke laboratorium," ungkapnya.

Meski saat itu PT BTL dikenal masyarakat sebagai perusahaan sawit, namun sejak 2017 pihak perusahaan diduga sudah mulai melakukan pembibitan dan penanaman kayu jenis gamal di wilayah konsesinya.

"Setahu saya, sudah tanam gamal sejak tahun 2017, itu mereka baru mulai pembibitan gamal. Jadi, hutan yang mereka babat ini yang diolah jadi pelet," ujarnya.

Sepengetahuannya, uji sampel tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah jenis kayu yang ada di hutan tersebut layak untuk dibuat pelet dan bisa laku jika dijual ke luar negeri.

"Kayu yang ditebang itu yang mereka ambil jadi pelet, karena gamal sekarang masih pembibitan dan ada yang sudah ditanam tapi masih belum layak ditebang," ujarnya.

Untuk menunjang kegiatannya, pihak perusahaan telah membangun pelabuhan di Desa Trikora. Pelet kayu ini awalnya masih dikirim ke luar negeri melalui pelabuhan yang ada di Kecamatan Paguat.

walnya, PT BTL merupakan perusahaan kelapa sawit yang mendapatkan izin lokasi dari Bupati Pohuwato berdasarkan surat keputusan Nomor 171/01/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang pemberian izin lokasi seluas 16.000 hektar.

Setahun kemudian, dalam statusnya sebagai perusahaan sawit, PT BTL mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan sekitar 15.797.48 hektar dari KLHK. Seiring berjalannya waktu, tahun 2022 izin pelepasan kawasan hutan itu telah dicabut berdasarkan surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 01 Tahun 2022.

Dalam putusan atas nama KLHK itu tercatat, ada sekitar 192 unit perizinan/Perusahaan di Indonesia dicabut dengan total luas 3.126.439.36 hektar oleh Presiden Jokowi melalui KLHK. Pencabutan izin itu dihitung mulai tanggal 6 Januari 2022. Akan tetapi, tahun 2020 ternyata PT BTL sudah terlebih dahulu mengajukan izin penetapan hutan hak dengan perubahan komoditas dari sawit ke gamal dan kaliandra. KLHK pun menyetujui usulan tersebut dengan skema Hutan Hak dengan luas 15.493 hektar kepada PT BTL.

Riset Walhi menyebut pencabutan izin pelepasan kawasan hutan oleh KLHK pada tahun 2022 secara otomatis tidak merubah apapun, termasuk aktivitas perusahaan.

Sejak perusahaan beroperasi, tren deforestasi di Kabupaten Pohuwato signifikan dan terlihat masif. Temuan Forest Watch Indonesia (FWI) (2024) menyebut dalam kurun waktu 2021 sampai 2023 deforestasi terjadi di dalam konsesi PT BTL dengan luasan 1.105 hektar.

Sementara berdasarkan citra satelit Nusantara Atlas, antara Januari 2023 hingga Agustus 2024, PT BTL telah membabat hutan alam sekitar 2.027 hektar. Di seluruh Gorontalo, Pohuwato menjadi kabupaten yang tertinggi kehilangan tutupan pohonnya.

Ironisnya, bahan baku industri wood pellet dari PT BTL yang disuplai ke PT Biomassa Jaya Abadi (BJA) bukan untuk kebutuhan dalam negeri, justru diekspor ke Jepang dan Korea Selatan dengan total produksi 21.066.025 kg dengan nilai 2.833.380 USD.



Artinya, kayu alam yang diambil oleh BTL dari Pohuwato ini tidak memberikan kontribusi dalam program transisi Indonesia yang ingin menggunakan co-firing pengganti batubara di 52 PLTU.

Manajer Kampanye Hutan Forest Watch Indonesia, Anggi Putra Prayoga, menyebut Gorontalo adalah provinsi yang paling terdampak dengan program proyek bioenergi nasional. Di Gorontalo terdapat 10 izin HTE dengan total luas 282 ribu hektar.

Pemanfaatan kayu dari hutan alam tidak akan pernah bisa menjawab apa-apa berkaitan dengan agenda transisi energi sebagai upaya pengurangan emisi," sebutnya.

Hal senada disampaikan Renal Husa dari Walhi Gorontalo, dirinya menegaskan penolakan terhadap semua industri ekstraktif, termasuk Proyek Bioenergi Nasional di Gorontalo.

Sebab, ini bakal mengancam ruang kelola rakyat dan berpotensi menimbulkan bencana ekologis baru.

"Hutan Gorontalo harus dikelola oleh rakyat, bukan korporasi, mengingat sejarah panjang konflik dengan masyarakat, seperti yang terjadi pada empat perusahaan," kata Renal.

Sementara Terry Repi Akademisi Universitas Muhammadiyah Gorontalo menyoroti bahwa bioenergi menjadi ancaman serius bagi biodiversitas. Aktivitas bioenergi dapat mengakselerasi hilangnya habitat terutama bagi spesies spesialis dan spesies dengan jelajah yang luas, berisiko menyebabkan kepunahan.

Selain itu, dibutuhkan waktu yang sangat lama, antara 44 hingga 104 tahun, bagi hutan untuk menyerap kembali kelebihan CO₂ setelah penebangan.

"Artinya, asumsi bahwa bioenergi kayu bersifat netral karbon adalah terlalu optimistis dan dapat menunda upaya mitigasi perubahan iklim yang lebih efektif," kata Terry Repi.

Berdasarkan laporan dari tim ilmuwan Global Carbon Project dalam jurnal Earth System Science Data akhir 2023, Indonesia jadi salah satu negara 10 besar pelepas karbon dunia. Bahkan, di sektor penggunaan lahan, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara penghasil emisi terbesar di dunia.

Di sisi lain juga, dalam riset Trend Asia yang berjudul "Adu Klaim Menurunkan Emisi" menyebut, bioenergi yang diklaim sebagai energi terbarukan justru akan melibatkan deforestasi, dan menimbulkan hutang karbon yang akan memakan waktu puluhan tahun untuk dilunasi. Pasalnya, riset itu menemukan proses produksi kayu tersebut akan menghasilkan net emisi 26,48 juta ton emisi karbon.

Dalam penelitian Trend Asia yang berjudul "Ancaman Deforestasi Tanaman Energi" juga menemukan hal serupa. Dimana, transisi energi Indonesia dari tanaman energi untuk dijadikan biomassa kayu akan memicu deforestasi hingga 2,3 juta hektar atau 33 kali luas Jakarta.





Siapa Pemilik Saham BTL

Struktur kepemilikan dan manajemen PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL) baru-baru ini terungkap berdasarkan data yang diakses melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada 5 Agustus 2024.

Dari data tersebut, teridentifikasi bahwa perusahaan ini dipimpin oleh Ir. Burhanuddin sebagai Direktur, dan Syamsul B. Ilyas sebagai Komisaris. Namun, yang menarik perhatian adalah munculnya nama Andy Kelana yang tercantum sebagai Presiden Komisaris, sementara Heru Purnomo menjabat sebagai Presiden Direktur sekaligus pemegang 1 persen saham perusahaan.

Mayoritas saham PT BTL, sebesar 99 persen, dikuasai oleh PT Buana Pratama Cipta (BPC). Menurut data yang sama, PT BPC sendiri dimiliki oleh PT Reka Varia Tara (RVT) yang menguasai 99 persen saham.

Mighty Earth menemukan, keterlibatan Andy Kelana semakin terlihat, karena ia juga tercatat memiliki 87,5 persen saham di PT RVT, sementara 12,5 persen sisanya dimiliki oleh Helena Adnan.

Kedua nama ini tidak asing lagi dalam dunia hukum, mengingat keduanya adalah mitra di Firma Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), yang memiliki portofolio klien di sektor pertambangan, termasuk PT Merdeka Copper and Gold Tbk, PT Saratoga Investama, dan Provident Capital.

Di situs resminya, Provident Agro mengklaim telah menjual seluruh sahamnya di PT Inti Global Laksana dan PT Banyan Tumbuh Lestari kepada pihak ketiga pada Juli 2019. Namun, fakta yang terungkap menunjukkan indikasi bahwa saham tersebut mungkin dialihkan kepada perusahaan yang dikendalikan oleh Andy Kelana dan Helena Adnan.

Ada dugaan kuat bahwa kedua orang ini memegang saham tersebut atas nama pemegang saham pengendali Provident Investasi Bersama Tbk, yaitu Winato Kartono, Edwin Soeryadjaya, dan Garibaldi Thohir.

Mighty Earth, juga dalam laporannya yang dirilis pada Mei 2024, mencurigai bahwa penjualan tersebut hanya sebuah transfer internal di dalam kelompok usaha Provident Group.

Dalam laporannya, Mighty Earth menyatakan, "Berdasarkan bukti yang ada, tampaknya Provident Agro 'menjual seluruh kepemilikan saham PT Inti Global Laksana dan PT Banyan Tumbuh Lestari' kepada Andy Kelana dan Helena Adnan, yang bertindak atas nama pemegang saham pengendali Provident Investasi Bersama Tbk."

Pernyataan ini menegaskan bahwa Andy Kelana dan Helena Adnan tidak mungkin menjadi pemilik manfaat dari PT BTL dan PT IGL.



Keterlibatan dalam Proyek Lain

Selain keterlibatannya di PT BTL, Andy Kelana juga diketahui memiliki 3,69 persen saham di PT Biomass Jaya Abadi (BJA), perusahaan yang berbatasan langsung dengan konsesi PT BTL. Mayoritas saham PT BJA dimiliki oleh Winato Kartono melalui Provident Biofuels Pte Ltd dan PT Provident Capital Partners, yang juga merupakan klien Andy Kelana di AKHH. Pemegang saham lainnya di PT BJA termasuk Edwin Soeryadjaya dari Saratoga Group (8,577 persen) dan Garibaldi Thohir dari Thohir Group (4,92 persen).



PT BTL Bantah Tuduhan Itu

Edwin Soeryadjaya, yang juga menjabat sebagai Komisaris Saratoga Investama dan Presiden Komisaris PT Adaro Energy Tbk, memiliki peran penting dalam berbagai perusahaan strategis. Sementara itu, Garibaldi Thohir adalah CEO Adaro Energy dan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Keterlibatan mereka dalam berbagai proyek, termasuk PT BJA, menunjukkan bagaimana jejaring bisnis ini saling terkait satu sama lain.

Winato Kartono, yang mendirikan Provident Capital Indonesia, juga memiliki pengaruh besar dalam jejaring bisnis ini. Selain menjadi Komisaris di berbagai perusahaan seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan MBMA, ia juga berinvestasi dalam proyek-proyek besar bersama Saratoga Investama Sedaya. Jejak langkah Winato dalam industri ini menunjukkan betapa kompleks dan terhubungnya jaringan kepemilikan dalam Provident Group.

Dari rangkaian informasi ini, terlihat jelas bahwa meski ada klaim penjualan saham, hubungan bisnis yang melibatkan nama-nama besar ini tetap erat dan saling terkait, menyisakan banyak pertanyaan mengenai siapa sebenarnya yang memegang kendali di balik layar PT Banyan Tumbuh Lestari.

Direktur PT BTL, Burhanudin, dengan tegas membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepada perusahaannya. Ia menegaskan bahwa sebagai pelaku usaha, PT BTL selalu mematuhi aturan yang berlaku, dengan seluruh perizinan yang sudah lengkap dan sesuai prosedur.

"Kami adalah investor jangka panjang yang berkomitmen pada keberlanjutan. Tidak mungkin kami mengabaikan aturan yang ada, terutama mengingat ini adalah bisnis internasional. Kepatuhan terhadap regulasi adalah prioritas utama kami," kata Burhanudin. Lebih lanjut, Burhanudin menekankan bahwa PT BTL dan mitra-mitra perusahaan lainnya telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan daerah. Mekanisme penatausahaan yang dijalankan perusahaan berlandaskan pada Hak Guna Usaha (HGU) yang sah.

"Saya tidak setuju jika lahan kami disebut sebagai hutan, karena sudah berstatus HGU dan APL. Lahan tersebut telah kami kembangkan menjadi kebun, dan dalam proses pembangunan kebun, kami melakukan pembukaan lahan atau land clearing, dan hasilnya kami manfaatkan dengan baik," jelasnya.

Burhanudin juga menambahkan bahwa aktivitas perusahaan seharusnya diapresiasi oleh pemerintah, terutama karena biomassa saat ini menjadi perhatian dunia dan merupakan teknologi baru di Indonesia. "Setelah penebangan, kami langsung melakukan penanaman kembali. Setiap hektar lahan ditanami sekitar 5.000 pohon, sehingga dari sudut pandang manapun, sulit untuk mengatakan bahwa ini adalah deforestasi," ujarnya.

Saat ditanya mengenai hubungan antara PT BTL dan PT Provident Investasi Bersama (PIB), pihak PT BTL menegaskan bahwa perusahaan mereka tidak memiliki afiliasi langsung dengan PIB. Mereka juga membantah adanya pengetahuan atau keterlibatan terkait kepemilikan PT Reka Varia Tara (RVT).

"BTL adalah mitra bisnis yang fokus pada produksi bioenergi, khususnya wood pellet. Sebagai penyuplai bahan baku yang kemudian diolah oleh PT BJA untuk dipasarkan, kami tidak terlibat dalam urusan kepemilikan saham atau struktur kepemilikan perusahaan lain. Fokus kami murni pada operasional," jelas perwakilan PT BTL. Terkait dengan isu konflik agraria antara masyarakat dan PT BTL, pihak perusahaan juga memberikan klarifikasi. Mereka membantah adanya janji pemberian sertifikat tanah secara gratis kepada masyarakat.



"Perusahaan tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan sertifikat tanah. Kapasitas PT BTL hanya sebatas membantu dalam pengurusan sertifikat bersama dengan pemerintah desa dan kecamatan. Sejak kapan perusahaan memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat?" tegasnya.



Sistem Berkelanjutan

Di tempat yang sama, VR Manager Internal PT BTL, Purnama, menjelaskan bahwa setelah pembukaan lahan, segera dilakukan penanaman jenis pohon gamal dan kaliandra. Pohon-pohon ini menjadi bahan baku utama di masa depan.

"Pohon-pohon yang kami tanam akan menjadi bahan baku utama setelah 4 tahun. Proses panen dapat dilakukan hingga lima kali setelah satu kali penanaman," kata Purnamasambil menunjukkan video dari lahan yang sudah mereka tanami.

Dalam proses pemanenan, pohon dipotong sekitar 50 sentimeter dari tanah, sehingga pohon tersebut dapat tumbuh kembali dan siap dipanen lagi di kemudian hari.

"Setelah lima kali panen, barulah kami mengganti pohon tersebut dengan yang baru, tanpa mencabut akarnya, sehingga kesuburan tanah tetap terjaga," tambahnya.

Purnama juga menjawab isu tentang hanya dua jenis kayu yang disebut ada dalam kawasan yang kini menjadi HGU perusahaan. Menurutnya, data itu hanya mencatat jenis kayu yang dominan, sementara hasil penelitian menunjukkan ada sekitar 15 jenis kayu di wilayah konsesi BTL.

"Yang dicatat adalah yang dominan, dan sistem memerlukan pencantuman nama latin. Hanya dua jenis kayu yang memiliki nama latin, dan semuanya sudah tercatat dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH)," pungkasnya.

Jejak Kotor di Lahan Konsesi Investasi Hijau

A Rifki Sufrian – Kilasjambi.com
Industri Biomassa

Said tak bisa menutupi kegusaran dari pancaran mata dan nada bicaranya, saat disinggung bila kemungkinan PT Hijau Artha Nusa (HAN) akan beroperasi lagi setelah “gulung tikar” sejak April 2023 lalu. Perusahaan hutan tanaman energi (HTE) yang meninggalkan jejak deforestasi di desanya.

“Keberadaan HAN sangat merugikan kehidupan masyarakat,” kata Said, Kepala Desa Nalo Gedang, saat dijumpai di rumahnya (30/07/2024).

Apalagi ia mengaku, belum sama sekali bertemu dengan manajemen PT HAN. Saat dilantik sebagai kepala desa terpilih pada tahun 2022, menurutnya, hanya tinggal beberapa sekuriti saja yang menjaga camp milik perusahaan.

Kini, camp tersebut sudah mulai roboh, tidak ada lagi atap seng terpasang, begitu pun dengan papan dinding yang semuanya telah dicopot. Dari pengamatan kilasjambi.com di lapangan, dipuing-puing camp masih banyak tumpukan berkas administrasi dan nota pemakaian barang dengan kop PT HAN, rerumputan menjulang menutupi hampir sekeliling camp disertai onggokan balok kayu yang sudah mulai melapuk.

Selain itu, akses menuju ke titik camp dan areal penanaman sengon sangat sulit dilalui, jalan utama dan koridor menuju lokasi sudah tertutup rapat

dengan semak belukar ditambah dengan kondisi jalan yang licin dan berlumpur. Selain itu, akses menuju ke titik camp dan areal penanaman sengon sangat sulit dilalui, jalan utama dan koridor menuju lokasi sudah tertutup rapat dengan semak belukar ditambah dengan kondisi jalan yang licin dan berlumpur. Kalau pun menerobos jalan pintas melewati perkebunan sawit warga kondisinya pun hampir sama, kita harus melalui tanjakan dan turunancuram dan hanya bisa dilintasi kendaraan roda dua.

Menurut Said, sejak ada HAN, warga semakin sulit mencari kayu yang akan dijadikan papan untuk membuat rumah. Pohon berdiameter besar sekarang sudah sulit ditemukan.

“Dulu areal yang dikelola HAN itu memang masih rimbo, kini yang tersisa hanya kayu jenis semacam pohon karet,” kata Said.

Dampak lainnya adalah banjir tahunan yang semakin luas sejak HAN beroperasi, penebangan pohon alam secara besar-besaran oleh perusahaan mengakibatkan fungsi hutan dalam menyerap dan menahan air hujan tidak lagi maksimal. "Kalau sekarang banjir di desa kami menyebabkan jalan umum tergenang, begitu juga sebagian kebun sawit warga," kata Said.



Kades Tolak HAN Kembali Beroperasi

Said mengaku, sebagai kepala pemerintahan desa dirinya tak bisa berbuat banyak terutama dalam pengawasan dan menerapkan kebijakan bagi perusahaan, korporasi seperti HAN mendapat izin langsung dari pemerintah pusat, mereka di tataran desa hanya mendapatkan sebatas pemberitahuan saja.

Untuk itu, tanpa ragu bila di kemudian hari PT HAN akan beroperasi lagi, sebagai kepala desa, Said akan menolak keberadaan perusahaan, tapi katanya, semua masih tergantung dari keputusan masyarakat terutama pemilik lahan yang mengikat janji dengan PT HAN.

"Saya pribadi menolak, karena tidak ada manfaatnya," kata Said. "Ketika HAN pun masih aktif, warga desa yang diberdayakan juga statusnya hanya buruh kasar," katanya menambahkan.

Fakta yang bikin Said geleng-geleng kepala adalah ketika dia mengetahui bila PT HAN mendapatkan izin penguasaan lahan di Nalo Gedang selama 100 tahun, informasi ini diperolehnya langsung kala diundang rapat bersama pihak Kementerian LHK di Jakarta pertengahan tahun 2023 lalu.



HAN Akui Adanya Deforestasi

Berbeda sikap dengan Kades Nalo Gedang, manajemen PT Hijau Artha Nusa justru menginginkan perusahaan aktif kembali dan terus beroperasi, agar pembukaan tutupan hutan yang sudah dilakukan perusahaan bisa segera ditanami pohon sengon dan tidak memperluas dampak deforestasi.

"Saya sebenarnya berharap perusahaan aktif terus. Kita kan buka lahan, kita [akan] tanam sengon lagi sehingga deforestasi tidak terjadi. Tapi memang [harus diakui sekarang] penanaman tidak jalan," kata Manajer Administrasi dan Marketing PT HAN, Muchlisin Madras melalui sambungan telepon.

Dengan aktifnya kembali HAN, Muchlisin juga berharap karyawan yang dirumahkan bisa dipekerjakan kembali dan hak-hak mereka yang belum dibayarkan bisa dilunasi perusahaan, termasuk dirinya.

Ia mengaku masih tercatat di jajaran manajemen perusahaan hingga kini. Namun sejak operasional perusahaan tidak berjalan, dirinya pun tidak menerima upah lagi.

"Ada beberapa orang sampai sekarang tidak dirumahkan atau tidak di-PHK. Cuma gajinya tidak dibayarkan, banyak yang tidak aktif lagi di manajemen, jadi banyak saya yang handle semua," katanya.

PT HAN adalah pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan nomor SK.183/Menhut-II/2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman.

Perusahaan mendapat izin konsesi seluas 32.620 hektar yang tersebar di Kabupaten Merangin dan Sarolangun. Khusus Merangin, areal konsesi perusahaan investasi Korea Selatan itu terletak di dua desa di Kecamatan Nalo Tantan, persisnya di Desa Nalo Gedang dan Baru Nalo.



Dalam dokumen akta perusahaan yang tercatat di Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang terbit pada 29 Januari 2021 dengan Nomor SP Data Perseroan AHU AH.01.03-0063480, perseroan ini dipimpin warga negara Korea Selatan, Han Man Seong yang berposisi sebagai Direktur. Han di perusahaan ini mengempit 30.475 lembar saham atau senilai Rp3,45 miliar.

Pemilik saham lain adalah Woorim Energy CO., Ltd yang berkedudukan di Bangi-dong, Songpa, Seoul, Korea Selatan. Woorim Energy yang menjadi pemilik saham mayoritas mengantongi 142.000 lembar saham atau senilai Rp14,2 miliar. Dalam dokumen akta tercatat, perusahaan ini masuk kategori penanaman modal asing (PMA).

Kemudian Lee Jonghak sebagai Presiden Direktur yang beralamat di Gangnam-gum Seoul, Korea Selatan tanpa memiliki saham, serta Mohamad Sukri sebagai Komisaris dengan 5.025 lembar saham atau senilai Rp502 juta.

PT HAN awalnya mengembangkan bisnis wood pellet untuk bahan baku energi biomassa dengan menanam pohon sengon. Alih-alih mengembangkan green energy lewat produk biomassa wood pellet, dalam praktiknya perusahaan justru gencar menebang kayu alam.

Di Desa Nalo Gedang, perusahaan mulai menebang kayu pada tahun 2019. Menggunakan alat khusus, kayu-kayu gelondongan itu diangkut ke kilang penggergajian (sawmill) dan kemudian dijual ke Surabaya dan Medan.

Investasi dan label hijau yang terbungkus di PT HAN diduga hanya akal-akalan saja. Perusahaan hanya melakukan greenwashing dan kenyataan perusahaan ini sama sekali tak menjunjung konsep ESG (environment, social, and good governance). Mereka hanya menebang kayu alam dengan dalih mengembangkan energi baru terbarukan. Dugaan ini muncul lewat perbandingan dengan hutan yang telah ditebang itu lebih luas dibandingkan dengan luas penanaman sengon.

Perusahaan mengklaim bahwa sejak beroperasi pada tahun 2019 dan hingga saat ini telah menebang pohon di lahan seluas sekitar 500 hektar lebih. Dari luasan tebangan kayu alam ini, setelah berjalan tiga tahun perusahaan baru menanam sekitar 100 hektar sengon.



Tinggalkan Masalah di Masyarakat

Di sisi lain, keberadaan perusahaan juga banyak meninggalkan persoalan dengan warga sekitar, terutama terkait hak atas pengelolaan lahan masyarakat yang belum dibayarkan oleh PT HAN. Hal ini terbukti dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV Jambi pada awal Maret 2024. Dari hasil monev diketahui PT HAN belum melaksanakan kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat begitu juga dengan kemitraan.

"Selain masih ada hutang dengan masyarakat pemilik lahan, HAN juga masih ada hutang dengan desa sebesar Rp30 juta," kata Said.

Said menceritakan, di periode pemerintahan desa Nalo Gedang sebelumnya ada perjanjian antara perusahaan dengan pihak desa terkait hasil pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan oleh HAN. Nilainya sebesar Rp130 juta. Uang sebesar Rp100 juta telah dibayarkan oleh HAN Ketika masih aktif beroperasi dan masih tersisa Rp30 juta.

"Uang itu kami belikan lahan milik masyarakat untuk dijadikan aset desa, namun kini pelunasannya bermasalah dengan pemilik lahan karena jatah desa belum dilunasi oleh HAN," kata Said

Heri Jasdi, Sekretaris Desa Baru Nalo mengatakan, lahan yang sebelumnya dikelola PT HAN meski telah ditinggal perusahaan tak ada masyarakat yang berani mengusik, areal lahan yang telah ditanam sengon juga dibiarkan begitu saja.

"Sengon teruslah tumbuh, tapi masyarakat dak berani juga mengganggu walau ada lahan milik mereka di situ. Baik masyarakat maupun perusahaan kini sama-sama tidak lagi beraktivitas di situ," kata Heri.

Pengamatan di lapangan, areal lahan yang telah ditinggalkan PT HAN di beberapa perbukitanlandai tampak barisan pohon sengon dengan diameter kira-kira sepaha orang dewasa. Namun, tak sedikit juga lahan yang kayu hutannya telah ditumbang sama sekali belum ditanamin sengon. Tunggul-tunggul kayu hutan masih terlihat jelas akibat aktivitas penebangan hutan.



"Saya tidak bisa memastikan apakah lahan dikembalikan ke masyarakat, atau masih dalam penguasaan perusahaan," kata Heri, saat ditemui di kediamannya akhir Juli lalu.

la memperoleh informasi, selain status lahan yang tidak jelas pasca HAN tidak lagi beroperasi, masih banyak hak-hak pekerja dari desa Baru Nalo dan Nalo Gedang yang belum dilunasi oleh perusahaan.

"Setahu saya ada masyarakat yang hanya pekerja harian saja, tapi ada juga pemilik lahan yang sekaligus juga bekerja di PT HAN," kata Heri Jasdi.

"Pola kerjasamanya yang saya tidak tahu persis seperti apa, tapi kalau untuk desa ada hitungan kubikasinya," katanya menambahkan.

Terkait adanya fee untuk masyarakat dan desa, Muchlisin memberi penjelasan hitungannya dari setiap meter kubik kayu yang dikeluarkan sesuai dengan hasil produksi yang tercantum dalam rencana kerja tahunan (RKT) perusahaan. Perkaliannya, sebut Muchlisin, untuk perkubik kayu perusahaan mengeluarkan fee sebesar Rp50 ribu dengan pengalokasian Rp25 ribu untuk masyarakat pemilik lahan dan separuhnya lagi untuk desa.

"Sebagian besar itu sudah dibayarkan Ketika produksi masih berjalan. Untuk saat ini saya tidak tahu perusahaan masih ada hutang apa tidak, yang jelas dahulu kita bayarkan," kata Muchlisin.



**Gulung Tikar,
Produksi PT HAN
Kurang dari 50 persen**

Dari catatan BPHL Wilayah IV Jambi, sejak April 2023, PT HAN sudah tidak aktif melakukan aktivitas pemanfaatan hutan dan terindikasi telah meninggalkan areal kerja. Sehingga perusahaan belum melaksanakan realisasi kegiatan penanaman sesuai dengan rencana kerja tahunan pengelolaan hutan (RKTPH) selama tiga tahun terakhir kurang dari 50 persen, perusahaan juga belum menyampaikan laporan kinerja secara periodik ke BPHL Wilayah IV Jambi.

Manajemen pun tak mengelak bila HAN dalam beberapa tahun terakhir tidak ada lagi aktivitas. Mulai dari tahun 2021 hingga sekarang, "Sudah tidak ada kegiatan lagi di lapangan," kata Muchlisin.

Meski begitu, Muchlisin memastikan konsesi di kawasan Nalo Tantan masih milik perusahaannya. Ia dengan tegas meminta tidak satu pihak pun yang mengklaim lahan di kawasan PT HAN.

"Lahan itu sebenarnya kan lahan HP (hutan produksi), 100 persen itu HP. Kalau secara aturan, tidak satu orang pun boleh mengambil kayu, apalagi mengklaim wilayah itu yang sudah diserahkan sebagai wilayah konsesi PT HAN," kata Muchlisin.

Sementara BPHL Wilayah IV Jambi memastikan jika hasil monitoring dan evaluasi mereka terhadap PT HAN, laporannya sudah disampaikan ke KLHK. Apalagi monev tersebut juga turut dilakukan langsung perwakilan dari kementerian. Menurutnya, akan ada tindakan tegas terhadap perusahaan, namun akan didahului dengan peringatan tertulis.

"Sekarang kita masih menunggu keputusan dari kementerian, biasanya perusahaan yang tidak lagi mengelola kawasan konsesinya dalam beberapa tahun seperti HAN ini akan diberikan peringatan sampai tiga kali," kata Benny Budiansyah, Kasi Pemantauan dan Evaluasi BPHL Wilayah IV Jambi, 2 September 2024.

Benny mengatakan, pihaknya tidak bisa semena-mena untuk mencabut izin konsesi perusahaan mengingat mereka sudah banyak menggelontorkan investasinya. Tapi setelah dalam tiga kali peringatan PT HAN tetap tidak bisa memenuhi kewajibannya melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang diberikan baru akan ada pertimbangan izinnya dicabut.

"Pelepasan kawasan ke masyarakat melalui skema perhutanan sosial sangat mungkin dilakukan, bila HAN tidak merespon tiga kali peringatan yang kita layangkan ke mereka," kata Benny menegaskan.



FWI dan Walhi Dorong Izin HAN Dicabut

Dari hasil analisa yang dilakukan Forest Watch Indonesia (FWI), luas deforestasi sepanjang tahun 2017-2021 akibat eksploitasi hutan yang dilakukan PT HAN seluas 3.732,9 hektar, jumlah tersebut berpotensi makin bertambah dengan adanya ancaman deforestasi pada tahun 2022-2023 seluas 225,3 hektar. Sedangkan tegakan sengon, FWI mendapati hanya seluas 64,5 hektar. Ini belum lagi terusirnya kelompok Orang Rimba yang telah lama mendiami kawasan hutan di Nalo Gedang yang dikelola oleh PT HAN.

Hasil monev yang dilakukan BPHL Wilayah IV Jambi terhadap PT HAN juga menjadi sorotan FWI. Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI, Anggi Putra Prayoga, mengatakan dari laporan monev itu menunjukkan ketidakmampuan HAN baik dari segi finansial maupun sumber daya manusianya dalam mengelola wilayah konsesinya dalam menanam sengon sebagai bahan baku pengganti energi fosil.

"Kita bersama Walhi Jambi sepakat mendorong kepada pemerintah untuk mencabut izin PT HAN," kata Anggi via sambungan telepon, 12 Agustus 2024.

Tabel Luas Deforestasi di Konsesi PT HAN

Tahun	Kerusakan Hutan	Luas (Ha)
2017-2021	Deforestasi	3.732,9
2022-2023	Alert Deforestasi	225,3

Sumber: Forest Watch Indonesia



la juga mendorong lahan konsesi PT HAN diserahkan dan dikelola oleh masyarakat, menurutnya, kamufase HAN sudah terendus untuk menghabiskan ruang hutan di Jambi. Apalagi ada potensi PT HAN akan melakukan take over areal konsesi ke perusahaan lain.

"Masih ada hutan alam tersisa di sana, ini bisa makin dihabisi bila terjadi take over," kata Anggi.

"Belum lagi terjadi asimetris informasi, hingga saat ini warga di Nalo masih menunggu HAN bagi hasil dari panen kayu sengon di kampung mereka, sedangkan HAN sudah tidak aktif lagi," kata Anggi menambahkan.

Manajer Advokasi Walhi Jambi, Eko Mulia Utomo mengatakan bila dari awal mereka telah menolak keberadaan PT HAN dengan pertimbangan di konsesi perusahaan masih terdapat kesatuan wilayah adat yang masih dikelola masyarakat dengan kearifan lokalnya. Pertimbangan lainnya, aktivitas HAN membuat berubahnya kondisi bentang alam dengan alihfungsi hutan karena komoditi utama perusahaan adalah sengon.

"Situasi hari ini tentu kita mendorong izin HAN dicabut dan dikembalikan hak kelolanya ke masyarakat," kata Eko. Senin, 26 Agustus 2024.

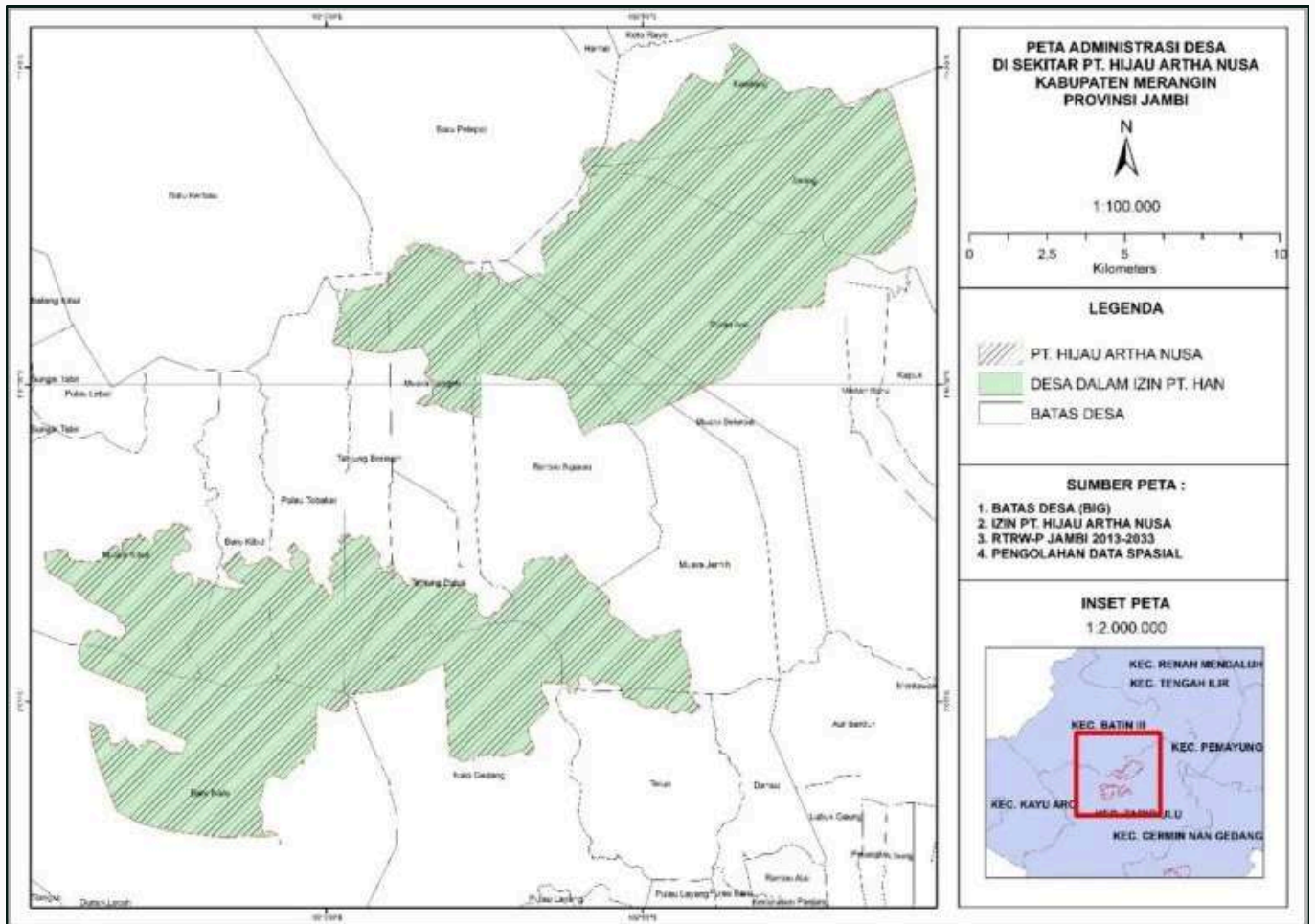
Eko menjelaskan, bila dikembalikan ke masyarakat pengelolaanya bisa dilakukan dengan banyak skema tanpa harus merubah bentang alam.

Status tetap kawasan hutan, dan pemerintah bisa melakukan pendekatan dengan skema perhutanan sosial.

"Tapi perlu juga dicatat, kita tidak hanya mengusulkan pelepasan kawasan HAN saja, tapi juga masyarakat perlu dipersiapkan untuk bisa mengelola kawasan hutan tersebut," kata Eko.

Konteksnya, kata Eko, masyarakat tentu punya kearifan sendiri soal pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan kawasan hutan. Hanya saja, perlu diperkuat kapasitas dan pemahaman kepada masyarakat untuk mengelola hutan berdasarkan regulasi yang berlaku.

Pasca HAN tidak lagi beroperasi, Walhi Jambi telah melakukan assesment awal terhadap sejumlah desa yang berada di sekitar konsesi HAN di Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin. Walhi mengaku tengah melakukan pengumpulan data di lapangan untuk melakukan analisis.



Walhi Jambi tengah melakukan assessment terhadap enam desa di Nalo Tantan yang sebagian kawasannya masuk ke dalam konsesi PT HAN

"Kita terus buka ruang diskusi dengan warga, terutama soal dampak kerusakan lingkungan yang mulai mereka rasakan," kata Eko.

"Belum lagi ternyata sebagian masyarakat tidak tahu bila lahan mereka masuk ke dalam konsesi HAN," katanya menambahkan.

Hanya saja, Walhi belum bisa merincikan berapa luasan deforestasi akibat "pembalakan" yang dilakukan HAN. Namun Walhi mendapati bila ada beberapa lubang larangan tempat bibit ikan bersemayam di beberapa titik sungai sudah menghilang.

Dari assessment itu nantinya, Walhi memastikan akan menelusuri dugaan adanya pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM yang dilakukan perusahaan seperti intimidasi ke masyarakat, "Tapi konteks awal kita masuk dulu ke pelanggaran administrasi," kata Eko.



Kondisi air sungai di kawasan konsesi PT HAN



Penggundulan Hutan Picu Perubahan Iklim

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, hingga kini terus mempopulerkan biomassa menjadi satu dari sederet sumber energi terbarukan pengganti energi fosil. Namun ada celah untuk mendapatkan bahan baku alternatif sebagai pengganti energi fosil batu bara itu bakal menyisakan persoalan penggundulan hutan.

Kondisi itu nantinya justru akan menambah emisi dari sektor kehutanan, pertanian, dan lahan (AFOLU). Greenpeace Indonesia menilai dari awal memang tidak ada niat yang tulus dari pemerintah untuk benar-benar meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi bersih. Persoalan krisis iklim saat ini sudah jelas dan tidak terbantahkan. Sehingga jika skema palsu (co-firing PLTU) ini tetap dijalankan akan memperparah emisi.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memang menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif untuk program energi terbarukan dengan menggunakan biomassa. Program ini, katanya, untuk mencapai target net zero emission yang tersusun dalam peta jalan menuju 100 persen energi terbarukan pada 2060. Dukungan untuk mencapai net zero emission ini diberikan dalam berbagai bentuk, salah satunya menggenjot co-firing PLTU.

Co-firing adalah pembakaran dua (atau lebih) jenis bahan yang berbeda pada waktu yang sama. Salah satu keuntungan dari co-firing adalah pembangkit yang ada dapat digunakan untuk membakar bahan bakar baru, yang mungkin lebih murah atau lebih ramah lingkungan seperti biomassa.

Peluang bisnis biomassa ini banyak dilirik dan dimanfaatkan investor dengan kedok investasi dan label hijau, mereka berlomba-lomba dapat mengantongi izin konsesi dari pemerintah. Salah satunya seperti yang dilakukan PT Hijau Artha Nusa yang beroperasi di Provinsi Jambi.

Dengan modus perusahaan hutan tanaman energi, mereka justru menggasak tutupan hutan yang menjadi salah satu pemicu semakin lajunya perubahan iklim.

Dari pengamatan iklim di Provinsi Jambi oleh BMKG dimulai sejak tahun 1983. Kenaikan suhu di Jambi terus meningkat seiring dengan peningkatan suhu udara di Indonesia dan perubahan iklim global. Pada tahun 2023 kondisi iklim di Indonesia mengalami rekor tahun terpanas kedua dibanding tahun normal (1991-2020) dengan anomali sebesar +0.5 derajat celsius, demikian juga untuk Provinsi Jambi, di mana kondisi terpanas terjadi di tahun 2023 tepatnya pada tanggal 14 Mei 2023. Pada saat itu, data hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Jambi di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 36.1 derajat celsius.

Baiknya Izin Konsesi di Lahan Terbengkalai

Akademisi UIN Sultan Thaha Saifuddin (STS) Jambi, Arfan Aziz menyebut, dugaan akal-akal yang dilakukan perusahaan seperti HAN dimulai dari persoalan adanya tiga blunder kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan. Yaitu hak pengusahaan hutan (HPH), hutan tanaman industri (HTI) dan hak guna usaha (HGU). Blunder yang menurutnya dilakukannya sejak jaman orde baru.

"Sudah tahu tiga kebijakan itu blunder, kenapa pemerintah langsung memberikan izin konsesi kepada perusahaan seperti HAN secara gelondongan dan tersebar di tiga blok (blok Tabir Barat-Tabir Ulu, blok Nalo Tantan dan blok Sarolangun)," kata Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN STS Jambi itu. Kamis, 29 Agustus 2024.

Arfan sangat mendukung kebijakan transisi energi yang gencar digaungkan pemerintah, sebab tidak selamanya masyarakat bergantung dengan energi fosil dan harus mulai beralih ke energi baru terbarukan (EBT) untuk mendukung target net zero emission yang tersusun dalam peta jalan menuju 100 persen energi terbarukan pada 2060 melalui program biomassa.

Namun, kata Arfan, target bebas emisi ini juga tidak harus memberikan izin konsesi kepada perusahaan dengan label investasi hijau di kawasan hutan yang masih terlindungi tutupan hutannya. Sehingga yang terjadi di lapangan kenyataannya korporasi malah memabat tegakan pohon yang membuat terjadinya deforestasi besar-besaran dan justru menyebabkan terjadinya pelepasan emisi.

"Hemat kami, akan lebih baik pemerintah dalam hal ini KLHK berikan izin konsesi kepada perusahaan seperti HAN di lahan-lahan yang terbengkalai. Bukannya di kawasan hutan," kata Arfan.

Konsesi di kawasan hutan ini, katanya, banyak menimbulkan permasalahan. Mulai dari konflik warga dengan perusahaan, masyarakat dengan satwa, terusirnya komunitas adat terpencil hingga pada perubahan lanskap alam.

"Yang terbesar tentu berdampak besar kepada kerusakan lingkungan yang memiliki efek jangka panjang," kata Arfan.

Jadi solusinya memang negara tidak perlu memberikan izin pelepasan kawasan hutan ke perusahaan dengan volume yang sangat luas. Arfan mendorong, izin konsesi ke perusahaandiberikan secara bertahap, serta harus dilakukan monitoring dan evaluasi.

"Selain izin diberikan saja kepada lahan yang terbengkalai tadi, luasannya juga bertahap, tidak perlu langsung tiga blok seperti yang dikantongi HAN. Ini bisa jadi solusi menurut kami," katanya.



Warga Perkotaan Hadapi Polusi dan Kerusakan Lingkungan Akibat Pabrik PLTBm

Rifani Halim – Kalanganjambi.pikiran-rakyat.com
Industri Biomassa

Jambi - Puluhan truk bermuatan kayu campuran yang ditutupi terpal biru, terparkir di sepanjang jalan dekat PT Rimba Plasma Sejahtera Lestari (RPSL) di RT 24, Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Pal Merah, Kota Jambi, pada 6 Agustus 2024.

Truk-truk tersebut terhenti karena dihadang oleh dua anak perempuan, Fadiyah Alkaff (16) dan kakaknya, Fadilah Alkaff. Mereka menghadang truk-truk yang melintasi jalan di depan rumah nenek mereka, Hafsah di dengan membentangkan beberapa batang kayu di jalan.

Protes ini dilakukan oleh keluarga nenek Nafsiah, yang diinisiasi oleh Fadiyah, karena rumah dan sumur nenek mereka rusak akibat aktivitas pabrik dan truk yang setiap hari berlalu-lalang di pemukiman menuju RPSL.

Aktivitas truk dan pabrik RPSL ini juga dinilai menyebabkan pencemaran polusi dan getaran yang merusak rumah-rumah di sekitar, sejak perusahaan berdiri 10 tahun silam.

Aksi penghadangan yang dilakukan cucu Nafsiah ini didasari oleh kerugian yang dialami keluarga mereka yang tidak dipertanggungjawabkan oleh pihak PT RPSL, seperti kerusakan rumah yang retak dan sumur yang rusak. Selain itu, operasi pabrik RPSL yang mengolah kayu menjadi Wood Pellet

biomassa untuk pembangkit listrik juga berdampak pada polusi lingkungan di sekitar.

Memang, jarak pabrik tersebut tidak begitu jauh dari pemukiman warga. Masyarakat sempat melakukan protes saat awal pendirian pabrik, namun setelah banyak yang diajak bekerja di perusahaan tersebut, protes pun mereda.

"Setelah masyarakat diajak bekerja di perusahaan, tidak ada lagi yang protes. Banyak masyarakat sini yang sudah bekerja di situ (Pabrik RPSL)," kata Fadilah saat ditemui awal Agustus lalu.

Seorang pria yang tak ingin menyebut namanya juga mengaku merasakan hal yang sama akibat aktivitas truk dan pabrik pengolahan Wood Pellet biomassa yang beroperasi di tengah pemukiman warga, melintasi jalan umum.

"Samalah, cuma lebih resah lagi soal angkutan yang lalu lalang tidak tahu siang dan malam," kata seorang warga saat ditemui (03/08/2024).

Menurutnya, sebagian besar masyarakat direkrut untuk bekerja di perusahaan itu paska konflik sosial di kawasan RT 24 Payo Lebar.

"Itupun baru-baru ini setelah ribut-ribut, sebelumnya tidak ada," ujarnya.

Dampak dari mondar-mandir truk dan cerobong asap juga dinilai menimbulkan debu di sekitar rumah warga.

"Macam debu nyembur ke sini semua," ungkapnya.

Keluarga nenek Hafsah, melalui Fadiah dan Fadilah, hampir satu dekadememprotes keberadaan perusahaan yang berdampak pada masyarakat ini. Keluarga nenek Hafsah ditemani Fadilah, pun sempat dipertemukan oleh Gubernur Al Haris dengan Tommy Fahrizal, Corporate Holding PT RPSL dan juga selaku juru bicara perusahaan dan beberapa perwakilan, pada 15 Agustus 2024.

Konflik panjang itu awalnya hendak diselesaikan oleh pemerintah Kota Jambi, namun perundingan antara kedua belah pihak menemui kebuntuan, hingga diambil alih oleh Gubernur Jambi. Al Haris saat diwawancarai mengatakan, penyelesaian tuntutan yang selama ini menjadi tuntutan keluarga nenek Hafsah kepada PT RPSL berupa tali asih sejumlah uang tunai yang tak disebutkan secara rinci jumlahnya. Haris bilang, telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak.

"Kedua belah pihak sudah sepakat berdamai secara kekeluargaan, sudah ditandatangani semua artinya ini sudah selesai semua," kata Haris.

Meski permasalahan sosial antara keluarga nenek Hafsah dan PT RPSL telah usai, kerusakan lingkungan dan kenyamanan warga sekitar mengenai operasional belum juga teratasi.

Direktur Perkumpulan Hijau Feri Irawan mengatakan, penyelesaian konflik sosial masyarakat dengan pola memberikan tali asih dan pembayaran terhadap warga yang terdampak, belum menyelesaikan masalah lingkungan.

"Orang itu dibayar atas nama ganti rugi, ganti rugi lingkungan itu tidak bisa dibayar dengan nilai. Nilai kerusakan lingkungan lebih besar dari pada uang karena dampak lingkungan mulai dari limbah perusahaan, asap, butiran hasil produksi itu menyebar di sekitar pabrik dalam bentuk udara. Dapat berefek pada ibu hamil dan bayi," kata Feri.

Selain itu, operasional pabrik dan kendaraan yang hilir mudik membawa kayu-kayu juga menyebabkan kebisingan.

Feri menyebut, di kemudian hari bisa saja terjadi masalah kesehatan dan lingkungan yang dirasakan oleh warga. Dia menyebut, secara tata ruang Kota Jambi, keberadaan PT RPSL yang berada di kelurahan Payo Selincah, kecamatan Pall Merah Kota Jambi menyalahi aturan.

"Itu sudah jelas, itu tata ruang untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan permukiman. Itu tidak boleh pabrik besar yang beroperasi 100 ribu per ton dalam satu jam mengelola kayu di dalam perkampungan," sebut Feri.



Feri menduga bahwa PT RPSL mungkin tidak memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA), yang merupakan izin resmi untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu di hutan produksi, termasuk dalam kegiatan penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran kayu.

"Mereka harus memiliki izin resmi untuk memanfaatkan hasil hutan. Tanpa izin tersebut, mereka berpotensi mendukung aktivitas deforestasi dan penggundulan hutan di Jambi," ujar Feri.

Perkumpulan Hijau, sebutnya telah membuat kajian terhadap PT RPSL. Hasilnya ada kejanggalan dalam proses penerbitan izin.

"Apalagi sekarang perizinan sudah berbasis Online Single Submission (OSS). Selain itu, dari segi substansi, izin ini juga cacat administrasi," tambahnya.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Izin Usaha, izin industri primer hasil hutan hanya dapat diberikan kepada pemegang IUPHHK, IUPHHBK, pengelola hutan, atau IUPHKm pada hutan produksi atau HPHD pada hutan produksi di wilayah kerjanya. Dengan demikian, jika PT RPSL beroperasi di Kota Jambi, mereka harus memiliki hutan produksi yang mereka kelola sebagai sumber bahan baku.

"Jika mereka tidak memiliki wilayah kelola di Kota Jambi, dari mana mereka mendapatkan kayu untuk memproduksi kayu olahan sebanyak 100.000 ton per tahun? Kami khawatir ada praktik penebangan kayu ilegal," kata Feri.

Siapa Pemilik PT RPSL?



Menurut data yang dihimpun Kalanganjambi.pikiran-rakyat.com, RPSL memiliki pemegang saham mayoritas, yaitu ELL Environmental Holdings, sebuah perusahaan besar asal Tiongkok. Dalam situs resminya, ELL mengoperasikan pengelolaan limbah air di Jiangsu, Tiongkok.

Direktur Radius Suhendra, seorang konglomerat asal Medan yang juga pendiri PT Indoferro, perusahaan pengolahan dan pemurnian bijih besi serta nikel, menjabat sebagai Direktur Eksekutif ELL. Selain itu, ia juga menjadi anggota Dewan Komisaris PT Rimba Palma Sejahtera Lestari (RPSL)

Radius merupakan putra dari Fajar Suhendra, pendiri Growth Steel Group. Berdasarkan dokumen pemegang saham RPSL tahun 2019, Fajar Suhendra tercatat memiliki 6.927.000 lembar saham dengan nilai sekitar Rp6,9 miliar.

Sugih Suhendra, pendiri PT Growth Asia, memegang 4.618.000 lembar saham senilai Rp4,6 miliar. Sedangkan 95% saham RPSL dikuasai oleh ELL melalui anak usahanya, PT Weal Union Limited yang berbasis di Hong Kong. ELL telah menginvestasikan Rp219,3 miliar dalam bisnis produksi wood pellet dan pembangkit listrik tenaga biomassa yang dikelola RPSL di Kota Jambi.

PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari memiliki Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi Nomor 132/Kep.Ka.BPMD-PPT.4/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang kegiatan Pembangunan Palm Kernel Mill dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Biomassa 2 x 15 MW di Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi.

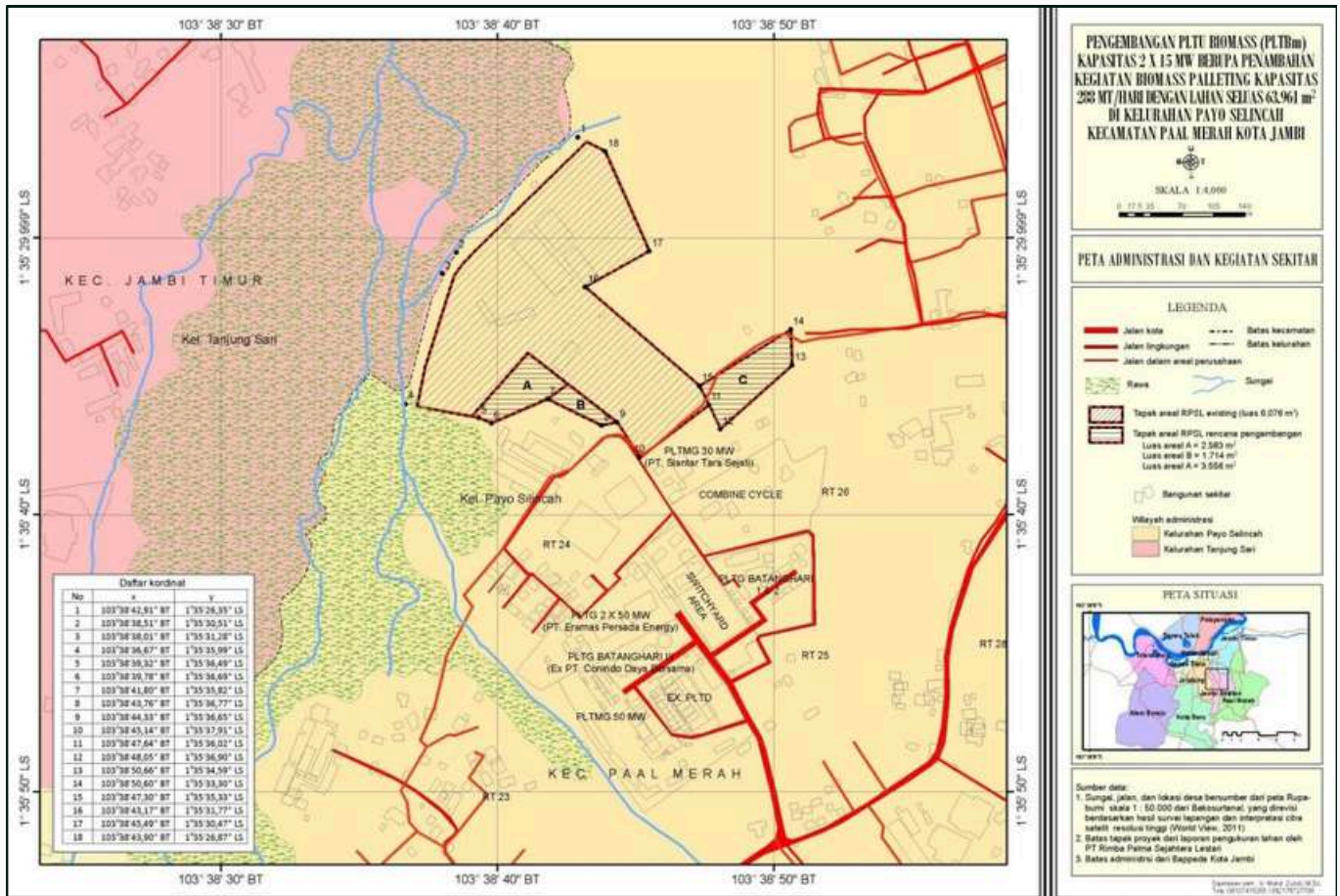
Lokasi kegiatan berada di Jalan Berdikari No. 47 RT. 24 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi Provinsi Jambi. Pembangkit Listrik Tenaga Uap Biomassa (selanjutnya disingkat PLTBm) yang menghasilkan listrik, sebesar 5 MW dipakai untuk keperluan sendiri dan sisanya 10 MW dijual beli "excess power" ke PT. PLN WS2JB di Palembang.

Humas PT RPSL Defri saat dikonfirmasi menerangkan, jika pabrik perusahaan berada jauh dari pemukiman warga RT 24 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Namun akses untuk keluar masuk kendaraan harus melewati pemukiman warga.

"PLTU kita ini kan pltbm, jadi suara mesin-mesinnya itu nggak [bising] ketika operasional. Hanya pas baru pertama startup hidup aja yang dia agak besar suaranya," kata Defri saat dihubungi via telepon akhir Agustus 2024. Defri mengaku perusahaan telah melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar untuk memitigasi dampak negatif yang dialami warga sekitar. Mempertanyakan keluhan langsung.

"Kita CSR aktif bulanan kepada masyarakat yang terdampak. Dampak buruk dan kerugian balik lagi cara kita ya CSR setiap bulannya," ujarnya.

Defri juga mengklaim, perusahaan PLTBm itu rutin melaporkan kegiatan operasi ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Uji kebisingan, debu dan getaran di ukuran ambang batas normal.



Peta pabrik PT Rimba Palma Sejahtera Lestari di Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Pal Merah, Kota Jambi Istimewa

Siapa Pemilik PT RPSL?

Dilansir dari website YLBHI.or.id, 29 organisasi masyarakat sipil mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak penggunaan biomassa kayu dalam strategi transisi energi pemerintah.

Mereka menganggap bahwa penggunaan biomassa kayu tidak hanya memperpanjang emisi polutan di sektor pembangkitan listrik, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat adat dan penduduk sekitar hutan yang tergantung pada kelestarian lingkungan.

Dalam upaya mencapai target 23% bauran energi pada 2023, pemerintah mendorong penggunaan biomassa sebagai bagian dari solusi. Biomassa pelet kayu diusulkan sebagai campuran batubara di PLTU (co-firing) atau digunakan secara mandiri di Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm).

Peta jalan PLN menargetkan co-firing hingga 10% di 52 PLTU yang sudah ada, dan hingga 30% di PLTU baru. Pemerintah mengklaim telah menurunkan emisi karbon sebesar 717.616 ton melalui pembakaran 668.869 ton biomassa di 41 PLTU.

Riset Trend Asia mengkritik klaim tersebut, menegaskan bahwa perhitungan pemerintah berdasarkan asumsi netral karbon dari pembakaran biomassa adalah keliru. Menurut perhitungan mereka, pembakaran pelet kayu dalam jumlah yang disebutkan akan menghasilkan emisi setara karbon sebesar 1,188 juta ton.

Asumsi netralitas karbon ini dianggap tidak tepat karena ekspansi Hutan Tanaman Energi (HTE) yang dibutuhkan untuk mendukung co-firing biomassa justru berpotensi mendorong deforestasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan emisi baru.

Manager Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI, Anggi Putra Prayoga, menyatakan bahwa industri listrik berbasis biomassa hanya merupakan bentuk kamufase. "Ini semua hanyalah kamufase dalam transisi energi, tujuannya sebenarnya untuk menebang kayu," ungkap Anggi saat diwawancarai Kalanganjambipikiran-rakyat.com.

Menurutnya, perusahaan hanya berupaya memanfaatkan kayu dari hutan rakyat maupun hutan alam untuk keuntungan bisnis. Pembangunan PLTBm di Jambi, katanya, akan mendorong deforestasi yang lebih luas, yang bertentangan dengan kondisi sosial dan budaya setempat.



Sangat sulit melacak asal usul kayu dengan legalitas yang jelas. Mereka mencampur kayu-kayu dari berbagai sumber tanpa kejelasan legalitas, kemudian mengklaim bahwa kayu tersebut merupakan limbah," jelasnya.

Jika perusahaan benar-benar berkomitmen pada transisi energi dan pengurangan emisi, menurutnya seharusnya mereka tidak menebang kayu, karena tindakan tersebut justru meningkatkan emisi karbon.

Menurut Anggi, pembakaran kayu membutuhkan waktu 40 hingga 100 tahun untuk mencapai kondisi Netral Karbon, dan itu pun hanya jika dilakukan rehabilitasi, sementara PT RPSL tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi karena mereka hanya memanfaatkan masyarakat.

Dwi Nanto, Manajer Kajian dan Penguatan Informasi Walhi Jambi, menekankan bahwa transisi energi tidak cukup hanya disebut sebagai energi baru dan terbarukan.

Dwi menyebut sejak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencanangkan program 1,29 juta hektar untuk pembangunan Hutan Tanaman Energi (HTE), di Provinsi Jambi sudah ada beberapa lokasi perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang diubah menjadi HTE yang pada akhirnya bakal mendorong deforestasi.

"Jika energi baru terbarukan diproduksi dari biomassa tetapi dilakukan dengan cara deforestasi, sama saja seperti batu bara. Akhirnya kita tetap merusak hutan. Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga harus dipertimbangkan," pungkasnya.





Ketika Kesehatan Warga yang Ada di Sekitar Pabrik PT RPSL Harus Jadi Perhatian

Rara Khushsoh Azzahro (RKA) – Jambian.id
Industri Biomassa

JAMBIAN.ID – Sore itu jalanan tampak sepi saat Jambian.id dengan bersepeda motor mengitari area pemukiman warga yang berdekatan dengan pabrik PT Rimba Palma Sejahtera Lestari (PT RPSL), sebuah perusahaan pengolah wood pellet untuk tujuan ekspor ke Korea Selatan yang juga mengoperasikan PLTBm (Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa).

Dalam cuaca terik berdebu itu, terasa bau serbuk-serbuk kayu, yang berasal dari pabrik yang berlokasi di RT 24, Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi tersebut.

Keberadaan perusahaan itu memang cukup dekat dengan rumah-rumah warga, ada yang hanya sekitar 5 meter jaraknya. Saat dijumpai untuk diminta tanggapan tentang debu-debu tersebut, tak banyak warga yang merespon. Mereka cenderung menghindar.

"Orang di sini banyak yang nggak mau buka suara. Karena mereka banyak yang mencari nafkah, bekerja di RPSL. Kalau sengaja nanya, ya pasti mereka nggak mau jawab. Tapi kalau lagi nggak sengaja ngobrol sesama warga, ada aja yang dikeluhkan," ungkap nenek Hafisah, seorang warga setempat.

Dia salah seorang warga yang tidak bekerja di perusahaan, dan keluarganya mulai merasakan dampak kesehatan sejak tahun 2017, atau sekitar setahun sejak PT RSPL beroperasi.

"Adik saya kena penyakit kulit. Kulitnyo tekelopak-tekelopok (terkelupas-red) sampai ke leher tekelopak semuo. Akhirnya dio berobat, terus di sano dio didiagnosa gitu kan, allergen gitu. Nah penyebabnyo karno limbah atau serbuk-serbuk. Nah serbuk kayu itulah yang mengakibatkan kulit leher, tangan sampai ke kaki. Bagian wajahnya total-total," tuturnya.

Hal serupa disampaikan oleh Dandi (nama samaran) seorang warga yang tinggal di sekitar pabrik. Dia masih ingat, saat masih duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, sempat mengalami gangguan pernapasan dan gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Namun keluarganya juga enggan mencari tahu lebih dalam asal penyakitnya.



Kasus Gangguan Pernapasan Tertinggi

Selain penyakit gatal-gatal di kulit, penyakit yang biasanya diderita oleh warga di daerah yang berdekatan dengan wilayah industri adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Dokter Rini Kartika Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Jambi memaparkan bahwa kasus ISPA ini masih jadi penyakit tertinggi yang ditemukan di Kota Jambi.

Sampai dengan Juli 2024, angka ISPA dengan dugaan non pneumonia pada anak sebanyak 8.612 kasus, kasus dengan dugaan pneumonia 188, dan 4 kasus dengan dugaan pneumonia berat atau dengan total keseluruhan 8.804 kasus.

Senada, dr. Tini, Kepala Puskesmas Payo Selincah menyampaikan terdapat 376 data kasus ISPA di Puskesmas Payo Selincah telah terjadi pada September 2024. Di mana, di antaranya dibagi Acute Pharyngitis sebesar 192 kasus dan Acute Nasopharyngitis [common cold] ada 184 kasus.

"Di daerah sini kan ada pabrik-pabrik, [namun] itu perlu tim yang ahli yang lebih tahu untuk memastikan pengecekannya. Beberapa bulan kemarau juga bisa jadi berdampak," jelasnya.

Sementara itu dr. Ikalius, Sp.P menjelaskan secara medis pemukiman warga yang dekat dengan daerah pabrik yang menghasilkan debu berpotensi terkena interstitial lung disease atau penyakit paru interstitial (ILD). Penyakit itu membutuhkan waktu lama baru bisa terlihat, paling tidak 10 hingga 20 tahun.

Gejala yang terjadi penderita mengalami batuk-batuk yang berulang. Semakin dekat dengan sumber debu perusahaan, maka semakin besar peluang kronis pada penderita.

"Batuk-batuk, kemudian berdahak, lama-lama dia (penderita-red) sesak. Setahun, dua tahun kalau belum sampai 10 tahun belum ketahuan. Kelihatannya kalau dicek dari spirometri (tes fungsi paru-paru-red) dan itu baru bisa dicek minimal kalau sudah 10 tahun," ungkap dia.

Biasanya penderita yang belum melewati fase 10 tahun dengan gejala beratnya, ketika berobat akan didiagnosa bronkitis kronis sebelum menjadi ILD. Penyakit jenis ILD merupakan penyakit permanen yang akan diidap penderita seumur hidup.

"Paru-parunya sudah tidak lentur lagi. Kita lihat sama seperti kawat per kan ada yang lentur terus ada yang sudah kaku, paru-paru pun sama kayak gitu," jelas dia.

Dia menyarankan agar perusahaan-perusahaan membuat agar limbah debu tidak terkontaminasi kepada masyarakat dan pekerja di dalamnya

Perusahaan Rutin Lakukan CSR Sebagai Bentuk Kompensasi

Defri, Humas RPSL mengklaim PT RPSL atau PLTBm mereka jaraknya terlalu dekat dari pemukiman warga.

"Cuma akses untuk keluar masuk kendaraannya saja yang harus melewati pemukiman warga," sebutnya. Dia pun mengatakan jika suara mesin yang berasal dari operasi pabrik tidak sampai mengganggu warga. "Mesin PLTBm yang kami gunakan suaranya tidak berisik, malah gak kedengaran sama sekali, kecuali pas pertama started up."

Dari pihak perusahaan sebutnya, mitigasi yang diakui untuk mengurangi dampak negatif terhadap warga menurutnya sudah dilakukan dengan pendekatan langsung ke warga. Menanyakan keluhannya apa, dan melakukan CSR aktif setiap bulan kepada warga yang terdampak.



Kompensasi Finansial Tidak Mengatasi Kerusakan Lingkungan

Feri Irawan, Direktur Perkumpulan Hijau, menegaskan bahwa cara menyelesaikan konflik sosial dengan memberikan tali asih atau kompensasi kepada warga yang terdampak tidak akan pernah cukup untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan.

"Orang-orang diberi uang dengan alasan ganti rugi, tapi kerusakan lingkungan tidak bisa dihargai dengan uang. Dampaknya jauh lebih besar. Limbah perusahaan, asap, dan partikel kecil hasil produksi menyebar ke udara di sekitar pabrik. Ini bisa berdampak buruk, terutama bagi ibu hamil dan bayi," kata Feri.

Dia juga menyoroti kebisingan yang ditimbulkan oleh operasional pabrik dan kendaraan pengangkut kayu yang hilir mudik, menambahkan bahwa dalam jangka panjang, ini bisa berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup warga sekitar. Feri menegaskan bahwa keberadaan PT RPSL di Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, melanggar aturan tata ruang.

"Sudah jelas, area itu seharusnya digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan permukiman, bukan untuk pabrik besar yang mengolah 100 ribu ton kayu per jam di tengah perkampungan," ujar Feri, menekankan pentingnya menjaga tata ruang kota agar sesuai dengan fungsinya.

PEMERIN
TAH DESA
BARA DAN
SELURUH MASYA
RAKAT DESA
MELARANG

KERAS
BERAKTIPITAS
MELEWATI BATS
PATOK INI

Carut Marut Investasi Biomassa di Pulau Buru

Khairiyah Fitri – Tempo
Industri Biomassa

Kementerian Pertanian berkolaborasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero membuka peluang pengembangan biomassa di Indonesia, dengan menggunakan lahan tandus untuk ditanami bahan baku biomassa.

"Kita Kementerian Pertanian dan PLN akan perluas kegiatan kita ini di seluruh Indonesia. Dari 46 pembangkit PLTU kita, tentunya untuk pengembangan ekosistem biomassa berbasis ekonomi kerakyatan dan pertanian terpadu," Kata Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono saat menghadiri peresmian pengembangan ekosistem biomassa di Tasikmalaya, Kamis, 26 September lalu.

Sejalan dengan itu, pemerintah mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Biomassa (PLTBm) dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 4 tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri ESDM No. 50 tahun 2017.

Dalam Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, Pulau Buru menjadi salah satu lokasi rencana dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) pengganti PLTMG. Dengan proyek Namlea 2 berkapasitas 10 MW.

PLN mengklaim upaya penurunan emisi sebesar 11 juta CO₂e melalui co-firing biomassa. Upaya itu diperlukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan lahan, regulasi serta kepastian pasokan bahan bakar biomassa dan biogas.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, pasokan dan sumber bahan bakar biomassa harus dipastikan dalam jangka panjang sebelum melakukan pembangunan pembangkit biomassa.

"Kami memanfaatkan lahan kering dengan luas total 1,7 hektar yang tersebar di seluruh tanah air sehingga mampu berkontribusi dalam upaya penurunan emisi sebesar 11 juta ton CO2e melalui co-firing biomassa," kata Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 28 September lalu.

Pada tahun 2023, mantan PJ Bupati Djalaludin Salampessy meneken kerjasama dengan PT Inagro Cipta Nusantara, perusahaan ini bakal membuka lahan 70.007 hektar untuk mengembangkan tanaman biomassa.

Beralih kepemimpinan ke PJ Bupati yang baru makin membuka keran investasi di sektor industri dan energi.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Buru tengah merevisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buru tahun 2025-2045.

Sedikitnya ada empat poin utama dalam perubahan Perda RTRW tahun 2025-2045, diantaranya;

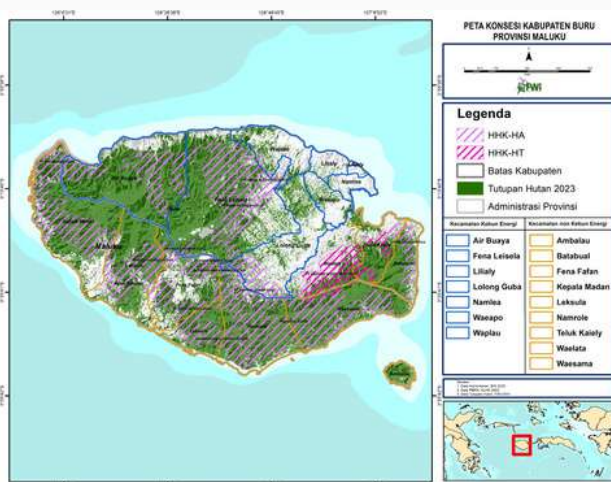
- 1 Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis berupa Proyek Strategis Nasional terdapat di Kabupaten Buru, yakni Bendungan Waeapo
- 2 Perubahan batas administrasi daerah berbatasan dengan Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Permendagri 82 Tahun 2008
- 3 Perubahan batas garis pantai akibat penegasan batas wilayah
- 4 Dinamika kebutuhan ruang untuk kepentingan investasi di Sektor Industri, sektor energi, maupun pengembangan kawasan perumahan, kawasan pertanian, kawasan pariwisata.

"Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi kebutuhan mendesak bagi Pemerintah Kabupaten Buru, mengingat adanya perubahan lingkungan strategis," kata PJ Bupati Buru, Syarif Hidayat saat membuka forum Konsultasi Publik ke-2 penyusunan dokumen revisi Perda RTRW, Rabu, 2 Oktober lalu.

Manajer Komunikasi Forest Watch Indonesia, Anggi Putra Prayoga mengatakan, kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Energi (HTE) tidak bisa menjamin keselamatan hutan alam.

"Forest Watch Indonesia melakukan analisis mengenai estimasi proyeksi deforestasi dari seluruh perusahaan HPH dan HTI di Indonesia," kata Anggi.

Melalui skema multi usaha kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Tahun 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, memberikan peluang usaha yang lebih luas bagi pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT untuk berkecimpung melakukan pembangunan HTE.



Peta Konsesi Kabupaten Buru Provinsi Maluku

Oleh pemerintah, pengelolaan Perhutanan Sosial dibungkus melalui kebijakan untuk melakukan bisnis energi biomassa yang berpotensi menimbulkan deforestasi. Proyeksi deforestasi, kata Anggi, dihitung dengan menggunakan pendekatan aksesibilitas. Aksesibilitas diartikan sebagai lama waktu yang dibutuhkan dari perjalanan konsesi HPH, HTI, dan Perhutanan Sosial (PS) ke titik PLTU terdekat.

"Metode yang digunakan yaitu metode cost distance dengan parameter keberadaan jalan, topografi dan landcover," kata dia.

PT Inagro Cipta Nusantara, kini membuka bisnis tanaman energi biomassa di Pulau Buru. Dalam waktu singkat perusahaan agro industri itu melakukan proyek penanaman meski berkali-kali diprotes masyarakat. Ada empat perusahaan di bawah PT Inagro Cipta Nusantara yang akan menjalankan konsesi, masing-masing, PT Waru Agro Manise seluas 20,120 hektar, PT Agro Pata Manise seluas 15,776 hektar, PT Agro Waa Nusa Jaya seluas 20.000 hektar, PT Agro Dati Pusaka seluas 14,111 hektar.

Proyek penanaman bahan baku biomassa ini tersebar di sepanjang pantai utara Pulau Buru. Di 7 kecamatan dan 48 desa dengan izin usaha tanaman kaliandra, lamtoro dan gamal. Tiga tanaman ini akan diolah menjadi kayu cacah (woodchip). FWI menganalisis secara spasial tujuh kecamatan yang disasar perusahaan HTE itu diduga menggunakan lahan HPH yang tidak aktif.

"Jika secara spasial kita analisis maka kecamatan yang disasar oleh 4 perusahaan HTE baru di Pulau Buru itu kemungkinan besar akan memanfaatkan pada konsesi tersebut, tapi ini masih dugaan," kata Anggi. Lahan HPH yang tadinya tidak aktif mengajukan izin baru ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Pola ini ditemukan di daerah lain, di mana lahan HPH yang sudah tidak aktif berubah menjadi usaha tanaman," ungkapnya.

Tempo menelusuri sejumlah desa yang akan dijadikan lokasi proyek tanaman biomassa. Berbagai masalah mengemuka, seperti konflik antara masyarakat adat dan perusahaan, ancaman banjir. Para perempuan adalah kelompok yang paling rentan karena ruang hidup mereka disulap menjadi proyek berkedok pembangunan daerah.



Aroma wangi cengkih menyeruak saat memasuki gapura Desa Skikilale, Kecamatan Waplau. Di sepanjang jalan desa berbukit itu tergelar cengkih di kanan kiri. Hasil bumi itu dijemur berderet di atas tanah. Desa tampak sunyi siang itu, Sabtu, 3 Agustus 2024. Para warga rupanya tengah berada di kebun. Agustus merupakan musim cengkih di Pulau Buru. Para petani akan berlomba pergi ke dusung, istilah kebun bagi orang Maluku.

Di ujung tanjakan desa, terlihat seorang perempuan tengah berlutut, tangan kanannya cekatan menebar cengkih di terpal berukuran 1x2 meter agar tak menumpuk di satu sisi.

"Bajalang suda (jalan sudah) jangan sampai malam," teriaknya kepada anak perempuannya.

Putrinya Belvia (8) tengah bersiap berkeliling kampung menjual terang bulang, istilah untuk martabak manis di Maluku. Terang bulan itu diisi di dalam kontainer plastik persegi panjang.

Sepasang anak dan ibu itu tampak sedang bercakap. Rupanya mereka membuat kesepakatan, setelah berdagang Belvia boleh mengambil sebesar Rp 5 ribu dari hasil jualannya itu. Sambil berpayung, bocah itu melangkahkan kakinya menjauh dari sang ibu. Cuaca memang sedang terik, supaya coklat meses di dalam terang bulan tak meleleh.



"Mama kalau laku semua ini beta (saya) ambil berapa?," ucap Belvina. "Rp 5 ribu," jawab Adeli.

Mama Adeli Lehalima (48) merupakan perempuan adat Desa Skikilale, dia dan suaminya saling bergantian pergi ke dusung untuk memetik cengkih. Jika tak pergi, ia bertugas menjemur.

"Biasa itu kalo tidak ada jualan beta (saya) ikut, tapi hari ini ada bikin terang bulan," katanya.

Bagi orang Maluku, musim cengkih diibaratkan musim uang. Baik laki-laki, perempuan hingga anak-anak berbondong-bondong pergi memetik cengkih. Bahkan kerabat dari desa tetangga biasanya datang membantu, mereka akan membagi hasil sesuai jumlah yang dipanen.

Mama Adeli, tak mau melewati momentum agar mendapat tambahan uang belanja. Musim kali ini dia membuat dagangan terang bulan mini. Begitu pun para mama di kampung.

Orang-orang di sana biasanya pulang sebentar di siang hari, mereka mengambil bekal untuk dimakan di kebun.

Mama-mama di sini bikin dagangan, kalau musim begini banyak laku karena dibawa ke dusung," katanya.

Selain mengurus rumah para perempuan juga berkebun. Ada coklat, cengkih, kayu putih dan berbagai umbi-umbian. Ada pula sayuran untuk dijadikan lauk makan keluarga. Dalam kepercayaan Buru, masyarakat menyebutnya Hawalal Hat, atau berkebun serta Bokos Mangaile yang artinya lumbung makanan. Sebelum mengambil hasil kebun, mereka akan merapal doa sebagai rasa sukur kepada alam semesta.

Skikilale terletak di atas bukit, untuk sampai di kampung itu butuh perjalanan menanjak selama 30 menit dengan jalan laki atau menggunakan sepeda motor. Jalannya curam pun berkelok-kelok dengan struktur tanah merah bercampur bebatuan.

Desa itu bersembunyi di balik belantara hutan alam. Skikilale juga masuk dalam rencana konsesi biomassa, PT Inagro Cipta Nusantara.

Adeli sudah tahu perihal Inagro, ia diceritakan suaminya, Esau saat mengikuti sosialisasi. Raut mukannya berubah merah dan kesal saat bercerita.

Saat itu tokoh-tokoh adat diundang ke Balai Desa untuk membicarakan rencana konsesi. Pihak perusahaan mengatakan akan menggunakan hutan masyarakat selama 30 tahun.

"Iya, itu Inagro katanya untuk pemetaan. Perusahaan harus bekerja," katanya.

Selain PT Inagro, ada sejumlah dinas yang juga datang untuk mengukur wilayah hutan yang dikelola masyarakat dan hutan area HPH.

"Kemarin dorang (mereka) dari 5 dinas, Dinas PU, Dinas Pertanahan, PMD, Dinas Pertanahan, Dinas Kehutanan mau mengukur jarak dari pemukiman," kata

Pihak pemerintah mengatakan, warga tidak boleh berkebun melewati batas yang telah ditetapkan.

"Kami tidak setuju, kalau lahan kami dipakai selama 30 tahun, hak kami bagaimana," tuturnya.

Nama Lehalima di belakang namanya merupakan Soa Waili atau nama marga suami yang disematkan setelah mereka menikah. Dalam sistem pemerintahan adat, marga yang sama membentuk persekutuan marga yang disebut Soa. Setiap Soa mempunyai sistem sendiri untuk mengatur urusan internal Soa nya.

Konflik Masyarakat dan Perusahaan



"Siti Maimunah, Pendiri Mama AletaFund mengatakan, wilayah hutan adat atau kebun dan wilayah kelola adat yang sudah ratusan tahun menopang masyarakat adat di Pulau Buru. Pembukaan lahan baru untuk perkebunan biomassa akan merubah lanskap budaya, pangan dan hubungan sosial. Termasuk praktik dan ritual adat yang berhubungan dengan perempuan bakal mengubah kosmologi dan spiritual mereka dengan hutan.

"Pulau itu menopang penghidupan masyarakat, terutama perempuan yang dekat dengan lahan dan air. Itu syarat utama orang untuk hidup," katanya.

Menurut Alumni Universitas Passau Jerman itu, penting meletakkan apa tujuan pembangunan biomassa saat listrik sudah ada di Pulau Buru. Belajar dari daerah lain di Indonesia, kebutuhan energi dibangun di atas tanah masyarakat justru untuk kepentingan kapital dan proyek semata.

"Bisa jadi energi itu bukan untuk Pulau Buru, tapi untuk kepentingan ekspor," ungkapnya. Sedangkan di Desa Waepotih, perusahaan sudah melakukan survey dan pemetaan sosial bahkan mendekati masyarakat adat.

Desa Waepotih dulunya merupakan desa induk dari Desa Skikilale sebelum dimekarkan. "Kalau persetujuan itu belum, tapi pendekatan yang mereka lakukan secara personal dengan warga dan pemerintah desa. Tapi final menerima mereka, tidak," kata Sekretaris Desa Waepotih, Jembris Tasidjawa.

Menurut Jembris, perlu ada kejelasan soal izin perusahaan sehingga tidak menimbulkan konflik lantaran tumpang tindih perizinan. Karena perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), PT Wainibe Wood Industri sudah lebih dulu ada di sana. Wainibe Wood Industri memiliki izin konsesi seluas 33.245 hektar. Sedangkan PT Sentosa Pratama Unit 1 seluas 32.960 hektar.

"Harus meninjau sebab akibatnya, jangan sampai kita berikan kewenangan akibatnya warga yang akan rugi," ungkapnya

Upaya pemerintah mendorong transisi energi dari energi fosil ke energi biomassa perlu dipertimbangkan ulang, mengingat permintaan bahan baku biomassa dari hutan akan meningkat. Jika ambisi itu tidak mempertimbangkan kemampuan adaptasi lingkungan bakal memunculkan masalah baru.

Ketimpangan kebijakan dan buruknya pengelolaan lahan dan kawasan hutan oleh pemerintah pusat maupun di daerah juga berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan perusahaan.

Di Desa Bara, PT Inagro sudah lebih dulu masuk. Desa ini dijadikan pilot project penanaman tanaman energi biomassa di Pulau Buru.

Menurut warga, perusahaan mengadakan sosialisasi ihwal rencana konsesi pada September 2023. Warga lantas menolak. Konflik mulai memanas pada Februari 2024, ketika perusahaan mulai menggusur lahan warga tanpa ada persetujuan terlebih dahulu.

Mama-mama di desa bahkan menempuh perjalanan jauh ke Namlea, Ibukota Kabupaten Buru untuk berdemo. Mereka juga menuntut soal penyerobotan lahan oleh PT Inagro Cipta Nusantara.

Rizal Tuhulola, warga Desa Bara mengatakan, konflik bermula ketika perusahaan mengklaim sudah mengantongi izin dari lahan milik salah seorang tokoh adat, Karim Gibrihi yang tinggal di Desa Tanjung Karang. Dua desa ini bertetangga.

Di bulan Mei 2024 penanaman perdana dilakukan dengan upacara adat dipimpin Wakil Raja Leisela. Asiz Hentihu. Ia saat ini maju sebagai Calon Bupati Buru.

"Mereka dekat dengan pemerintah, kami tidak bisa berbuat apa-apa," ungkapny.

Menurut Rizal, aktivitas perusahaan cacat secara prosedural lantaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buru telah menerbitkan sertifikat baru di atas tanah yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dimana keputusan pengadilan bernomor 119/pdt.G/2003/PN.AB menetapkan areal lahan tersebut secara sah milik Desa Bara. Kepemilikan tanah desa juga didukung Surat Keputusan Pemerintah Negeri/Rechensap Leisela Nomor 07/PMRI/III/2004.

"Ada kejanggalan soal administrasi, itu. Dan kami punya bukti dimana lahan itu milik Desa Bara," kata Rizal.

Seorang pegawai kantor BPN Namlea yang tak mau disebutkan namanya mengaku, sertifikat tersebut dikeluarkan pada tahun 2019 untuk pembukaan lahan baru.

"Iya betul, itu dikeluarkan di tahun 2019," katanya.

Sejumlah warga pernah diminta menandatangani surat pernyataan ganti rugi untuk meredam konflik. Biaya ganti rugi tanaman sebesar Rp 50 ribu oleh PT Agro Dati Pusaka, anak usaha PT Inagro Cipta Nusantara. Namun mereka menolak.

"Jelas menolak karena kebun-kebun warga itu sudah ditanam lama, dan ganti rugi itu tidak senilai," ucap Rizal.

Pihak perusahaan juga sempat berjanji tidak akan melewati batas lahan, namun kenyataannya pembongkaran lahan melebihi batas sampai ke perkebunan warga.

"Awalnya itu 28 hektar, tapi itu sampai ke dalam desa," ungkapny.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) baru-baru ini melayangkan surat terbuka kepada Menteri ATR BPN, Agus Harimurti Yudoyono.

AMAN menolak Peraturan Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi HPL. tanah ulayat di wilayah adat.

Lenny Patty, Ketua AMAN Maluku mengatakan, peraturan menteri itu tidak dapat memperkuat hak-hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah adatnya.

"Dengan adanya peraturan itu justru mempercepat hilangnya wilayah adat dari penguasaan masyarakat dan akan menimbulkan konflik," kata Lenny, Senin 8 Oktober 2024.

Tempo mendatangi lokasi penanaman biomassa di desa itu untuk meminta konfirmasi, ada tujuh orang pekerja tampak sedang beristirahat di pos.

Empat orang sedang menikmati makan siang, mereka duduk melingkar. Salah seorang lainnya duduk bersandar membelakangi sebuah papan putih bertuliskan rencana penanaman dan jadwal kerja harian. Sementara dua orang lainnya tengah selonjoran sambil merokok.

"Untuk biomassa, ada gamal, lamtoro dan kaliandra," kata seorang pekerja sambil mengunyah.

"Sudah, manejer tidak ada di sini ada di Namlea," lanjutnya.

Di depan pos berbahan kayu itu, terhampar luas tanaman industri biomassa mulai tumbuh. Para pekerja membuat pagar untuk menyekat area pintu masuk bagian belakang desa dengan area kebun. Ada satu unit traktor di sebelah kanan, sekitar 100 meter dari arah jalan raya tertancap papan larangan melewati batas yang dibuat warga.





Kala Banjir Bandang Mengintai Warga

Dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Maluku tahun 2022 hingga 2026 menyebutkan, indeks ketahanan daerah Kabupaten Buru masuk kategori rendah dengan skor 0,17 dari indeks rata-rata 1,21. Bahaya banjir di Kabupaten Buru seluas 18.302 hektar.

Pulau Buru juga masuk kategori kerusakan lingkungan yang parah akibat bencana banjir dengan kerugian ekonomi senilai 54,19 miliar.

Pada Awal Juli 2024 lalu, banjir bandang di Pulau Buru menerjang 12 Desa di 4 kecamatan. Diantaranya, Kecamatan Waelata, Batabual, Lolong Guba dan Waeapo. BNPB mencatat, dari 298 warga terdampak banjir bandang, 210 diantaranya mengungsi. Sebanyak 508 rumah rusak, 1 fasilitas pendidikan, 1 kantor desa dan 1 jembatan juga ikut rusak.

Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buru, Fandy Rada mengungkapkan, dalam tiga tahun terakhir bencana hidrometeorologi menimpa kabupaten berjuduk bupolo itu.

"Dalam tiga tahun ini ya, banjir, tanah longsor ada sesekali itu angin puting beliung," kata Fandy.

Waeapo salah satu dari empat kecamatan yang terdampak banjir juga masuk dalam rencana bisnis PT Inagro Cipta Nusantara. Ada tujuh desa berdiri di sana. Desa-Desa tersebut yakni, Desa Savana Jaya, Waenetat dan Wanareja adalah tempat pengasingan eks tahanan politik 65. Sedangkan Desa Gogorea, Waekasar dan Waekarta merupakan wilayah transmigrasi. Di Desa Waetele dihuni masyarakat asli Pulau Buru dan sejumlah pendatang.

Sejak program transmigrasi era Orde Baru, Kecamatan Waeapo dijadikan sentra penanaman padi. Data BPS Kabupaten Buru mencatat, lahan produksi padi di Waeapo pada tahun 2023 seluas 25.004,23 hektar.

Terhampar sawah di kiri dan kanan jalan, sejumlah petani tampak menanam padi usai lahan seluas 32 hektar rusak lantaran banjir bandang pada awal Juli Lalu.

Akibatnya, para petani merugi karena tak bisa meladang. Sawah dan lahan yang ditanami tanaman hortikultura jadi rusak.

Susanti (56), Transmigran asal Banyuwangi, Jawa Timur terpaksa banting setir membuka warung makan di pinggir jalan Trans Buru, jalan yang menghubungkan Kabupaten Buru dan Buru Selatan.

Dia bercerita, sejak periode transmigrasi tahun 1989 di Pulau Buru, banjir terparah baru ia alami di tahun ini.

"Itu sawah-sawah di depan sana rusak semua, barusan ini yang paling parah sejak saya datang di sini," ungkapnya.

Keberadaan hutan dapat mempengaruhi kondisi iklim regional suatu wilayah karena tutupan vegetasi. Hilangnya vegetasi hutan akan mengubah kondisi biofisik yang menuntun pada perubahan dinamika neraca air dan neraca energi permukaan wilayah. Dengan demikian bencana hidrometeorologi akan terus mengintai masyarakat.

"Pengelolaan hutan yang serampangan memicu deforestasi lantaran wilayah resapan air makin berkurang sehingga menyebabkan daya tampung lingkungan ikut menurun," tutur Manajer Komunikasi FWI, Anggi Putra Prayoga.





Pelet Kayu Ilegal dari Gorontalo Ngalir ke Korea Selatan dan Jepang?

Sarjan Lahay – MONGABAY
Industri Biomassa

Sejumlah dump truk lalu lalang. Ada yang membongkar muatan, sebagian rapi berjejer di tepi jalan. Di ujung pelabuhan, tiga pekerja bongkar muat (TKBM) sibuk mengikat barang di atas mobil berkapasitas sekitar 30 ton. Barang-barang itu mau dimuat ke kapal tongkang yang siap berlabuh.

“Ini pelabuhan PT Biomasa Jaya Abadi. Barang-barang yang dimuat ke kapal tongkang itu adalah wood pellet yang akan dikirimkan ke luar negeri,” kata seorang nelayan kepada Mongabay saat mengunjungi lokasi akhir Juli lalu.

Pelabuhan ini terletak di Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Pohuwato, Gorontalo. PT Biomasa Jaya Abadi (BJA) yang merupakan perusahaan pengelola dan sekaligus memproduksi pelet kayu (wood pellet), membangun pelabuhan ini sebagai terminal khusus ekspor hasil produksi mereka.

Pelet kayu produksi BJA adalah bahan bakar biomassa yang bisa campur dengan batubara dalam pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Proses pencampuran ini dikenal sebagai co-firing biomassa, yakni, pembakaran batubara bersama biomassa dalam satu sistem pembakaran yang sama.

Di Indonesia, pelet kayu diklaim jadi satu bahan bakar energi terbarukan lebih ramah lingkungan. Bahkan, PLN memandang co-firing biomassa

sebagai solusi murah menurunkan emisi pembangkit listrik fosil serta jadi strategi menurunkan emisi karbon. PLN menargetkan 52 PLTU di Indonesia tahun 2025 gunakan bahan bakar berbasis biomassa sebagai sumber energi dengan porsi 5-10%. Pelet kayu yang diperlukan setidaknya 8-14 juta ton per tahun. PLN berencana, memenuhi kebutuhan dari hasil produksi hutan tanaman energi (HTE).

Begitu juga di luar negeri, pelet kayu juga produk ekspor bukan barang murahan. Menurut Sistem Informasi Legalitas Kayu, rata-rata harga biomassa pelet kayu sebesar Rp2.170 per-kilogram. Setidaknya, ada tujuh perusahaan ekspor pelet kayu, termasuk BJA.

Dalam website resmi, BJA bermimpi jadi pemimpin global dalam memproduksi pelet kayu. Bahan baku mereka dapatkan antara lain dari perusahaan sawit yang bertransformasi jadi HTE, yakni, PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL) dan PT Inti Global Laksana (IGL). Kedua perusahaan ini juga di Gorontalo dengan luas 27.353,53 hektar.



Aktivitas transshipment BJA. Foto: FWI

Dengan luas cukup besar itu, negara-negara tetangga seperti Jepang dan Korea Selatan tertarik berbisnis dengan BJA sebagai penyedia pelet kayu untuk pembangkit listrik skala besar mereka.

Kini, BJA salah satu produsen kayu di Indonesia dengan volume produksi dan perdagangan tahunan tercatat paling besar.

BJA menyematkan label hijau pada produknya dengan komitmen keberlanjutan untuk perlindungan dan konservasi lingkungan. Perusahaan ini pun mendapatkan sertifikat sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK), dengan menegaskan komitmen terhadap standar ketat dan jadi pilihan utama bagi mitra yang mencari solusi energi ramah lingkungan.

Dari penelusuran Mongabay awal Agustus 2024 menunjukkan, gambaran berbeda. Melalui analisis citra satelit dan spasial serta data ekspor pelet kayu, ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara komitmen keberlanjutan BJA dan praktik di lapangan.

Dugaan deforestasi BTL dan IGL, yang menyuplai bahan baku pada BJA, diduga kuat melanggar prinsip keberlanjutan.

Penelusuran kami juga menemukan, sebagian pelet kayu ekspor BJA mungkin melanggar hukum, tak tercatat dalam sistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu, aktivitas transshipment kapal BJA diduga di wilayah konservasi perairan, yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai legalitas operasionalnya.

Aktivitas Ekspor Wood Pellet dari Gorontalo

Ekspor Wood Pellet Gorontalo dimulai pada September 2021 dan berlanjut sebanyak 27 kali hingga Juli 2024.

Bulan	Jumlah (Ton)	Nilai Ekspor (US\$)	Korea Selatan (US\$)	Jepang (US\$)	Singapura (US\$)	Arab Saudi (US\$)
Juli 2024	15...	2,071,964	2,0...			
Juni 2024	15...	2,080,986	2,0...			
Mei 2024	10...	1,417,710		1,417...		
April 2024	10...	1,450,884	1,4...			
Maret 2024	10...	1,349,286			1,349,286	
Februari 2024	21,546	2,850,201	1,5...	1,340...		
Januari 2024	21,184	2,955,247	2,955...			
Desember 2023	21,215	2,853,440	1,4...	1,420...		
Oktober 2023	10...	1,413,058	1,4...			
September 2023	1...	1,511,617	1,5...			
Agustus 2023	10...	1,490,027	1,4...			
Juli 2023	10...	1,291,499		1,291...		
Juni 2023	10...	1,413,018	1,4...			
April 2023	10...	1,433,039		1,433...		
Februari 2023	21,062	3,159,323	3,159...			
Desember 2022	10...	1,691,508	1...			25
November 2022	10...	1,569,485	1...			5
Agustus 2022	199.31	77,908				
Juli 2022	22.0	26,410				
September 2021	17.5	21,000				21
Jan-Agustus 2021	16.48	16,706.00				

Sumber: MONGABAY



Babat Hutan Alam

BJA merupakan perusahaan pengolahan pelet kayu berdiri pada 2020. Perusahaan ini mendapatkan bahan baku dari PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL) dan PT Inti Global Laksana (IGL), merupakan perusahaan perkebunan sawit yang bertransformasi menjadi HTE.

Pada 2010, BTL dan IGL mendapatkan izin lokasi perkebunan sawit dari Bupati Pohuwato, Syarif Mbuinga, berdasarkan surat keputusan Nomor 171/01/VI/2010, masing-masing seluas 16.000 hektar dan 12.000 hektar. BTL berlokasi di Kecamatan Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur dan Lemito. IGL berlokasi di Kecamatan Lemito, Wanggarasi.

Pada 2011, perusahaan yang terafiliasi dengan Provident Agro Group ini mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari KLHK seluas 15.797,48 hektar kepada BTL dan 11.860 hektar kepada IGL. Pada Januari 2022, Siti Nurbaya, Menteri LHK, dan diumumkan Presiden Joko Widodo mencabut izin pelepasan kawasan hutan. Saat itu, pemerintah nilai, kedua perusahaan tak ada operasi di lapangan.

Ternyata, kedua perusahaan telah mengajukan izin penetapan hutan hak kepada KLHK pada 2020 seluas 15.493 hektar untuk BTL, dan 11.860 hektar untuk IGL. Pada 13 Mei 2020, KLHK akhirnya menyetujui usulan dengan skema hutan hak sesuai luasan yang diusulkan.

SK pencabutan izin pelepasan kawasan hutan yang dibebankan pada BTL dan IGL tak mengubah apapun. Pada Februari 2020, kedua perusahaan ini juga mengubah tanaman jadi gamal dan kaliandra, yang biasa jadi bahan baku pelet kayu.

Dari analisis citra satelit dan spasial oleh Forest Watch Indonesia (FWI) periode 2021-2023, BTL melakukan deforestasi 1.105 hektar hutan alam jadi bahan baku wood pellet. Menurut analisis Nusantara Atlas pada Januari 2023–Agustus 2024, IGL membabat hutan alam 36 hektar untuk kepentingan sama.

Mongabay mendatangi kawasan ini pertengahan Agustus 2024, untuk melihat langsung aktivitas di kedua perusahaan. Di lapangan, terjadi pembersihan hutan (land clearing). Pada 2019, kawasan yang terbabat BTL dan IGL itu sebelumnya hutan alam. Perlahan hutan alam berganti kebun kayu 'energi' gamal dan kaliandra.

Terry Repi, akademisi Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMG) mengatakan, Gorontalo memiliki nilai konservasi tinggi berada di Pohuwato, termasuk di kedua konsesi perusahaan itu. Dia pernah penelitian di Bentang Alam Popayato-Paguat itu pada 2021.

Distribusi konservasi tinggi di Pohuwato juga diakui dalam dokumen Folu Net Sink 2030 Gorontalo yang menyebut, ada sekitar 84.566,87 hektar yang dengan keanekaragaman hayati tinggi di Pohuwato.

"Angka itu terbesar dari kabupaten atau kota lain di Gorontalo," katanya dalam diskusi yang dibuat FWI.

Bentang Alam Popayato-Paguat, kata Terry, menjadi daerah tangkapan air, habitat satwa, menjadi koridor penting biodiversitas dan berbagai spesies kunci. Ia juga menghubungkan wilayah timur dan barat Sulawesi.

Kalau terbabat untuk kebun energi, katanya, hutan akan terfragmentasi. Dia sebutkan, di bentang ini teridentifikasi 23 spesies mamalia, sebanyak 16 jenis endemik dan empat jenis dilindungi yakni, anoa, babirusa, rangkong, dan tarsisius.

"Ada 175 jenis burung, dengan 41 jenis endemik, dan 21 dilindungi," kata Terry.

Data Ekspor Wood Pellet milik BJA yang Tercatat di SILK (Oktober 2023 – Agustus 2024)

BJA tercatat telah melakukan ekspor wood pellet sebanyak 7 kali ke Jepang dan Korea Selatan dengan total 82.273 metrik ton. Adapun nilai ekspor mencapai 11,1 juta USD.

Tanggal Pengiriman	Negara Tujuan	Jumlah (KG)	Nilai Ekspor (USD)
1 24/10/2023	Korea Selatan	10,506,007	1,413,058
2 21/12/2023	Jepang	10,560,018	1,420,322
3 18/03/2024	Korea Selatan	10,221,860	1,349,286
4 26/04/2024	Korea Selatan	10,400,600	1,450,884
5 13/06/2024	Korea Selatan	15,025,170	2,080,986
6 15/07/2024	Korea Selatan	15,014,231	2,071,964
7 14/08/2024	Jepang	10,545,805	1,413,138

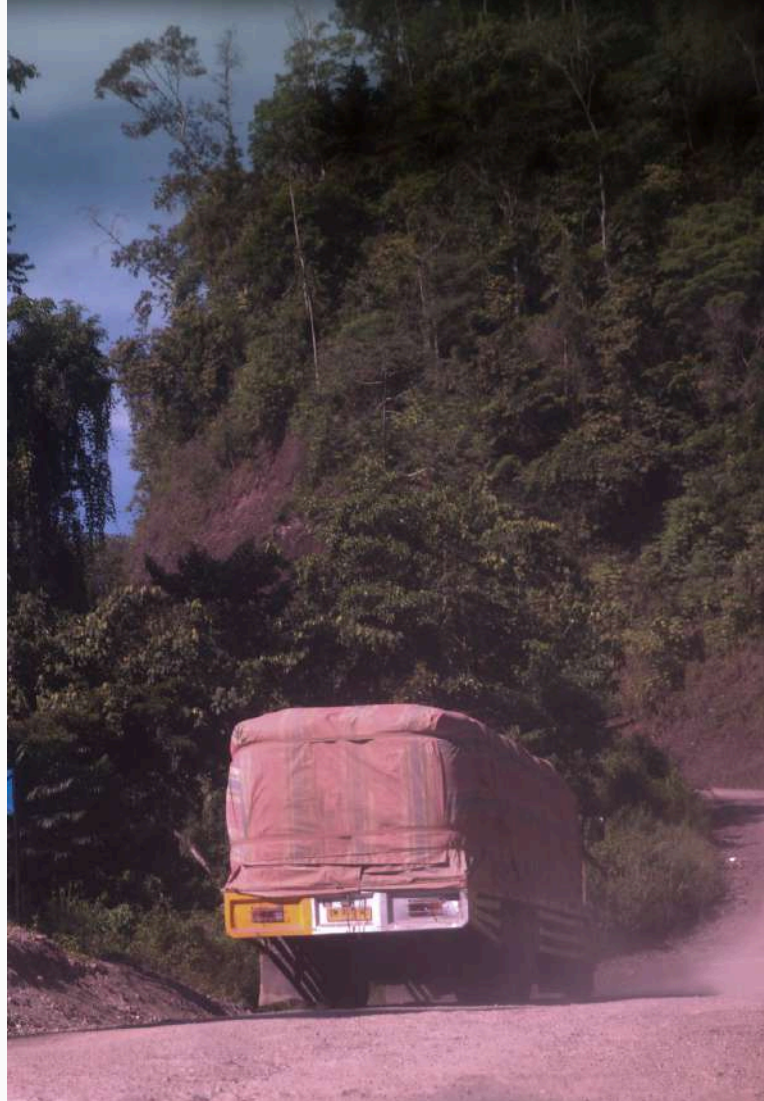
Anggi Putra Prayoga, Manager Kampanye, Advokasi, Media FWI mengatakan, yang dilakukan BTL dan IGL tak sesuai transisi energi sesungguhnya. Pasalnya, produksi biomassa pelet kayu menghasilkan emisi karbon dari deforestasi kedua perusahaan.

"Yang dibuat BTI dan IGL ini bukan hutan tanaman energi, tapi hutan emisi karena mereka membabat hutan alam," kata Anggi kepada Mongabay, Agustus lalu.

Menurut dia, pemanfaatan biomassa pelet kayu sebagai sumber energi hanya menghasilkan utang emisi karena dari kerusakan hutan alam. Hutan alam, katanya, ekosistem paling banyak menyimpan karbon dibanding hutan tanaman.

Dia contohkan, dalam satu hektar hutan alam dapat menyimpan karbon 254 ton karbon-C. Sedangkan hutan tanaman menyimpan karbon hanya 107,86 ton karbon per hektar. Berarti, konversi satu hektar hutan alam jadi hutan tanaman melalui land clearing hanya hasilkan utang emisi karbon 146,14 ton karbon-C per hektar.

Anggi bilang, masifnya pemanfaatan biomassa yang diklaim sebagai sumber energi terbarukan akan memicu konversi hutan dan lahan secara besar-besaran. Proyek biomassa akan meningkatkan ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia dan mendorong deforestasi 'terencana' atas nama hijau dan energi terbarukan.



Burhanuddin, Direktur Operasional BTL, IGL, dan BJA, protes karena perusahaan mereka disebut lakukan deforestasi. Perusahaannya, tak membabat hutan alam, melainkan membuka lahan untuk bikin tanaman alam. Menurut dia, kawasan dalam konsesi perusahaan tidak bisa disebut hutan alam.

"Saya tidak mau dikatakan bahwa wilayah perusahaan adalah hutan alam, karena konsesi kita sudah memiliki HGU [hak guna usaha]. Kita juga membangun kebun dengan tanaman alam," kata Burhanuddin kepada Mongabay akhir Agustus lalu.

Padahal, dengan izin perusahaan berubah dari perusahaan sawit ke hutan tanaman energi itu status lahan pun beda. Sebelumnya, kebun sawit punya izin hak guna usaha (HGU) dengan status lahan alokasi penggunaan lain, saat ini HTE—setelah sebelumnya dua izin pelepasan kawasan hutan untuk dua perusahaan sawit dicabut— sudah di kawasan hutan.

Meski begitu, Burhanuddin akui, perusahaan land clearing, namun langsung menanam 5.000 bibit per hektar. Kalau dijumlahkan dengan kayu alam, katanya, lebih banyak tanaman yang ditanam perusahaan dibanding yang ditebang.

Dengan begitu, Burhanuddin mengklaim tidak melakukan deforestasi dan mengikuti semua peraturan. Terlebih lagi, katanya, produk perusahaan adalah bahan untuk mendukung transisi energi.

“Pohon yang kita tanam di dalam perusahaan itu akan dipanen nanti empat tahun kemudian. Dalam sekali tanam, kita bisa panen sebanyak lima kali. Begitu kita panen, tanaman itu kita sisanya 50 sentimeter hingga bisa tumbuh lagi. Jadi tidak ada deforestasi,” katanya.

Data Ekspor Wood Pellet dari PT Biomasa Jaya Abadi (BJA)

BJA mengaku telah melakukan ekspor wood pellet sejak 17 November 2022, dan sudah ada 21 kali sampai 14 Agustus 2024.

Tanggal	Negara Tujuan	Jumlah (Kg)	Nilai Ekspor (USD)
17 November 2022	Korea Selatan	10,605,727	1,537,685
21 Desember 2022	Korea Selatan	10,100,050	1,666,508
20 Februari 2023	Korea Selatan	10,562,150	1,584,323
3 April 2023	Jepang	10,615,100	1,433,039
18 Juni 2023	Jepang	10,505,710	1,413,018
22 Juli 2023	Jepang	10,331,990	1,291,499
30 Agustus 2023	Korea Selatan	10,681,194	1,490,027
29 September 2023	Korea Selatan	10,835,965	1,511,617
24 Oktober 2023	Korea Selatan	10,506,007	1,413,058
5 Desember 2023	Korea Selatan	10,656,148	1,433,117
21 Desember 2023	Jepang	10,560,018	1,420,322
6 Januari 2024	Korea Selatan	10,472,501	1,460,914
28 Januari 2024	Korea Selatan	10,712,067	1,494,333
9 Februari 2024	Jepang	10,722,024	1,340,253
29 Februari 2024	Korea Selatan	10,824,003	1,509,948
18 Maret 2024	Korea Selatan	10,221,860	1,349,286
26 April 2024	Korea Selatan	10,400,600	1,450,884
12 Mei 2024	Jepang	10,501,562	1,417,710
13 Juni 2024	Korea Selatan	15,025,170	2,080,986
15 Juli 2024	Korea Selatan	15,014,231	2,071,964
14 Agustus 2024	Jepang	10,545,805	1,413,138

Dugaan perdagangan ilegal

Dari penebangan pohon di konsesi BTL dan IGL, perusahaan yang mendapatkan keuntungan lebih besar adalah BJA. Pada 18 Maret 2020, BTL dan IGL menandatangani nota kesepakatan dengan BJA untuk berkomitmen memenuhi kebutuhan produksi ekspor pelet kayu.

Pengiriman pelet kayu langsung di pelabuhan terminal khusus BJA di Desa Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Pohuwato. Di pelabuhan yang kerap disebut “Pelabuhan Lalape” itu, pelet kayu diangkut melalui kapal tongkang BJA dan transshipment ke kapal asing asal Panama di tengah laut, tak jauh dari pelabuhan.

Misal, Jepang, menargetkan produksi listrik 1.065 Terawatt hour (TWh) tertuang dalam bauran energi 2030, dan 3,7-4,6% antara lain target berasal dari biomassa. Sedangkan Pemerintah Korea Selatan mengumumkan rencana transisi energi dengan target 20% energi terbarukan pada 2030.

Listrik dua negara itu mayoritas bersumber dari energi fosil atau baling banyak pakai batubara. Adapun pelet kayu di kedua negara ini untuk dicampurkan dengan batubara di sejumlah PLTU mereka. Cara itu diklaim dapat menurunkan emisi sektor pembangkit listrik dan jadi strategi menurunkan emisi karbon.

Mongabay melakukan analisis data terbuka dengan membandingkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data KLHK untuk melihat lebih jauh ekspor pelet kayu dari Gorontalo. Hasilnya, BJA, satu-satunya pabrik pengelola pelet kayu di Gorontalo ini diduga kuat ekspor wood pellet ke luar negeri secara ilegal, atau tanpa tercatat (unreported) dalam sistem KLHK.

Menurut data SILK KLHK, sejak Oktober 2023-Agustus 2024, BJA tercatat ekspor wood pellet tujuh kali ke Jepang dan Korea Selatan total 82.273 metrik ton melalui perusahaan Hanwa Co., Ltd. Ini perusahaan global trading berbasis di Jepang. Nilai ekspor mencapai US\$11,1 juta.

Data ekspor pelet kayu dari BJA menyebut, 21 kali telah ekspor wood pellet dari November 2022-Agustus 2024. Adapun pelet kayu ke Jepang dan Korea Selatan mencapai 230.398 metrik ton dengan ekspor US\$31.78 juta.

Sisi lain, data BPS Gorontalo menyebut, ekspor pelet kayu dari Gorontalo sudah 27 kali sejak 2021-Juni 2024 dengan delapan negara tujuan, yakni, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Estonia, Irak, Qatar, dan Suriah. Adapun total ekspor 230.672,39 metrik ton senilai US\$32.14 juta.

Dengan begitu, ada perbedaan data signifikan antara data KLHK, BJA, dan BPS dengan selisih ekspor pelet kayu cukup besar. Kalau mengacu data BJA, ada 14 ekspor pelet kayu tak tercatat dalam sistem KLHK.

Potensi kerugian negara mencapai US\$20.58 juta, atau setara Rp316 miliar (kurs Rp 15.396 per 6 September 2024).

Pada 16 Agustus lalu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengamankan kapal MV Lakas yang dicurigai membawa pelet kayu ilegal di perairan Gorontalo. Kapal berbendera Filipina ini dengan 17 anak buah kapal (ABK).

Berdasarkan informasi, pelet kayu kapal itu milik BJA sebanyak 10.545 metrik ton. Namun, hanya beberapa waktu saja, kapal ini langsung dilepas kembali oleh Bakamla. Ketika mengkonfirmasi soal ini, BJA mengklaim pelet kayu yang diangkut kapal sudah mendapatkan izin berlayar lengkap dari lembaga berwenang, seperti Karantina, Bea Cukai, Imigrasi dan Syahbandar di Gorontalo.

Dugaan praktik unreported juga tergambar dalam SILK yang menyebut, kayu wood pellet tercatat hanya dari kayu jambu-jambu (*Eugenia sp.*); dan nyatoh (*Madhuca sp.*).



Wood pellet. Foto: FWI

Padahal, dalam penelitian Terry Repi bersama Burung Indonesia menyebut, wilayah itu adalah kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Artinya, tidak hanya dua jenis pohon di wilayah itu.

Bukan hanya itu, pada 7-9 Juni 2024, kapal tongkang BJA ini juga tercatat melakukan transshipment dengan kapal asing dari Panama dengan jarak 2 mil dari daratan Pohuwato. Transshipment itu berada di areal persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) BJA.

Hasil analisis spasial FWI menunjukkan, kapal asing membuang jangkar di zona inti—bukan zona pemanfaatan—merupakan calon kawasan konservasi perairan daerah Pohuwato. Ironisnya, wilayah itu juga lokasi penangkapan dan perlindungan gurita Masyarakat Suku Bajo Torosiaje.

Willem Pattinasarany, Koordinator Indonesia Working Group and on Forest Finance (IWGFF) mengatakan, semua aktivitas perdagangan kayu atau bahan bakunya seperti wood pellet harus tercatat di SILK. Hal itu untuk memastikan produk kayu dan bahan baku diperoleh dari sumber yang asal-usulnya dan pengelolaan memenuhi aspek legalitas.

Sistem itu, katanya, untuk mendukung upaya pemerintah memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu yang tak sah.

“Ekspor wood pellet BJA yang tak tercatat dalam sistem KLHK perlu dicurigai. Bisa jadi ada perbuatan melawan hukum dengan ekspor tidak tercatat di SILK. Singkatnya, bisa saja ada perdagangan ilegal yang dilakukan,” katanya kepada Mongabay 7 September 2024.

Modus-modus perdagangan kayu ilegal dan bahan baku turunannya kerap kali dari praktik unreported ini. Ia dilakukan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dari produk ekspor dan bisa mengarah ke pencucian uang. Praktik ini, katanya, juga disebut kejahatan penipuan dalam perdagangan sebagai upaya menghindari pajak.

Menurut Willem, perusahaan yang melakukan praktik unreported bisa dilaporkan kepada pihak berwajib, sekaligus sertifikat SVLK-nya harus dicabut. Dalam kasus BJA, kata Willem, KLHK, Dirjen Pajak, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus menyelidiki lebih dalam terkait perbedaan data ekspor itu.

Mongabay menghubungi Drasospolino, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK melalui pesan WhatsApp untuk mengkonfirmasi perbedaan data ekspor pelet kayu BJA. Sayangnya, sampai berita ini terbit, tak ada jawaban.

Burhanuddin membantah, semua tuduhan yang dialamatkan kepada perusahaannya. Sebagai pelaku usaha, katanya, mereka mengikuti semua aturan berlaku dan mestinya tidak ada perbedaan data.

Dia bilang, 21 kali ekspor pelet kayu itu sudah dilaporkan ke KLHK, tanpa terkecuali.

Ketika perusahaan ekspor wood pellet, mereka lampirkan semua dokumen yang diperlukan dan kirim ke pembeli. Mereka, tak pernah mengabaikan aturan, terlebih lagi produksi wood pellet cukup besar dan setiap pengiriman pakai kapal besar.

"Wood pellet yang kita kirim ini bukan barang hanya 1-2 kilogram. Ekspor kita ini rata-rata 10.000 metrik ton dengan kapal besar. Barang ini tidak mungkin kita sembunyikan," kata Burhanuddin.

Soal hanya dua jenis kayu tercatat dalam SILK, kata Burhanuddin, perusahaan hanya mencatat jenis pohon mayoritas dan memiliki nama latin dalam sistem KLHK. Adapun soal transshipment di luar areal PKKPRL BJA, katanya, itu tanggung jawab agen, bukan perusahaannya.

"Aktivitas transshipment itu juga berdasarkan arahan dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tilamuta. Itu bukan tanggung jawab kita. Setiap kegiatan kita itu juga berada dalam pengawasan," katanya.

Siapa Mereka?

Berdasarkan penelusuran profil perusahaan pakai data resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), orang-orang yang penerima manfaat dari aktivitas BTL, IGL, dan BJA adalah perusahaan pemilik modal besar dan pengusaha yang punya relasi dengan penguasa. Orang-orang terafiliasi melalui Provident Investasi Bersama Tbk (Provident Investasi).

Secara historis, awalnya BTL dan IGL merupakan anak perusahaan dari Provident Agro Tbk yang kini berubah nama PT Provident Investasi Bersama Tbk (Provident Investasi).

Pada Juli 2019, Provident Investasi menjual mayoritas saham BTL dan IGL ke PT Buana Pratama Cipta, 1% saham dimiliki Heru Purnomo dan 99% saham punya PT Reka Varia Tara (Reka).

Mongabay berusaha menelusuri Reka, tetapi tak tercatat dalam sistem AHU saat verifikasi pada 5 Agustus 2024. Tetapi, dalam laporan Mighty Earth yang terbit Mei 2024 menemukan, kepemilikan Reka berada di tangan Andy Kelana, menguasai 87,5% saham dan Helena Adnan 12,5% saham.

Dua orang itu adalah pengacara asal Indonesia yang tergabung dalam firma hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH) yang berbasis di Jakarta. Firma hukum ini memberikan "nasihat hukum" di bidang pertambangan, minyak dan gas, kehutanan dan perkebunan, energi terbarukan, serta industri listrik dan energi. Salah satu Klien AKHH adalah Provident Capital, perusahaan yang mendirikan Provident Investasi.

Menurut Mighty Earth, Andy Kelana dan Helena Adnan memegang saham BTL dan IGL untuk dan atas nama pemegang saham pengendali Provident Investasi, yakni, Winato Kartono, Edwin Soeryadjaya, Garibaldi Thohir, dan Sandiaga Uno melalui PT Saratoga Sentra Business. Orang-orang itu diduga dikaburkan jejaknya melalui Reka yang tak tercatat dalam AHU.

Mighty Earth menyebut, penjualan saham BTL dan IGL untuk menjaga kepentingan pemilik sebenarnya dalam Provident Group. Penjualan itu, sebut Mighty hanyalah transfer internal dalam grup. Tak hanya itu, dugaan keterlibatan Provident Investasi dalam bisnis biomassa ini juga tergambar dalam profil perusahaan BJA, perusahaan yang membeli bahan baku pelet kayu dari BTL dan IGL.



Hutan alam sudah terbabat. Foto: FWI

Penelusuran Mongabay dari data Ditjen AHU yang akses dari 30 Juli-22 Agustus memperlihatkan para pemilik saham BJA terafiliasi baik langsung, maupun tak langsung dengan Provident Investasi.

Misal, PT Sekawan Artha Lestari (SAL) memegang 34,5% saham BJA, dengan struktur kepengurusan dipegang dua direksi dari Provident Investasi, seperti Tri Boewono dan Budianto Purwahjo. Andy Kelana juga tercatat punya 3,7% saham BJA.

Ada juga nama Albert Saputro, Presiden Direktur PT Merdeka Copper Gold Tbk, perusahaan yang didirikan Provident Capital, tercatat jadi komisaris BJA. Selain itu, Hanwa Co., Ltd. perusahaan global trading asal Jepang yang mengembangkan 'kemitraan biofuels' dengan Provident Group juga punya saham 20% di BJA.

PT Energi Hijau Bersama (EHB) memiliki 41,8% saham BJA, membuat keterlibatan Provident Investasi dalam bisnis biomassa di Gorontalo ini lebih jelas. Pemegang saham pengendali Provident Investasi, Garibaldi 'Boy' Thohir –kakak Menteri BUMN Erick Thohir, memiliki 11,4% saham EHB.

Ada pula PT Surya Nuansa Ceria, anak perusahaan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) milik Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) juga memiliki 38,6% saham di EHB. Nama Sakti Wahyu Trenggono, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) juga tercatat punya 5,7% saham EHB.

Pada 1 September lalu, Mongabay mengirimkan surat ke Provident Investasi melalui email resmi perusahaan guna mempertanyakan hubungan mereka dengan BTL, IGL, dan BJA. Sampai berita ini terbit, tak ada balasan.

Sedang Burhanuddin membantah, ketiga perusahaannya terafiliasi dengan Provident Investasi. Sebagai karyawan, dia tidak mengetahui lebih jelas siapa saja pemilik saham dalam perusahaan atau perusahaan induknya. "BTL, IGL, dan BJA tidak terafiliasi dengan Provident Investasi Bersama Tbk."



Rantai Pasokan Kayu Wood Pellet di Jambi, Diduga Berasal dari Hasil Tebangan Ilegal

Hidayat – Jambian.id
Industri Biomassa

JAMBIAN.ID -- Antrean panjang mobil truk di Jalan Berdikari, Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi mengular. Truk-truk itu mengangkut muatan kayu alam (racuk), karet dan sempangan (sisa) kayu sawmill.

Pemandangan itu hampir dapat dijumpai tiap hari. Lebih kurang ada 30 unit truk bermuatan kayu yang mengantre untuk bongkar muat kayu di perusahaan Rimba Palma Sejahtera Lestari (PT RPSL). Kayu-kayu ini akan diolah untuk bahan bakar kayu energi.

"Saya sudah belasan tahun muat kayu dan saya 3 tahun ini mengantarkan kayu ke PT RPSL," sebut Toni salah seorang sopir truk saat ditemui oleh merdeka.com pada (05/8) lalu. Dia mengaku berasal dari Sungai Gelam, untuk antar kayu sebanyak 8 ton, diperlukan waktu sekitar 1 jam, jelasnya.

Selain dari Sungai Gelam, maka ada juga kayu-kayu yang diantar dari daerah Petaling, Pemayang, Senggeti, seberang Kota Jambi, dan Sabak. "Ada juga kayu yang berasal dari lahan yang dibuka untuk kebun sawit," imbuhnya.

Perusahaan Rimba Palma Sejahtera Lestari (PT RPSL) di Kota Jambi merupakan anak perusahaan Weal Union Limited dari Hongkong, yang dibuktikan dengan nomor: AHU-00034.AH.02.02 Tahun 2014.

PT Rimba Palma Sejahtera Lestari telah memiliki Izin Lingkungan atas kegiatan Pembangunan Palm Kernel Mill dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Biomassa 2 x 15 MW di Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Bahan bakar yang digunakan oleh PT RPSL berupa cangkang, fiber, kayu karet, kayu sempangan, serbuk kayu, palm kernel, PKE, janjangan, pelepah sawit, sabut kelapa, kayu sayatan, kayu tengah, serbuk kayu halus, dan tankos. Sumber bahan bakar diperoleh dari perusahaan terdekat yang telah bekerja sama dengan pemrakarsa untuk pemasok bahan bakar.

Pada saat ini PT RPSL berencana akan melakukan pengembangan kegiatan, yaitu produksi Biomass Pelleting dengan kapasitas 288 metrik ton per hari. Pada proses Biomass Pelleting, input yang digunakan adalah bahan baku kayu chips (kayu karet, rengas dan bungur dan tandan kosong yang diproses dengan menggunakan proses torefaksi dan dibentuk menjadi pellet.



Kayu akan masuk ke Perusahaan Rimba Palma Sejahtera Lestari (PT RPSL)

Perusahaan Rimba Palma Sejahtera Lestari (PT RPSL) di Kota Jambi merupakan anak perusahaan Weal Union Limited dari Hongkong, yang dibuktikan dengan nomor: AHU-00034.AH.02.02 Tahun 2014. PT Rimba Palma Sejahtera Lestari telah memiliki Izin Lingkungan atas kegiatan Pembangunan Palm Kernel Mill dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Biomassa 2 x 15 MW di Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi.

Bahan bakar yang digunakan oleh PT RPSL berupa cangkang, fiber, kayu karet, kayu sempangan, serbuk kayu, palm kernel, PKE, janjangan, pelepah sawit, sabut kelapa, kayu sayatan, kayu tengah, serbuk kayu halus, dan tankos. Sumber bahan bakar diperoleh dari perusahaan terdekat yang telah bekerja sama dengan pemrakarsa untuk pemasok bahan bakar.

Pada saat ini PT RPSL berencana akan melakukan pengembangan kegiatan, yaitu produksi Biomass Pelleting dengan kapasitas 288 metrik ton per hari. Pada proses Biomass Pelleting, input yang digunakan adalah bahan baku kayu chips (kayu karet, rengas dan bungur dan tandan kosong yang diproses dengan menggunakan proses torefaksi dan dibentuk menjadi pellet.

Humas Perusahaan PT Rimba Palma Sejahtera Lestari Defri menyebut perusahaan saat ini sedang mendukung transisi energi di Indonesia yaitu pembangkit listrik tenaga biomassa dan Biomassa pelleting.

"Kami sempat memasok listrik tenaga uap ke PLN di kawasan Payo Selincah. MOU terakhir kita itu di tahun 2019," jelas Defri (26/08/2024)

Di Agustus 2022 dengan memanfaatkan biomassa limbah bekas tebangan dan sawmill, PLTBM itu dihidupkan kembali, tapi sekarang tujuannya untuk memasok listrik ke pabrik wood pellet milik perusahaan sendiri.

"Pasokan bahan baku dari sawmill yang ada di Kota Jambi dan Muaro Jambi, itu mencapai 90 persen. Itu pakai trader pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini yang suplai ke pabrik, kami terima bersih," jelasnya.

Untuk kebutuhan pabrik PT RPSL, Defri menjelaskan, untuk kuota mencapai 100.000 ton dalam satu tahun beroperasi. Namun kebutuhan bahan baku baru tercukupi 60-70 persen dalam pertahun. Harga beli per ton dari pemasok berkisar Rp 250,000 ribu. Akan tetapi harga tersebut bisa naik jika bahan baku kurang.

"Kita ini kan ibaratnya beli sampah. Itu sisa-sisa kayu dari sawmill yang sudah enggak jelas bentuknya," ujarnya.

Dia juga memastikan perusahaan telah menanyakan asal usul kayu yang berasal dari sawmill.

"Kita menanyakan pihak sawmill apakah mereka memiliki dokumen lengkap. Kami juga menggunakan pihak ketiga juga untuk menanyakan dokumen kelengkapan bahan baku yang dikirim oleh mereka," jelasnya.

Adapun untuk wood pellet yang dihasilkan PT RPSL, sebutnya akan diekspor ke Korea Selatan.

"Mungkin di Sumatera kita PT RPSL ini salah satu pengeksport terbesar juga ke Korea untuk wood pellet," tutupnya.



Sumber Bahan Kayu Sempengan dari Sawmill di Jambi

Saat menelusuri ke tingkat sawmill, hal sebaliknya terjadi. Tidak seluruh kayu yang ada telah memiliki izin dokumen resmi. Alasannya yang diungkap adalah biaya pengurusan izin yang rumit dan mahal.

"Jadi kayu yang masuk sawmill ini biar tidak memiliki surat kayu tetapi tetap aman, karena dikawal oleh petugas, Kayu log yang masuk ke sawmill itu saat malam hari sekitar pukul 01.00 WIB dini hari," sebut Sukarejo (nama samaran) salah satu pekerja sawmill saat dijumpai (28/08/2024).

Dia tidak merinci siapa petugas dan instansi apa yang dimaksudkannya itu.

"Sempengan (kayu sisa) dari sawmill kami itu dalam satu kali muat mobil truk berkapasitas 5-7 ton, itu kami jual ke pihak ketiga," ujarnya.

Dia menyebut sumber kayu log di sawmill berasal dari berbagai macam tempat di Kabupaten Sarolangun tepatnya Durian Luncuk, Batanghari, kemudian dari Sungai Gelam, Simpang Pramuka, dan wilayah perbatasan Jambi Sumatera Selatan. Menurutnya, Kayu bagus itu jauh dari Sarolangun dan perbatasan Jambi - Sumatera Selatan.

"Sawmill yang berada disini [di sekitar kota Jambi] ada 15 sawmill yang setiap hari beroperasi, namun lebih banyak lagi sawmill yang berada di Muaro Jambi," tutupnya.

Deforestasi di Jambi

Tutupan hutan di Jambi dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Data KKI Warsi pada tahun 1973 tutupan hutan di Jambi yang tercatat 3,4 juta hektare. Namun di tahun 2023 tutupan hutan di Jambi mengalami penurunan yaitu hanya tinggal 922,891 hektare. Benteng terakhir hutan alam di Jambi tersisa di empat taman nasional.

Direktur Perkumpulan Hijau Feri Irawan menyatakan dari hasil analisis data yang didapat olehnya, diduga bahwa perusahaan PT Rimba Palma Sejahtera Lestari tidak memiliki izin untuk bahan kayu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) untuk sumber bahan baku produksi wood pellet. Namun pihak perusahaan mendapatkan izin usaha industri primer hasil hutan kayu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).



Tutupan di Jambi dari tahun ke tahun mengalami penurunan karena pembukaan lahan sawit

"Jadi pihak perusahaan PT RPSL hanya memiliki empat lokasi pengambilan bahan kayu di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, yaitu Kebun IX, Air Hitam, Petaling dan Talang Belido. Namun jika keluar dari 4 lokasi tersebut bahan kayu yang diperoleh PT RPSL. Itu ilegal izin itu harus sesuai dengan AMDAL mereka," katanya, saat ditemui di kantor Perkumpulan Hijau. Feri pun menyebut jika kayu yang diambil bukan saja dari kayu hasil perkebunan karet. Tetapi juga ada jenis kayu hutan, seperti bungur dan rengas.

"Jika kayu bungur dan rengas itu kayu dari hutan alam, itu mendorong deforestasi dan rusaknya ekosistem," jelasnya.

Dari dokumen AMDAL, PT RPSL bahan baku beragam untuk produksi biomassa dan pelet kayu. Di tahun 2017 mereka mengolah cangkang sawit 281,9 ton, fiber sawit sebanyak 59.967,5 ton, kayu karet 32,206,2 ton, kayu sempengan 371 ton dan serbuk kayu sebesar 2.090,6 ton.

"Jika tak punya area kelola di Kota Jambi, maka perlu dipertanyakan bagaimana cara merekadapatkan kayu untuk memproduksi wood pellet 100.000 ton per tahun itu? Sekarang bilang ambil kayu dari sawmil. Ini sawmil yang mana? Legalitas kayu dari sawmil itu meragukan dan diduga kayu ilegal," tutupnya.

Manager Kampanye dan Advokasi Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga mengatakan bahwa untuk produk-produk yang berbasis bahan baku kayu maka asal-usulnya harus jelas.

"Jadi sekarang jika disebut ambil limbah, katakanlah dari sawmil, lalu izin Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) nya bagaimana? Dapat dipastikan itu tidak jelas karena pihak sawmill tidak memiliki izin. Apakah pihak perusahaan benar sudah menelusuri asal usul kayu yang besar kemungkinan berasal dari hutan-hutan alam tersisa di Jambi," jelas Anggi, melalui sambungan telepon (03/9/2024).

"Transisi energi ini sekedar kamufase, justru praktik ini mendorong masyarakat untuk menebang pohon di hutan yang berujung terjadinya deforestasi," lanjutnya.

Anggi pun menyebut adanya potensi kerugian negara akan menjadi besar, apalagi akibat pengawasan di tingkat tapak yang lemah.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan pusat statistic (BPS) Provinsi Jambi jumlah ekspor olahan kayu ke Korea Selatan tercatat pada tahun 2020 mencapai 129.344.258,98 kg, 64.283.706, 63 kg di tahun 2021, 174.562.133,01 di tahun 2022, dan 97.866.902,75 di tahun 2023.



Jika benar kayu-kayu diolah di sawmill berasal dari penebangan pohon secara ilegal, tentu sangat menyedihkan. Upaya Polda Jambi menekan angka ilegal logging masih butuh kerja keras. Di sepanjang 2024 ini saja, tercatat ada 19 kasus Ilegal Logging ditangani Polda Jambi. Dengan rincian, proses lidik 5 orang, tahap dua ada 14 orang dan 35 orang tersangka.

Sedangkan barang bukti yang disita polisi 9 unit truk, 1 unit pickup, 4 unit ekskavator, 1 unit sepeda motor, 3 unit chainsaw. Untuk kayu log (kayu balok) 414 batang dengan ukuran 7,50 M, 10 batang kayu pancang, 5 batang kayu panjang 4 keping papan.

"Pasti kami berantas dan kami tetap akan menindak tegas para pelaku perambahan hutan tersebut," kata Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Reza Khomeini saat dihubungi wartawan Merdeka.com pada Jumat (11/10).



Co-Firing

3



Praktik Co-Firing PLTU Nagan Raya Kesehatan Warga Jadi Ancaman

Mardili - BITHE.co
Co-Firing

BITHE.co - Siang itu, Rabu 7 Agustus 2024, asap putih tipis mengepul keluar dari ujung cerobong Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1&2 Nagan Raya. Pemandangan ini terlihat jelas dari rumah Midarwati (53 tahun), warga Dusun Gelanggang Merak, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.

Gemuruh mesin itu terdengar sayup-sayup hingga ke rumahnya yang hanya berjarak 30 meter dari dinding PLTU yang dikelola oleh PT PLN Sektor Pembangkitan Nagan Raya.

"Kalau pagi sampai siang itu asapnya sedikit, tapi kalau sudah malam asapnya lebih tebal dan gemuruh mesin semakin kencang terdengar," ungapnya.

Midarwati tinggal bersama ketujuh anaknya dan empat orang cucunya yang masih berusia dua hingga delapan tahun.

Sebagai warga yang tinggal di dekat PLTU, selain selalu mendengar gemuruh mesin, Midarwati masih ingat dengan jelas, ketika dia harus membawa cucunya yang masih berusia 18 bulan ke klinik kesehatan akibat menderita sesak nafas pada 2023. "Dipeugah lek dokter gara-gara abee (kata dokter akibat terpapar abu)," ungap Midarwati.

"Dipeugah lek dokter gara-gara abee (kata dokter akibat terpapar abu)," ungap Midarwati.

Jika sewaktu-waktu kambuh, terpaksa cucunya harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kini cucunya yang bernama Sri Wahyuni itu telah berusia dua tahun dan sudah dua kali masuk rumah sakit karena menderita infeksi saluran pernafasan. Dia memperkirakan asal debu itu berasal dari dampak pembakaran PLTU.

Faktor keterbatasan ekonomi membuat Midarwati memilih bertahan meski harus hidup berdampingan dengan PLTU 1&2 Nagan Raya.

Sehari-harinya, dia berjualan nasi di depan rumahnya. Jika warungnya sepi, Midarwati memasak di dapur dan meminta cucunya berjaga apabila ada pembeli yang datang.

Midarwati mengaku keempat cucunya hanya bermain di rumah dan tidak sebebas anak-anak pada umumnya. Faktor kualitas udara yang buruk dan tidak ada lagi ruang bermain anak di daerah itu membuat Midarwati harus melindungi keluarga besarnya dari polusi udara.



Midarwati (53) menggendong cucunya yang terkena penyakit ISPA di Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, Rabu (7/8/2024). Foto: (Bithe/Mardili)

"Di sini kami hanya tinggal di rumah dan tidak ada tempat bermain untuk anak-anak [di luar] karena asap dan debu," kata Midarwati kepada Bithe saat dijumpai di kediamannya, pada Rabu (7/8/2024).

Dirinya dan empat orang cucunya kini sering menderita batuk dan sesak nafas. "Saya dan empat cucu saya ini kalau sudah sakit pasti batuk, dan kalau sudah parah sampai sesak nafas," ungkapnya.

Selain gejala ISPA yang dideritanya, maka mulai muncul pula bercak hitam gatal pada kulit. Menurut pengakuan Midarwati, gatal-gatal pada kulit itu dirasakan selama 3 bulan sejak awal tahun 2024, bukannya hanya dia saja, tapi hampir seluruh anggota keluarganya dan masyarakat yang masih bermukim di dekat PLTU 1&2 Nagan Raya merasakan penderitaan yang sama.

"Sebelumnya, saya tidak pernah merasakan gatal-gatal separah ini," jelasnya.

Musim kemarau panjang 2024 ini juga membuat Midarwati sangat menderita karena asap dan abu PLTU yang masuk ventilasi rumahnya.

"Kalau sudah lama musim kemarau, sekali hujan itu airnya warna hitam karena debu sudah menumpuk di genteng rumah," ucapnya menjelaskan.

Setiap pagi Midarwati harus menyapu dan membersihkan perabotan rumahnya akibat hujan abu hitam. Jika umumnya orang membersihkan rumah tiga kali sehari, maka Midarwati harus melakukan pekerjaan tersebut lebih dari delapan kali.

Dia heran melihat asap yang keluar dari cerobong PLTU 1&2 Nagan Raya yang tidak lagi berwarna hitam dan berubah menjadi warna putih kekuningan.

"Dulu asapnya hitam saya tahu itu dari batubara, tapi sekarang warnanya putih kekuningan, apa batubara yang berubah warna?" ungkap Midarwati keheranan. Sebagai orang awam, dia tidak sepenuhnya paham tentang teknologi co-firing.

Masih di Desa Suak Puntong, Dusun Permai, tampak sejumlah anak-anak sedang asik bermain sepeda di halaman rumah. Mereka yang tinggal di sana merupakan warga yang direlokasi dan mendapatkan biaya ganti rugi dari PLTU 1&2 Nagan Raya.

Darna (56), salah seorang warga Dusun Permai, dulunya tinggal di depan PLTU 1&2 Nagan Raya, kini lebih memilih tinggal sedikit lebih jauh dari perusahaan pembangkit listrik milik negara itu. Darna merupakan salah seorang perempuan yang vokal menentang keras pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh operasi PLTU 1&2 dan menuntut hak ganti rugi.

Pada tahun 2020, Darna mendapatkan kompensasi atas tanah dan bangunan miliknya sebesar Rp 500 juta. Meski terbilang murah, Darna dan keluarganya lebih memilih menjual dan pindah ke tempat yang lebih aman dari asap dan debu PLTU.

"Saya lebih memilih pindah meski harganya tidak sesuai, daripada anak cucu saya harus kena debu setiap hari," kata Darna saat ditemui Bithe, pada Selasa (6/8/2024).

Kini Darna dan keluarganya pindah ke Dusun Permai, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, jaraknya sekitar 3 km dari PLTU 1&2 Nagan Raya. Pindah dengan harapan hidup bisa peroleh lingkungan yang lebih sehat, namun pada kenyataannya Darna dan keluarganya masih saja diteror asap dan abu hasil pembakaran PLTU.

"Kalau anginnya bertiup ke arah selatan, asap dan debunya tetap masih kena ke pemukiman kami," tuturnya.



Ancaman ISPA bagi Kesehatan Warga

Midarwati menjaga cucunya yang sedang bermain teras rumah. Foto: (Bithe/Mardili)

Data penyakit ISPA yang diperoleh dari Puskesmas Padang Rubek, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya menunjukkan, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 809 kasus, tahun 2023 sebanyak 526 kasus, tahun 2024 terhitung sejak Januari hingga Juli sebanyak 146 kasus.

Kepala Puskesmas Padang Rubek, Kiky Tri Wahyuni menyebutkan pasien yang mengeluhkan ISPA ke Puskesmas Padang Rubek mulai dari usia 5 tahun ke atas.

Kiky menjelaskan, penyakit ISPA merupakan penyakit infeksi yang menyerang saluran pernafasan, disebabkan oleh adanya Infeksi virus atau bakteri pada saluran pernapasan dan dipengaruhi oleh sistem kekebalan tubuh.

"Jadi, bayi dan anak-anak menjadi kategori yang rentan terkena ISPA," ujarnya.

Ia belum bisa memastikan sumber penyebab ISPA di Padang Rubek karena belum ada riset mendalam. Namun kata dia, pola hidup tidak sehat dan lingkungan dengan kualitas udara yang buruk bisa menjadi penyebab ISPA.

"Kami belum dapat memastikan karena belum adanya penelitian," kata Kiky.

Psikolog Anak, Endang Setianingsih, menyatakan lingkungan memiliki peran penting dalam perkembangan psikologi anak terutama perkembangan mental anak.

Lingkungan sekitar juga peran besar dalam membentuk pola pikir dan perilaku anak tersebut.

Bila lingkungannya buruk seperti kebisingan, polusi udara, serta tata ruang yang tidak nyaman dapat menyebabkan gangguan psikologis pada seseorang.

"Jika lingkungan tidak bersih, maka psikologi anak akan tampak rapuh dan mudah terkena stres, mudah cemas dan bahkan depresi," ungkap Endang kepada Bithe, Rabu (21/8/2024).

Endang menjelaskan, pengaruh bermain bagi anak dapat membentuk otot dan melatih seluruh tubuhnya. Bermain juga berpengaruh dalam penyaluran tenaga emosi, dan bila terpendam akan dapat mempengaruhi perilakunya seperti gelisah, mudah tersinggung dan mudah tegang dalam menghadapi sesuatu hal.

"Anak yang tinggal di lingkungan terbatas akan memiliki perilaku agitasi, mudah gelisah dan akan mengalami halusinasi," jelas Endang.



PLTU Co-Firing dan Klaim Keamanan Teknologi

PLTU 1&2 Nagan Raya terletak di tepi jalan nasional lintas Barat Sumatera tepatnya di Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Conveyor atau pengangkut material campuran batu bara dan biomassa, milik PLTU 1&2 Nagan Raya membentang diatas jalan nasional. Truk bermuatan tampak lalu lalang masuk ke area PLTU.

PLTU ini mulai beroperasi sejak 2014 dengan menggunakan bahan bakar batu bara, ini juga merupakan program percepatan 10.000 MW tahap pertama, yang tertuang dalam Perpres No. 71 Tahun 2006. Kemudian, pada Oktober 2020 dilakukan uji coba co-firing menggunakan cangkang sawit sebesar 5 sampai 10 persen biomassa. Penerapan co-firing pada 2021 menggunakan teknologi co-firing sebesar 4,6 MW.

Team Tata Niaga dan Bahan Bakar PLTU 1&2 Nagan Raya, Edy Purnama menyampaikan bahwa, hingga saat ini 2024 PLTU Nagan Raya telah menggunakan empat jenis biomassa yakni cangkang sawit, serbuk gergaji (sawdust), sekam padi, potongan kayu berukuran kecil (wood chip).

"Kita juga sedang dalam tahap uji coba serat kelapa sawit (fiber)," ucap Edy.

Untuk pencampuran, kata Edy, masih 3 hingga 5 persen biomassa yang dicampur dengan batubara. Target pencampurannya hingga 10 persen, namun masih terkendala di bahan baku biomassa. Edy menyebutkan, jumlah pembakaran perhari di PLTU 1&2 Nagan Raya sebesar 50 hingga 100 ton.

"Dari kebutuhan harusnya pembakaran sebesar 300 ton per hari, tapi belum optimal karena masih ada keterbatasan bahan baku," pungkasnya.

Dalam wawancara dengan Bithe.co, Team Leader Lingkungan PLTU 1&2 Nagan Raya, Husnul Hidayat, mengatakan program co-firing jauh lebih aman dibandingkan sebelumnya.

"Program co-firing biomassa ini jauh lebih aman dan mampu menekan jumlah partikel karbon pencemaran udara," ungkap Husnul Hidayat.

Husnul menyampaikan, hingga April 2024 PLTU 1&2 Nagan Raya sudah membakar biomassa sebesar 18.982 ton dan listrik yang dihasilkan dari biomas tersebut sebesar 14.800 megawattower. Untuk besaran CO2 yang berhasil ditekan sejumlah 18.122 ton.

"Artinya, lebih sedikit bahkan hampir tidak ada emisi," tegasnya.

Dia juga menerangkan terkait abu sisa pembakaran boiler, PLTU Nagan Raya telah dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan yakni Electrostatic Emission Monitoring (ESP) yang berfungsi untuk menangkap debu dari emisi gas buang.

"Kita sudah menggunakan teknologi ESP, jadi tidak ada lagi pencemaran udara," kata Husnul Hidayat.

Terkait asap pekat di malam hari, Husnul membantah adanya praktik pengoperasian di waktu-waktu tertentu. Dia mengatakan proses pembakaran pada PLTU dilakukan selama 24 jam dengan pengendalian emisi gas buang.



Dampak Polusi dari PLTU

Studi yang dilakukan Salikin Mirza pada tahun 2021 tentang dampak PLTU bagi warga di Desa Suak Puntong, dari delapan warga yang diwawancarai mendapatkan data bahwa kesejahteraan warga sekitar PLTU yang beroperasi sangat rendah.

"Faktor utamanya karena debu yang dihasilkan oleh PLTU itu sendiri, faktor lainnya karena polusi dan kebisingan dan jalan utama yang rusak," tulis Salikin Mirza dalam penelitiannya.

Direktur Yayasan Apel Green Aceh, Syukur Tadu mengatakan, PLTU 1&2 Nagan Raya telah mempersempit ruang hidup masyarakat disana. Pencemaran lingkungan lewat asap dan debu hasil pembakarannya telah mengancam kesehatan warga terutama anak-anak.

"Solusi terbaiknya adalah pensiun dini PLTU 1&2 Nagan Raya," kata Syukur Tadu.

Syukur juga menyebutkan, praktik pembakaran batu bara dengan biomassa atau disebut co-firing yang dilakukan oleh PLTU 1&2 malah memperburuk kondisi lingkungan, asap yang semakin pekat dan debu yang semakin banyak telah mengundang bencana penyakit ISPA dan mengancam lingkungan bermain anak.

"Sudah saatnya beralih ke energi yang lebih bersih, karena nyawa manusia lebih berharga dibandingkan PLTU," tuturnya.

Manager Kampanye dan Advokasi Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga menilai, teknologi co-firing dengan cara membakar batubara dan biomassa akan tetap menghasilkan pencemaran lingkungan dan berdampak bagi kesehatan masyarakat sekitar.



"Co-firing ini sebenarnya hanya kamuflase transisi energi," kata Anggi Prayoga, Senin (12/8/2024). "Kata co-firing digunakan seolah-olah merupakan solusi krisis iklim," tambahnya.

Menurut Anggi, selama proses bakar membakar masih dipraktikkan, maka selama itu pula pencemaran akan terus terjadi dan belum bisa disebut transisi energi.

Dia juga menyoroti permasalahan lingkungan dan kesehatan warga di lingkaran PLTU. Praktik co-firing dianggap akan lebih banyak berdampak pada lingkungan dan kesehatan terutama anak-anak yang menjadi kelompok rentan terinfeksi penyakit ISPA.

"Kalau kita bicara perubahan, maka harus di audit semuanya mulai dari aktor, implementasi, dan kebijakan," tegas Anggi Prayoga. Tujuan audit jelasnya untuk menghindari perluasan dampak buruk dari co-firing. Jika masih berdampak, maka praktik co-firing harus dihentikan, sebutnya.

Walhi Aceh menilai, transisi energi model co-firing adalah cara melegalkan pembangkit listrik tetap beroperasi dengan memanfaatkan bahan bakar fosil dan biomassa. Nyatanya hal tersebut hanya menambah penderitaan warga sekitar PLTU.

"Co-firing ini tidak mengurangi emisi gas rumah kaca karena masih melakukan proses pembakaran batubara dan biomassa, malah ini akan memperburuk kondisi lingkungan," ucap Direktur Walhi Aceh, Ahmad Shalihin. "Praktik ini (co-firing) tidak mengurangi emisi, karena mereka menebang pohon dan merusak biodiversiti di lokasi pengembangan biomassa. Akibatnya hutan yang menyerap emisi malah hilang," tambahnya.



Tinjauan Ilmiah Keberadaan Dampak Polusi bagi Anak

Laporan dari organisasi penelitian Health Effects Institute (HEI) menemukan bahwa anak-anak dibawah usia lima tahun sangat rentan terdampak polusi udara hingga menyebabkan kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, asma, dan penyakit paru-paru.



Bercak hitam bekas penyakit kulit ditangan Midarwati. Foto: (Bithe/Mardili)

Mereka juga menemukan, pada tahun 2021 polusi udara menyebabkan 8,1 juta kematian di seluruh dunia. Selain kematian, jutaan orang lainnya hidup dengan penyakit kronis yang melemahkan kesehatan, ekonomi, dan masyarakat.

Lebih khusus, sebuah studi tentang dampak polutan dari Universitas Diponegoro pada April 2022, menyatakan bahwa pencampuran bahan bakar batubara dan biomassa sekam padi dapat meningkatkan kualitas abu yang cukup tinggi.

"Kandungan abu dan volatile matter atau zat terbang dari sekam padi jauh lebih tinggi dibandingkan batubara," kata peneliti Nur Cahyo dkk.

Nur Cahyo menjelaskan, secara karakteristik, sekam padi mempunyai kandungan nilai kalor dan kandungan air yang lebih rendah dibandingkan dengan batubara.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farras Ilham dan Nazaruddin Sinaga, menyebutkan, pengaruh co-firing dengan menggunakan serbuk gergaji (sawdust) 5 persen masih belum ada pengaruh signifikan pada emisi gas buang.


Lanjutnya, meski nilai rata-rata data temperatur buangan menggunakan teknologi co-firing terbilang lebih rendah sekitar 2,2 derajat celcius, namun mereka menemukan adanya peningkatan pada gas buangan yakni Nitrogen Oksida (NOx), meskipun tidak signifikan dibandingkan saat Coal firing dan masih memenuhi batas baku mutu Peraturan menteri No.P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019.

Midarwati harus menutup makanan di warungnya rapat-rapat dari abu yang beterbangan. Ia juga menutup penampungan air hujan dengan kain menghindari paparan partikel kecil berbahaya itu.

"Sudah ditutup pakai kain pun tetap debunya masuk ke air yang ditampung," keluhnya.

Midarwati mengaku sudah tidak tahan tinggal di lingkaran PLTU dengan kualitas udara yang semakin buruk. Dia juga bersedia apabila sewaktu-waktu pihak PLTU membeli rumah dan tanahnya.

"Belum dibeli, tapi lebih baik rumah ini saya jual daripada tinggal dalam abu kotor," pungkasnya menutup harapan terbesarnya saat ini.



Mencermati Praktik Curang Oplosan Bahan Baku Co-Firing untuk PLTU Indramayu. Apa Dampaknya?

Anna Desliani – Parboaboa
Co-Firing

PARBOABOA - Udara panas menyengat di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat siang itu. Debu-debu pun tampak bertebaran di jalan, imbas puluhan kendaraan angkutan yang lalu-lalang.

Puluhan truk bermuatan 7 hingga 15 ton serbuk gergaji atau sawdust terlihat melintasi jalan desa satu-satunya yang menuju PLTU Indramayu. Pemandangan yang nyaris terekam saban hari sejak PLTU anak perusahaan dari PT PLN (persero) tersebut menerapkan co-firing biomassa pada 18 Juni 2021.

Skema co-firing adalah dengan mencampurkan antara bahan bakar fosil batubara dengan biomassa ini untuk bahan baku PLTU. Ini sejalan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2017 tentang penggunaan biomassa sebagai bahan bakar pada pembangkit tenaga listrik.

Pemerintah, melalui beleid tersebut, hendak menekan ketergantungan pada energi fosil khususnya batubara, sekaligus mendorong pencapaian target bauran energi baru terbarukan (EBT) pada tahun 2025, yaitu sebesar 23% dari total konsumsi energi nasional.

Ada empat jenis biomassa yang biasanya digunakan saat proses co-firing: kayu asal hutan energi, limbah pertanian atau perkebunan, limbah industri, dan sampah rumah tangga. Beberapa contohnya seperti wood pellet, cangkang sawit, dan sawdust (serbuk gergaji). Jenis terakhir itulah yang digunakan di PLTU Indramayu.

Lalu apakah penggunaan sawdust efektif sebagai bahan baku PLTU?

Rabu, 17 Juli 2024, beberapa pria larut dalam obrolan di sebuah gazebo rumah. Seorang pria lain mendekat sambil memegang selembar kertas putih di tangan. Para pria itu adalah para supir truk colt diesel pembawa serbuk.

Serbuk-serbuk itu dikumpulkan dari berbagai wilayah di Jawa Barat, semisal Tasikmalaya, Bandung, Majalengka, Subang, Ciamis, Ciasem, hingga Kabupaten Kuningan.

Para sopir truk biasanya berhenti di sana sebelum melanjutkan perjalanan ke PLTU Indramayu. Mereka mengambil surat kirim barang (SKB), sebagai syarat administratif untuk dapat masuk ke lokasi.



Dokumen SKB hanya dimiliki oleh pemasok serbuk, yaitu mereka yang telah bekerja sama dengan PLTU untuk menyuplai bahan baku. Saat berhenti inilah, biasanya digunakan oleh para oknum supir untuk menambahkan air pada muatan sawdust. Tujuannya agar tonase yang di dapat bertambah.

Hal itu sudah jadi rahasia umum. Seorang warga Desa Sumuradem, Dulmin menyebut praktik itu biasa dilakukan dimana saja.

"Biasanya nggak ada tempat khusus atau tempat-tempat tertentu untuk melakukan penyiraman serbuk. [Dapat] dilakukan dimana saja," ujar Dulmin. Dia tergabung dalam Komunitas Jatayu (Jaringan Tanpa Asap Batubara di Indramayu), sebuah kelompok warga yang memperjuangkan agar desanya bebas polusi PLTU.

Apa yang dikatakan Dulmin memang ada benarnya. Bahkan seorang supplier, yang diketahui juga bekerja sebagai karyawan PLTU, bahkan mengarahkan Parboaboa untuk melakukan hal serupa, jika ingin menyuplai serbuk.

"Asal dikasih plastik alas saja [agar tidak rembes]," ujar pria berkulit sawo matang itu mengungkap triknya.

Dia bilang, sudah ada kesepakatan tidak tertulis untuk para pengangkut serbuk, yaitu:selama air tidak menetes banyak, biasanya truk-truk tersebut masih diperbolehkan masuk ke PLTU.

Di wilayah Pantura Jawa Barat yang memiliki banyak pemberhentian dan SPBU tersebut, biasanya para supir melakukan praktik tersebut. "Bayar 50 ribu, sepuasnya [bisa siram air]," katanya.

Pengoplosan bahan baku co-firing, menurut pengakuan pria asal Indramayu itu, terpaksa dilakukan demi mendapatkan keuntungan dari biaya operasi.

"Kalau kering itu paling dapat cuma 6 ton. Paling besar itu 7 ton. Ya, [biayanya] habis-habis untuk perjalanan saja," katanya. Untuk menyiasatinya, para supir melakukan pencampuran antara biomassa dengan air.

Dalam hitungannya, 1 ton serbuk dibanderol dengan harga Rp320.000. Dengan komposisi biomassa dan air 7:3, maka sekali angkut saja, penjual bisa mendapat tambahan keuntungan Rp960 ribu.

Parboaboa coba membuat analisis sederhana. Jika kebutuhan bulanan bahan baku untuk co-firing PLTU Indramayu adalah sekitar 12.000 ton serbuk gergaji, maka PLTU yang memiliki kapasitas 3 x 330 Megawatt telah mengalami kerugian lebih dari 1 miliar rupiah setiap bulan saja dari pembelian serbuk gergaji.

Sawdust Basah Akan Berdampak pada Energi Dihasilkan

Peneliti biomassa, Justin Satrio, mengatakan penggunaan sawdust dalam kondisi basah itu aneh. Karena menurutnya, dalam pembakaran co-firing yang diperlukan bahan baku yang kering. Justin bilang, kadar air biomassa itu mestinya di bawah 20 persen atau lebih rendah lagi, yaitu 15 persen.

"Air itu kan suatu gangguan yang negatif. Jadi, harus dihilangkan. Karena air itu juga mengurangi nilai panas yang dihasilkan," jelasnya saat dihubungi melalui zoom.



Jika biomassa berasal dari tanaman seperti rumput atau sekam padi, bahkan kadar airnya bisa mencapai 40 hingga 50 persen, sehingga perlu dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini sebutnya jadi tantangan, karena memperoleh biomassa dari sisa-sisa bahan organik di negara seperti Indonesia tergolong mudah, namun untuk mengeringkannya itu yang butuh biaya besar.

"Sawdust basah itu sangat berpengaruh pada energi yang dihasilkan dari proses pembakaran," lanjutnya.

Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, maka harga per ton itu ditentukan oleh kualitas biomassa dan kadar airnya, bukan semata-mata dari berat tonasenya saja. Dalam kasus di PLTU Indramayu, dalam perhitungannya oplosan 7 ton sawdust dalam satu truk yang berubah menjadi 10 ton setelah ditambah air, maka kadar air yang dihasilkan bisa mencapai 44%.

Artinya, biomassa yang bermanfaat tinggal 56% saja, sisanya adalah air yang justru akan mengurangi efisiensi pembakaran. Dia pun menyinggung perihal potensi dampak polusi yang lebih tinggi karena energi yang dibutuhkan untuk pembakaran akan menjadi lebih besar.

"Kita sering kali cuma fokus dalam PLTU-nya. Tetapi, untuk menghasilkan biomasanya, itu tidak dihitung impact-nya. Environmental impact-nya tidak dihitung," tandas Justin.



Lalu apakah penggunaan sawdust sebagai bahan co-firing akan lebih efektif dari bahan baku biomassa lainnya?

Amalya Oktaviani, Manajer Kampanye Bioenergi Trend Asia, mencoba membuat analisisnya, berdasarkan jumlah unit PLTU Indramayu yang telah diset untuk proses co-firing.

Dengan aktivasi tiga unit, kata Amalya, estimasi kebutuhan wood pellet mencapai 688.430 ton per tahun. Namun, jika menggunakan sawdust sebagai bahan baku, kebutuhan akan meningkat karena nilai kalorinya lebih rendah dibandingkan dengan wood pellet.

"Kalau sawdust yang cuma 2.900 kalori, maka setidaknya butuh 1,5 kali lipat [dari biomassa lain]," jelas perempuan lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut.

Kalkulasi pasokan biomassa juga sempat disinggung seorang supplier, yang juga merangkap sebagai pekerja di PLTU Indramayu. Menurutnya, pihak PLTU akan menampung sebanyak apapun serbuk gergaji, selagi kualitas biomassa terpenuhi.

Manajer Kampanye, Advokasi, dan Media Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Prayoga, menyebut praktik pencampuran sawdust dan air, tak hanya terjadi di PLTU Indramayu, tetapi juga di PLTU lain. Dia sebut praktik serupa juga terjadi di PLTU Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Hal ini serupa dengan kajian Trend Asia. Dalam risetnya mereka mendeteksi bahwa pencampuran sawdust dan air sebagai biomassa pembakaran terjadi di seluruh provinsi di Pulau Jawa. Terdapat setidaknya tiga PLTU besar yang mewakili tiga provinsi tersebut: PLTU Indramayu di Jawa Barat, PLTU Rembang di Jawa Tengah, dan PLTU Paiton di Jawa Timur.

Anggi meyakini, pihak PLN menyadari pencampuran sawdust dan air adalah praktik kotor yang tidak proper diterapkan di lapangan. Akan tetapi, karena bersifat perintah, maka tidak boleh diputus begitu saja. Mandat yang ia maksud mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Pengesahan RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2021-2030.

Dalam diktum kedua bagian c, disebutkan bahwa target bauran energi baru dan terbarukan pembangkitan tenaga listrik pada akhir tahun 2025 sebesar 23,0 persen. Dengan demikian, apapun persoalannya termasuk potensi kerugian yang akan dialami oleh PLN maupun PLTU.

"Mau tidak mau, suka tidak suka, PLN menyadari bahwa ini adalah praktik kotor [tapi tetap dijalankan]," ungkapny (01/08/2024).



"Jadi, ada yang memanfaatkan situasi tersebut. Nggak mungkin PLN tidak mengetahui karena truk itu hanya bisa masuk [atas izin] PLN atau petugas di PLTU," ujarnya. "Dugaan saya, [dalam permainan ini] ada keterlibatan orang atas," kata Anggi.

Di sisi lain, Anggi menganggap bahwa co-firing adalah bisnis yang tidak realistis. Dalam analisisnya, harga sawdust yang ditetapkan sebesar Rp300 per kilogram tidak masuk akal jika mempertimbangkan biaya pengangkutan dari lokasi produksi ke PLTU. Ongkos transportasi dan logistik bisa membengkak, tergantung pada jarak dan volume pengiriman. Dengan harga jual sawdust yang rendah, maka produsen akan menghitung ulang beban finansial yang ditanggung.

Hal ini yang membuka celah praktik pencampuran bahan baku dengan air, yang semata-mata dilakukan untuk meraup keuntungan. "Ini murni bisnis meraup keuntungan," tegasnya.

Anggi merekomendasikan agar proses audit dan evaluasi besar-besaran terkait kebijakan co-firing tersebut perlu segera dilakukan. "Ini harus diaudit dan dievaluasi besar-besaran kebijakan co-firing ini," pungkasnya.

Peneliti Biomassa, Justin Satrio, mengatakan penggunaan sawdust dalam kondisi basah itu aneh. Menurutnya, dalam pembakaran co-firing diperlukan bahan baku yang kering. Seandainya pun terdapat kadar air pada biomassa tersebut, maka harus dikeringkan terlebih dahulu. Di sinilah tantangannya. Karena untuk memperoleh biomassa dengan kadar air rendah, biaya yang dikeluarkan akan sangat besar. Pada prinsipnya, kata Justin, kadar air biomassa itu mesti di bawah 20 persen atau lebih rendah lagi, yaitu 15 persen. Jika biomassa berasal dari tanaman seperti rumput atau sekam padi, kadar airnya bisa mencapai 40 hingga 50 persen, sehingga perlu dikeringkan terlebih dahulu.

"Air itu kan suatu gangguan yang negatif. Jadi, harus dihilangkan. Karena air itu juga mengurangi nilai panas yang dihasilkan," jelas Justin saat dihubungi melalui saluran Zoom.

Selain itu, Justin memastikan bahwa sawdust basah itu sangat berpengaruh pada energi yang dihasilkan dari proses pembakaran. Dia mencontohkan, di Amerika Serikat, jika dirinya membeli biomassa, maka harga per ton itu ditentukan oleh kualitas biomassa dan kadar airnya. Karena semakin banyak kadar air, nilai kalori dari biomassa tersebut juga akan semakin rendah. Justin mengaku kaget dengan temuan Parboaboa terkait praktik oplosan biomassa di Indramayu. Dalam perhitungannya, jika 7 ton sawdust dalam satu truk berubah menjadi 10 ton setelah ditambah air, maka kadar air yang dihasilkan bisa mencapai 44%.

"Itu aneh sekali. Artinya, biomassa yang bermanfaat tinggal 56% saja, sisanya adalah air yang justru akan mengurangi efisiensi pembakaran," katanya.

Praktik semacam itu, singgung Justin, secara tidak langsung juga berpotensi menghasilkan polusi lebih tinggi karena energi yang dibutuhkan untuk pembakaran menjadi lebih besar.



Co-Firing Sumber Energi Bersih di Aceh? Antara Pasokan dan Isu Degradasi Lingkungan

Cut Nauval - Waspadaaceh.com

Co-Firing

Kebijakan Co-firing diatur dalam Peraturan Menteri No 12 Tahun 2023 tentang pemanfaatan biomassa di PLTU, tujuannya untuk menekan emisi karbon serta mengurangi ketergantungan pada batu bara.

Deriansyah (40) sibuk memilih kayu gelondongan di antara tumpukan sampah di Pantai Lam Naga, Desa Peunaga Rayeuk, Kec Meureubo, Aceh Barat, Provinsi Aceh. Berbagai jenis sampah terbawa oleh arus laut pasca hujan seperti botol plastik, ranting kayu, dan batang-batang pohon terdampar di sepanjang bibir pantai. Kayu yang berdiameter sekitar 25 cm dengan panjang antara satu hingga dua meter itu kemudian dipotong dengan gergaji menjadi beberapa bagian. Suara senso (gergaji mesin) bersahut-sahutan dengan deburan ombak yang terus menghantam pantai.

"Sekarang cuaca lagi pas, kami mulai ambil kayu-kayunya, lalu kami olah jadi biomassa kebutuhan PLTU 1&2 Nagan Raya," ujar Pria yang akrab disapa Adun Deri, Rabu (28/8/2024).

Dia tidak bekerja sendiri, ia mengajak dua timnya bergerak menyusir pantai untuk mengumpulkan sampah kayu tersebut. "Kami harus lebih hati-hati memilih kayu, karena masih mengandalkan mesin pencacah plastik, kayu-kayu yang keras seperti jenis kayu cemara, tidak kita ambil karena khawatir mesinnya bisa rusak," katanya.



Deriansyah, warga Meureubo, Aceh Barat, mengumpulkan limbah kayu di Pantai Lam Naga, Desa Peunaga Rayeuk, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Rabu (28/8/2024). Kayu tersebut akan diolah menjadi serpihan untuk kebutuhan co-firing PLTU 1&2 Nagan Raya. (Foto/Cut Nauval D.)

Setelah kayu yang dipilah terkumpul, mereka mengangkutnya ke dalam gerobak dan becak. Kayu itu kemudian dibawa ke tempat pencacahan untuk diproses menjadi serpihan kayu. Jarak dari pantai tempat pengambilan kayu, ke tempat pencacahan sekitar 2,2 km.

Deri baru mengetahui potensi biomassa pada awal 2024, saat mendengar bahwa PLTU 1 dan 2 Nagan Raya membutuhkan pasokan biomassa untuk dibakar bersama batu bara. Metode co-firing ini diklaim mampu menghasilkan energi bersih.

"Saya pikir hanya perusahaan besar yang bisa menyuplai biomassa. Ternyata kami bisa menjual langsung ke PLTU tanpa melalui vendor," katanya.

Ternyata Deri tidak hanya mengumpulkan kayu. Bersama temannya, Abdullah, Deri punya misi mendirikan "Bang Dolah Recycle". Bank sampah yang hadir dari kegelisahan melihat kawasan di Pantai Lam Naga yang dipenuhi sampah saban hari.

"Apalagi kalau musim hujan, makin penuh sampah di sini. Jadi sampah ini bisa kami pilah. Yang plastik kami bawa ke bank dolah recycle, sedangkan kayu itu kami olah jadi serpihan yang bisa dijadikan biomassa. Kalau dulu, kayu-kayu ini mungkin hanya jadi bahan bakar api unggun para nelayan," lanjutnya.

Mesin pencacah terus bekerja, mengubah kayu menjadi serpihan kecil dengan alat penggiling plastik sederhana. Deri meminjam mesin tersebut dari Pemerintah Desa Meureubo selama dua bulan terakhir. "Waktu itu, mesin ini sempat rusak karena kayu yang dicacah terlalu keras," katanya sambil mengumpulkan hasil serpihan kayu yang dimasukkan ke dalam karung besar.

Dalam waktu setengah jam, mesin ini mampu menghasilkan lima karung serpihan kayu, dengan berat sekitar 150 kilogram. "Satu karung beratnya sekitar 30 kilogram, jadi untuk menghasilkan satu ton diperlukan sekitar 33 karung," jelasnya.

Serpihan kayu nantinya kemudian dibawa ke PLTU 1&2 Nagan Raya, yang berjarak sekitar 6 km dari tempat pencacahan. Hingga saat ini, sudah tiga kali Deri telah memasok biomassa ke PLTU 1&2 Nagan Raya. "Setoran pertama kami dapat lebih dari satu ton, yang kedua 2,4 ton, dan yang ketiga hampir 3,5 ton," ujarnya.

Deri juga mengandalkan berbagai sumber pasokan biomassa, termasuk dari kilang padi dan pengrajin perabot di sekitarnya. Namun, ia mengakui bahwa kondisi cuaca menjadi tantangan tersendiri, jika musim hujan tiba, biomassa yang dipasok dalam kondisi basah akan menurunkan nilai kalori dan harga jualnya. "Cuaca sekarang tidak sahabat, jika hujan lebat, aktivitas kami terhambat," jelasnya.



Menurut Deri, bisnis biomassa yang ia geluti belum memberikan keuntungan yang pasti. Selain bahan baku yang tidak rutin didapatkan dan keuntungan yang minim, belum sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Prosesnya mulai dari pemilihan kayu, pemotongan, hingga pengiriman ke PLTU memerlukan tenaga dan biaya yang tidak sedikit.

"Saya bilang, kita seperti sedang 'membakar uang'. Ini investasi, tapi apakah sudah ekonomis? Belum, karena hingga kini kita belum tahu berapa penghasilan yang pasti," kata Deri.

PLTU membeli biomassa seharga Rp668 ribu per ton. Terakhir, mereka membayar Rp2,3 juta untuk 3,5 ton biomassa. "Dari penjualan ini, kami membagi hasilnya kepada teman-teman yang bekerja sebesar dua ratus ribu atau tiga ratus ribu per orang. Namun, jika dihitung berdasarkan waktu kerja, jumlah tersebut jelas tidak cukup. Belum lagi jika mesin rusak, uangnya habis untuk perbaikan." lanjutnya.

Saat ini, biaya transportasi seperti bensin dan konsumsi masih ditanggung dari kantong pribadi. Deri berencana mengevaluasi dan menghitung ulang biaya operasional.

Meski keuntungan belum terlihat, ayah tiga anak ini tetap optimis. Deri yakin potensi biomassa ini bisa menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat. "Mungkin belum banyak yang tahu, tapi biomassa ini bisa menjadi potensi ekonomi," ujarnya.

Jerih payah Deri dan kawan-kawannya berakhir ke penumpukan dome milik PLTU 1 & 2. Di sana, serpihan kayu milik Deri menunggu giliran untuk dibakar ke tungku pembakaran. Secara kuantitas pasokan biomassa dari Deri tidak sebanding dengan pasokan perusahaan, namun bagi mereka itu sangat berarti. Dari sana mereka mendapatkan sedikit uang tambahan.



PLTU Biomassa

Tumpukan cangkang sawit, serbuk kayu, serpihan kayu, dan sekam padi terlihat di area penampungan bahan baku atau dome PLTU 1&2 Nagan Raya, Desa Suak Puntong, Nagan Raya, Provinsi Aceh. Bahan-bahan ini adalah biomassa, yang digunakan dalam proses co-firing di PLTU.

Puluhan truk hilir mudik membawa muatan biomassa yang dikumpulkan dari berbagai wilayah di Aceh. Mereka adalah vendor perusahaan pemasok biomassa yang bekerja sama dengan PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI).

Di lokasi ini, alat berat seperti eskavator mencampur biomassa dengan batu bara. Campuran tersebut kemudian diangkat oleh crane yang dikendalikan sang operator dari ruang kontrol. Campuran itu dimasukkan ke dalam tabung dan diteruskan melalui belt conveyor menuju boiler dapur pembakaran.

Di sinilah biomassa dan batu bara dibakar untuk menghasilkan energi listrik, yang kemudian dialirkan ke konsumen. Belt conveyor beroperasi hingga 18 jam dalam sehari mengantarkan bahan bakar ke mesin boiler pembangkit listrik. Dari seberang jalan, terlihat cerobong asap PLTU yang masih

mengeluarkan kepulan asap putih. Para pekerja tampak menggunakan sekop untuk membersihkan batu bara yang tumpah berceceran di area yang becek akibat musim hujan. Di antara para pekerja Tim Leader Operasi Coal Ash Handling (CAH), Redha Sukmana sedang mengawasi proses tersebut.

Di salah satu area dome, terlihat tumpukan karung berisi serbuk gergaji dan serpihan kayu. "Itu milik masyarakat yang dibeli langsung tanpa melalui perusahaan," kata Redha.

Belakangan ia sedikit was-was, karena stok batu bara kian menipis, cuaca buruk yang melanda kawasan pesisir barat Aceh membuat kapal tongkang tak berani merapat ke dermaga.

"Selama dua bulan terakhir, stok batu bara mulai menipis, biasanya tumpukan batu bara di sini bisa mencapai ketinggian sembilan meter, kalau sekarang malah lebih banyak biomassa" katanya.

Meskipun saat itu stok biomassa berlimpah, tetapi pembakaran tetap harus dicampur dengan batu bara, sebab mesin milik PLTU 1&2 Nagan Raya tidak dirancang full biomassa. Sehingga penerapan co-firing menjadi pilihan paling tepat.



Kebijakan Co-firing diatur dalam Peraturan Menteri No 12 Tahun 2023 tentang pemanfaatan biomassa di PLTU, tujuannya untuk menekan emisi karbon serta mengurangi ketergantungan pada batu bara.

Di Indonesia, 52 PLTU wajib menggunakan 5-10 persen biomassa dari total batu bara yang digunakan. Batu bara sebagai bahan bakar fosil menghasilkan polusi udara seperti karbon dioksida yang memicu perubahan iklim serta zat berbahaya lain yang merusak kesehatan dan lingkungan.

Indonesia, bersama negara lain, berkomitmen menangani emisi melalui Perjanjian Paris. Perjanjian ini meminta setiap negara menargetkan pengurangan emisi dan mencapai Emisi Nol Bersih(Net-Zero Emission). Untuk itu, Pemerintah mulai perlahan beralih dari energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

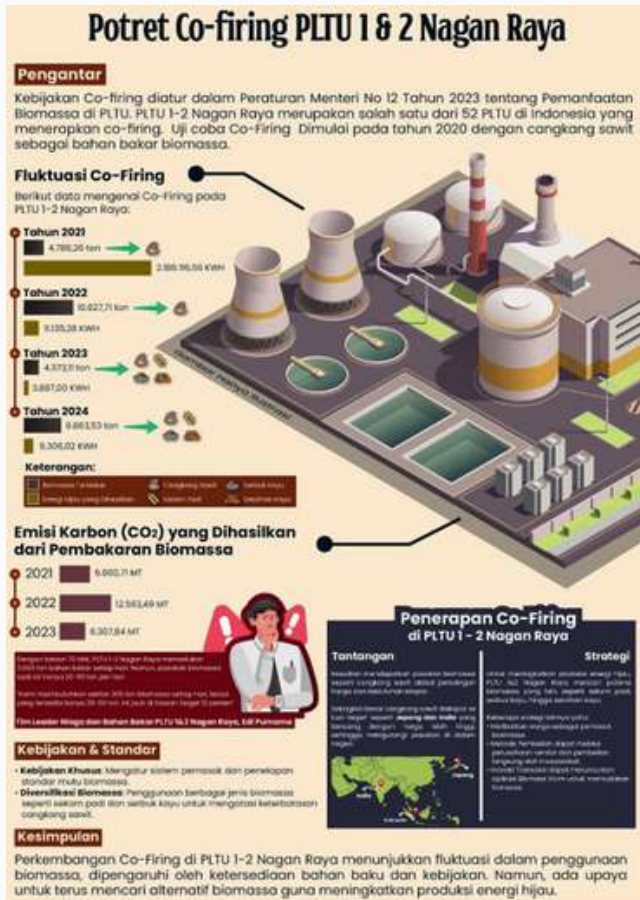
Menurut data Global Energy Monitor sepanjang tahun 2022, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di seluruh dunia menghasilkan emisi karbon dioksida (CO₂) sekitar 8,99 miliar ton, Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan emisi sebesar 214 juta ton CO₂.

PLTU 1-2 Nagan Raya salah satu dari 52 PLTU yang diwajibkan menerapkan co-firing. PLTU ini beroperasi pada 2014. Setelah enam tahun membakar penuh batu bara, pada tahun 2020, PLTU milik pemerintah ini mulai uji coba co-firing. Ketika itu, uji coba dilakukan menggunakan cangkang sawit sebagai bahan bakar biomassa.

Pembakaran biomassa menghasilkan energi hijau dalam bentuk kWh. Energi hijau adalah energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan, seperti matahari, angin, dan biomassa. Pada tahun 2021, PLTU ini membakar 4.786,26 ton cangkang sawit, menghasilkan energi hijau sebesar 2.186.116,56 KWH sekitar 2,19 MW. Setahun kemudian, jumlah cangkang sawit yang dibakar meningkat menjadi 10.627,71 ton, menghasilkan 11.135,28 KWH energi hijau.

Pada tahun 2021 dan 2022, mereka hanya menggunakan cangkang sawit sebagai pendamping batu bara. Namun, pada tahun 2023, penggunaan biomassa menurun drastis menjadi 4.373,11 ton, setara dengan 3.887,00 KWH energi hijau.

Menurunnya pembakaran biomassa karena kesulitan dalam mendapatkan cangkang sawit. Sebagian besar cangkang sawit diekspor ke luar negeri seperti Jepang dan India yang bersaing dengan harga lebih tinggi, sehingga mengurangi pasokan di dalam negeri.



"Cangkang sawit ini hanya perusahaan sawit yang bisa supply ke kita. Sementara kita bersaing dengan ekspor, sehingga penggunaan cangkang sawit sebagai bahan baku co-firing tidak bisa konsisten," ujar Redha.

Akhirnya, PLTU 1&2 Nagan Raya mencari potensi biomassa yang lain, seperti sekam padi, sawdust, hingga wood chip. "Kita pernah juga uji coba pakai kayu kaliandra, tapi skalanya masih kecil," kata Redha.

Bukan hanya karena harga cangkang yang melambung, tetapi ada kebijakan khusus yang mengatur sistem pemasok serta penetapan standar mutu biomassa. Kemudian jenis biomassa yang digunakan mulai bervariasi, termasuk sekam padi, serpihan kayu dan serbuk kayu.

Pada 2024, jumlah biomassa yang dibakar meningkat menjadi 9.863,53 ton, menghasilkan 9.306,02 KWh energi hijau.

Tim Leader Niaga dan Bahan Bakar PLTU 1&2 Nagan Raya, Edi Purnama, mengatakan dulu harga cangkang sawit Rp600 ribu per ton, tetapi kini sudah mencapai Rp800 ribu per ton. Sedangkan harga batubara antara Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta per ton.

"Sekarang mencampur cangkang sawit dengan batu bara sudah tidak ekonomis lagi. Jadi kami mencari alternatif bahan bakar biomassa lain, seperti sekam atau woodchip," katanya.

Untuk memenuhi pasokan biomassa, mereka melibatkan warga sebagai pemasok. Ada dua cara, yaitu dengan membeli melalui perusahaan vendor atau membelilangsung dari masyarakat. Untuk memudahkan transaksi, mereka juga meluncurkan aplikasi Biomass Store. "Kami tetap menerima biomassa dari warga yang ingin menjualnya," ujar Edi.

Penerimaan biomassa dibedakan yang berasal dari vendor dan masyarakat langsung. Jika biomassa berasal dari warga dan jumlahnya kecil, mereka tidak menghitung nilai kalorinya dan adanya penyesuaian harga. Nantinya ada proses visual check untuk memastikan kualitas biomassa dan penyesuaian harga berdasarkan kalori. "Tapi untuk biomassa dari vendor yang jumlahnya banyak, kami cek kelembaban atau moisture-nya. Semakin kering biomassa, semakin bagus kalorinya. Biomassa yang terlalu basah akan kami tolak," jelas Edi.

Dengan beban 70 MW, PLTU 1-2 Nagan Raya memerlukan total bahan bakar mencapai 3.800 ton per hari. Namun, pasokan biomassa hanya mencapai 20-50 ton per hari. Sisanya tetap mengandalkan batu bara. "Kebutuhan biomassa harian kami sekitar 200 ton, sementara yang tersedia hanya 20-50 ton. Ini jauh di bawah target 12 persen," jelas Edi.

Pemanfaatan biomassa dalam proses co-firing selama ini masih bergantung pada limbah perkebunan yang tidak dikelola secara optimal dari hulu ke hilir. PLTU 1 dan 2 Nagan Raya mengakui adanya potensi besar dengan menanam pohon biomassa, seperti penanaman pohon jenis kaliandra, yang dapat memenuhi kebutuhan biomassa secara berkelanjutan.

Pemerintah juga berencana untuk menjadikan Hutan Tanaman Energi (HTE) guna memenuhi kebutuhan pasokan biomassa bagi PLTU. Namun, hingga kini, PLTU 1 dan 2 mengakui belum ada kerjasama terkait hutan tanaman energi tersebut. Mereka baru bekerja sama dalam penyediaan bibit penanaman kayu kaliandra dengan Universitas Teuku Umar dan menyebutkan beberapa wilayah dengan potensi penanaman kaliandra, seperti lahan di Gayo Lues.



PT PLN UPK 1&2 Nagan Raya menggandeng empat vendor sebagai pemasok biomassa. Salah satunya PT Kurma Karya Global yang rutin memasok beberapa jenis biomassa, seperti sekam, serpihan kayu, dan serbuk kayu. Perusahaan ini bekerja sama dengan berbagai panglong kayu dan kilang padi di sejumlah daerah, termasuk Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, dan beberapa daerah lainnya.

"Kami memasok sekitar 400 ton biomassa per bulan ke PLTU. Jika dikumpulkan dari warga, bisa mencapai 40-50 ton per minggu," kata Humas PT Kurma Karya Global, Ismail Abda, saat ditemui waspadaaceh.com, Rabu (14/8/2024).

Perusahaan yang berbasis di Meulaboh, Aceh Barat ini mengumpulkan biomassa utamanya dari Aceh Barat Daya. Di sana terdapat alat untuk memproses wood chip dari limbah kayu yang dikumpulkan dari warga dan panglong kayu sekitar. Sebanyak 60 warga dipekerjakan untuk mengumpulkan sekam dan serbuk kayu dengan pendapatan rata-rata Rp150.000 per hari.

"Namun, kapasitas produksi wood chipper saat ini masih kecil, hanya tiga ton per jam. Kami juga bekerja sama dengan kilang padi dan panglong kayu dari berbagai daerah," jelasnya.

Mereka harus memastikan kualitas biomassa, terutama memastikan bahan baku tidak basah agar nilai kalori tetap terjaga. Kendala utama dalam memasok biomassa, menurutnya, pada biaya transportasi, terutama untuk daerah jauh dari PLTU seperti Aceh Tamiang, yang mencapai Rp 4 juta per pengiriman.

PT Kurma Karya Global juga mengakui tidak mengetahui asal-usul kayu yang dikumpulkan warga, apakah berasal dari penebangan ilegal atau tidak, karena perusahaan hanya berperan sebagai penampung. Ketidakmampuan vendor memasok biomassa dalam skala besar menjadi persoalan serius bagi PLTU. Selama ini PLTU Nagan Raya kerap alami kekurangan stok biomassa. Ternyata program co-firing tidak semulus yang direncanakan di atas kertas. Tak hanya itu, mereka harus bersaing dengan perusahaan asing yang menawarkan harga lebih tinggi untuk cangkang sawit.

Di sisi lain, usaha PLTU dengan melibatkan warga juga tidak memberikan solusi berarti. Kemampuan warga mengumpulkan biomassa jauh lebih rendah dibandingkan vendor. Ironisnya, bisnis biomassa ini belum memberikan keuntungan signifikan bagi masyarakat lokal. Pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan jerih payah yang mereka keluarkan.

Bila dipotret lebih luas, energi hijau yang dihasilkan dari co-firing tidak memberikan sumbangsih yang besar terhadap sumber energi terbarukan di Aceh. Mayoritas sumber listrik di Aceh masih berasal dari energi kotor. Data yang diperoleh waspadaaceh.com dari PLN UID Aceh hanya 4,1 persen produksi listrik di Aceh yang bersumber dari energi terbarukan.

Aceh Miliki Potensi Terbarukan

General Manager PLN UID Aceh, Mundhakir, mengakui energi hijau yang mampu mereka hasilkan masih kecil, padahal, Aceh memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar.

Aceh memiliki potensi energi terbarukan 3.619 MW, terdiri dari potensi Pembangkit Tenaga Air, Pembangkit Tenaga Panas Bumi, Tenaga Biomassa, serta Tenaga Surya dan Bayu. Potensi tersebut membuka peluang bagi investasi.

Pemerintah Aceh menyadari potensi besar EBT yang mereka miliki, sehingga mereka berani menargetkan bauran EBT melampaui target nasional. Aceh menargetkan bauran EBT 25% sementara secara nasional menargetkan 23%.

Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas ESDM Aceh, Dedi Muhamad Roza, menyebutkan target bauran EBT di Aceh adalah 25% pada tahun 2025 dan 41,3% pada tahun 2050, lebih tinggi dari target nasional. Namun sampai tahun 2023, realisasi bauran energi di Aceh baru mencapai 12,12%.

Meski realisasi masih rendah, Dedi optimis keberadaan PLTA Peusangan yang akan beroperasi pada akhir 2024 realisasinya akan meningkat drastis. PLTA Peusangan mampu menghasilkan 45 MW energi bersih.

Dalam perencanaan Pemerintah Aceh EBT dari co-firing justru tidak masuk dalam rencana realisasi EBT di Aceh. Idealnya kebijakan pemerintah pusat dikoneksikan dengan kebijakan pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan menteri, pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan co-firing dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri ESDM RI.

"Tidak ada keterlibatan pemerintah daerah dalam kebijakan co-firing ini. kontribusi co firing terhadap bauran energi sangat kecil," jelasnya.



Mencermati berbagai persoalan yang dihadapi oleh PLTU, co-firing masih menghasilkan emisi, di sisi lain co-firing juga membuka peluang perambahan hutan. Data dari PLTU 1&2 Nagan Raya, dari penerapan co-firing tersebut telah menghasilkan Karbon Dioksida (CO₂) pada 2021 sejumlah 6.860,71 Metrik Ton (MT), pada tahun 2022 telah menghasilkan 12.563,49 MT dan Tahun 2023 menghasilkan 6.307,84 MT CO₂.

Pada faktanya penerapan co-firing tidak sepenuhnya menghasilkan energi hijau, karena melalui proses pembakaran tetap menghasilkan emisi. Menurut Perencana Monitoring dan Evaluasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Munawir, jika pemerintah benar-benar ingin menerapkan energi bersih, langkah yang harus diambil adalah pensiun dini PLTU dan beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, mikro hidro, panas bumi, dan gelombang laut.

"Saat ini, sumber energi listrik Aceh masih dominan dari PLTU. Seharusnya PLTU dipensiunkan dan diganti dengan pembangkit yang ramah lingkungan," kata Munawir.

Munawir juga mengatakan terkait dukungan politik, kebijakan, dan anggaran untuk transisi energi di Aceh masih minim.

"Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk energi ramah lingkungan. Contohnya, unit PLTMH di Gayo Lues tidak lagi beroperasi karena tidak ada alokasi anggaran untuk menghidupkannya kembali," ujarnya.

Munawir juga menyampaikam dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Dinas ESDM menolak penerapan Co-firing bagi PLTU di Aceh dan lebih memilih co-firing untuk PLTD. Walhi sendiri bingung bagaimana penerapan co-firing untuk PLTD.

"Seharusnya ada keselarasan antara pernyataan dukungan transisi energi dengan realisasi kebijakan dan anggaran. Pemerintah perlu serius dalam menerapkan kebijakan yang mendukung energi bersih dan ramah lingkungan di Aceh," jelasnya.

Menggugat Co-Firing sebagai Energi Bersih

Penerapan co-firing biomassa dicurigai hanya menjadi alasan untuk memperpanjang usia PLTU dan melanggengkan penggunaan batubara, sehingga pemain di sektor batubara tetap eksis meskipun porsi penggunaannya berkurang.

Label transisi energi yang disematkan pada praktik co-firing ini pun menimbulkan kontroversi dan dianggap jauh dari konsep transisi energi yang berkeadilan.

Direktur Apel Green, Syukur Tadu, menyebut pembakaran cangkang sawit, penambangan batu bara, dan pemanfaatan Tanaman Hutan Energi (HTE) justru meningkatkan emisi karbon. Ia menilai co-firing sebagai solusi palsu untuk menyelamatkan bumi dari emisi. "Hal ini akan memperpanjang penderitaan warga sekitar PLTU yang selama ini dirundung masalah kesehatan, gangguan terhadap ruang hidup, dan pekerjaan mereka akibat polusi," jelasnya.

Syukur juga menegaskan bahwa PLTU harus memastikan semua biomassa yang digunakan tidak berasal dari kayu ilegal. Mengingat kebutuhan serbuk atau serpihan kayu yang tinggi, ada potensi terjadinya penebangan kayu ilegal, terutama di wilayah Sumber Panglong yang letaknya berdekatan dengan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Manajer Kampanye dan Advokasi Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga juga menilai biomassa tidak tepat sebagai sumber energi terbarukan di Indonesia. Berdasarkan data, pencapaian energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia masih sangat jauh dari target yang ditetapkan.

Pada tahun 2023, realisasi EBT hanya 12,5 persen, jauh di bawah target 17,9 persen. Apalagi, pemerintah berencana menurunkan target bauran energi terbarukan dari 23 persen pada tahun 2025 menjadi 19 hingga 22 persen, mengikuti perubahan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang tengah dibahas.

Di balik penurunan target ini, biomassa muncul sebagai salah satu prioritas utama untuk mencapai

target yang lebih rendah dengan tren pertumbuhan yang sangat lambat 0,1 persen dari 2021 ke 2022 dan 0,2 persen dari 2022 ke 2023 Indonesia diperkirakan akan gagal mencapai target bauran energi 23 persen pada 2025.

Sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan ini, biomassa ditempatkan sebagai prioritas kedua setelah energi surya dalam RPP KEN. Biomassa, yang mencakup kayu, limbah pertanian, dan produk olahan kayu, dianggap sebagai alternatif energi terbarukan yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Namun, ada kekhawatiran serius terkait dampak lingkungan dari proyek biomassa ini. Potensi biomassa di Indonesia, yang berasal dari perkebunan kayu dan kelapa sawit, sangat besar, dengan luas areal mencapai 5 juta hektar untuk hutan tanaman industri dan 15,3 juta hektar untuk kelapa sawit.

Konsesi kehutanan menjadi lebih leluasa untuk memanfaatkan hutan alam dengan dalih transisi energi pemenuhan bahan baku biomassa kayu. Hal ini yang justru mempertajam ketimpangan penguasaan lahan dan memperburuk situasi kehidupan masyarakat adat.

Padahal dalam penelitian Trend Asia, untuk proyek co-firing biomassa 10% di seluruh PLTU yang dicanangkan pemerintah, membutuhkan lahan sebanyak 2,33 juta hektare, atau 35 kali luas DKI Jakarta. Potensi praktik buruk dalam pengadaan ini akan sangat besar.

"Deforestasi mengancam hutan alam karena tuntutan pemenuhan biomassa dari kayu melalui penyediaan hutan tanaman energi. Kebijakan transisi energi perlu dievaluasi agar lebih berkeadilan. Jadi, energi hijau seperti apa yang bisa diterapkan di Indonesia tanpa merusak hutan?" ujarnya.



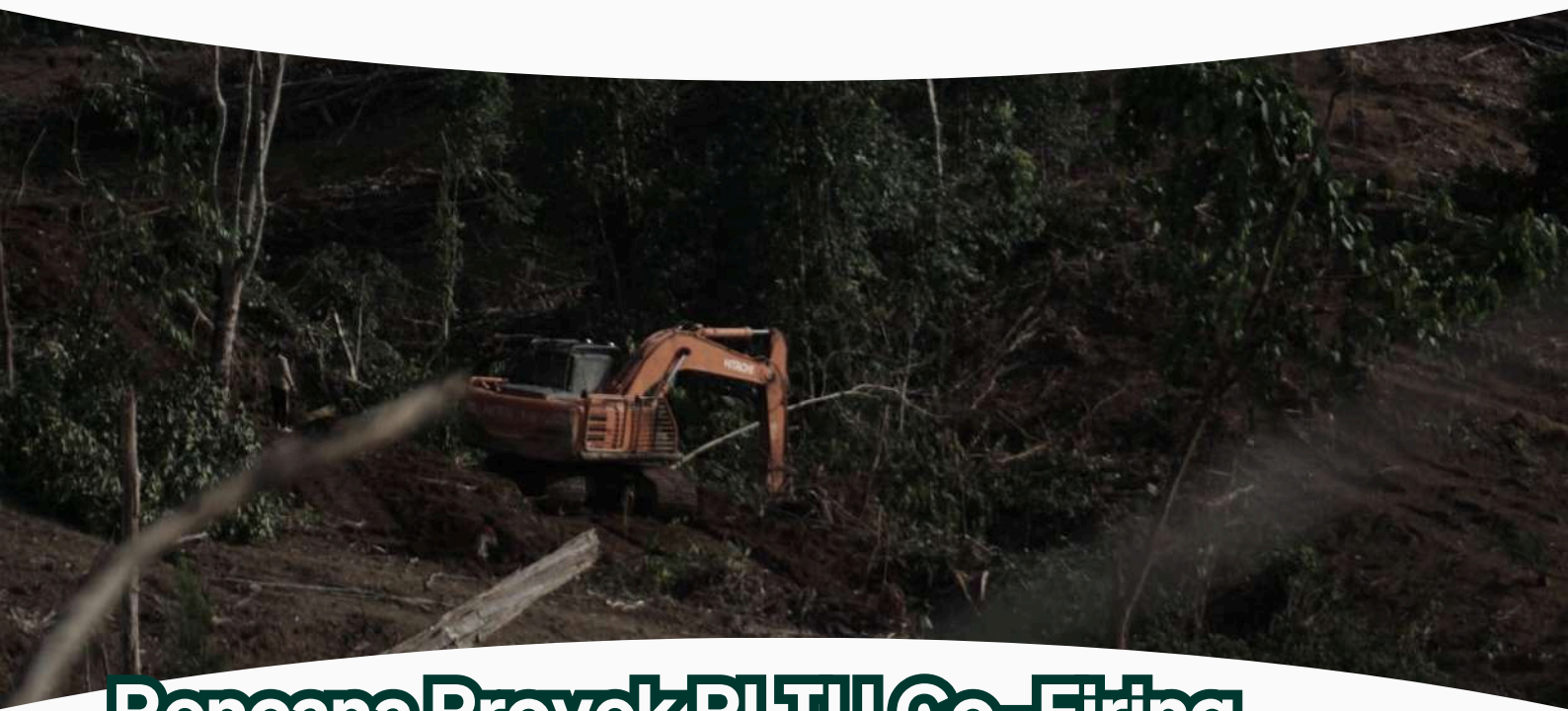


Meskipun belum pada skala besar, mereka mengklaim bahwa upaya ini menunjukkan tekad PLTU dalam mendorong ekonomi kerakyatan. PLTU aktif mengembangkan partisipasi publik melalui pemanfaatan biomassa, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Menurut Anggi, dalam momen tahun politik, narasi greenwashing semakin kuat digunakan untuk melegitimasi penerbitan izin baru bagi Hutan Tanaman Energi. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya menambah laju deforestasi, tetapi juga mengakibatkan perampasan lahan, memperburuk risiko bencana hidrologis, dan memperdalam konflik penguasaan lahan.

"Pemerintah belum mengambil langkah konkret dalam transisi energi, malah memperburuk keadaan. Sudah saatnya negara menyusun kebijakan yang benar-benar melindungi rakyat dan lingkungan," tuturnya.

Penerapan co-firing di PLTU 1&2 Nagan Raya sudah memasuki tahun keempat, namun realisasinya masih jauh dari target. Bahkan sekadar menjamin pasokan masih kelimpungan. Sudah saatnya pemerintah mengkaji ulang kebijakan co-firing. Pemerintah harus serius untuk transisi energi menuju transisi energi yang bersih, adil, dan berkelanjutan.



Rencana Proyek PLTU Co-Firing Ancaman bagi Hutan Jambi

**Teguh Suprayitno – MONGABAY
Co-Firing**

Sungai Pemusiran di Sorolangun, Jambi, dulu menopang kehidupan warga desa, kini terlihat hitam. Saban hari ratusan truk hilir-mudik mengangkut batubara melewati jalan tanah bergelombang. 'Emas hitam' berceceran, hanyut terbawa hujan ke sungai.

"Dulu masak, mandi, nyuci, semua butuh air sungai. Sekarang airnya sudah ndak biso lagi dipakai," kata Usman., warga Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangain, Sarolangun.

Warga tak hanya kehilangan sumber air bersih, juga pangan seperti ikan dampak kampung terkepung tambang batubara.

"Dulu, ikan baung, lampam banyak. Kalau najur, kadang biso dapat sampai 10 kg, sekarang sudah ndak ado lagi. Lah habis," ujar lelaki 73 tahun itu.

Sungai Pemusiran berada di sekitar tambang batubara PT Jambi Prima Coal, perusahaan BUMN, PT Surya Global Makmur dan PT Dinar Kalimantan Coal. Tiga perusahaan ini bakal jadi pemasok batubara ke PLTU mulut tambang Jambi-1. Proyek ini bagian dari ambisi Presiden Joko Widodo membangun pembangkit listrik 35.000 Megawatt.

PT Jambi Power, perusahaan patungan bentukan PT PLN Indonesia Power dengan PT Sumber Segara Primadya (SSP)—yang bertanggung jawab

membangun pembangkit listrik berkapasitas 600 MW itu, sudah mengantongi izin lingkungan Nomor 75/2019 dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sarolangun.

Setelah groundbreaking pada 2018, proyek ini mangkrak. Perusahaan konsorsium asal Tiongkok yang bakal mendanai proyek PLTU dikabarkan bubar. Meski begitu PLTU Jambi-1 tetap masuk dalam RUPTL PLN 2021-2030, dan target beroperasi pada 2027.

PLTU Jambi-1 bakal gunakan campuran biomassa dan batubara yang pemerintah 'kampanyekan' lebih ramah lingkungan.

Pada 2022, Indonesia Power menjalin kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi sampai 2025, untuk membangun demplot tanaman energi dengan menanam pohon gamal dan kaliandra pada lahan 70 hektar di PLTU.

Islah Hayati, dari LPPM Universitas Jambi, juga ketua program pembangunan demplot menolak berkomentar.

"Kami tidak diizinkan Indonesia Power untuk publikasi apapun," jawabnya saat dihubungi via WhatsApp, 16 Agustus lalu.



Focus Group Discussion dan Fieldtrip : Pembangunan Hutan Tanaman Energi

Laporan Walhi Jambi menyebutkan, pembangkit Jambi-1 memerlukan pasokan batubara 3,7 juta ton per tahun atau setara 10.200 ton per hari. Berarti, PLTU akan membakar 425 ton batubara setiap jam.

Hasil riset Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) yang rilis Januari 2022 menemukan fakta lebih buruk, bahwa standar emisi udara PLTU MT Jambi-1 masih mengacu pada aturan usang, Permen No18/2008.

Seharusnya, standar emisi mengacu pada peraturan terbaru sesuai Permen LHK Nomor 15/2019 karena analisis mengenai dampak lingkungan hidup PLTU Jambi-1 diserahkan pada 2019.

Dalam dokumen amdal juga tak mengidentifikasi dan menghitung dampak kesehatan dari emisi polutan udara. Bahkan, tidak menyebutkan emisi dari merkuri dan logam berat beracun lain, meski pembangkit batubara sebagai sumber utama emisi beracun ini.


Warga Pemusiran, berada dua kilometer dari pembangunan PLTU bakal terancam. Usman khawatir, terjadi dampak lebih buruk kalau proyek listrik itu tetap lanjut.

"Sekarang kalau panas, debu batubara itu nyebar kemano-kemano. Apolagi kalau PLTU jadi, tambah parah."

Laporan CREA dan IESR berjudul "Manfaat Kesehatan dari Transisi Energi Berkeadilan dan Penghentian Bertahap Batubara di Indonesia" rilis Juli 2023, menjelaskan, penghentian penggunaan batubara lebih cepat pada 2040, sejalan dengan target Perjanjian Paris untuk membatasi kenaikan suhu 1,5 derajat celsius.

Penghentian PLTU batubara akan menghindarkan 182.000 kematian karena polusi udara serta biaya kesehatan US\$130 miliar sampai akhir masa pakai semua pembangkit listrik. Dalam laporan itu, Jambi masuk dalam 10 provinsi paling terdampak emisi PLTU batubara, dan bertanggung jawab atas kematian 187 orang per tahun.

Meski demikian, pemerintah tetap berambisi membangun dua pembangkit batubara di Jambi dengan kapasitas 1.200 MW.



Co-Firing, Solusi Palsu dan Ancaman bagi Hutan Jambi

Dalam komitmen Indonesia tekan emisi, PLTU co-firing—dengan menambahkan biomassa sebagai bahan bakar ke dalam boiler batubara—diklaim lebih ramah lingkungan dan akan meningkatkan bauran energi terbarukan 1,8%.

Sampai 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menargetkan 52 PLTU—dengan 107 mesin pembangkit—gunakan co-firing. Forest Watch Indonesia (FWI) memperkirakan, kebutuhan biomassa untuk PLTU co-firing dengan kapasitas 18.664 MW itu mencapai 8-14 juta ton per tahun. Bahan baku biomassa ini akan disokong dari hutan tanaman energi (HTE), limbah pertanian atau perkebunan, limbah industri kayu, dan sampah rumah tangga.

Anggi Putra Prayoga, Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI mengatakan, upaya pemerintah menekan emisi dari pembangkit batubara justru mengancam hutan alam tersisa. Data FWI 2023 menunjukkan, pembangunan HTE mengakibatkan penggundulan hutan 55.000 hektar dan mengancam 420.000 hektar hutan alam di 31 konsesi. Pembangunan HTE akan menjadi pendorong deforestasi baru hutan alam Indonesia.

Anggi bilang, proyek pembangunan HTE untuk biomassa PLTU co-firing akan merusak 4,65 juta hektar hutan alam dari konsesi HPH, HTI dan perhutanan sosial yang turut mengusahakan HTE. Luas kerusakan hutan akan terus bertambah, karena pada 2024 ini ada 37 pemegang izin konsesi HTE. FWI bilang, pada 2025 izin HTE bakal bertambah jadi 43.

“HTE akan menjadi alat para pemegang izin PBPH untuk memperpanjang cengkeraman mereka atas sumber daya hutan dan lahan,” katanya.

Dari 37 perusahaan pemegang izin konsesi HTE, PT Hijau Artha Nusa (HAN) menjadi satu-satunya perusahaan HTE di Jambi. Dalam profil perusahaan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada 5 Agustus 2024, Mohamad Sukri, sebagai komisaris pun saham 5.025 lembar, Rp502,5 juta.

Selanjutnya, Han Man Seong, menjabat sebagai direktur mengantongi 30.475 lembar saham, Rp3,047 miliar. Pemegang saham mayoritas HAN adalah Woorim Energy Co., Ltd, berbasis di Goejeong-ro 166beon-gil, Seo-gu, Daejeon, Korea Selatan. Perusahaan yang bergerak di bisnis pembangkit listrik tenaga surya dan energi terbarukan itu menguasai 142.000 lembar saham Rp14,2 miliar.

Perusahaan modal asing ini mendapatkan izin konsesi seluas 32.620 hektar sampai 2073 di Kabupaten Merangin dan Sarolangun, sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan dengan Nomor SK 183/Menhut-II/2013 diteken Zulkifli Hasan 25 Maret 2013.

Perusahaan asal Korea Selatan itu hanya beroperasi tiga tahun, mulai 2019-2021. Laporan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV Jambi menyebutkan, perusahaan resmi berhenti beroperasi pada April 2023, setelah membabat ribuan hektar hutan dan menjual ribuan kubik kayu.

Walhi Jambi menyebut, selama perusahaan beroperasi luas tutupan hutan hilang mencapai 990 hektar. Abdullah, Direktur Eksekutif Walhi Jambi mengatakan, seharusnya perusahaan memulihkan hutan dengan menanam sengon, sesuai izin THE mereka.

“Tetapi lahan yang dipulihkan ditanami sengon untuk tanaman energi itu tidak sampai 7%,” katanya.

Amalya Reza Oktaviani, Manajer Program Bioenergi Trend Asia mengatakan, PLTU co-firing biomassa hanyalah solusi palsu pemerintah. Klaim PLN bahwa co-firing biomassa pelet kayu sebagai solusi mengurangi emisi gas rumah kaca dan transisi energi nyatanya tidak terbukti.

Riset Trend Asia menemukan, penggunaan co-firing tetap menghasilkan emisi karbon mulai hulu sampai hilir. Sebanyak 10% target biomassa pada 52 PLTU berpotensi menghasilkan emisi karbon sampai 26,48 juta ton dioksida (CO₂e) per tahun. Emisi itu muncul mulai dari deforestasi, pengelolaan HTE. Angka itu belum termasuk emisi dari proses produksi pelet kayu.

Organisasi yang jadi akselerator transformasi energi dan pembangunan berkelanjutan di Asia itu memperkirakan pencampuran biomassa justru menambah emisi dari PLTU batubara dengan proyeksi terus naik jadi 298,9 juta ton CO₂e pada 2030.

"Argumentasi PLN, penggunaan biomassa kayu tidak menghasilkan emisi alias netral karbon, tidak terbukti," kata Amel, sapaan akrab Amalya.

Dalam Kebijakan Energi Nasional, listrik dari biomassa punya porsi besar sebagai bauran energi terbarukan hingga 2040. Bahkan, PLTU batubara captive untuk industri, juga didorong pakai campuran biomassa 30%.

"Biomassa dari PLTU co-firing, selalu dipromosikan berhasil menekan emisi 1 juta ton,"

Laporan Trend Asia, pemerintah setidaknya harus membangun 2,33 juta hektar HTE untuk memenuhi pasokan biomassa co-firing 10% atau setara 35 kali luas daratan Jakarta. Luas bisa melonjak tiga kali lipat, kalau pemerintah gunakan pohon gamal sebagai tanaman energi.

"Tekanan hutan dan lahan makin besar kalau dorongan transisi energi biomassa," kata Amel.

Sepanjang 2023, PLN mengklaim menyerap 1 juta ton biomassa untuk memenuhi kebutuhan 43 PLTU co-firing. Jumlah ini naik lebih 71% dibanding 2022 hanya 585.000 ton. Kalau semua rencana pemerintah berjalan mulus, PLN mengklaim energi co-firing biomassa di PLTU itu akan menghasilkan listrik 12,71 terawatt jam, atau setara bauran energi terbarukan 3,59%.

Seharusnya, Indonesia belajar dari pengalaman pembangkit listrik biomassa milik Drax Group, di North Yorkshire, Inggris. Laporan The Guardian menyebutkan, pembangkit listrik berkapasitas 2,6 gigawatt itu menghasilkan emisi empat kali lebih besar ketimbang PLTU batubara di Britania Raya.

Tahun lalu, pembangkit listrik biomassa itu menciptakan 11,5 juta ton karbon dioksida atau hampir 3% dari total emisi karbon di Inggris. Drax menerima subsidi £22 miliar meskipun menjadi

penghasil emisi terbesar di Inggris pada 2023. Setiap tahun, kata Amel, Drax mendapatkan subsidi pemerintah Inggris. Pada 2020, subsidi yang mengalir ke Drax mencapai £832 juta. Tahun 2021, nilai meningkat jadi £893 juta. Rata-rata setiap hari Drax menerima subsidi £2,3 juta sampai £2,4 juta, atau setara Rp46 miliar lebih.

"Apakah Indonesia sanggup memberi subsidi itu? Uang sebanyak itu bisa untuk mengembangkan energi bersih."

Sebenarnya, Dewan Energi Nasional tahu kalau pembangkit listrik biomassa tidak ergonomis, tetapi pemerintah tetap nekat memakainya. "Transisi energi ini murni kepentingan bisnis."

Pencampuran biomassa terbukti tak mengurangi penggunaan batubara. Berdasarkan statistik PLN 2021, penggunaan biomassa untuk PLTU co-firing mencapai 282.628 ton. Jumlah naik signifikan dibanding 2020 hanya 9.731 ton. Pada tahun sama, pemakaian batubara juga ikut naik jadi 68,47 juta ton, dari 66,68 juta ton pada 2020. Penggunaan batubara yang terus naik menunjukkan PLN gagal menjalankan strategi kedua, yakni, menggantikan sebagian batubara dengan biomassa untuk bahan bakul PLTU, seperti tercantum dalam RUPTL PLN 2021-2030.

"Jadi, transisi energi sebagai bisnis. Penggunaan co-firing justru memperpanjang umur PLTU batubara yang sudah tua. Yang diuntungkan pebisnis, mereka punya peluang bisnis baru dengan HTE."



Lokasi groundbreaking PLTU Mulut Tambang Jambi-1 masih tak berubah sejak dimulai 2018 lalu.

Anggi, Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI mengatakan, PLTU co-firing yang dicap sebagai energi bersih di tengah tekanan krisis iklim dan ekologi, hanyalah ilusi dan kebohongan.

"HTE itu tidak menjawab apa-apa, tidak menjawab iklim, emisi, lingkungan, malah merugikan masyarakat dan merusak hutan," katanya.



Sungai Nyabu, di Desa Tanjung Kasri, yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Foto: Teguh Supriyanto/ Mongabay Indonesia

Laksmi Dhewanthi, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK mengakui pembangunan HTE akan menyebabkan pelepasan karbon yang berdampak pada meningkatnya efek gas rumah kaca. Namun, dia berdalih itu hanya terjadi di awal.

“Semua proses pasti ada pembukaan lahan, kita bangun rumah pun demikian. Jadi, yang dilihat bukan sesaatnya, tapi manfaat lebih lanjutnya,” katanya, saat ditemui di peresmian tower GRK di Jambi, 18 Juli lalu.

Untuk melihat dampak dari pembangunan HTE, katanya, harus keseluruhan. “Jangan fokus pada satu tahapan, tapi fokus pada proses keseluruhan.

Karena kita menghitungnya memang di Paris Agreement memang di 2030. Jadi, nanti kalau misal [hutan] dibuka, kemudian ditanam kembali, dikembalikan lagi seperti asal, itu kemudian menjadi balance.”

Dia akui aktivitas manusia akan mempunyai dampak pada lingkungan tetapi pemerintah berupaya untuk mengendalikannya. Laksmi menolak mengomentari hasil riset beberapa lembaga swadaya masyarakat yang menyebut pembangunan HTE merusak lingkungan dan makin memperburuk krisis iklim.

“Sekali lagi saya tidak melihat bagaimana metodologi kajiannya, jadi saya tidak bisa mengomentari secara langsung.”

Kaya Energi Terbarukan

Dalam Rencana Umum Energi Nasional 2015–2050, Jambi memiliki potensi energi terbarukan 447 MW dari mikrohidro dan minihidro. Lokasi tersebar di Sarolangun, Merangin, Bungo dan Kerinci, dataran tinggi yang mayoritas tutupan hutan masih terjaga.

“Jambi wilayah barat banyak menyimpan potensi energi terbarukan bersumber dari air. Di sana, banyak aliran sungai dan tutupan hutan relatif masih banyak sebagai daerah tangkapan air,” kata Setyasmoko Pandu Hartadita, Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Jambi.

Sesuai rencana umum energi daerah Jambi pada 2019, Jambi memiliki target penggunaan energi terbarukan 24% pada 2025, mencapai 40% pada 2050.

Riset FWI dan Walhi Jambi menyebut, konsesi HAN merupakan lokasi yang disepakati Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, juga Pemerintah Jambi untuk proyek millennium challenge corporation, fokus pembangunan rendah karbon dan penguatan pemanfaatan energi terbarukan melalui pembangkit mikrohidro.

Pembukaan kawasan ini tidak hanya bencana banjir dan longsor, juga mengancam energi terbarukan dari aliran sungai.



Laporan World Bank tentang Pemetaan Sumber Daya Hidro Kecil di Indonesia pada 2017, menyebut Merangin memiliki potensi 778 MW, jauh lebih besar dari daya PLTU co-firing Jambi-1. Aliran Sungai Batang Tabir di sekitar konsesi HAN berpotensi menghasilkan listrik lebih dari 5 MW.

“Potensi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik 35.000 rumah tangga. Kalau kita bicara energi bersih. Air sebenarnya lebih ramah lingkungan dibanding PLTU, karena tidak ada proses pembakaran,” kata Pandu.



Jadi Dalang Deforestasi, PT HAN di Jambi Rugikan Negara Puluhan Miliar

**Teguh Suprayitno - MONGABAY
Co-Firing**

Suara ekskavator menderu di tengah hutan di Desa Nago Gedang yang hening. Mengobrak-abrik ratusan pohon, meratakannya dengan tanah. Terlihat beberapa orang tengah mengawasi. Tak jauh dari mereka, tampak barisan bibit sawit baru ditanam.

Seorang warga mengaku sengaja menyewa alat berat, Rp 3,5 juta sehari untuk membersihkan pinggiran lahan agar api tidak merembet saat tumpukan pohon itu dibakar. Setelah dibakar, lahan akan ditanami padi.

"Beras lagi mahal. Setelah panen baru ditanam sawit, cabai sama sayuran," katanya.

Dia mengakui, lahan yang dia garap masuk dalam kawasan hutan yang menjadi izin konsesi PT Hijau Artha Nusa (HAN). Perusahaan yang disokong modal dari Korea Selatan untuk bisnis Hutan Tanaman Energi.

Dalam dokumen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang diakses Mongabay pada 5 Agustus 2024, saham PT HAN dimiliki Mohamad Sukri, yang menjabat sebagai Komisaris. Dia mengepit 5.025 lembar saham, seharga Rp 502,5 juta. Selanjutnya Han Man Seong, Direktur PT HAN. Man Seong tercatat mengantongi 30.475 lembar saham, senilai Rp3,047 miliar.

Tetapi pemegang saham mayoritas PT HAN adalah Woorim Energy Co., Ltd, yang berbasis di Goejeong-ro 166 beon-gil, Seo-gu, Daejeon, Korea Selatan. Perusahaan yang bergerak di bisnis pembangkit listrik tenaga surya dan energi terbarukan itu menguasai 142.000 lembar saham setara Rp14,2 miliar.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan nomor SK 183/Menhut-II/2013 yang diteken Zulkifli Hasan pada 25 Maret 2013, PT HAN mendapatkan izin konsesi seluas 32.620 hektare di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai dengan 2073.

Konsesi PT HAN terbagi di 3 blok. Blok I terletak di Kecamatan Tabir, Tabir Ulu, dan Tabir Barat dengan luas lahan 11.494 hektare. Sedangkan blok II seluas 10.239 hektare berada di Nalo Tantan, dan Renah Pemberap. Setidaknya ada 15 desa yang masuk dalam konsesi perusahaan di wilayah Kabupaten Merangin, salah satunya Desa Nalo Gedang.

Sementara blok III seluas 10.947 hektare berada di wilayah Desa Ranggo, Panca Karya dan Demang, Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun.

Setelah muncul omnibus law, terjadi perubahan izin perusahaan. PT HAN diketahui mengantongi izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPHH), sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 230/Menlhk/Setjen//HPL.3/5/2021 tanggal 18 Mei 2021. Lewat izin sapu jagat ini perusahaan akan memproduksi wood pellet, veneer dan kayu gergajian. Wood pellet akan diproduksi dari pohon sengon yang ditanam perusahaan, untuk campuran bahan bakar PLTU batubara.

Sekitar awal 2022, perusahaan tidak lagi beroperasi di lapangan. Banyak warga menjarah kawasan hutan untuk membuka lahan. Sepanjang tiga jam perjalanan, Mongabay menemukan banyak pembukaan lahan baru di konsesi PT HAN. Mayoritas untuk kebun sawit.

"Yang digarap itu belukar. Sebagian kebun karet ditumbang diganti sawit. Kalau buka hutan asli jarang," kata lelaki 52 tahun itu.



Forest Watch Indonesia (FWI) tahun 2022 mencatat, luas lahan pertanian kering campur di konsesi PT HAN mencapai 15.577 hektare, belukar 544 hektare, tanah terbuka 300 hektare, pertambangan emas ilegal 374 hektare dan perkebunan 182 hektare.

Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Abdullah mengakui, jika konsesi PT HAN bukan tanah kosong, meski statusnya kawasan hutan produksi. Banyak sisa belukar dan kebun karet warga yang telah ditanam puluhan tahun.

"Jadi sebelum perusahaan itu mendapatkan izin, di sana sudah banyak kebun masyarakat," katanya.

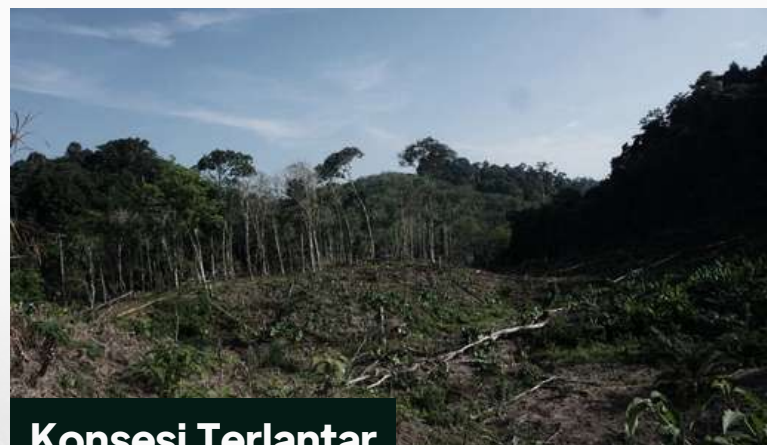
Mongabay menemui Kepala Desa Baru Nalo, Thamrin. Hampir separuh wilayah desa masuk dalam izin konsesi PT HAN. Thamrin mengakui banyak lahan warganya yang masuk dalam kawasan hutan. Seingat dia, kawasan hutan produksi itu baru ditetapkan pemerintah sekitar 1980an.

"Warga buka lahan itu sudah lama, malah sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan. Makanya jadi ribut."

Muhlisin Madras, Manajer Administrasi dan Marketing PT HAN mengakui, banyak alih fungsi lahan di konsesi perusahaan yang menjadi kebun karet dan sawit masyarakat.

Bahkan sebagian jadi lokasi tambang emas ilegal. Dia beralasan jumlah pegawai yang terbatas membuat perusahaan kesulitan memberantas aktivitas ilegal tersebut.

"Kita capek bertengkar terus dengan masyarakat. Tapi untuk kegiatan ilegal—tambang emas—kita sudah lakukan himbauan, bahkan kita pernah laporkan ke pihak berwajib,"



Konsesi Terlantar

Hasil Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) yang dilakukan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV Jambi menyimpulkan perusahaan asal Korea Selatan itu telah berhenti beroperasi sejak April 2023.

Tetapi, Khairul mantan komandan Satpam PT HAN yang ditemui Mongabay mengaku, perusahaan beroperasi di lapangan hanya sampai 2021.

"Perusahaan itu cuma tiga tahun beroperasi mulai 2019 sampai 2021, sudah itu tidak operasi lagi," katanya.

Sejak itu konsesinya dibiarkan terlantar. Hutan yang sebelumnya dibabat untuk diambil kayunya, sekarang tampak semak. Di beberapa bukit terlihat banyak coakan. Perusahaan milik Woorim Energy itu seharusnya melakukan penanaman sengon di lahan yang telah ditebang. Tetapi selama beroperasi, perusahaan hanya fokus menebang kayu.

Data Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan, selama beroperasi 2019-2021, PT HAN hanya menanam sengon seluas 64,5 hektare. Angka itu jauh dari dokumen rencana penanaman 2015-2024 yang menargetkan penanaman 18.087 hektare. Lembaga yang fokus isu hutan ini menuding, PT HAN sebetulnya tidak serius membangun hutan tanaman energi.

"HAN ini sebetulnya hanya mengincar kayu, tapi kedoknya HTE. Mereka mengekstraksi hutan, dapat kayu gratis terus dijual," kata Anggi Putra Prayoga, Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI.

Berdasarkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) jumlah produksi kayu bulat PT HAN selama 2021-2023 sebanyak 7.014 meter kubik. Sementara data SKSHHK menunjukkan mulai 2021 sampai 2023, PT HAN telah mengangkut kayu bulat 14.851 meter kubik. Tetapi kayu itu tidak diolah menjadi wood pellet maupun veneer.

Menurut keterangan warga, ribuan kubik kayu itu dibawa ke tempat penggergajian milik perusahaan kemudian dijual ke Jakarta dan Medan. Kayu yang ditebang berkualitas bagus, seperti Meranti Batu, Meranti Merah dan Kempas.

Dilansir dari Liputan6.com, keuntungan menjual kayu alam saat itu lebih besar dibanding bisnis kayu pellet. Dalam situs Indotrading.com, yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam skala business to business, harga jual wood pellet untuk biomassa hanya berkisar Rp1.500 per kilogram. Sementara harga jual kayu meranti bisa mencapai Rp 5,7 juta per meter kubik.

Analisis Geospasial yang dilakukan Walhi Jambi menggunakan platform Global Forest Watch (GFW) menunjukkan, selama tiga tahun perusahaan Korea Selatan itu beroperasi, luas tutupan hutan yang hilang mencapai 990 hektare. Tetapi lahan yang dipulihkan dengan ditanami sengon tidak sampai 7%.

"PT HAN ini adalah protret pemegang izin HTE di Indonesia, mereka sebenarnya hanya ingin menguasai hutan untuk kepentingan ekonomi," kata Anggi.

Muhlisin mengakui realisasi penanaman sengon tidak sesuai target. Dia beralasan banyak pegawai yang dirumahkan karena perusahaan pailit. Dalam laporan BPHL Wilayah IV Jambi, areal perusahaan berencana untuk diijakan, karena perusahaan sudah tidak dapat beroperasi.



Negara Rugi Puluhan Miliar

September 2023, Deri Sopian, staf Lembaga Tiga Beradik menemukan aktivitas illegal logging di wilayah Desa Baru Kibul, yang masuk dalam konsesi PT HAN. Beberapa orang tengah sibuk mengangkut puluhan kayu gelondongan ke atas truk. Kayu berdiameter 40-50 centimeter dan panjang belasan meter itu diduga akan dikirim ke tempat penggergajian.



Dua tahun lalu, 8 warga Desa Nalo Baru ditangkap Satreskrim Polres Merangin karena terlibat kasus illegal logging di konsesi PT HAN. Polisi mengamankan puluhan kubik kayu yang dimuat dalam tiga truk. Tiga pelaku divonis setahun penjara. Kasus ini turut menyeret aparat desa.

Kata Deri, aktivitas ilegal di konsesi HAN semakin marak sejak perusahaan mandek beroperasi. "Sekarang ada dua sawmill baru dekat HAN," katanya.

Wilayah konsesi PT HAN merupakan hutan hujan dataran rendah di Sumatera. Sepanjang 2017-2021, FWI mencatat telah terjadi penggudulan hutan seluas 4.834,52 hektare. Sementara Analisis Geospasial yang dilakukan Walhi Jambi menggunakan platform Global Forest Watch (GFW) menunjukkan, empat tahun sejak perusahaan asing itu diberikan izin HTE pada 2013, luas tutupan hutan yang hilang mencapai 1.557 hektare.

Hilangnya tutupan hutan akibat perambahan membuat negara rugi. Sesuai SK Menteri LHK No 661 Tahun 2023 yang mengatur besaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), kerugian negara akibat pembukaan lahan ilegal di konsesi PT HAN ditaksir mencapai Rp 30 miliar lebih. Sampai sekarang, pembabatan hutan di konsesi HAN terus berlanjut.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Ahmad Bestari menganggap perusahaan asal Korea Selatan itu tidak berkomitmen menjaga wilayah konsesinya, sehingga banyak terjadi perambahan di kawasan hutan yang merugikan negara.

"Kalau bicara devisa, hasusnya negara dapat duit, tapi gak jadi. Dia—HAN—nggak bayar karena tidak ada kegiatan. Negara justru rugi akibat sumber daya-nya hilang, karena banyak perambahan. Mestinya izin HAN diberikan ke investor lain, sehingga ada pendapatan untuk negara."

Bestari mengaku telah berulang kali melaporkan perusahaan penanaman modal asing (PMA) tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup

agar dievaluasi. Menurutnya, keberadaan PT HAN tidak menguntungkan pemerintah meski perusahaan milik Woorim Energy itu ikut mendukung program energi hijau.

"Karena hasil produksi wood pellet-nya dijual ke Korea Selatan, bukan untuk kebutuhan listrik di Indonesia," katanya.

Bambang Hero Saharjo, ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan pembalakan liar, tambang ilegal hingga perkebunan masyarakat di konsesi perusahaan tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi tetapi juga ekologi.

"Sehingga kalau kita hitung kerugian negara, nilainya akan jauh lebih besar dari PSDH-DR yang hilang. Belum lagi kalau kita hitung biaya pemulihannya," katanya.

Peraih penghargaan Sense About Science John Maddox 2019 itu juga menegaskan, perusahaan bertanggung jawab memulihkan wilayah izin konsesinya yang rusak, meski bukan disebabkan aktivitas perusahaan.

"Sebetulnya ini bisa dilaporkan ke Gakkum karena terjadi kerusakan lingkungan. Bahkan kalau terbukti menyebabkan dampak buruk yang merugikan, perusahaan bisa digugat ke pengadilan," katanya.



Perusahaan Tinggalkan Hutang

Zuhadi, mantan Kepala Desa Nalo Gedang, masih ingat betul janji manis Richo Widoyo Manajer Produksi PT HAN 2019 lalu. Waktu itu, Richo menjanjikan warga pemilik pancong alas dan pemerintah desa bakal dapat bagian dari setiap kubik kayu yang ditebang dari kawasan hutan.

"Janjinya dulu per kubik masyarakat yang punya lahan dapat Rp25.000, desa Rp25.000."

Berpikir bakal dapat banyak uang, Zuhadi kemudian mengajukan pinjaman Rp250 juta ke perusahaan. Dia pikir, uang bagian desa bisa melunasi hutang. Tetapi sampai sekarang Pemerintah Desa Nalo Gedang hanya menerima bagian Rp100 juta dari hasil tebangan kayu hutan.

"Dulu itu dikasih Rp100 juta untuk DP—down payment. Sisanya akan dikasih 3-4 bulan lagi, tapi sampai sekarang nggak ada dibayar," kata Zuhadi jengkel.



Lelaki 52 tahun itu mengaku sudah bolak-balik menagih perusahaan, tetapi manajemen perusahaan selalu berkelit. Rencana Zuhadi, uang kurang bayar itu akan digunakan untuk melunasi pembelian tanah desa.

"Uang Rp 100 juta itu saya belikan tanah 1 hektare untuk desa, harganya Rp130 juta. Sampai sekarang belum lunas, masih kurang Rp30 juta. Duit dari perusahaan itu rencananya buat ngelunasi utang, tapi nggak dibayar."

Gara-gara utang Rp 30 juta ini, pemerintah desa Nalo Gedang digugat keluarga M. Syafei. Pemerintah desa diminta membayar Rp80 juta karena melanggar perjanjian pelunasan tanah. Namun akhirnya kedua pihak sepakat di angka Rp 35 juta.

Kata Zuhadi, perusahaan tidak hanya nunggak bayar dengan Pemerintah Desa Nalo Gedang tetapi juga kepada Sarmono, pengusaha kayu asal Bangko, Merangin. "Kabarnya utang sampai Rp 1 miliar, makanya swamill perusahaan di Mentawak itu dibongkar Sarmono, karena utangnya nggak dibayar."

"Dulu itu dikasih Rp100 juta untuk DP—down payment. Sisanya akan dikasih 3-4 bulan lagi, tapi sampai sekarang nggak ada dibayar," kata Zuhadi jengkel.

Kepala Desa Baru Nalo itu cerita, awalnya pihak desa mengajukan pinjaman Rp 20 juta ke perusahaan setelah dijanjikan ada bagi hasil kayu. Selama empat bulan pembayaran lancar. Setelah itu macet. "Macet sampai sekarang nggak operasi lagi. Bagian masyarakat juga masih banyak yang belum lunas. Gaji pegawai nunggak, ada yang dua bulan belum dibayar."

Perusahaan juga menjanjikan bagian 10% dari hasil panen tanaman sengon pada masyarakat yang terikat pola kemitraan. Tetapi banyak yang kecewa, karena sampai sekarang, sengon yang ditanam perusahaan belum pernah dipanen dan perusahaan telah berhenti beroperasi. Muhlisin mengaku uang bagi hasil kayu Rp 100 juta untuk Desa Nalo Gedang sudah dibayar perusahaan. Dia justru ragu perusahaan berhutang dengan desa atau sebaliknya.

"Karena di wilayah Desa Nalo Gedang kayunya itu tidak banyak, dikit kayunya. Kayu yang banyak itu di wilayah Nalo Baru,"

Warga Mulai Kebanjiran



Pembabatan hutan di wilayah Kecamatan Nalo Tantan, Tabir dan Tabir Barat yang menjadi konsesi PT HAN mulai menimbulkan bencana. Kepala Desa Nalo Gedang, Said mengaku wilayah desanya kerap kebanjiran setiap kali turun hujan.

"Kapan hujan pasti banjir, jalan pinggir sungai itu tertutup air. Yang parah itu kebun warga," katanya, 7 Agustus 2024.

Menurut Said, banjir yang terjadi karena Sungai Lontar di dalam konsesi PT HAN tidak sanggup menampung debit air hujan, setelah hutan di atasnya dibabat perusahaan. Desa di sekitar Sungai Tantan, muara dari Sungai Lontar juga kerap kebanjiran.



"Yang parah itu Desa Sungai Ulak karena posisinya di bawah."

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jambi Abdullah mengungkapkan, konsesi PT HAN merupakan wilayah tangkapan air. Eksploitasi kawasan hutan alam akan menyebabkan bencana ekologis seperti banjir.

"Kalau wilayah hutan di hulu dihabiskan akan berpotensi menimbulkan bencana. Banjir datang lebih cepat karena daerah tangkapan air sudah hancur," jelasnya.

November 2020 lalu, BPBD Merangin melaporkan, ratusan rumah di Kecamatan Tabir, Tabir Ilir, Tabir Timur dan Margo Tabir, terendam banjir.

Menurut Abdullah, banjir yang terjadi di Merangin saat itu bukan hanya disebabkan curah hujan yang tinggi, tetapi juga masifnya pembabatan hutan.

Dia mendesak agar pemerintah mencabut izin PT HAN. Sementara konsesinya diserahkan ke masyarakat untuk dikelola lewat perhutanan sosial.

"Jokowi kan punya target 12 juta hektare untuk perhutanan sosial, ini sebenarnya kesempatan yang pas. Skemanya bisa hutan desa atau lainnya."



Co-Firing di PLTU Teluk Balikpapan, Transisi Energi atau Bencana Ekologi?

**Hernanda Salsabila Putri – nomorsatukaltim.disway.id
Co-Firing**

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Transisi energi melalui kebijakan biomassa Co-Firing, nampaknya masih harus melalui jalan panjang dan berliku. Program Co-firing di PLTU Teluk Balikpapan merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon, sekaligus memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan.

Meskipun sudah dimulai sejak akhir 2022, implementasi program Co-Firing di PLTU terbesar di Pulau Kalimantan tersebut menghadapi berbagai kendala teknis dan tantangan di lapangan.

Kebijakan Co-Firing dengan biomassa diperkenalkan melalui Peraturan Menteri No 12 Tahun 2023, yang mewajibkan PLTU di seluruh Indonesia untuk mulai menggantikan sebagian batu bara dengan biomassa.

Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional, yang ditargetkan mencapai 23 persen pada 2025.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap batu bara, yang merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di sektor energi.

PLTU Teluk Balikpapan, dengan kapasitas sebesar 2×110 megawatt, telah menerapkan kebijakan ini sejak Desember 2022 dengan mencampurkan biomassa hingga 3 persen dari total bahan bakar yang digunakan.

Biomassa yang dipilih berupa limbah kayu jenis Woodchip, yang diperoleh dari wilayah sekitar Balikpapan. Limbah kayu ini kemudian dicampurkan dengan batu bara di area stok bahan bakar sebelum proses pembakaran berlangsung.

Penggunaan Woodchip sebagai biomassa bukan hanya membantu mengurangi emisi karbon, tetapi juga membuka peluang baru bagi pengelolaan limbah kayu lokal, yang sebelumnya dianggap kurang bernilai ekonomi.

Di tingkat nasional, sebanyak 52 PLTU lainnya juga diwajibkan melakukan program Co-Firing dengan menggunakan 5-10 persen biomassa sebagai bahan bakar. Hal ini diharapkan dapat mengurangi emisi polusi dari pembakaran batu bara, yang masih menjadi sumber utama pembangkit listrik di Indonesia.

Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris, di mana negara ini berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempercepat transisi menuju sumber energi terbarukan.



Menurut data global, pada tahun 2022, PLTU berbasis batu bara di seluruh dunia menghasilkan emisi sebesar 8,99 miliar ton CO₂, dengan kontribusi Indonesia mencapai sekitar 214 juta ton. Tingginya angka ini mencerminkan pentingnya langkah nyata dalam menurunkan emisi, khususnya dari sektor energi yang masih bergantung pada batu bara.

Dengan meningkatnya penggunaan biomassa sebagai alternatif, Indonesia berharap dapat mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangkit berbasis batu bara. Namun, pelaksanaan Co-Firing di PLTU Teluk Balikpapan dan pembangkit lainnya masih menemui berbagai kendala. Termasuk ketersediaan pasokan biomassa yang stabil dan keterbatasan infrastruktur yang mendukung penggunaan bahan bakar campuran ini.

Pasokan Woodchip, misalnya, memerlukan rantai pasokan yang stabil agar volume biomassa dapat memenuhi kebutuhan harian pembangkit tanpa terganggu. Selain itu, teknologi pembakaran di beberapa PLTU juga perlu penyesuaian agar dapat mengolah campuran biomassa dan batu bara secara optimal.

Kendati demikian, PLTU Teluk Balikpapan tetap optimistis dapat meningkatkan persentase biomassa dalam bauran energinya dalam beberapa tahun ke depan. Dukungan dari pemerintah dan kolaborasi dengan sektor swasta diharapkan dapat mempercepat penyediaan infrastruktur dan pasokan biomassa, sehingga transisi energi menuju energi terbarukan ini bisa berjalan lebih lancar. Di sisi lain, edukasi dan sosialisasi terkait kebijakan ini juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya transisi ke energi hijau dan upaya mengurangi dampak negatif dari penggunaan batu bara.

Dengan kombinasi kebijakan pemerintah, komitmen industri, dan dukungan masyarakat, PLTU Teluk Balikpapan meyakini bahwa langkah-langkah ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kualitas lingkungan di masa depan. Melalui upaya yang berkelanjutan, diharapkan PLTU Teluk Balikpapan dapat menjadi contoh nyata dalam mengimplementasikan transisi energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan di Indonesia. Kebijakan Co-Firing: Langkah Awal Pengurangan Emisi Karbon dan Tantangan Pasokan Biomassa.

Team Leader bidang Niaga dan Bahan Bakar di PLTU, Alif, menyatakan bahwa penggunaan biomassa dapat mendukung pencapaian target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025. Namun, hingga saat ini, penggunaan biomassa baru mencapai 3 persen dari total konsumsi bahan bakar, dengan batu bara masih mendominasi sebagai sumber energi utama.

“Kami sedang berusaha keras untuk meningkatkan proporsi biomassa, tetapi tantangan yang kami hadapi cukup besar,” ujar Alif.





Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi Co-Firing adalah ketersediaan pasokan biomassa. "Kami pernah mencoba pasokan dari Sotek, Penajam Paser Utara (PPU), tetapi pengiriman melalui laut dengan tongkang tidak efisien dan mengakibatkan kerugian," jelas Alif.

Pengiriman biomassa sering terhambat oleh cuaca dan kondisi laut yang tidak menentu, yang mengganggu kelancaran suplai. Kebutuhan konsumsi biomassa maksimal PLTU Teluk Balikpapan mencapai 100 ton per hari, namun saat ini rata-rata pasokan yang tersedia hanya sekitar 30-50 ton per hari.

PLTU Teluk Balikpapan melakukan kerja sama dengan kelompok tani dan berbagai komunitas pengelola limbah kayu di sekitar Balikpapan. "Kami mencoba menjalin kemitraan dengan masyarakat lokal untuk meningkatkan pasokan biomassa," beber Alif.

Namun, kendala logistik dan harga beli biomassa yang rendah menjadi penghalang dalam mencapai target. Di samping masalah pasokan, aspek ekonomi juga menjadi tantangan. Alif menjelaskan bahwa biaya biomassa dihitung setara 1,2 kali harga batu bara, tetapi biaya transportasi tidak diakomodasi dalam aturan.

Ini membuat pemasok enggan berinvestasi lebih jauh dalam penyediaan biomassa, karena mereka tidak mendapatkan keuntungan yang memadai. PLTU Teluk Balikpapan kini berupaya memperluas sumber biomassa dengan menjajaki kerja sama baru.

Alif menyampaikan bahwa pihaknya sedang mencari lahan untuk kerjasama yang lebih luas, termasuk dengan institusi seperti Perhutani. Namun, proses ini masih dalam tahap awal dan membutuhkan waktu untuk mencapai skala yang diharapkan. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat lebih proaktif dalam mendukung upaya transisi energi.

Sudirman dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan menekankan bahwa pihaknya siap

mendukung kolaborasi antara PLN dan pemangku kepentingan lainnya. "Ini penting untuk memastikan keberlanjutan program ini," tegasnya.

Meskipun PLTU Teluk Balikpapan telah memulai langkah awal dalam pemanfaatan biomassa, realisasi transisi energi ini masih jauh dari target. Alif menekankan bahwa Koordinasi yang lebih baik antara PLN, pemerintah daerah, dan pemasok lokal, serta dukungan kebijakan yang menyeluruh, sangat dibutuhkan agar program Co-Firing ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Saat ini dengan seluruh tantangan yang masih banyak menghadang, semua pihak harus dapat bekerja sama untuk menciptakan solusi yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan, demi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat dan alam di sekitar PLTU Teluk Balikpapan.

Kerja Sama DLH dan PLN Temui Titik Buntu

Pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan bekerja sama dengan PLN untuk mengolah sampah organik, terutama potongan kayu dari hasil pemangkasan dan dahan pohon, menjadi bahan bakar jumputan padat. Bahan bakar ini kemudian digunakan sebagai campuran batubara untuk mendukung program energi baru terbarukan di PLTU Teluk Balikpapan.

Tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk mengurangi volume sampah kota secara signifikan, sekaligus mendukung transisi energi bersih yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Namun, pelaksanaan kerja sama ini menemui berbagai kendala di lapangan, terutama terkait aspek finansial.

Menurut Sudirman dari DLH Kota Balikpapan, meskipun pengolahan sampah organik menjadi bahan bakar alternatif ini memberikan nilai tambah, harga beli yang ditetapkan PLN untuk bahan bakar jumputan padat sangat rendah, yaitu hanya sekitar 500 rupiah per kilogram.

"Harga yang mereka beli memang tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus kami keluarkan. Biaya tenaga kerja, listrik untuk mesin, dan bahan bakar itu semua membutuhkan anggaran yang cukup besar," jelasnya.

Sudirman menambahkan bahwa dengan harga beli saat ini, pemerintah kota harus menanggung selisih yang cukup besar, yaitu sekitar 10 juta rupiah per bulan, atau mencapai 120 juta rupiah per tahun.

"Kalau kita lihat, biayanya lebih tinggi daripada pendapatan dari hasil penjualan bahan bakar ke PLN. Jadi bisa dibilang kami nombok," ujarnya.

Kondisi ini menjadikan pemerintah kota menghadapi beban finansial tambahan dalam menjalankan program pengolahan sampah ini.

Melihat situasi tersebut, pada awal tahun 2024, pemerintah melibatkan pihak ketiga dalam proses pengolahan sampah. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau pihak ketiga ini membantu pengelolaan sampah organik dengan menggunakan alat dan tenaga mereka sendiri, sehingga mengurangi beban biaya operasional yang sebelumnya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

Menurut Sudirman, pihak ketiga ini mampu mengolah sekitar satu ton sampah organik per hari. "Dengan adanya pihak ketiga, beban operasional pemerintah bisa berkurang cukup signifikan," jelas Sudirman.

Keberadaan pihak ketiga ini memberikan angin segar bagi pemerintah kota karena pengolahan sampah organik dapat terus berjalan tanpa membebani anggaran daerah. Namun, kolaborasi ini tidak sepenuhnya tanpa kendala. Dalam beberapa kali diskusi dan pertemuan dengan PLN, pihak pemerintah kota menyampaikan bahwa aspek harga masih menjadi tantangan besar.

Sudirman menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan agar harga beli bahan bakar juputan padat dapat ditinjau ulang oleh PLN. "Kami harap PLN bisa mempertimbangkan kenaikan harga beli bahan bakar ini, minimal mendekati angka yang lebih layak untuk menutupi biaya operasional," kata Sudirman.

Meski demikian, ia mengakui bahwa keputusan akhir terkait harga berada di tangan manajemen PLN pusat, sehingga pemerintah daerah hanya bisa menunggu kepastian dari PLN. Selain persoalan harga, pemerintah juga berharap PLN dan pihak terkait lainnya memperhatikan aspek legalitas serta tata kelola lingkungan dalam program ini.

Pemerintah menekankan pentingnya adanya koordinasi yang jelas dan tertulis terkait izin pemanfaatan lahan tidur sebagai sumber biomassa.

"Sampai saat ini kami masih menunggu kejelasan terkait prosedur administratif yang harus dipenuhi, termasuk persetujuan penggunaan lahan masyarakat untuk program ini," terang Sudirman.

Pemerintah daerah berharap kerja sama ini dapat berjalan dengan dasar yang jelas dan melibatkan masyarakat secara legal. Terlepas dari berbagai tantangan, pemerintah kota tetap optimis terhadap potensi jangka panjang dari program ini. Program pengolahan sampah menjadi bahan bakar terbarukan diyakini mampu membantu mengatasi masalah penumpukan sampah kota, khususnya dari hasil pemangkasan pohon dan limbah organik lainnya.



Setiap hari, DLH mencatat sekitar 3 hingga 5 ton sampah organik yang berasal dari pemangkasan pohon di ruang terbuka hijau (RTH) dan taman kota. Sampah ini sebelumnya hanya ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA), tetapi kini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar juputan padat.

"Dengan program ini, kita tidak hanya mengurangi jumlah sampah di TPA, tetapi juga bisa memanfaatkan sampah tersebut untuk hal yang lebih bermanfaat," ujar Sudirman.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa program ini juga turut berkontribusi dalam transisi energi bersih yang didorong oleh pemerintah pusat.

KERJA SAMA DLH DAN UPTD TPAS MANGGAR

Pemerintah Kota Balikpapan, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan UPTD TPAS Manggar, berkolaborasi dengan PT PLN untuk mengelola sampah organik sebagai bahan bakar biomassa yang ramah lingkungan.

Dijelaskan pihak TPA Manggar, Harianto, kerja sama tersebut mencakup operasionalisasi mesin pengolah biomassa, bantuan renovasi fasilitas, dan integrasi dengan program penanganan sampah dari ruang terbuka hijau (RTH) di kota. Dengan ini, sampah organik seperti ranting, daun, dan potongan kayu dari hasil pemangkasan rutin di Balikpapan kini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi emisi karbon sekaligus mengurangi penumpukan sampah di TPAS. PLN menghibahkan tiga mesin utama untuk pengolahan sampah organik, yang meliputi mesin pencacah kayu (woodchipper), pencacah daun, dan pencetak pellet. Mesin-mesin ini memainkan peran kunci dalam proses pengolahan biomassa di TPAS Manggar.



Sebelum program ini, fasilitas TPAS sebagian besar digunakan untuk pengolahan kompos, dan bangunan yang digunakan sempat mengalami kerusakan. PLN turut memberikan bantuan perbaikan bangunan ini agar dapat digunakan kembali untuk pengolahan biomassa.

Dengan adanya mesin dan renovasi bangunan tersebut, TPAS Manggar kini mampu menghasilkan woodchip dari bahan-bahan organik yang bisa langsung dimanfaatkan sebagai bahan bakar biomassa bagi PLTU Teluk Balikpapan.

Dalam program ini, TPAS Manggar mengolah sekitar 5-10 ton biomassa per bulan, dengan sebagian besar bahan baku berasal dari limbah pohon dan kayu yang dikumpulkan dari RTH, pemangkasan pohon kota, dan penataan taman.

DLH memiliki unit kerja khusus yang menangani penataan RTH, termasuk pemangkasan dan penebangan pohon, yang rutin menghasilkan limbah organik dari berbagai titik di Balikpapan. "Setiap hari, unit kerja ini mengirimkan sekitar 1-3 ton sampah organik ke TPAS Manggar, yang kemudian ditimbang sebelum diproses lebih lanjut," jelas Harianto.

Setelah ditebang, kayu masih dalam kondisi basah dan beratnya bisa lebih tinggi, tetapi seiring proses pencacahan dan pengeringan, kadar airnya berkurang dan beratnya juga menyusut. Limbah yang telah dikeringkan dan dicacah ini, yang kini lebih ringan, menjadi produk woodchip atau pellet yang bisa digunakan sebagai campuran bahan bakar di PLTU.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan biomassa sebagai bahan bakar tambahan, PLN telah menetapkan target bahwa setidaknya 3 persen dari total bahan bakar PLTU berasal dari biomassa, untuk mengurangi emisi karbon dan mengurangi ketergantungan pada batu bara. Saat ini, PLTU Teluk Balikpapan membutuhkan sekitar 3.000 ton batu bara per hari, yang berarti pasokan biomassa sekitar 90 ton per hari diperlukan untuk mencapai target co-firing 3 persen tersebut.

Namun, hingga saat ini, TPAS Manggar belum mampu memenuhi kapasitas tersebut karena sumber biomassa terbatas pada limbah pohon dari pemangkasan dan penebangan rutin kota, yang produksinya fluktuatif dan terbatas pada kegiatan harian pemangkasan yang bukan dilakukan khusus untuk memenuhi target biomassa. Meskipun demikian, upaya ini sudah cukup membantu mengurangi akumulasi sampah organik yang sebelumnya hanya akan ditimbun di TPAS.

DLH dan TPAS Manggar tetap berupaya optimal dengan kapasitas yang ada dan memastikan bahwa sampah organik dari ruang publik kota tidak terbuang sia-sia, melainkan diolah menjadi biomassa.



PLN, di sisi lain, mengizinkan pasokan tambahan dari sumber biomassa lain jika diperlukan. Seiring permintaan biomassa yang terus meningkat, ada upaya untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat dan sektor swasta, dalam proses pengolahan dan penyediaan biomassa.

Salah satu pihak ketiga, yakni Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), kini terlibat dalam pengelolaan biomassa sebagai bagian dari program corporate social responsibility (CSR). "KSM membantu menyediakan bahan baku dari luar sumber sampah DLH, yang mencakup kayu limbah dari lokasi lain atau hasil penebangan pohon, yang tidak diperjualbelikan sebagai kayu, melainkan diolah dari sampah atau limbah yang tidak memiliki nilai jual," paparnya.

Kerja sama ini menguntungkan semua pihak, termasuk KSM yang mendapat tempat untuk mengumpulkan bahan baku. Di TPAS Manggar, pihak KSM menambah mesin pencacah mereka sendiri dan tenaga kerja, sehingga proses pengolahan bisa berlangsung lebih cepat dan lebih efisien.

Setelah biomassa siap, PLN membeli woodchip dan bahan bakar dari hasil olahan dengan harga yang ditentukan. Harga beli ini tidak tetap, tetapi mengikuti formula dari PLN yang mempertimbangkan harga pasar batu bara dalam tiga bulan terakhir serta nilai kalori yang dimiliki woodchip tersebut.

Proses sebelum pengiriman biomassa melibatkan pengujian laboratorium oleh PLN, yang mengambil sampel untuk memastikan bahwa produk woodchip dari TPAS Manggar memenuhi standar kalori, biasanya antara 3000-3500 kalori. Jika memenuhi standar, maka biomassa tersebut dapat dikirim dan dihargai sesuai hitungan formula, tetapi jika kadar kalorinya di bawah standar, biomassa tidak akan diambil oleh PLN.

Sejauh ini, woodchip dari TPAS Manggar selalu lolos uji laboratorium dan memenuhi syarat, sehingga TPAS Manggar dapat mengirim pasokan secara teratur ke PLTU Teluk Balikpapan.

Kolaborasi dengan Pemasok Lokal: Langkah Tersendat

Agus Wahono, Direktur Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Balikpapan, menjelaskan bahwa target pasokan biomassa yang diharapkan PLTU masih belum tercapai. Saat ini, PLTU menetapkan target 5000 ton per bulan, sementara KSM baru mampu memasok sekitar 10 ton per hari atau kurang dari 1000 ton per bulan.



"Ini disebabkan beberapa tantangan, termasuk kapasitas mesin yang belum optimal dalam menangani jenis kayu keras dan besar," ucap Agus.

Dilanjutkan Agus, pemanfaatan kayu limbah di masyarakat juga belum sepenuhnya tersosialisasikan dengan baik. Masih banyak warga yang belum mengetahui bahwa semua jenis kayu tebangan dapat diolah sebagai biomassa.

Selain itu, rendahnya harga beli dari PLTU menjadi faktor lain yang menyebabkan keterbatasan suplai dari masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa penjualan kayu ke PLTU memerlukan standar tertentu yang hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan resmi, sehingga masyarakat tidak bisa langsung menjual kayu ke PLTU.

KSM memiliki lokasi di Teritip dan Kilometer 26 sebagai pusat kegiatan pengolahan biomassa. Saat ini, mereka bekerja sama dengan PLN, PLTU, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menjalankan program pemberdayaan.

Salah satu program yang sedang dikembangkan adalah pemanfaatan lahan tidur untuk menanam tanaman energi seperti Indigofera dan Lamtoro, yang dapat diolah menjadi biomassa. Program ini masih dalam tahap identifikasi lahan-lahan tidur di Balikpapan dan sekitarnya, termasuk wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) yang dekat dengan Samboja.

Agus juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kayu limbah tanpa harus membakarnya. "Kami menawarkan opsi agar masyarakat membawa kayu limbah tersebut ke TPA untuk diolah, dan KSM akan membelinya dengan harga yang layak," tutupnya.

Permasalahan Ekonomi dan Lingkungan

Dampak lingkungan dari aktivitas PLTU yang masih dominan menggunakan batu bara juga menjadi perhatian.



Di tengah desiran ombak dan riuhnya kehidupan pesisir, nelayan-nelayan di Teluk Balikpapan kini menghadapi tantangan yang semakin berat. Kehadiran perusahaan-perusahaan besar seperti PLTU Co-Firing Teluk Balikpapan, Petrosea, dan BCT tidak hanya mengubah wajah lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup mereka.

Bilal, salah seorang nelayan, merasakan dampak langsung dari aktivitas perusahaan-perusahaan ini. "Kami hanya diberi jarak 100 meter dari jeti perusahaan. Jika itu yang ditetapkan, kami mau ke mana?" keluh Bilal dengan nada pasrah.

Jarak tersebut seakan mengurung mereka dalam area yang semakin menyempit, membuat aktivitas menangkap ikan menjadi semakin sulit. Ia merasa bahwa semua perusahaan yang beroperasi di sekitar mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil tangkapan nelayan.

Meskipun PLTU Co-Firing menggunakan campuran biomassa dari limbah kayu, sebagian besar bahan baku yang diandalkan tetap batu bara. Ini menjadi sumber keprihatinan bagi Bilal dan rekan-rekannya. Setiap hari, mereka harus menghirup debu batu bara yang melayang dari cerobong asap PLTU. "Debu itu dari boiler yang dibakar, terbang ke udara, dan dibawa angin utara ke sini. Kami hanya bisa pasrah dengan nasib," katanya.

Bau batu bara yang menyengat seolah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat pesisir merasa terpaksa untuk tetap beraktivitas, meskipun khawatir dengan dampak polusi yang mengintai. "Kalau kami takut dengan baunya, kami tidak bisa beraktivitas di laut. Mau tidak mau, kami harus menerima keadaan ini," ungkapnya.

Limbah batu bara yang dihasilkan oleh PLTU juga menjadi ancaman serius bagi hasil tangkapan nelayan. Nelayan-nelayan di Teluk Balikpapan, yang berada di ring satu, jelas menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut. Bilal mengakui bahwa ia belum mengetahui dengan pasti jarak antara tempat tinggalnya dan perusahaan-perusahaan tersebut, tetapi satu hal yang jelas: nelayan adalah pihak yang merasakan dampak langsung. "Ini bukan hanya masalah dari PLTU, tetapi dari semua perusahaan. Jika limbah minyak terlihat jelas, limbah batubara dari PLTU tidak tampak alirannya ke mana," tegasnya.

Dukungan Pemerintah Daerah yang Minim

Implementasi kebijakan Co-Firing di PLTU Teluk Balikpapan juga dihadapkan pada minimnya dukungan dari pemerintah daerah.

Anggi dari Forest Watch Indonesia (FWI) menegaskan, program ini berjalan secara top-down dari PLN tanpa keterlibatan pemerintah setempat dalam pengawasan dan mitigasi dampak lingkungan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait kesiapan mitigasi risiko, terutama dalam pengawasan lingkungan dan keamanan operasional.



Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan energi ini terlihat kurang harmonis dan tidak terintegrasi, berdampak pada ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kebutuhan atau kesiapan di daerah.

Misalnya, pemerintah daerah belum memiliki regulasi dan perangkat yang cukup untuk menangani aspek pemantauan lingkungan, seperti Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

"Sejalan dengan target PLN untuk mencapai bauran energi hingga 5-10% dari biomassa di 52 PLTU pada tahun 2025, co-firing tampaknya dicanangkan secara ambisius," ujarnya.

Kendati demikian, Anggi menilai bahwa program ini terkesan dipaksakan tanpa memperhitungkan kesiapan sumber daya manusia, kemampuan pemerintah daerah, maupun kesiapan perangkat kebijakan di tingkat lokal. Seharusnya, penyusunan kebijakan energi ini mengutamakan prinsip partisipatif dengan proses-proses Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), di mana publik diajak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan melalui penelitian dan konsultasi yang lebih luas.

Implementasi co-firing sejauh ini juga masih menghadapi masalah dalam pemenuhan bahan baku biomassa. Karena kurangnya sumber bahan baku yang stabil, PLN mulai mempertimbangkan berbagai alternatif, termasuk penggunaan lahan tidur.

Namun, pemanfaatan lahan ini harus sesuai dengan tata ruang dan prinsip-prinsip konservasi lingkungan, seperti perlindungan sumber air dan tanah.

Potensi dampak negatif dari program co-firing ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di sektor lingkungan, misalnya risiko alih fungsi ruang terbuka hijau (RTH) untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biomassa. Anggi juga menyebut adanya kekhawatiran akan potensi alih fungsi lahan mangrove di kawasan Teluk Balikpapan, yang memiliki peran penting dalam ekosistem pesisir.

Program ini, jika dilaksanakan tanpa evaluasi yang matang dan monitoring yang intensif, dapat mengancam keberlanjutan ekosistem lokal di Balikpapan. Secara keseluruhan, kurangnya koordinasi antara PLN dan pemerintah daerah, ditambah dengan pelaksanaan yang belum optimal, membuat program co-firing ini menghadapi banyak tantangan di lapangan.

Anggi menyarankan agar kebijakan energi yang melibatkan pemanfaatan biomassa dilakukan melalui pendekatan yang lebih berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak secara aktif, serta mempertimbangkan kapasitas daerah agar hasilnya tidak hanya sekadar memenuhi target bauran energi.

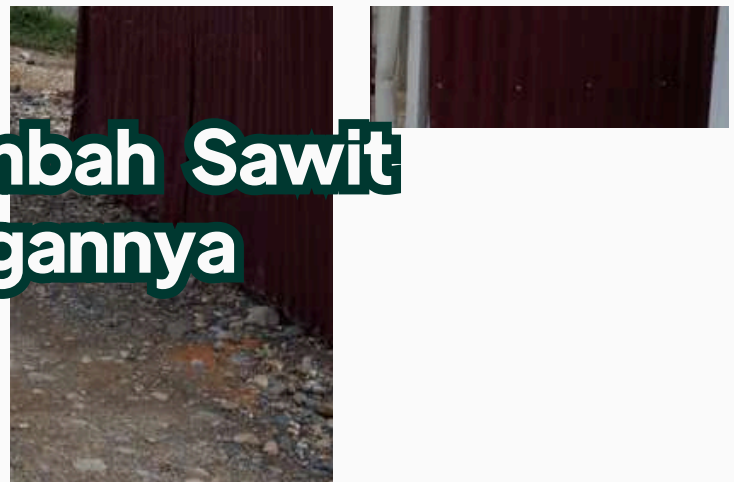
"Tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam di Kalimantan Timur," tutupnya.



4

Pembangkit Listrik





PLTBm Berbasis Limbah Sawit Potensi dan Tantangannya di Aceh Tamiang

Jafarudin – Aceh.tribunnews.com
Pembangkit Listrik

Pos Satpam di Pintu Gerbang lokasi sedang dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) yang Berada di Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang Serambinews.com berkunjung pagi itu.

Lebih kurang sekitar 100 meter, para pekerja sedang membangun bagian dari pondasi dan pengecoran tiang bangunan yang digadagadag akan menjadi bagian dari PLTBm. Peletakan batu pertamanya disebut telah dilakukan pada 25 Juli 2023.

PLTBm ini dibangun di atas lahan PT Primanusa Energi Lestari, yang akan memanfaatkan tandan kosong (tankos) kelapa sawit dari masyarakat sebagai bahan bakar penggerak turbin untuk menghasilkan listrik yang akan dipasok ke PT PLN (Persero) Aceh.

Nilai investasi proyek ini Rp 300 miliar bekerjasama dengan pemerintah Jepang melalui skema tender pengurangan emisi Japan Credit Mechanism (JCM). Adapun untuk proyek energi terbarukannya dikerjakan oleh China Energy Engineering Construction. Pihak perusahaan menargetkan perusahaan tersebut dapat selesai pembangunan dalam dua tahun.

PLTBm ini ditargetkan bisa menghasilkan 12 Megawatt listrik. Meski sebenarnya kondisi listrik

Aceh saat ini telah surplus sebesar 255 MW dengan daya mampu sebesar 822 MW serta beban puncaknya 567 MW. Saat ini, PLN telah melayani lebih dari 1,6 juta pelanggan di Aceh dengan 86 persennya adalah pelanggan rumah tangga.

Keberlanjutan Bahan Baku Limbah Sawit

Kehadiran PLTBm di Aceh Tamiang ini diharapkan menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan, karena menggunakan limbah kelapa sawit sebagai bahan bakar, yang banyak dihasilkan dari perkebunan sawit di wilayah tersebut.

Meskipun inisiatif ini dianggap ramah lingkungan, ada kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dari emisi yang dihasilkan serta efek ekonomi pada masyarakat lokal.

Dalam jurnal bertajuk "Mewujudkan Ekonomi Sirkular Untuk Kesejahteraan Masyarakat Aceh Tamiang Melalui Pelatihan Pemanfaatan Limbah Sawit," yang ditulis lima akademisi IAIN Langsa menyebutkan, untuk 1 ton kelapa sawit akan mampu menghasilkan limbah berupa tandan kosong kelapa sawit sebanyak 21 - 23% atau 230 kg.

Pada Tahun 2022, berdasarkan BPS Kabupaten Aceh Tamiang, produksi TBS Kelapa Sawit per tahunnya mencapai 49.665 ton dari luas areal

23.382 hektar milik warga. Artinya, dalam setahun tandan kosong Kelapa Sawit yang dihasilkan warga di Aceh Tamiang adalah sebanyak 11.422.000 kg atau per harinya 31.295 kg. Sebagian dari janjangan kosong ini pun sudah dimanfaatkan warga untuk pembuatan pupuk kompos, dan para pelaku jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Lalu bagaimana jika bahan baku itu kurang untuk pasokan PLTBm?

Hal lain yang jadi pertanyaan adalah persoalan emisi yang akan dihasilkannya. Ketua Program Studi Magister Energi Terbarukan Universitas Malikussaleh Dr Adi Setiawan MT kepada Serambinews.com menyebutkan sepengetahuannya belum ada Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa di Indonesia (PLTBm) yang tidak menghasilkan emisi. Karena saat pembakaran limbah tandan atau janjangan kosong (tankos) untuk mengalirkan panas ke dalam boiler atau ketel uap guna menghasilkan energi kalor yang kemudian dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin guna menghasilkan arus listrik.

Sebab pada tankos kelapa sawit tersebut mengandung potasium. Potasium tersebut bisa menyebabkan kerak yang menempel pada pipa, sehingga efisiensi boiler akan berkurang. Walhasil, bahan bakar menjadi boros dan akan menghasilkan polusi. Jika pembakarannya tidak sempurna, maka asap dari pembakaran tankos tersebut akan hitam.

Asap hitam inilah yang akan menimbulkan emisi dan berpotensi menjadi sumber polutan. Padahal karena boiler digunakan terus menerus, sehingga kerak tidak sempat dibersihkan.

"Sepengetahuan saya belum ada PLTBm yang menggunakan alat pembakar yang tidak menghasilkan emisi, hanya saja dalam jumlah kecil," sebut Adi, yang sebelumnya pernah bekerja sebagai karyawan PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk (AMIN) atau Atmino, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perancangan, pembuatan, dan pemasangan boiler yang menghasilkan uap, panas, dan tenaga listrik.

Saat itu pihaknya pernah mengembangkan alat pembakaran berbasis tankos kelapa sawit yang tidak menghasilkan emisi. Namun karena biayanya mahal, sehingga ketika ditawarkan ke perusahaan PLTBm tidak bersedia menggunakannya. "Sehingga kadang sama saja dengan menggunakan batu bara, yang menghasilkan emisi juga," katanya.

Untuk mengoperasikan PLTBm berbahan baku tankos, maka jarak maksimal adalah 20 kilometer dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) agar biaya yang dikeluarkan lebih efisien.

Biasanya PKS mampu mengolah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa Sawit sebanyak 20 ton per jam dan beroperasi dalam setahun selama 5.800-6.000 jam. Selain tankos, maka dalam kondisi terdesak, PLTBm bisa memanfaatkan cangkang kelapa sawit, untuk menjaga suplai. "Tempat saya bekerja dulu mampu menghasilkan listrik 1.5 Megawatt, yang bahan bakunya berasal dari satu pabrik dengan kapasitas 15 ton per jam," katanya.

Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Aceh, Lukman Hakim kepada Serambinews.com menyebutkan bahwa jumlah daya dari PLTBm Tanjung Seumantoh yang akan ditampung oleh PLN adalah sebesar 9.8 MW dengan harga beli sebesar Rp 975/kWh.

Dia pun mengkonfirmasi bahwa sudah ada kontrak dengan PT Prima Energi Lestari selaku pengelola PLTBm Aceh Tamiang. "Sudah ada kontrak," ujar Lukman. Rencananya arus listrik ini akan diinterkoneksi ke gardu induk yang ada di Tualang Cut di sisi 20 KV.

"PLTBm ini sebagai salah satu usaha penambahan bauran energi terbarukan yang secara nasional ditargetkan capaiannya di angka 23% pada tahun 2025," imbuhnya.





Bahan Baku Tankos yang Digunakan Masyarakat

Muhammad Ridwan, Kepala Mukim Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, Kabupaten kepada Serambi menyebutkan jika selama ini sebagian warga yang memiliki usaha batu bata telah memanfaatkan tankos kelapa sawit sebagai bahan bakar ketika kayu bakar sulit didapatkan atau mahal. Selain itu juga dimanfaatkan untuk berbudidaya jamur merang.

"Usaha tersebut masih ada di Simpang Empat tersebut," ujar Ridwan. "Abu tankos pun masih dimanfaatkan sebagai bahan dolomit dan pupuk organik."

Sebuah penelitian bertajuk "Analisis Kelayakan Usaha Pembuatan Batu Bata Dengan Tandan Kosong Kelapa Sawit Sebagai Bahan Bakar Di Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat," oleh dua staf pengajar prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, menyimpulkan jika penggunaan tandan kosong kelapa sawit sebagai bahan bakar dalam usaha pembuatan batu bata memiliki dampak positif baik bagi pengrajin maupun lingkungan.

Sebab abu pembakaran Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) tersebut dapat dijual sehingga menambah pendapatan bagi pengrajin batu bata, mengurangi pencemaran lingkungan dari limbah PKS dan penebangan hutan secara liar.



Spesifikasi Pabrik

Data yang diperoleh Serambinews.com dari dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PLTBm milik PT PT Primanusa Energi Lestari tahun 2023, memperoleh rekomendasi pada 16 April 2023 dari Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam dokumen tersebut juga disampaikan PITBm tersebut daya rencana terpasang pada 9.8 MW dengan pola operasi pembangkit biomassa sawit. Luas areal yang digunakan 10 ribu meter persegi dengan status lahan yang digunakan hak guna bangunan dengan sumber air yang digunakan Sungai Tanjung, debit air yang digunakan 30

meter³ per jam. Sedangkan untuk kebutuhan bakut biomassa sawit (Cangkang, tandan kosong dan ampas) dengan kebutuhan bakar mencapai 108.000 ton per tahun. Lalu Kapasitas penyimpanan bahan bakar 20 ribu ton M3.

Pabrik itu menggunakan cerobong 27 meter dengan umur rencana usaha atau kegiatan PLTBs tahap pra-konstruksi sampai konstruksi selama dua tahun dan lama operasional 25 tahun. Kebutuhan per hari mencapai 108 ton atau 32.400 ton per tahun, kemudian untuk cangkang yang dibutuhkan perhari mencapai 45 ton dan per tahun 13.500 ton. Lalu tandan kosong yang dibutuhkan per harinya mencapai 207 ton atau sekitar 62.100 ton/tahun.



Serambinews.com sudah berupaya berulang kali menghubungi Direksi PT Primanusa Energi Lestari Julianti Wijaya melalui WhatsApp berulang kali pada pertengahan Agustus 2024, tapi tidak mendapat respon. Lalu, Serambinews.com kembali menghubunginya dengan cara mengirim beberapa pertanyaan sebagai hak jawab pada 2 September 2024. Namun, tidak ada balasan.

Pada 3 September 2024, Serambinews.com menghubunginya kembali dan mengirim pertanyaan lagi ke WA Julianti Widjaja, tapi juga tidak balasan. Belakangan ketika terhubung, Julianti menyarankan untuk menghubungi Karimun Usman yang juga Komisaris PT Primanusa Energi Lestari. Julianti juga mempertanyakan tujuan Serambi mengirim pertanyaan ke Whatsappnya, meskipun Serambi sudah memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan dilakukan wawancara tersebut.

Julianti juga menyebutkan akan membaca dulu pertanyaan yang dikirim Serambi ke WhatsAppnya, kemudian akan memberikan jawaban. "Oke-oke saya baca dulu ya," ujar Julianti. Namun, sampai 5 September 2024 Serambinews.com menunggu jawaban dari Julianti, tidak ada balasan apapun.





Pembangunan PLTBm di Ohoi Namar Harus Menyertakan Kajian Kerentanan Pulau Kecil

Edison Waas – Tirtastory.id
Pembangkit Listrik

titastory.id, Maluku Tenggara – Isu pemanasan global dan perubahan iklim mengancam manusia. Upaya mengurangi dampak kerusakan lingkungan (mitigasi) dan penyesuaian diri dengan lingkungan (adaptasi) terus suarkan.

Salah satu upaya mitigasi, yaitu menggantikan energi fosil dengan energi terbarukan yang akan dibangun di Ohoi (Desa) Namar, Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) sebagai lokasi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm).

Demikian diungkapkan Malik Renfaan, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PUTR) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) kepada titastory.id, di ruang kerjanya, Kamis (08/08/2024)

Pengembangan PLTBm di Ohoi Namar adalah berdasarkan Peraturan (Perda) Kabupaten Malra Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, pasal 18 angka 3 point c yang menjelaskan bahwa sistem jaringan energi pembangkit listrik lainnya berupa PLTBm Langgur 2 di Kecamatan Manyeuw. "Rencana ini telah mendapat restu oleh Pemerintah Daerah dengan hadirnya Perda Nomor 2 Tahun 2024. Di kawasan ini nantinya akan dibangun infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan penampungan bahan baku, berupa kayu dan daun," ungkap Renfaan.

Akuinya, pihak PLN di beberapa waktu lalu telah melakukan kunjungan dan telah disampaikan rencana tersebut. Sehingga pemerintah Kabupaten Malra diminta menyediakan lahan.

"Pihak PLN pusat pernah datang dan mereka menyampaikan tentang rencana pembangunan PLTBm, dan pemerintah kabupaten diminta untuk menyediakan lahan PLTBm sekaligus dengan lahan untuk menampung bahan bakunya," ucapnya.

Adapun Desa Namar, adalah kawasan pertanian lahan kering, berjarak 10,8 km dari Kota Langgur, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara. Peta tutupan lahan Kabupaten Malra milik KLHK tahun 2022 memperlihatkan Kei Kecil adalah pulau yang didominasi kawasan pertanian lahan kering bercampur semak dengan luas 1438 km².

Warga di desa itu selain bertani juga nelayan. Lautnya menyediakan potensi sumber daya jenis ikan pelagis seperti ikan kakap, kerapu, tongkol, layang dan teri, abalon, teripang, kerang, kepiting. Saat musim tertentu nelayan yang memiliki bagan akan mendapatkan hasil yang cukup melimpah. Nelayan di daerah ini juga mengandalkan metode bagan apung. Kawasan ini juga merupakan kawasan konservasi penyu. Tahun 2023, Balai Konservasi Sumber Daya Alam telah melakukan pelepasliaran 69 ekor penyu (*Eetmochelys imbricata*) di daerah ini.



Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malra, Neles Retoop di ruang kerjanya, Kamis (08/08/2024) mendeskripsikan, jika Pulau Kei Kecil adalah dataran rendah yang didominasi batuan karang. Berada 100 meter di permukaan laut.

"Ini daerah karang, terletak 100 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini rentan dalam kaitan terhadap bencana kekeringan dan abrasi air laut.

Dia bilang soal rencana pengembangan PLTBm telah didengarnya. Hanya saja jika bahan baku PLTBm adalah vegetasi, maka diperlukan kajian serius sebutnya.

"Jika bahan bakarnya dari vegetasi, kayu dan lain lain maka mestilah dilakukan kajian serius karena di satu sisi kita melakukan mitigasi namun disisi lain mengakibatkan masalah baru," ujarnya.

Dia justru menyarankan jika PLTBm menggunakan bahan baku dari sampah hal ini masih bisa di mungkin.

"Kabupaten Malra, sampah yang dihasilkan per hari apakah 20 ton Jika disinergikan dengan Kota Tual maka hal itu bisa memadai," ucapnya.

Karena kondisi pulau Kei Kecil masuk dalam kategori pulau kecil, tidak diharapkan adanya pembukaan tutupan hutan. Dan pihaknya terus menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat dalam kaitan dengan ancaman krisis air di waktu waktu akan datang. Rencana pengembangan PLTBm di Kei Kecil pun akan berindikasi pada ancaman pada alam sekitar, lebih khusus pasokan air bersih.

Ahli lingkungan dari Universitas Pattimura, Prof. Agus Kastanya kepada titastory.id menerangkan pihaknya selama ini menyalurkan perhatian pada realitas pembangunan di pulau-pulau kecil yang tidak memperhatikan kondisi daya tampung. Dengan ciri dan karakter Aliran Sungai (DAS) pendek yang kemudian dipengaruhi dengan aktivitas ramah lingkungan akan berdampak buruk untuk pulau itu.

Dia bilang, selisih DAS yang pendek, dan jika tutupan hutan di buka maka lingkungan akan hancur, air akan kering di waktu panas akan terjadi erosi dan banjir, dan dampaknya terasa di kawasan pesisir dan laut. Keberadaan pulau kecil, dalam kaitan dengan perubahan iklim sebutnya, sedang di intip bahaya. Bahaya yang dimaksudkan adalah terjadinya kenaikan muka air laut, naiknya temperatur dan terjadinya badai tropis dan memicuabrasi pantai yang cukup masif.

Dengan situasi global yang ada skema mitigasi pada sektor energi, yaitu energi fosil harus dialihkan ke energi terbarukan termasuk bio energi, angin, matahari, arus laut dan sebagainya.

"Dalam kaitan dengan bio energi atau energi dari biomassa itukan memanfaatkan bahan baku dari vegetasi. Nah dalam kaitan dengan kondisi pulau kecil dengan segala daya dukung terbatas, pengelolaan dan pemanfaatannya harus menjaga kemampuan dan daya dukung'," jelasnya.

Kastanya berpendapat pemanfaatan sumber energi hutan (biomassa atau bioenergi) yang bersifat monokultur untuk bahan baku akan memicu masalah lingkungan. Dia menekankan pemanfaatan energi berpola hutan energi tidak bisa di anjurkan untuk pulau kecil. Itu berbahaya. Sebab dengan sifat monokultur dalam pemanfaatan yang tidak sesuai berdampak pada serangan penyakit dan sebagainya.

"Jadi sekali kali jangan melakukan program seperti itu di pulau kecil." tegas Kastanya. Ditegaskan Kei Kecil, pulau yang sangat kecil. Merupakan daerah karang yang menyimpan karbon yang cukup tinggi dan karang juga menyimpan air. "Di Kei Kecil itukan ada semacam danau, dan dijadikan sebagai sumber air bersih dan itu yang harus dijaga." ucapnya.

Untuk menjaga, harus dibangun sistem perbandingan, terutama agro industri yang berasal dari tanaman yang sudah berkembang di situ yaitu Smart Agroforestri (Agroforestri cerdas) dalam kaitan dengan ketahanan iklim.



"Untuk pulau kecil jangan dibangun industri energi biomassa atau bioenergi yang tidak menjamin kelestarian lingkungan karena untuk hal itu membutuhkan lahan dan ruang yang cukup luas." terangnya. Sehingga sedapat mungkin energi yang lain dapat dimanfaatkan dan tetap fokus pada Smart agroforestry demi ketersediaan sumber air sebagai bentuk mitigasi dan adaptasi kondisi lingkungan di Pulau Kei Kecil.

"Untuk pulau kecil jangan dibangun industri energi biomassa atau bioenergi yang tidak menjamin kelestarian lingkungan karena untuk hal itu membutuhkan lahan dan ruang yang cukup luas." terangnya.

Sehingga sedapat mungkin energi yang lain dapat dimanfaatkan dan tetap fokus pada Smart agroforestry demi ketersediaan sumber air sebagai bentuk mitigasi dan adaptasi kondisi lingkungan di Pulau Kei Kecil.

Perlu diwaspadai, dalam kaitan dengan perubahan iklim dengan langkah mitigasi dalam kaitan dengan sumber energi namun bisa menciptakan dampak kerusakan yang lain atau menciptakan masalah baru.

Dia pun menerangkan, penggunaan tanaman energi tentunya perlu diperhatikan serius, sebab dengan tipikal pulau kecil dan rentan terhadap air adalah tantangan. Sebab prosesnya adalah proses hilangnya air dari tanaman melalui stomata atau transpirasi dalam jumlah yang banyak akan menjadi masalah terkait ketersediaan air bersih. Stomata dalam istilah sains adalah lubang mikro yang ditemukan pada daun, dan menghubungkan jaringan tanaman. Pada kebanyakan vegetasi, transpirasi bersifat pasif karena dikontrol oleh kelembaban atmosfer dan tanah.

Dilansir dari Mongabay, Indonesia akan menjadi satu dari banyak negara pulau dan kepulauan di dunia yang merasakan dampak dari perubahan iklim di kawasan pesisir. Dalam hitungan 15 tahun ke depan, dampak tersebut akan mengakibatkan terjadinya kenaikan permukaan air laut sampai kenaikan gelombang pasang. Pada kurun waktu tersebut, Indonesia Timur diprediksi akan menjadi wilayah terparah yang terkena dampak.

Kepala Sub Direktorat Perubahan Iklim Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) Sudhiani Pratiwi kepada mongabay mengatakan, perubahan iklim tak hanya berdampak pada kehidupan biota laut beserta perairannya saja, berdampak juga pada sosial ekonomi masyarakat yang ada di kawasan pesisir.

Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) diketahui merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi biomassa. Biomassa sendiri diartikan sebagai bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk atau buangan seperti tumbuhan, kotoran, limbah pertanian, dan sebagainya.

Dalam teori, biomassa dapat dijadikan sebagai sumber energi terbarukan. Keberadaannya dipercaya bersifat berkelanjutan sehingga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik menggunakan bahan bakar sebagai hasil konversi bahan biologis dan organik pengganti bahan bakar fosil, dan dapat berkontribusi pada perlindungan iklim.

Tentang PLTBm



Data Direktorat Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM dalam kaitan dengan proyek usulan RUPTL untuk PLTBm di Provinsi Maluku dalam rencananya akan dikembangkan di empat kawasan.

Empat kawasan tersebut adalah, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) berkapasitas 10 MW, Amahai, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) berkapasitas 6 MW, Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru berkapasitas 10 MW dan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) berkapasitas 10 MW.

Data ini juga mengisyaratkan tentang rencana realisasi di tahun 2024 dan pengembangan PLTBm-nya diserahkan pengelolaan ke Independent Power Producer (IPP) sebagai pelaksana proyek, sementara PLN berposisi sebagai pembeli daya listrik. Sesuai rencana, pengembangan PLTBm ada di Kota Langgur, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana data Direktorat Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM.



Pulau-Pulau Kecil yang Perlu jadi Pertimbangan

Tentunya rencana ini butuh perencanaan matang, karena Langgur di Kei Kecil adalah kawasan yang memiliki topografi dengan ketinggian 100 meter dpl. Berbeda dengan Pulau Kei Besar yang memiliki topografi berbukit dan bergunung yang membujur sepanjang pulau dengan ketinggian rata-rata 500-800 meter dpl, dengan gunung sebagai puncak tertinggi.

Sesuai peta Geologi Indonesia 1965, kepulauan di Maluku Tenggara terbentuk dari tanah dan batuan yang tercatat sebanyak 3 jenis tanah (podzolik, rensina, latosol) dan 5 jenis batuan (aluvium undak, terumbu koral, sekis habluk, paleogen, ulagan paleozoikum).

Iklim dan Cuaca iklim wilayah kabupaten Maluku Tenggara dipengaruhi oleh Laut Banda, Laut Arafura, dan Samudra Indonesia yang dibayangi oleh pulau Irian di bagian Timur dan benua Australia di bagian Selatan, sehingga perubahan iklim dapat terjadi sewaktu waktu. Tipe iklim berdasarkan klasifikasi agroklimat, kabupaten ini termasuk dalam Zona agroklimat C2 di mana bulan basah terjadi selama 5-6 bulan dan bulan kering terjadi selama 4-5 bulan.

Dialiri sungai dan danau yang berair sepanjang tahun tercatat berjumlah 7 buah. Di pulau Kei kecil ada 3 buah sungai yaitu Evu, Semawi, dan Uf, sedangkan di Kei Besar memiliki 4 buah sungai yaitu Holay,

Wetuar, Ur, dan Weduar. Sementara terdapat 2 buah danau di pulau Kei kecil yaitu danau Ablel dan Wearlaai. Demografis penduduknya sesuai data Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, penduduk Maluku Tenggara pada tahun 2020 adalah berjumlah 121.511 jiwa, yang terdiri dari 60,488 laki-laki dan 61.023 perempuan, yang tersebar di 11 kecamatan dengan kepadatan sebesar 124 jiwa per km persegi.

Jumlah penduduk di kecamatan Kei kecil merupakan yang terbanyak di antara 11 kecamatan yaitu: 33.987 jiwa karena kecamatan ini menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian. Sedangkan yang mendapatkan distribusi penduduk paling sedikit adalah: kecamatan Kei Besar Selatan Barat dengan Jumlah Penduduk sebesar 3.486 jiwa.

Selain itu, data tanaman produksi perkebunan di Kabupaten Maluku Tenggara adalah kelapa, kopi, kakao, tebu dan pala. Kelapa adalah tanaman produksi yang mampu menyumbang 1.149,04 ton di tahun 2020 dan angka ini disumbang dari kawasan Kecamatan Kei Besar Selatan sebesar 2.310 ton. (data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2021).



Warga Belum Dengar Rencana Detail

Kepala Ohoi (Desa) Namar, Roby Sirwutubun, Kecamatan Manyeuw di kediamannya saat diwawancarai menyebut pihaknya telah menerima informasi soal rencana pengembangan PLTBm dari Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tenggara melalui Kepala Bidang Bina Marga.

“Rencana pembangunan perusahaan masih sebatas komunikasi, belum ada kejelasan tindak lanjutnya. Walaupun itu dilakukan maka sudah pasti harus ada kejelasan dengan warga di enam desa atau Ohoi di Kecamatan Manyeuw, ” ucapnya.

Komunikasi lebih lanjut sebutnya perlu dilakukan dengan pemilik petuanan yang terdiri dari enam kampung atau desa yakni, Desa Namar, Ngayup, Ngilngof, Ohoililir, Ohoiluk dan Selayar. Dia juga menerangkan, hadirnya perusahaan di kawasan Namar dan sekitarnya mesti juga memperhitungkan kondisi dalam kaitan dengan ketersediaan air bersih, karena warga di enam desa juga bergantung pada salah satu danau di tengah pulau di Kei Kecil.

“Ada danau namanya Ablel Ohoi Namar. Danau itu menjadi sumber air bersih untuk warga di Kepulauan Kei Kecil.

Danau itu digunakan pihak PDAM dan warga untuk kebutuhan hari hari. Jika nantinya ada investasi perusahaan di lokasi Namar dan sekitarnya persoalan air bersih juga pun harus diperhatikan secara serius.” tekannya.

Pantuan di kawasan Danau Ablel Ohoi Namar, kawasannya masih terjaga. Hamparan pepohonan dan sekumpulan pohon sagu. Disana telah didirikan instalasi perpipaan milik PDM. Suara mesin terdengar dari kamar mesin untuk memompa air ke kawasan Pulau Kei, Kota Langgur dan warga sekitar.

Energi Menjadi Kebutuhan Dasar dan Menjadi Ukuran Kemakmuran

Untuk diketahui Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement menjadi UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Framework Convention of Climate Change. Dalam Nationally Determined Contribution (NDC) tahun 2022. Indonesia menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia di tahun 2030 sebesar 31,98 persen tanpa syarat atau dengan usaha sendiri dan 43,20 persen bersyarat atau dukungan internasional.



Dewan Energi Indonesia dalam proyeksi nasional menjelaskan permintaan energi Indonesia akan meningkat 5,0 persen per tahun. Dan tahun 2050 akan mencapai persentase 548,8 million tonne oil equivalent (MTOE). Adapun 83 persen sumber energi listrik di Indonesia menggunakan energi fosil dan masuk dalam negara penyumbang CO2 teratas di Dunia. Sedangkan total potensi energi hijau untuk pembangkit listrik mencapai 3.643 GW yang tersebar merata di seluruh Indonesia, sehingga pemanfaatannya dianggap memiliki nilai penting untuk pemerataan pembangunan di bidang energi.

Di Maluku konsumsi listrik ada pada angka 2,5 persen jauh dari Sulawesi, Kalimantan yang ada pada posisi 4,6 dan 4,5 persen. Maluku dari rasio elektrifikasi ideal masih tertinggal sehingga menghambat pembangunan daerah serta optimalisasi potensi sektor unggulan yakni perikanan.

Direncanakan PT. PLN (Persero) bakal membangun Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berkapasitas 10 MW di Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Namlea Kabupaten Buru, Langgur (Maluku Tenggara) dan Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, seperti yang disebut dalam rapat kerja antara komisi B DPRD Maluku tanggal 3 September 2016 dengan Manajer PT. PLN (Persero) Unit Instalasi Pembangkit XIV UPK Pembangkit dan Jaringan Papua-Maluku-2 Ambon, Tri Haryanto.

Dilansir dari Website pln.co.id, potensi sumber energi listrik yang tersedia di Maluku terdiri dari tenaga surya, angin, air, panas bumi, bio energi, arus laut dan gas bumi. Diperkirakan sumber tenaga hybrid mencapai 56 MW dan tersebar di 7 lokasi.

Penjelasan dari situs PLN ini pada tabel Rincian Rencana Pengembangan Pembangkit listrik tahun 2024 dengan proyeksi pengembangan Langgur 2 berkapasitas 10 MW yakni jenis PLTBio yang pengembangannya oleh IPP.

Dia juga menerangkan, hadirnya perusahaan di kawan Namar dan sekitarnya mesti juga memperhitungkan kondisi dalam kaitan dengan ketersediaan air bersih, karena warga di enam desa juga bergantung pada salah satu danau di tengah pulau di Kei Kecil.



“Ada danau namanya Ablel Ohoi Namar. Danau itu menjadi sumber air bersih untuk warga di Kepulauan Kei Kecil. Danau itu digunakan pihak PDAM dan warga untuk kebutuhan air hari. Jika nantinya ada investasi perusahaan di lokasi Namar dan sekitarnya persoalan air bersih juga pun harus diperhatikan secara serius.” tekannya.

Pantauan di kawasan Danau Ablel Ohoi Namar, kawasannya masih terjada. Hamparan pepohonan dan sekumpulan pohon sagu. Disana telah didirikan instalasi perpipaan milik PDM. Suara mesin terdengar dari kamar mesin untuk memompa air ke kawasan Pulau Kei Kecil, Kota Langgur dan warga di Kecamatan Manyeuw.





Dilema Pembangkit Listrik Biomassa di Kalbar

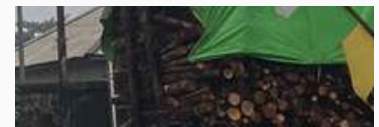
**Arief Nugroho – Pontianak Post
Pembangkit Listrik**

Biomassa menjadi salah satu unsur bahan baku energi baru terbarukan dalam kebijakan transisi energi. Kayu salah satunya. Produk hutan dan perkebunan ini memiliki peranan penting sebagai bahan bakar pada Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm). Lantas, bagaimana praktiknya? Berikut laporan wartawan Pontianak Post, Arief Nugroho.

Ribuan batang kayu menumpuk bak gunung di tempat penampungan PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL), yang terletak di Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Dua unit excavator tampak mondar-mandir memindahkan sedikit demi sedikit batang kayu dari penampungan ke tungku pembakaran. Sementara cerobong pembuangan tak henti-hentinya mengeluarkan asap hitam.

PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari, merupakan perusahaan pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) berkapasitas 15 Megawatt (MW). Perusahaan ini mulai beroperasi pada tahun 2018, sekaligus menjadi pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) pertama di Kalimantan Barat.

Listrik yang dihasilkan PLTBm tersebut untuk memasok kebutuhan energi ke Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebesar 10 Megawatt atau sebesar 70 juta kilowatt hour (kWh) pertahun.



Untuk memproduksi energi, PLTBm ini diperkirakan membutuhkan bahan bakar sebanyak 98.400 ton pertahun, atau 8.200 ton per bulan, atau 273,3 ton per hari. Tak heran jika kita melintas di jalan raya Pontianak-Pinyuh itu, banyak mobil pengangkut kayu keluar masuk ke perusahaan tersebut. Mulai dari pick-up dan truk-truk besar. Aktivitas seperti ini menjadi pemandangan setiap hari, mulai dari pagi, siang bahkan malam.

Mereka datang membawa muatan kayu yang berasal dari berbagai penjuru Kalimantan Barat, seperti Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, Landak, Bengkayang, Sanggau, bahkan Kabupaten Sintang. Satu di antaranya adalah Aliansyah. Pemuda 21 tahun asal Kabupaten Kubu Raya ini sudah tiga tahun menjadi suplier kayu untuk PLTBm Siantan.

Berbekal kendaraan bak terbuka (pick-up), Aliansyah mencari kayu yang dijual masyarakat hingga ke Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak. Ia membelinya dengan harga Rp 450 ribu per pick-up. Kayu-kayu tersebut kemudian dijual kembali ke PLTBm dengan harga Rp280 ribu per ton.

"Satu pick-up biasanya mampu mengangkut 3 ton. Rata-rata kayu pohon karet milik warga." kata Aliansyah kepada Pontianak Post.

Dalam sehari, Aliansyah bisa memasok kayu ke PLTBm sebanyak 2-3 kali, atau 14 kali dalam seminggu. Tergantung ketersediaan kayu dari masyarakat. "Biasanya saya dihubungi penebang. Kalau kayunya sudah ada dan siap angkut, baru diangkut. Tapi sekarang agak susah, karena faktor cuaca. Hujan dan banjir," bebernya. Hal senada juga diungkapkan Himi, warga Sungai Pinyuh. Hilmi mengaku sudah dua tahun menjadi pemasok bahan bakar PLTBm Siantan. Ia mendapatkan kayu dari masyarakat di sekitar Anjungan hingga ke Toho.

Sama dengan Aliansyah, Hilmi juga memiliki koneksi dengan penebang kayu di sana. Mereka selalu menghubunginya setiap ada persediaan kayu. "Sama. Saya juga membeli dari warga. Satu pick-upnya sekitar Rp400 ribu hingga Rp450 ribu," kata dia. Dikatakan Hilmi, hampir semua jenis kayu diterima PLTBm. Namun kebanyakan kayu pohon karet. "Kebanyakan karet. Tapi ada juga jenis lain, seperti laik dan lain-lain," katanya.

Berbeda dengan Aliansyah dan Hilmi, Ainul, warga Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya ini justru lebih dulu terjun sebagai penjual kayu sekaligus pemasok kayu ke PLTBm Siantan. Kayu yang dijual berasal dari kebun karet milik keluarganya yang ingin dialihfungsikan dari perkebunan karet ke sawit. Biasanya, kata Ainul, pohon karet yang sudah ditebang tidak dimanfaatkan dan hanya ditimbun begitu saja. Demikian juga pohon-pohon hasil land clearing, sebelum ditanami sawit.

"Sekitar tahun 2018, saya mendapat informasi kalau ada perusahaan yang mau menampung kayu bakar. Katanya untuk pembangkit listrik. Saya pun kepikiran untuk menjual kayu-kayu itu ke sana," beber Ainul.

Dengan berbekal truk sewaan, ia mengangkut kayu-kayu tersebut ke PLTBm. Selain itu, ia juga membeli kayu milik warga di sekitar tempat tinggalnya.

Satu truk mampu mengangkut 8 hingga 9 ton, dengan harga Rp 1,8 juta. Dari situ, ia mendapat keuntungan Rp 700 ribu sekali kirim. "Tapi, saya tidak setiap hari kirim. Mungkin dalam sebulan hanya 2 atau 3 kali kirim," bebernya. Menurut Ainul, di sekitar desanya, lebih dari 100 hektar luas kebun karet berubah menjadi perkebunan sawit. "Punya keluarga saya saja ada 5 hektar. Belum lagi punya warga yang lain. Mungkin ada ratusan hektar," katanya.

Keberadaan PLTBm tersebut tak lepas dari kebijakan pemerintah tentang transisi energi. Di antaranya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2022 dan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT).



Tambahan Pasokan Listrik Kalbar

Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Wilayah Kalimantan Barat Mukhlis mengatakan, dengan adanya kebijakan transisi energi, PLN Kalimantan Barat merasa diuntungkan. Sebab, dapat menekan biaya pokok produksi (BPP) hingga Rp 500 miliar per tahun.

"BPP di Kalbar ini masih mahal. Rata-rata Rp450 ribu per kWh. Total produksi pertahun mencapai Rp800 miliar per tahun. Dengan kebijakan transisi energi ini, kami bisa menghemat hingga Rp500 miliar pertahun," kata Muklis kepada Pontianak Post.

Dengan keberadaan PLTBm Siantan, PLN mendapat pasokan listrik sebesar 10 Megawatt atau sebesar 70 juta kilowatt hour (kWh) pertahun, dengan penetapan Commercial Operating Date (COD), selama 20 tahun.

Dikatakan Mukhlis, listrik yang dihasilkan PLTBm tersebut akan dialirkan ke jaringan milik PLN sepanjang 5,6 kilometer sirkuit (kms) dari titik interkoneksi Gardu Induk (GI) Siantan ke Sistem Khatulistiwa. Saat ini, Sistem Khatulistiwa melayani pelanggan di Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Pemangkat, Sambas dan Bengkayang, dengan beban puncak mencapai 599,2 Megawatt dan daya mampu pasok sebesar 581,3 Megawatt.

"Dengan adanya PLTBm ini, setidaknya bisa menambah pasokan listrik yang ada. Dengan harga jual 1.495 per kWh, berdasarkan Permen ESDM No. 27 tahun 2014," terangnya.



Terlebih, kata Mukhlis, hingga saat ini Kalimantan Barat masih bergantung pada listrik Malaysia, sebesar 85,4 Megawatt. "Ketergantungan pada Listrik Malaysia ini masih cukup tinggi, yakni antara 40-50 persen. Tapi sekarang sudah mulai dikurangi, tinggal 20-30 persen," jelasnya.

Untuk itu pihaknya mendorong dibangunnya PLTBm di Kalimantan Barat, dengan melihat potensi yang ada. Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) misalnya. Berdasarkan data BPS Kalbar tahun 2023, setidaknya ada 129 PKS, dengan total produksi 6.260 ton perjam. Dari total PKS tersebut bisa menghasilkan energi Listrik 300-600 Megawatt.

"Tentu dengan potensi itu bisa menghasilkan limbah cair (pome) sebagai bahan bakar PLTBg, Belum lagi potensi mikrohidro. Karena saat ini pembangkit-pembangkit listrik yang di Kalimantan Barat paling besar kapasitasnya hanya 25 Megawatt," bebernya.

Dijelaskan Mukhlis, saat ini bauran energi di Kalimantan Barat berdasarkan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2021-2030 EBT, sebesar 33,2 persen.



Potensi Deforestasi

Biomassa sebagai strategi pengurangan emisi dalam penanganan perubahan iklim memiliki konsekuensi terhadap kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam upaya mitigasi perubahan iklim kedepan.

Praktik pemanfaatan biomassa yang diklaim sebagai sumber energi terbarukan, terutama bahan-bahan seperti kayu, cangkang sawit, jangkos, dan batang sawit, memiliki implikasi lingkungan dan sosial yang lebih luas.

Penggunaan biomassa juga berpotensi menyebabkan perampasan tanah dan konflik agraria dengan masyarakat adat, juga lokal. Pembakaran biomassa menghasilkan polusi udara pun dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Penggiat lingkungan Ahmad Syukri dari Link-AR Borneo mengatakan, kebijakan transisi energi tidak bisa dilakukan di tengah situasi sekarang. Indonesia adalah salah satu negara yang menyepakati perjanjian untuk menahan laju perubahan iklim dan suhu dunia, dari 1,5 hingga 2 derajat celsius.



Sialnya, kata pria yang akrab disapa Uki itu, biomassa dimasukan sebagai salah satu unsur bahan baku energi baru terbarukan. Menurutnya, untuk mendapatkan bahan bakar selain fosil seperti kayu, jangkos, cangkang sawit dll, akan berpotensi menyebabkan deforestasi. Ditambah lagi dampak dari pembakaran.

Uki mengatakan, dengan sumber bahan baku dari masyarakat, secara tidak langsung PLTBm melibatkan masyarakat dalam praktik deforestasi, meskipun tidak dalam skala besar seperti HTI.

"Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, nilai jual kayu sebagai bahan bakar, cukup tinggi. Dengan seperti itu, Masyarakat akan menebang pohon, mungkin berasal dari kawasan penyangga sekitar kebun, atau tempat tinggalnya," bebarnya. "Karena PLTBm ini menerima semua jenis kayu, dan tidak ada standar tertentu. Kecuali batang kelapa," sambungnya.

Namun, dalam jangka panjang, ketersediaan kayu-kayu dari masyarakat tidak akan mampu mencukupi kapasitas produksi yang mereka inginkan. Otomatis mereka akan menggunakan skema pasokan dari Hutan Tanaman Energi (HTE) yang dirancang pemerintah

Dikatakan Uki, saat ini hampir semua perusahaan dengan multi usahanya mulai membagi konsesinya untuk bisa beradaptasi dengan kebijakan pemerintah dan memastikan pasar jauh lebih dekat. Misalnya untuk pasar PLTBm, mereka cukup menjadikan chip kayu (serpihan kayu) atau wood pellet.

Maka tidak heran, jika keberadaan HTI yang diperuntukan untuk pellet kayu, lokasinya tidak jauh dengan posisi pembangkit listrik (PLTU atau PLTBm) di Kalimantan Barat. Salah satunya PT. Muara Sungai Landak (MSL), yang terletak di Wajok Hilir, Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah.

Senada juga diungkapkan Manajer Kampanye dan Intervensi Forest Watch Indonesia (FWI) Anggi Putra Prayoga. Anggi menilai pemanfaatan

biomassa dalam transisi energi merupakan driver baru kerusakan hutan di Indonesia. FWI mencatat Pembangunan Hutan Tanaman Energi (HTE) telah merusak hutan seluas 55.000 hektare (Ha) dan masih ada 420.000 Ha hutan alam di dalam 31 konsesi HTE direncanakan untuk di-deforestasi.

"Karena sejatinya ini adalah transformasi dari Hutan Tanaman Industri (HTI) ke HTE maka kecenderungannya adalah deforestasi. Dilakukan dengan pembukaan hutan dan lahan baru untuk memenuhi tuntutan usaha baru dalam bentuk tanaman energi," katanya.

Anggi melihat, bisnis kayu di Indonesia sedang mengalami stagnasi. Usaha baru berupa pembangunan HTE melalui multi-usaha kehutanan, dia duga, hanyalah cara untuk mengamankan bisnis. Konsesi kehutanan menjadi lebih leluasa untuk memanfaatkan hutan alam dengan dalih transisi energi, guna memenuhi bahan baku biomassa kayu. Padahal, pemanfaatan biomassa sebagai alternatif untuk mengurangi emisi karbon perlu diuji dengan prinsip-prinsip keadilan dan berkelanjutan.

Menurutnya, untuk memuluskan proyek transisi energi tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan di sektor kehutanan. di antaranya termuat di dalam PP No 23 tahun 2021 tentang perizinan multi usaha di sektor kehutanan, Permen LHK Nomor 7 tahun 2021, yang berisi tentang eksklusivitas bagi ketahanan energi, kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi konversi dicadangkan bagi ketahanan energi, dan Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 yang mengatur tentang proyek ketahanan energi akan dibantu oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Dari kebijakan tersebut, pemerintah telah membangun tujuh perusahaan Hutan Tanaman Energi (HTE) di Kalimantan Barat, yang berpotensi menyebabkan deforestasi. Tujuh perusahaan tersebut di antaranya, PT. Muara Sungai Landak (MSL) dengan luas konsesi 13.000 Ha, di Wajok, Kabupaten Mempawah, PT. Hutan Ketapang Industri dengan luasan konsesi 100.150 Ha, di Ketapang, PT. Gambaru Selaras Alam dengan luas konsesi 20.445 Ha, di Kabupaten Sanggau, PT. Inhutani III Nanga Pinoh dengan luas konsesi 119.080 Ha, di Kabupaten Melawi, PT. Bhatara Alam Lestari dengan luas konsesi 7.100 Ha, Kabupaten Mempawah, PT. Nityasa Idola dengan luas konsesi 113.196 Ha, di Kabupaten Sanggau, dan PT. Daya Tani Kalbar dengan luas konsesi 56.060 Ha di Kabupaten Ketapang.

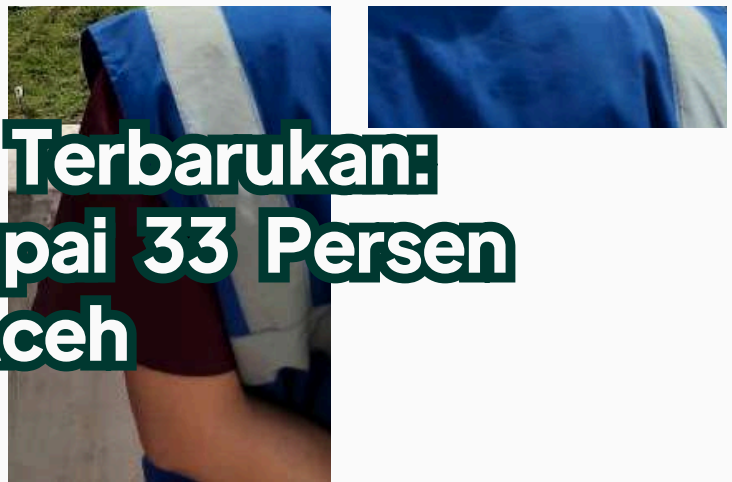
"Perusahaan-perusahaan tersebut diduga diproyeksi untuk menyuplai bahan bakar ke pembangkit listrik di Indonesia," katanya.

Menurut Anggi, kebijakan pemerintah mengganti energi berbahan dasar fosil ke biomassa disinyalir memiliki implikasi lingkungan yang lebih luas. Terlebih, Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi dengan target mitigasi deforestasi hutan alam dengan luas 917 ribu hektar (berdasarkan dokumen FOLU Net Sink 2030).

Sementara itu, pihak PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL) enggan memberikan tanggapan. Pontianak Post telah mendatangi kantor PT. RPSL tersebut di Jalan Wajok KM 7,5 Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah. Namun, Pontianak Post tidak berhasil menemui manajemen PT. RPSL dengan alasan belum membuat janji.

Pontianak Post juga telah mengirim surat permohonan wawancara ke perusahaan tersebut, dengan nomor surat 55/Red-PP/VIII/2024, tanggal 27 Agustus 2024, namun hingga berita ini ditayangkan, pihak PT. RPSL, tidak memberikan tanggapan. (**)





Target Energi Baru Terbarukan: Pesimis Akan Tercapai 33 Persen di Tahun 2025 di Aceh

Alfan Raykhan Pane – Komparatif.id
Pembangkit Listrik

Komparatif.ID, Banda Aceh - Untuk mendukung komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam hal program transisi energi, yaitu pemanfaatan energi listrik dari sumber energi terbarukan, Pemda Aceh pada tahun 2019 melalui Qanun Nomor 4 Tahun 2019 mengeluarkan kebijakan tentang arah bauran strategi energi di Aceh

Dalam Rencana Umum Energi Aceh (RUEA) sumber energi baru dan terbarukan di targetkan jika pada tahun 2025 porsi energi baru dan terbarukan (EBT) akan mencapai 33,9% pada tahun 2025, yang kemudian makin meningkat menjadi 43,3% pada tahun 2050.

Provinsi Aceh sendiri memiliki potensi energi baru dan energi terbarukan yang melimpah baik berupa panas bumi, air, surya, angin, biomassa dan pasang surut. Potensi air untuk pembangunan PLTA sebesar 2.862,8 MW. Potensi air untuk pembangunan PLTMH terdapat di 15 kab/kota dengan kapasitas 194,517 MW. Sedangkan potensi panas bumi terdapat di 17 lokasi tersebar di sembilan kabupaten/kota dengan Kapasitas 1.115 MW.

"Kalau semua selesai kita realisasikan, saya kira bukan hanya 23 persen [seperti target nasional], tapi kita bisa mencapai 25 persen pada tahun 2025," jelas Dedi M. Rozali, Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Aceh (01/08/2024).

Untuk mencapainya target bauran EBT itu, PLTP Seulawah Agam, PLTA Kombih, dan PLTP Jaboi di Sabang, pun disiapkan. Namun nyatanya yang sudah selesai dibangun hanya PLTA Peusangan, yang membuat capaian energi dari bauran EBT barulah 12,12 persen. Dedi sebut, ada kendala dalam investasi. Tidak saja di Aceh, tapi juga di tingkat nasional.

"Target Nasional bauran EBT dari energi nasional di tahun 2025 itu 23%. Tapi sampai sekarang belum juga tercapai. Kemungkinan [kendala] di investornya," ujar Dedi M. Roza.

Di Aceh, Dedi sebut ada kendala dalam prioritas proyek sehingga pembangunannya berjalan tertatih-tatih. Contohnya PLTA Peusangan yang memakan waktu belasan tahun.

"Pembangunan PLTA Peusangan I berkapasitas 88 MW dimulai tahun 1994, sempat terhenti tahun 1996 dan mulai lanjut lagi tahun 2011. Baru selesai satu unit kapasitas 35 MW. Tahun 2024 ini bakal menyusul Unit 2 berkapasitas 45 MW," jelasnya.

Sementara itu, pembangunan PLTU Nagan Raya 1 dan 2 berkapasitas 150 MW dimulai sejak tahun 2006 dan dapat dirampungkan tahun 2014.



"[Bagaimanapun] kita harus konsisten dengan EBT ini, karena ramah lingkungan dan menguntungkan kehidupan manusia di masa depan, karena persentase potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) Provinsi Aceh yaitu: air 51,79%; surya 21,38%; panas bumi 19,85%, dan biomassa 7,03%".

Pembangunan sumber pembangkit EBT sebutnya menarget bahwa PLN, di tahun 2060 tidak ada lagi pembangkit listrik berbahan bakar batubara.

PLN di Aceh Mulai Gunakan Co-Firing

PLTU COFIRING & PERUSAHAAN PEMBANGUNAN HTE (2021-2023)

PERUSAHAAN

PT Aceh Nusa Indrapuri
Aceh Besar, Pidie

LUAS HTE

97,768.60 Ha

LUAS DEFORESTASI

1,7242.83 Ha



PLTU CO-FIRING
PLTU NAGAN RAYA

Sumber: Forest Watch Indonesia

Potensi energi baru dan terbarukan, sebenarnya sangat melimpah di Aceh, termasuk dari pemanfaatan panas bumi. Pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) pun dilirik.

Saat ini PLTMH yang telah beroperasi adalah PLTP Jaboi (6,19 MW) dengan tahap duanya 10 MW sedang eksplorasi IUP. Juga PLTP Seulawah Agam 2 x 55 MW (1 x 55 MW yang juga sedang tahap Pengurusan IUP. Di luar itu, ada dua lokasi lainnya sudah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri ESDM untuk dilaksanakan survey pendahuluan.

Di luar PLTMH, Pemda Aceh juga sedang mengupayakan pembangkit skala kecil, seperti di PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan

PLTMH (Pembangkit listrik Mikro Hidro) yang punya potensi melimpah sebagai penerangan di daerah-daerah terpencil.

Untuk menuju transisi energi itu juga, PLTU (Pembangkit listrik tenaga uap batubara) pun mulai menerapkan co-firing, yaitu mencampurkan antara bahan bakar fosil batubara dengan biomassa.

Contohnya di PLTU Nagan Raya, yang dimiliki oleh PT PLN (Persero). Biomassa yang digunakan berasal dari cangkang buah sawit (palm kernel shell) dan kayu kaliandra yang dicampurkan ke batubara jenis low range coal dan medium range coal.

"Uji coba pertama pun telah mulai dilakukan pada Oktober 2020, dan implementasi tahun 2021, dengan menggunakan cangkang sawit sebesar 5-10 persen. Namun ketersediaan cangkang sawit menjadi kendala," tutur General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi (IUD) Aceh Mundhakir (30/7/2024).

Untuk menyiasatinya, pihak PLN lalu mencoba kayu kalindra. Hasilnya dari parameter operasi yaitu pressure maupun temperatur masih dalam batasan rentang normal operasi. Begitu juga emisi gas buang yang dihasilkan masih dalam batasan normal baku mutu yang ditetapkan kementerian lingkungan hidup.

Joni, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran, DLHK Aceh, menyebut jika transisi energi baru terbarukan, tidak melulu soal penggunaan pohon. Pengalaman di PLTU Nagan 1 dan 2, bahan baku co-firing ternyata juga dapat menggunakan jumbueng atau batang padi yang sudah dipanen).

"Jumbueng juga lebih ekonomis digunakan untuk bahan co-firing, ketimbang diolah menjadi pakan ternak. Bandingkan dengan kayu, yang lebih bernilai dijadikan mebel ketimbang dibakar sebagai kayu bakar," terang Joni (26/07/2024).

Selain itu tuturnya dalam waktu dekat Dinas LHK Aceh akan mencoba refuse derived fuel (RDF) atau teknologi yang mampu mengubah sampah menjadi energi.



Penggunaan Energi Biomassa Akan Mengubah Tata Ruang di Aceh

Namun target transisi energi di Aceh ini ditanggapi pesimis oleh para pemerhati dan pegiat lingkungan.

"Sampai akhir tahun 2023, capaian target bauran energi baru 12 persen, padahal dari Rencana Umum Energi Aceh (RUEA) dari bauran EBT adalah 33,9 persen di tahun 2025. Bisa dibayangkan dalam 1 atau 2 tahun ini, apakah pemerintah mampu

mencapai target yang telah direncanakannya sendiri?" jelas Ahmad Shalihin, Direktur Eksekutif WALHI Aceh (12/08/2024).

Dia pun menyinggung penggunaan biomassa sebagai co-firing PLTU yang sebenarnya tidak banyak berkontribusi dalam pengurangan emisi. "Proses co-firing itu menghasilkan emisi karbon yang cukup tinggi. Bedanya hanya material yang digunakan seperti sekam padi, cangkang sawit, pelet kayu yang bisa dibudidayakan. Sedangkan emisinya tetap," lanjutnya.

"Jangan sampai transisi EBT ini jadi "solusi palsu" penurunan emisi." Di sisi lain, dia pesimis karena banyak konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang digadang-gadang sebagai produsen kayu untuk biomassa atau Hutan Tanaman Energi (HTE) sudah banyak yang tidak beroperasi.

"Ada beberapa HTI di Aceh, seperti Aceh Nusa Indrapuri (Kabupaten Aceh Besar), Mandum Payah Tamita (MPT) di Cot Girek, Rencong Pulp and Paper Indonesia (RPPI) di Kabupaten Aceh Utara, yang itu semua bisa dikatakan dalam posisi mangkrak atau terlantar."

Dia juga menengarai trend HTE akan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mendapatkan pendanaan. Alih-alih melakukan reboisasi, ujung-ujungnya praktik ini akan mendorong makin maraknya deforestasi di Aceh.

"Dengan adanya agenda HTE ini, sudah dipastikan bahwa proses tahapan (pembibitan, penanaman, perawatan dan pemanenan) itu tidak akan dilakukan secara tertib, walaupun itu ada dilakukan maka tidak sesuai dengan jumlah yang dipanen atau ditebang," jelasnya.

Perihal potensi meningkatnya deforestasi akibat trend HTE, dijelaskan oleh Anggi Putra Prayoga, Manager Komunikasi, Kerjasama, dan Kebijakan Forest Watch Indonesia (FWI). "Ketika bicara tentang kebutuhan co-firing, yang salah satu bahan bakunya biomassa maka akan membutuhkan lahan atau ruang. Hasil analisis kami, ini akan perlu wilayah yang lebih luas lagi. Akan ada 4,65 juta hektar lahan hutan yang dipertaruhkan," katanya (1/8/2024).

Karena membutuhkan lahan yang lebih luas, maka HTE pun jelasnya juga akan dapat menimbulkan gesekan sosial dengan warga masyarakat lokal, mengeliminasi masyarakat adat yang telah mengelola hutan sebagai ruang hidupnya.

"Korporasi yang mendapatkan izin berdasarkan surat yang dipegangnya, akan melakukan apa saja, selama dia bisa mengelola lahan yang diberikan," jelas Anggi.



Apa Kendala Transisi Energi di Aceh?

General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi (IUD) Aceh Mundhakir menyebut beberapa kendala yang menyebabkan proses transisi energi di Aceh yang dicanangkan tidak berjalan sesuai rencana.

"Ada kendala sosial, berkaitan dengan masyarakat yang pro dan kontra di sekitar proyek pembangkit; juga kendala lahan, meliputi tata ruang kehutanan, pemukiman penduduk, kendala peraturan, dengan banyaknya lintas sektor yang terlibat dan saling terkait," ujarnya.

Di sisi lain, di tingkat pengembang atau Independent Power Producer (IPP) yang turut jadi kendala.

"Kendala Internal di IPP, misalnya kemampuan modal, dari investor atau pendananya seperti di tingkat perbankan nasional maupun perbankan luar negeri, yang punya aturan masing-masing."

Namun, pihak pemerintah juga dianggap berkontribusi dalam memperlambat pembangunan di bidang EBT. Seperti yang diungkap oleh Erdiwansyah, praktisi EBT sekaligus akademisi di Universitas Serambi Mekkah (USM) Banda Aceh.

"Transisi energi di Aceh sering terkendala dengan kebijakan pemerintah yang sering berganti. Seperti izin lingkungan (Amdal) yang sulit keluar, rentang waktu yang lama dan berlarut-larut serta masih banyaknya pajak yang harus disetorkan para investor," jelas Erdiwansyah (15/08/2024).

Praktik-praktik pungli dan uang-uang 'siluman' pun masih kerap dijumpai.

"Saya pernah tanya kepada investor yang sedang urus izin di Samar Kilang. 'Sudah habis uang berapa untuk dapat izin lingkungan?' Mereka bilang sudah hampir Rp 5 miliar. Hanya untuk selebar izin. Kita tanya kendalanya dimana, mereka bilang ada di dinas, di kampung, yah banyak. Banyak preman yang jadi momok bagi investor."

Atas performa yang RUEA yang tampaknya tidak akan mencapai target ini, Khairil Syahril, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyebut perlu ada evaluasi.

"Pendapat saya jika Qanun No. 4 tahun 2019 tentang RUEA tidak efektif kita gunakan, tentunya harus ada evaluasi, setelah kita evaluasi maka kita lakukan perubahan sebab sudah lima tahun berjalan," jelas Khairil (29/08/2024).

"Apabila Pemerintah Aceh tidak mampu menjalankan amanat qanun, maka atas masukan Dinas ESDM Aceh perlu segera mengajukan perubahan (revisi) Qanun tersebut ke DPRA," lanjutnya.

Dia pun menyebut jika pihak DPRA sudah mengusulkan revisi qanun, tetapi hal ini masih menunggu revisi RUEN dari Kementerian ESDM, pungkasnya.





**Forest Watch Indonesia
2025**



**Forest Watch Indonesia
2025**



Color Palette.



Font.

- +Jakarta Sans Display
- +Jakarta Sans Text